



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 dan sebagai pedoman pelaksanaan tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, serta untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 2

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan:

- a. Renja Perangkat Daerah;
- b. Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pasal 3

Uraian mengenai RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada Kepala BAPPELITBANGDA setiap triwulan.

Pasal 6

Kepala BAPPELITBANGDA bertanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan ini dengan kewajiban melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah serta menghimpun dan menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

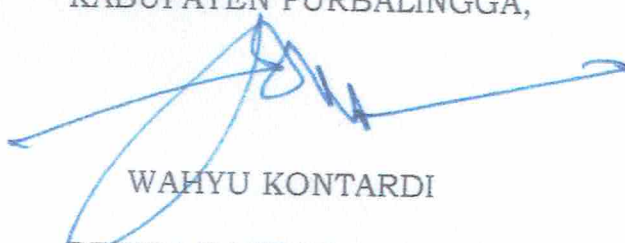
Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 62

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	 I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan	I-8
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I-9
 BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 II-1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1 Aspek Geografi.....	II-1
A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
B. Letak dan Kondisi Geografis	II-2
C. Kondisi Geomorfologi dan Topografi	II-2
D. Kondisi Geologi	II-4
E. Jenis Tanah.....	II-5
F. Kondisi Klimatologi.....	II-7
G. Kondisi Hidrologi.....	II-8
H. Potensi Pengembangan Wilayah	II-9
I. Wilayah Rawan Bencana.....	II-28
2.1.1.2 Aspek Demografi	II-30
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-33
A. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi	II-33
B. PDRB Perkapita	II-36
C. Laju Inflasi	II-36
D. Penduduk Miskin dan IPM	II-37
1. Penduduk Miskin	II-37
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-38
E. Angka Melek Huruf.....	II-40
F. Partisipasi Sekolah.....	II-41
G. Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan	II-43
H. Prevalensi Balita Gizi Buruk	II-44
I. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II-46
J. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	II-46
K. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-47
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-48
A. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-48
1. Pendidikan	II-48

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)	II-48
b. Angka Partisipasi Murni (APM).....	II-49
c. Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah.....	II-50
d. Rasio Guru terhadap Siswa.....	II-51
e. Pendidikan Anak Usia Dini.....	II-52
f. Angka Putus Sekolah	II-53
g. Angka Kelulusan.....	II-54
2. Kesehatan	II-54
a. Kasus/Angka Kematian Ibu (AKI)	II-54
b. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA).....	II-55
c. Angka Kematian Neonatal	II-56
d. Angka Kesakitan dan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan.....	II-57
e. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4.....	II-58
f. Pemanfaatan Fasilitas dan Sarana Kesehatan	II-59
g. Penolong Kelahiran Terakhir	II-63
h. Pemberian Air Susu Ibu (ASI).....	II-65
i. Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk.....	II-67
j. Rasio Dokter per Satuan Penduduk	II-67
k. Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk	II-68
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-68
a. Pekerjaan Umum	II-68
b. Penataan Ruang	II-69
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-72
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II-72
6. Sosial	II-74
B. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-76
1. Tenaga Kerja	II-76
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-80
3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-81
4. Pangan	II-83
5. Pertanahan.....	II-84
6. Lingkungan Hidup	II-85
7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-85
8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-90
9. Perhubungan	II-92
10. Komunikasi dan Informasi	II-93
11. Koperasi dan UKM	II-93
12. Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	II-94
13. Kepemudaan dan Olah Raga	II-95
14. Statistik	II-96

15.Persandian	II-96
16.Kebudayaan	II-96
17.Perpustakaan	II-97
18.Kearsipan	II-97
C. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-98
1. Perikanan	II-98
2. Pariwisata	II-99
3. Pertanian	II-101
4. Energi dan Sumber Daya Mineral	II-103
5. Perdagangan	II-104
6. Perindustrian	II-106
7. Transmigrasi	II-107
D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-107
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-108
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-108
A. Rata-rata Pengeluaran Penduduk.....	II-108
B. Nilai Tukar Petani (NTP).....	II-109
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-110
A. Infrastruktur jalan	II-111
B. Bandara JB Soedirman	II-111
C. Drainase	II-111
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-112
A. Keamanan dan Ketertiban	II-112
B. Kemudahan Perijinan	II-113
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-114
A. Rasio Ketergantungan	II-114
B. Rasio Lulusan Pendidikan	II-115
 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Purbalingga	
Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Purbalingga	
Tahun 2016-2021	II-115
2.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-115
A. Urusan Pendidikan	II-115
B. Urusan Kesehatan	II-117
C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-122
D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-123
E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II-124
F. Urusan Sosial	II-126
2.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-127
A. Urusan Tenaga Kerja	II-127
B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .	II-127
C. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-128
D. Urusan Pangan	II-130

E. Urusan Pertanahan.....	II-131
F. Urusan Lingkungan Hidup	II-132
G. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-134
H. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-134
I. Urusan Perhubungan	II-136
J. Urusan Komunikasi dan Informatika	II-137
K. Urusan Koperasi dan UKM	II-138
L. Urusan Penanaman Modal	II-139
M. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	II-141
N. Urusan Statistik	II-142
O. Urusan Persandian	II-142
P. Urusan Kebudayaan	II-143
Q. Urusan Perpustakaan	II-144
R. Urusan Kearsipan	II-146
2.2.3. Urusan Pilihan	II-146
A. Urusan Kelautan dan Perikanan	II-146
B. Urusan Pariwisata	II-147
C. Urusan Pertanian	II-148
D. Urusan Perdagangan	II-152
E. Urusan Perindustrian	II-153
F. Urusan Transmigrasi	II-154
2.2.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-155
A. Urusan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan	II-155
B. Urusan Pengawasan	II-156
C. Urusan Keuangan	II-156
D. Urusan Pemerintahan	II-157
2.2.5. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-162
2.2.6 Evaluasi Sustainable Development Goals (SDGs)	II-169
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-185
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-185
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-187
2.3.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-187
2.3.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-190
2.3.2.3 Urusan Pilihan	II-195
2.3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-198
2.3.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-198
2.3.2.6 Unsur Pengawas	II-199
2.4. Isu Strategis Daerah	II-199
 BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	 III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah	III-1

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-3
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-6
3.2.1. Gambaran Keuangan Daerah.....	III-6
A. Gambaran Pendapatan Daerah	III-6
B. Gambaran Belanja Daerah.....	III-10
C. Gambaran Pembiayaan Daerah	III-12
3.2.2. Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-13
A. Kebijakan Pendapatan Daerah	III-14
B. Kebijakan Belanja Daerah	III-16
C. Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-23
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-12
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020.....	IV-13
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional	IV-13
4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	IV-14
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga	IV-16
4.3. Sinkronisasi Prioritas Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa tengah.....	IV-19
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
DAERAH	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan RKPD Kabupaten Purbalingga dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-8
Gambar 2.1.	Peta Administratif Kabupaten Purbalingga	II-1
Gambar 2.2.	Peta Topografi Kabupaten Purbalingga	II-4
Gambar 2.3.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Purbalingga	II-6
Gambar 2.4.	Peta Curah Hujan Bulanan Kabupaten Purbalingga	II-8
Gambar 2.5.	Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Purbalingga	II-9
Gambar 2.6.	Peta Rencana Lokasi Industri Kabupaten Purbalingga	II-21
Gambar 2.7.	Peta Rencana Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga ...	II-26
Gambar 2.8	Peta Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Purbalingga....	II-28
Gambar 2.9.	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	II-32
Gambar 2.10.	Laju Inflasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2019	II-37
Gambar 2.11.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2019	II-38
Gambar 2.12.	Angka Kesakitan Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2018 ..	II-44
Gambar 2.13.	Tren Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Tahun 2015 - 2019.....	II-45
Gambar 2.14.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2019.....	II-47
Gambar 2.15.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2019.....	II-48
Gambar 2.16.	Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019	II-53
Gambar 2.17.	Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2019.....	II-54
Gambar 2.18.	Jumlah Kematian Ibu Menurut Puskesmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	II-55
Gambar 2.19.	Tren Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Tahun 2015 - 2019	II-56

Gambar 2.20. Sebaran Kematian Neonatal Menurut Puskesmas Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	II-57
Gambar 2.21. Cakupan K1 dan K4 Kabupaten Purbalingga dan Jawa Tengah Tahun 2018	II-59
Gambar 2.22. Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin Menurut Penolong Kelahiran Anak Terakhir Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 dan 2018	II-65
Gambar 2.23. Persentase Bayi Berumur 0-5 Bulan Menurut Jenis Kelamin Yang diberi ASI Eksklusif di Kab. Purbalingga Tahun 2017.....	II-67
Gambar 2.24. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019.....	II-82
Gambar 2.25. Persentase Perempuan Berumur 15 – 49 Tahun Yang Pernah Kawin Menurut Jenis Alat KB yang Digunakan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	II-83
Gambar 2.26. Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2017.....	II-103
Gambar 2.27. Capaian Indikator Kinerja Masing-masing Urusan Tahun 2019	II-163
Gambar 2.28. Grafik Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Purbalingga	II-203
Gambar 2.29. Persentase Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Desil 1-4 Kabupaten Purbalingga.....	II-203

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jenis Tanah di Kabupaten Purbalingga	II-6
Tabel 2.2.	Analisis Kelas Intensitas Hujan di Wilayah Kabupaten Purbalingga	II-7
Tabel 2.3.	Luas Areal Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Purbalingga.....	II-14
Tabel 2.4.	Kriteria Pemilihan Lokasi Industri	II-19
Tabel 2.5.	Penduduk Kabupaten Purbalingga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2019	II-31
Tabel 2.6.	Kepadatan Penduduk dan Faktor yang Mempengaruhinya Tahun 2016 2019	II-32
Tabel 2.7.	Penduduk Kabupaten Purbalingga menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2019	II-33
Tabel 2.8.	Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2019 .	II-34
Tabel 2.9.	Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019.....	II-35
Tabel 2.10.	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Rp.) 2015 – 2019..	II-36
Tabel 2.11	Karakteristik Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga, 2015-2019	II-37
Tabel 2.12.	Nilai IPM Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya Tahun 2015-2019.....	II-39
Tabel 2.13.	Komponen IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019.....	II-39
Tabel 2.14.	Persentase Angka Melek Huruf Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 – 2019	II-41
Tabel 2.15.	Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah dan Karakteristik Demografi Kabupaten Purbalingga Tahun 2018	II-41
Tabel 2.16.	Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2018	II-43
Tabel 2.17.	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	II-46
Tabel 2.18.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019.....	II-48
Tabel 2.19.	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Purbalingga, 2015-2019.....	II-49

Tabel 2.20.	Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019.....	II-50
Tabel 2.21	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019.....	II-51
Tabel 2.22.	Guru dan Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019	II-52
Tabel 2.23.	Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019.....	II-53
Tabel 2.24.	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019.....	II-54
Tabel 2.25	Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga, 2015- 2018	II-58
Tabel 2.26.	Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Menurut Lamanya Terganggu dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga, 2016-2017	II-60
Tabel 2.27.	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Berobat Jalan dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga, 2017 – 2018.....	II-61
Tabel 2.28.	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga, 2016 - 2018	II-62
Tabel 2.29.	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Jalan Kabupaten Purbalingga, 2016 - 2018	II-63
Tabel 2.30.	Persentase Penduduk Menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga, 2016 - 2018.....	II-64
Tabel 2.31.	Persentase Baduta (0-23 bulan) Menurut Lamanya Disusui Kabupaten Purbalingga, 2016-2017	II-67
Tabel 2.32.	Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019.....	II-68
Tabel 2.33.	Perkembangan Rasio Dokter Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2018.....	II-68
Tabel 2.34.	Perkembangan Rasio Tenaga Paramedis Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2018.....	II-69
Tabel 2.35.	Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2019.....	II-70
Tabel 2.36.	Perkembangan Jaringan Irigasi dan Ketersediaan Air Irigasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2019.....	II-70

Tabel 2.37.	Kondisi Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2019.....	II-74
Tabel 2.38.	Perkembangan Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2019.....	II-75
Tabel 2.39.	Data Jumlah PMKS yang Terkena Operasi Tahun 2018-2019	II-76
Tabel 2.40.	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Purbalingga, 2015 - 2019.....	II-77
Tabel 2.41.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin Tahun 2015 - 2019.....	II-78
Tabel 2.42.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2019	II-78
Tabel 2.43.	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2019.....	II-79
Tabel 2.44.	Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	II-80
Tabel 2.45.	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha 3 Kategori dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	II-80
Tabel 2.46.	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.....	II-81
Tabel 2.47.	TPAK dan TKK Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan 2019 ..	II-81
Tabel 2.48.	Kondisi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2019	II-83
Tabel 2.49.	Capaian Urusan Ketahanan Pangan di Kab. Purbalingga Tahun 2016 - 2019	II-85
Tabel 2.50.	Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2018.....	II-85
Tabel 2.51.	Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2019.....	II-86
Tabel 2.52.	Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga Per Kecamatan 2019	II-87
Tabel 2.53	Hasil Pelaksanaan Perekaman KTP-el di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	II-88
Tabel 2.54.	Kepemilikan Akta Kelahiran per Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	II-90

Tabel 2.55.	Jumlah Pelayanan Akta perkawinan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2019	II-91
Tabel 2.56.	Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2019	II-92
Tabel 2.57.	Fasilitas Lalu Lintas Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2019 ..	II-93
Tabel 2.58.	Perkembangan Capaian Kinerja Koperasi dan UKM Tahun 2015 - 2019.....	II-95
Tabel 2.59.	Jumlah Ijin yang Diterbitkan Tahun 2015 - 2019.....	II-95
Tabel 2.60.	Realisasi Investasi Tahun 2015 – 2019	II-96
Tabel 2.61.	Produksi Ikan, Tingkat Konsumsi Ikan, Produksi Hasil Olahan Ikan DanJumlah Pasar Ikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2019.....	II-100
Tabel 2.62.	Jumlah Wisatawan dan Pendapatan dari Obyek Wisata menurut Bulan di Kab. Purbalingga Tahun 2019	II-101
Tabel 2.63.	Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2019	II-102
Tabel 2.64.	Perkembangan Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan dan Penggunaan Pupuk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019	II-103
Tabel 2.65.	Jumlah Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2019.....	II-104
Tabel 2.66.	Jumlah Air PDAM yang Disalurkan, Debit Mata Air dan Debit Sungai di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2018.....	II-105
Tabel 2.67.	Perkembangan Kondisi Perdagangan di Kabupaten PurbalinggaTahun 2015 - 2018	II-106
Tabel 2.68.	Perkembangan Kondisi Perindustrian Kabupaten Purbalingga 2015 - 2018.....	II-107
Tabel 2.69.	Pemberangkatan Transmigrasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2019.....	II-108
Tabel 2.70.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2015 - 2019.....	II-109
Tabel 2.71 .	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Purbalingga, 2015 - 2018	II-110
Tabel 2.72.	Kondisi Infrastruktur Jalan Mendasarkan Kewenangannya di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	II-112
Tabel 2.73.	Kondisi Jaringan Drainase di Kabupaten Purbalingga Tahun	

2015 - 2018.....	II-113
Tabel 2.74. Perkembangan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2019	II-114
Tabel 2.75. Indikator Kemudahan Perijinan di Kab. Purbalingga, 2017 - 2019	II-115
Tabel 2.76. Rasio Ketergantungan Kabupaten Purbalingga, 2015 - 2019.....	II-115
Tabel 2.77. Persentase Penduduk 10 tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2017	II-116
Tabel 2.78. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Pendidikan.....	II-117
Tabel 2.79. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Kesehatan.....	II-119
Tabel 2.80. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-123
Tabel 2.81. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-125
Tabel 2.82. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II-125
Tabel 2.83. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Sosial.....	II-127
Tabel 2.84. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Tenaga Kerja.....	II-128
Tabel 2.85. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-129
Tabel 2.86. Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-130
Tabel 2.87. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Pangan.....	II-132
Tabel 2.88. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Pertanahan.....	II-133
Tabel 2.89. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Lingkungan Hidup	II-133
Tabel 2.90. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	II-135

Tabel 2.91. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urutan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-136
Tabel 2.92. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urutan Perhubungan.....	II-137
Tabel 2.93. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urutan Komunikasi dan Informatika	II-138
Tabel 2.94. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urutan Koperasi dan UKM	II-140
Tabel 2.95. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urutan Penanaman Modal	II-141
Tabel 2.96. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urutan Kepemudaan dan Olah Raga.....	II-142
Tabel 2.97. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urutan Statistik.....	II-143
Tabel 2.98. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urutan Persandian	II-143
Tabel 2.99. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urutan Kebudayaan.....	II-144
Tabel 2.100. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urutan Perpustakaan	II-145
Tabel 2.101. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urutan Kearsipan	II-147
Tabel 2.102. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urutan Kelautan dan Perikanan	II-148
Tabel 2.103. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urutan Pariwisata	II-149
Tabel 2.104. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urutan Pertanian.....	II-150
Tabel 2.105. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urutan Perdagangan.....	II-153
Tabel 2.106. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urutan Perindustrian	II-155
Tabel 2.107. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urutan Transmigrasi	II-155
Tabel 2.108. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urutan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan	II-156

Tabel 2.109. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Pengawasan.....	II-157
Tabel 2.110. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Keuangan	II-158
Tabel 2.111. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Pemerintahan	II-158
Tabel 2.112. Indikator SPM Urusan Pendidikan.....	II-164
Tabel 2.113. Indikator SPM Urusan Kesehatan	II-165
Tabel 2.114. Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ...	II-167
Tabel 2.115. Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-168
Tabel 2.116. Indikator SPM Urusan Sosial	II-169
Tabel 2.117. Indikator SDG's Kabupaten Purbalingga	II-174
Tabel 2.118. Jumlah Rumah Tangga PBDT Tahun 2015	II-202
Tabel 2.119. Jumlah Individu PBDT Tahun 2015	II-202
Tabel 3.1. Realisasi dan Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Purbalingga	III-9
Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018–2022.....	III-12
Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 - 2022.....	III-15
Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 – 2022.....	III-17
Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	IV-8
Tabel 4.2. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021	IV-23
Tabel 5.1 Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020	V-2
Tabel 6.1. Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	VI-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan setiap daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Salah satu diantaranya adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang dalam penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. **Secara substansial**, RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah; rencana program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran dan lokasi kegiatan; serta prakiraan maju dan perangkat daerah penanggung jawab;
2. **Secara normatif**, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD.
3. **Secara operasional**, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan masing-masing Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
4. **Secara faktual**, RKPD menjadi tolok ukur penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan substansi RKPD didasarkan pada hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah serta penjaringan usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu, mengingat kabupaten / kota merupakan bagian dari provinsi, maka substansi RKPD harus sinkron dan sinergis dengan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, proses penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dilakukan melalui pendekatan perencanaan sebagai berikut :

1. Pendekatan Teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
2. Pendekatan Partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat;
3. Pendekatan Politis, yaitu dilaksanakan dengan mengakomodir kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan;
4. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional serta pendekatan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.

Sedangkan secara substansi, penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dilaksanakan melalui pendekatan :

1. Holistik-Tematik, yaitu proses dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor yang meliputi potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2. Integratif, yaitu proses yang dilaksanakan dengan menyatukan wewenang dan sumber pendanaan dari seluruh pihak kedalam satu proses terpadu dengan fokus yang jelas;
3. Spasial, yaitu proses perencanaan dan pengendalian berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah.

Selanjutnya RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.

Secara lebih rinci, penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

- 1). Penyusunan Rancangan Awal;
- 2). Penyusunan Rancangan;
- 3). Forum Perangkat Daerah;
- 4). Pelaksanaan Musrenbang;

- 5). Perumusan Rancangan Akhir; dan
- 6). Penetapan.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah

- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (5-69/2019));
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30).

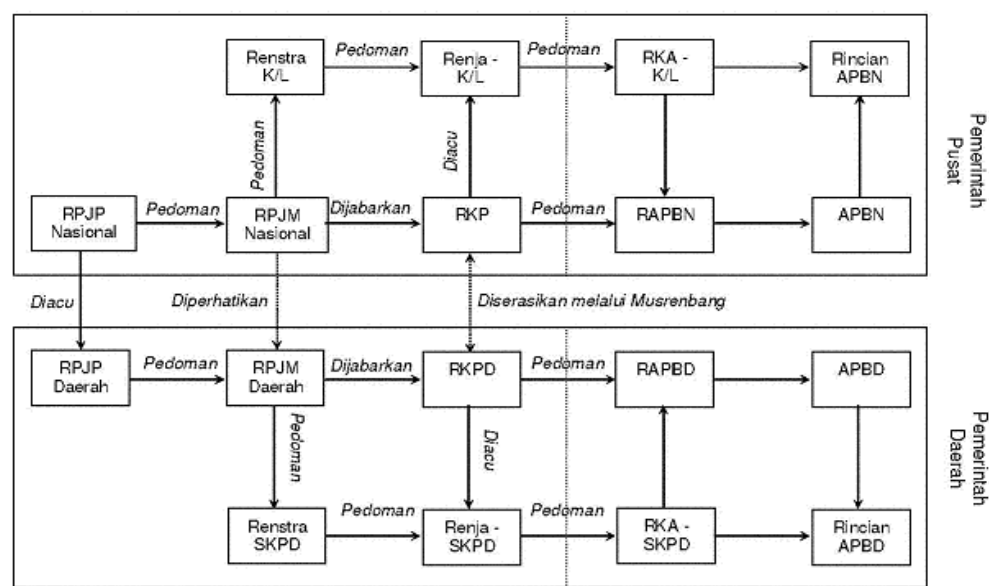
1.3. Hubungan Antar dokumen Perencanaan

Tujuan perencanaan pembangunan nasional antara lain adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang waktu, antar urusan pemerintah, dan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pada tingkat nasional, provinsi, maupun dokumen perencanaan tingkat kabupaten, baik dokumen perencanaan yang bersifat spasial maupun aspasia. Substansi RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 selaras dengan prioritas, kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purbalingga tahun 2005 – 2025.

Selain itu, mengingat wilayah Kabupaten Purbalingga secara administratif dan geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang, Banyumas, Banjarnegara dan Pekalongan, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) keempat kabupaten tersebut, sehingga dapat terwujud keselarasan antar

wilayah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun ke depan.

Selanjutnya, sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Purbalingga harus menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Sebagai dokumen perencanaan tahunan pada tingkat Perangkat Daerah. Terkait dengan hal tersebut, hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 adalah untuk :

1. Menentukan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah untuk tahun 2021;
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2021.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk :

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
2. Menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021;

3. Menjadi sarana untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penyajian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat tentang kondisi umum daerah yang mencakup aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; evaluasi pelaksanaan program RKPD tahun 2019 dan realisasi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah dan tantangan serta prospek perekonomian daerah; arah kebijakan keuangan yang terdiri atas proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah; Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021; serta Sinkronisasi Prioritas Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah RKPD tahun 2021 Kabupaten Purbalingga.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas 77.764,122 Ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah ($\pm$ 3.254 ribu Ha). Secara administrasi Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa dan 15 kelurahan, 996 dusun, 1.558 RW dan 5.092 RT. Rata-rata setiap Desa/Kelurahan memiliki enam rukun warga dan 21 rukun tetangga.

Wilayah Kabupaten Purbalingga berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang dan Pekalongan di sebelah Utara; Kabupaten Banjarnegara di sebelah Timur dan Selatan; Kabupaten Banyumas di sebelah Barat. Pada bagian Selatan merupakan bagian dari DAS Kali Serayu dengan sungai-sungai anakan seperti Kali Pekacangan, Klawing, Gintung dan sebagainya. Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu wilayah di kawasan andalan Jawa Tengah Selatan (Hal. 13, Lampiran IX, PP No. 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah).



Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Purbalingga

B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Purbalingga terletak di bagian barat daya Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Purbalingga terletak pada posisi 109°11'-109°35' Bujur Timur dan 7°10'-7°29' Lintang Selatan. Kabupaten Purbalingga di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara. Jarak ibu kota Kabupaten Purbalingga dengan ibu kota Provinsi sejauh 191 km.

C. Kondisi Geomorfologi dan Topografi

Wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki ketinggian tempat antara 23 meter – 3.432 meter dari permukaan laut. Klasifikasi ketinggian Kabupaten Purbalingga termasuk dalam klasifikasi ketinggian antara 0 – 1.500 meter dari permukaan laut. Menurut klasifikasi ketinggian wilayah Kabupaten Purbalingga tersebut masing-masing mempunyai sifat-sifat khusus seperti diuraikan sebagai berikut:

- Daerah Ketinggian 7 – 25 meter dpl
Merupakan daerah potensi persawahan dengan pengairan yang memadai.
- Daerah Ketinggian 25 – 100 meter dpl
Daerah dengan sebagian wilayah masih berpotensi untuk tanah persawahan. Sebagian wilayah ketinggiannya antara 50 – 100 meter dpl berpotensi untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi yang lebih besar.
- Daerah Ketinggian 100 – 500 meter dpl
Daerah berpotensi utama untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi wilayah bergelombang dan berbukit-bukit.
- Daerah Ketinggian 500 – 1.000 meter dpl
Daerah berpotensi untuk wilayah perkebunan dan baik untuk dikembangkan budidaya tanaman sayur-sayuran, mengingat wilayah tersebut cukup dingin.
- Daerah Ketinggian diatas 1.000 meter dpl
Daerah yang terbatas untuk usaha pertanian karena topografi wilayah bergelombang. Daerah dengan topografi demikian berpotensi sebagai wilayah non budidaya atau kawasan hutan lindung.

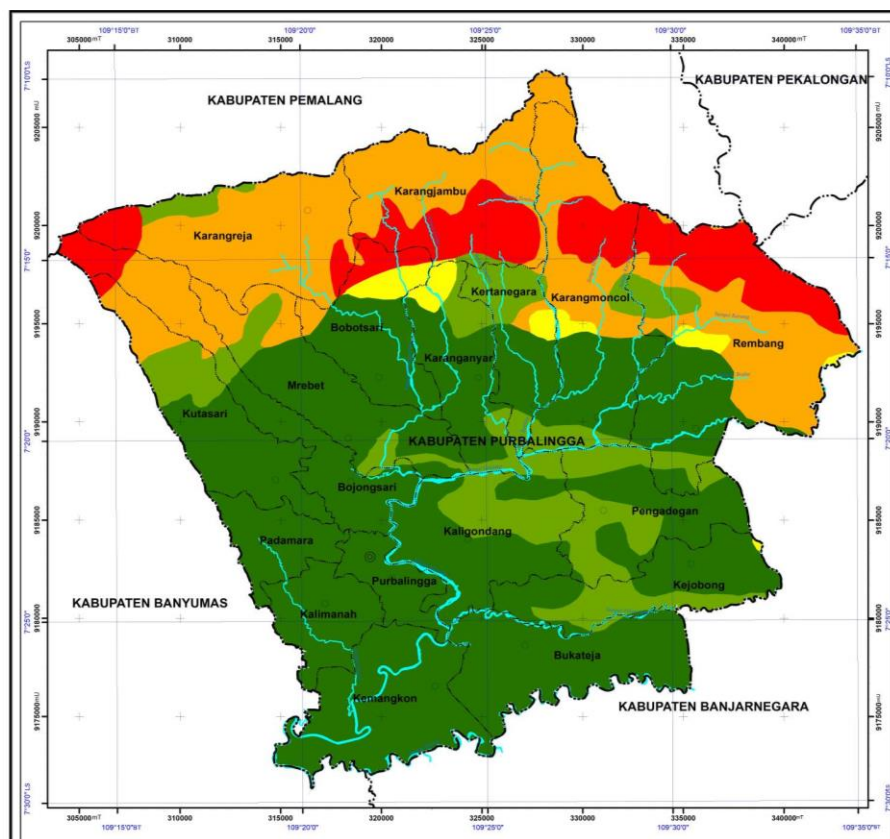
Dataran tinggi di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Rembang, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kertanegara dan sebagian Kecamatan Kutasari, sebagian Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet dan Kecamatan Bobotsari.

Sedangkan dataran rendah di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Pengadegan, sebagian Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Kejobong, sebagian Kecamatan Kutasari, Kecamatan Padamara dan Kecamatan Kemangkon.

Tingkat kelerengan yang terdapat di Kabupaten Purbalingga terdiri atas:

- a. Bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan kelerengan > 40%. Daerah ini meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.
- b. Bagian tengah merupakan daerah dengan kelerengan 25%-40%. Daerah ini meliputi sebagian wilayah Kecamatan Rembang, Karangmoncol, Karangreja dan Bojongsari.
- c. Bagian selatan merupakan daerah dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0 - 25%. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

Gambaran kondisi topografi Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar peta berikut ini:



Gambar 2.2.
Peta Topografi Kabupaten Purbalingga

D. Kondisi Geologi

Berdasarkan kondisi geologi, wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri dari batuan sedimen klasik berupa batuan andesit, sirtu, batu pasir darat, batu lempung, dan trass dengan persebaran sebagai berikut:

Komposisi litologi batuan yang terdapat di Kabupaten Purbalingga terdiri atas:

- Alluvium endapan rawa dan danau, terutama tersusun oleh lempung, umumnya bersifat kedap air.
- Endapan alluvium gunung api, terdiri dari bahan-bahan tak mengeras, mengandung bongkah-bongkah batuan gunung api, tersusun oleh andesit sampai basalt dengan kelulusan terhadap air rendah sampai tinggi.
- Lava andesit berongga asal Gunung Slamet dengan kelulusan terhadap air tinggi sampai sedang.
- Endapan vulkanik tua yang terdiri dari aliran lava yang bersifat andesit sampai basalt dan breksi. Kelulusan terhadap air rendah sampai sedang.

- Batu pasir tufaan, batupasir, konglomerat, tufa, breksi dan lempung dengan kelulusan terhadap air rendah.
- Napal, napal lempungan dan napal globigerina dengan sisipan tipis tufa pasiran, batu gamping pasiran, batu pasir, batu lempung dan lempung tufaan dengan kelulusan terhadap air rendah

E. Jenis Tanah

Kabupaten Purbalingga memiliki struktur tanah yang bervariasi mulai dari perbukitan sampai pegunungan. Berikut ini adalah jenis tanah yang terdapat di daerah Kabupaten Purbalingga dan penyebarannya :

1. Tanah Alluvial

Tanah ini biasanya berwarna kelabu, coklat, dan hitam, bersifat peka terhadap erosi, karena merupakan endapan tanah liat dan pasir, maka terdapat di sepanjang sungai yang cukup besar, seperti Sungai Gintung bagian tengah dan hilir, Sungai Klawing, Sungai Pekacangan dan Sungai Serayu bagian tengah dan hilir.

2. Tanah Latosol

Di Kabupaten Purbalingga tanah latosol dirinci menjadi:

- Tanah Latosol coklat yang berasosiasi dengan negosol coklat
- Tanah Latosol coklat dari bahan induk vulkanik
- Tanah latosol merah kuning, dan
- Tanah Latosol coklat tua

3. Tanah Andosol

Jenis tanah ini berbentuk dari batuan bekuan dan intermedior, mempunyai sifat peka terhadap erosi, berwarna coklat atau hitam kelabu. Terdapat disekitar puncak Gunung Slamet.

4. Tanah Gromosol

Tanah ini berbentuk dari endapan liat dan bekuan. Berwarna kelabu sampai hitam, bersifat peka terhadap erosi, dapat dijadikan tanah pertanian dan perkebunan.

5. Tanah Regosol

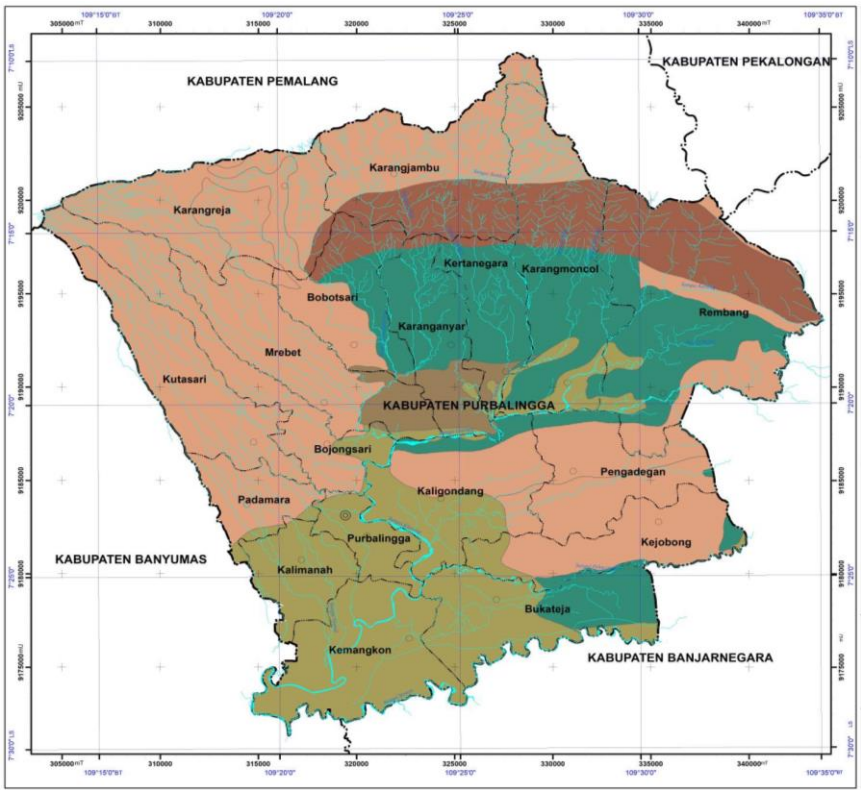
Tanah ini berbentuk dari batuan endapan dan bekuan, sangat peka terhadap erosi, kurang baik untuk pertanian.

Tabel 2.1.
Jenis Tanah di Kabupaten Purbalingga

Kelas	Jenis Tanah	Deskripsi Terhadap Erosi	Lokasi
I	Alluvial, tanah clay, planosol, hidromorf kelabu, laterit air tanah	Rendah/ Tidak Peka	Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Bojongsari, Mrebet, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang
II	Latosol	Sedang/ Agak Peka	Kecamatan Pengadegan, Kejobong, Kaligondang, Padamara, Bojongsari, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, karangjambu, Karangmoncol, Rembang
III	Kambisol, mediteran, brown forest soil, non caltic brown, mediteran.	Tinggi/ Kurang Peka	-
IV	Andosol, laterit, grumosol, podosol, podsolic.	Sangat Tinggi/ Peka	Kecamatan Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, Kaligondang, Pengadegan, Kejobong, Bukateja, Karangreja, Karangjambu
V	Regosol, litosol, organosol, renzina.	Amat Sangat Tinggi/ Sangat peka	Kecamatan Mrebet, Karanganyar, Kertanegara, Bobotsari

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga 2016

Gambaran jenis tanah di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar peta berikut ini.



Gambar 2.3.
Peta Jenis Tanah Kabupaten Purbalingga

F. Kondisi Klimatologi

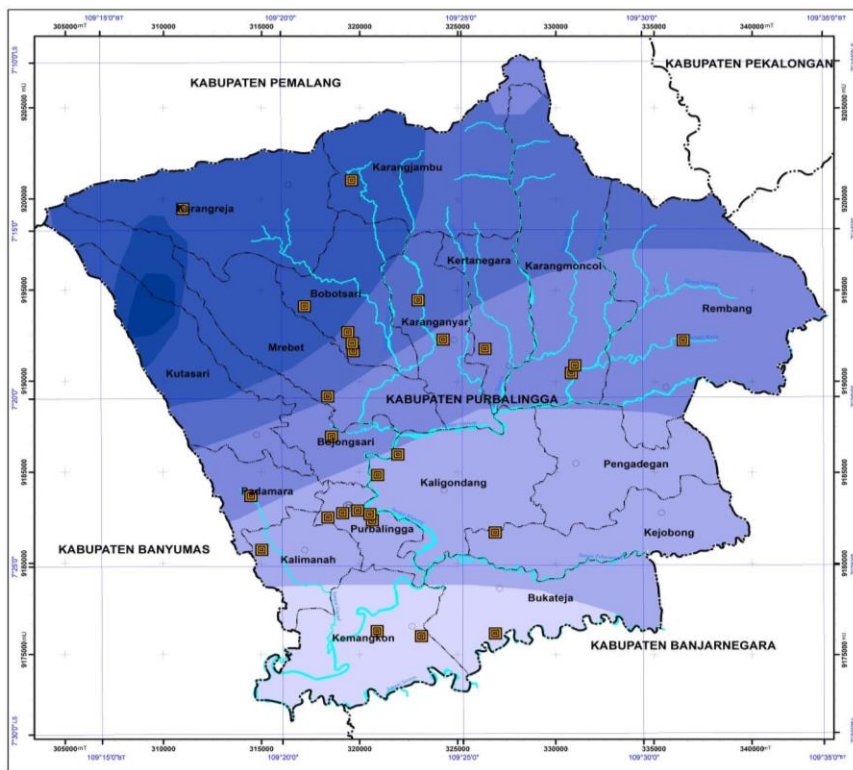
Tipe iklim di Purbalingga tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia, yaitu beriklim tropis dengan musim kemarau dan musim hujan silih berganti setiap setengah tahun. Berdasarkan klasifikasi dari Oldeman adalah beriklim A1 yang lima hingga sepuluh bulan secara berurutan ialah bulan basah. Tipe A1 merupakan tipe iklim yang menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat ditanami padi satu kali dan ditanami palawija sebanyak dua kali. Tanaman yang sebaiknya banyak dikembangkan dan dibudidayakan adalah tanaman palawija. Wilayah Kabupaten Purbalingga sebagian wilayahnya terletak di lereng bagian selatan Gunung Slamet dengan rata-rata curah hujan 3.337 mm/tahun dan suhu udara berkisar antara 22°C - 33°C.

Intenisitas hujan yang terjadi selama setahun dan dirata-rata perhari hujan dalam setahun.

Tabel 2.2.
Analisis Kelas Intensitas Hujan di Wilayah Kabupaten Purbalingga

Kelas Intensitas Hujan	INTENSITAS HUJAN (mm / hari hujan)	KETERANGAN	LOKASI
I	=< 13,5	Sangat Rendah	-
II	13,6 – 20,7	Rendah	-
III	20,7 – 27,7	Sedang	Kecamatan Kemangkon, Bukateja
IV	27,7 – 34,8	Tinggi	Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, Kaligondang, Pengadegan, Kejobong, Bukateja, Kemangkon
V	> 34,8	Sangat Tinggi	Kecamatan Padamara, Bojongsari, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, Karangreja, Karangjambu

Sumber: SK Mentan No.837/KPTS/UM/11/1980 dan No. 683/KPTS/UM/8/1982



Gambar 2.4.
Peta Curah Hujan Bulanan Kabupaten Purbalingga

G. Kondisi Hidrologi

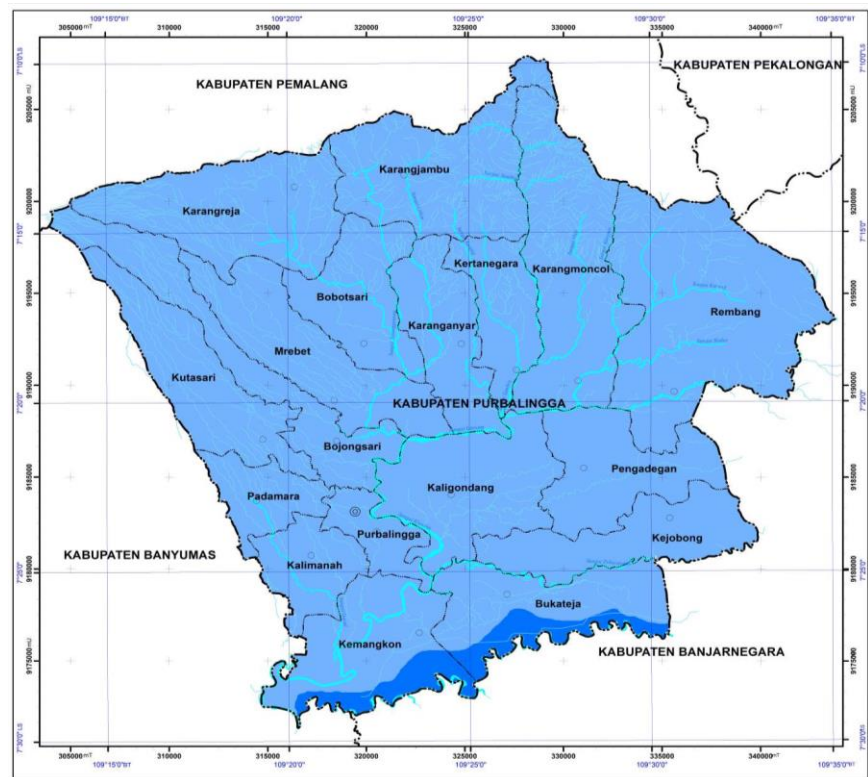
Pada umumnya, sungai-sungai di Kabupaten Purbalingga belum dimanfaatkan secara optimal, baik untuk pengairan tanah pertanian maupun untuk kebutuhan lainnya. Tetapi sungai yang memungkinkan untuk dibuat bendungan, dam dan waduk-waduk kecil lainnya yang tidak banyak mengeluarkan dana, telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk pengairan sawah, perikanan dan sebagainya.

Debit air sungai itu sendiri dalam setahunnya tidak tetap, karena debit air sungai dipengaruhi oleh curah hujan di daerah hulu. Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari 2 (dua) macam aliran, yaitu sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya serta sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga saja. Sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya, yaitu sungai Pekacangan, sungai Serayu dan sungai Klawing.

Sedangkan sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga dan berpotensi untuk pengairan yaitu :

- Sungai Ponggawa
- Sungai Wotan
- Sungai Tungtung Gunung
- Sungai Tlahap

- Sungai Gemuruh
- Sungai Laban
- Sungai Kajar
- Sungai Kuning
- Sungai Lembereng
- Sungai Gintung
- Sungai Soso
- Sungai Tambra
- Sungai Lebak
- Sungai Muli



Gambar 2.5.
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Purbalingga

H. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah dapat diketahui dari potensi kawasan budidaya sebagaimana tercantum dalam Revisi RTRW Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2031. Kawasan budidaya terdiri atas: (1) kawasan peruntukan hutan produksi; (2) kawasan peruntukan pertanian (3) kawasan peruntukan pertambangan; (4) kawasan peruntukan industri; (5) kawasan peruntukan pariwisata; (6) kawasan peruntukan permukiman; dan (7) kawasan pertahanan dan keamanan.

(1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi yang terdapat di Kabupaten Purbalingga adalah kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi dimana

eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam. Kawasan ini merupakan areal hutan yang dikuasai oleh Perhutani BKPH Gunung Slamet Timur yang terdiri dari 4 RPH, yaitu RPH Serang, RPH Picung, RPH Karangreja, dan RPH Tunjungmulih. Kawasan hutan produksi diperuntukkan bagi areal hutan yang diproduksi baik melalui tebangkan maupun pengambilan produksi bentuk lainnya. Oleh karena itu jika terdapat areal dengan hak atas tanah dan masyarakat atau badan hukum, wajib diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria:

Landasan kebijaksanaan yang menyangkut hutan produksi adalah SK Mentan No. 683/KPTS/UM/8/1981, PP No 104 Tahun 2015 kriteria kawasan hutan produksi seperti dengan penetapan kawasan hutan lindung yaitu kelerengan, jenis tanah dan curah hujan. Kriteria kawasan peruntukan hutan produksi adalah :

1. Peruntukan Hutan Produksi Terbatas

Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 - 174 di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.

2. Peruntukan Hutan Produksi Tetap

Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.

Sesuai hasil analisis luasan berdasarkan interpretasi citra satelit tahun 2015 dan data *.shp hutan yang diberikan Kementerian LHK, luas hutan produksi di Kabupaten Purbalingga kurang lebih 3.926,83 hektar, meliputi :

1. Hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 641,74 hektar yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 74,22 hektar;
 - b. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 67,67 hektar;
 - c. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 269,34 hektar;
 - d. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 147,47;
 - e. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 21,10 hektar;

- f. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 51,78 hektar;
 - g. Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 9,33 hektar; dan
 - h. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 0,83 hektar.
2. Hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 3.285,09 hektar yang meliputi wilayah :
- a. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 546,02 hektar;
 - b. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 9,88 hektar;
 - c. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 494,55 hektar;
 - d. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 707,17 hektar;
 - e. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 640 hektar;
 - f. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 85,94 hektar;
 - g. Kecamatan Kutasari seluas kurang lebih 67,46 hektar;
 - h. Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 147,12 hektar; dan
 - i. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 586,95 hektar.

Hutan produksi di luar kawasan hutan pada tanah negara yang dikelola oleh masyarakat (hutan rakyat) dapat diberikan hak pinjam pakai atau hak milik sesuai dengan syarat subjek sebagai pemegang hak. Kawasan hutan produksi yang ada dan fisiknya masih berupa hutan, tetap dipertahankan untuk hutan produksi. Sedangkan apabila kriteria kawasan berubah fungsinya menjadi hutan lindung pemanfaatannya disesuaikan dengan lebih mengutamakan upaya konservasi misalnya paling tidak menjadi kawasan hutan produksi dengan tebang pilih.

Diadakan penertiban penguasaan, pemeliharaan batas hutan dan pemilikan tanah serta pernbinaan dan pemanfaataannya yang seimbang antara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan atau penggunaan non hutan lainnya dan sudah menjadi garapan rakyat. Bentuk penertiban dapat melalui kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ataupun bentuk-bentuk lain yang sesuai.

(2) Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di wilayah Kabupaten Purbalingga seluas kurang lebih 41.314 hektar yang terdiri atas kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan hortikultura dan kawasan perkebunan.

a. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 22.297 hektar terdiri atas tanaman pertanian pangan lahan basah dan lahan kering. Kawasan budidaya pertanian ini mempunyai kriteria sebagai unit lahan yang mempunyai tingkat kesesuaian bagi peruntukan pola usaha pertanian dan tidak dialokasikan untuk kawasan lindung.

1. Kawasan Pertanian Lahan Basah

Kawasan pertanian lahan basah adalah kawasan yang dapat diperuntukkan bagi usaha pertanian pangan yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dan sumber utama pengairannya berasal dari irigasi, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan. Potensi pertanian lahan basah di Kabupaten Purbalingga seluas $\pm$ 15.694 ha yang terdiri dari lahan sawah beririgasi dan lahan sawah tadah hujan yang berada di seluruh wilayah kabupaten.

Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi tanaman padi sesuai dengan penetapan bupati. Penggunaan jenis tanaman lainnya selain padi diperkenankan apabila air tidak mencukupi atau adanya pertimbangan pencapaian target produksi optimal seperti palawija. Untuk mengoptimalkan produksi tersebut wajib berpedoman pada pola tanam yang ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Usaha pertanian berupa tegalan atau kebun campur, kebun sayur atau hutan rakyat pada areal yang potensial untuk memperoleh irigasi dan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah mampu menjangkau tanah yang dimilikinya, maka pemilik wajib mengembangkan untuk diubah menjadi sawah. Pembangunan gedung, perumahan dan pabrik atau bangunan fisik di kawasan ini tidak diperkenankan kecuali bangunan fisik pendukung prasarana irigasi.

Untuk perkampungan atau bangunan fisik yang ada tidak diperkenankan melebar atau meluas ke areal sawah yang saat ini dan dinyatakan sebagai kawasan pertanian lahan basah atau bukan sawah tetapi berpotensi untuk berkembang menjadi sawah. Perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan secara

nasional maupun regional serta ada Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan tanah.

Pembangunan yang bersifat non pertanian diusahakan agar tidak menggunakan areal pertanian yang subur, beririgasi teknis, setengah teknis dan sederhana, serta berfungsi utama melindungi sumber daya alam dan warisan budaya. Pelaksanaan konservasi tanah atas dasar status irigasi, produktivitas, sifat penggunaan tanah (perkotaan atau perdesaan) dan letak serta luas tanah dilakukan secara bertahap. Kegiatan yang diizinkan adalah pengolahan lahan dan penelitian. Jenis bangunan yang diizinkan yaitu prasarana irigasi.

Penyediaan bibit unggul oleh petani secara mandiri perlu dikembangkan untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap bibit unggul produksi daerah lain atau pengusaha bibit. Sehingga sektor pertanian di Kabupaten Purbalingga akan menjadi kuat yang pada akhirnya akan menghambat berkembangnya sektor industri yang tidak berbasis potensi lokal.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering

Kawasan ini adalah kawasan yang dapat diperuntukkan bagi budidaya pertanian dalam arti luas juga, namun ada keterbatasan khususnya mengenai ketersediaan air, sehingga komoditi yang diusahakan juga dipilih yang sesuai dengan kemampuan lahannya. Pertanian lahan kering merupakan areal lahan yang keadaan dan sifat fisiknya mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi bagi tanaman palawija dan hortikultura (kebun campur, tanaman hortikultura, dan ladang).

Potensi kawasan pertanian lahan kering seluas ± 6.603 Ha terdapat di seluruh wilayah kabupaten. Kawasan pertanian lahan kering merupakan kawasan yang boleh dialihfungsikan untuk kegiatan lainnya, dikecualikan untuk kegiatan industri skala menengah dan besar, dengan syarat di luar lahan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan memberi nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi serta tidak

mengganggu keseimbangan lingkungan. Alih fungsi lahan agar disesuaikan dengan rencana rinci tata ruang dan rencana detail tata ruang.

3. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Menurut Permen 19 Tahun 2016, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan terdiri dari kawasan pertanian pangan berkelanjutan nasional untuk lintas provinsi, kawasan pertanian pangan berkelanjutan provinsi untuk lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi, dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten/kota untuk 1 kabupaten/kota. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 18.583 Ha yang terdapat di seluruh wilayah kabupaten.

Tabel 2.3.
Luas Areal Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
Kabupaten Purbalingga

No.	Kecamatan	Kawasan Pertanian Lahan basah (Ha)	Sempadan Sungai (Ha)	Total Kawasan Pertanian Lahan Basah (Ha)	Kawasan Pertanian Lahan Kering	Total KP2B
1	Bobotsari	826.06	65.78	891.84	4.60	896.44
2	Bojongsari	861.60	36.40	898.00	303.75	1201.76
3	Bukateja	1013.43	36.98	1050.41	100.33	1150.74
4	Kaligondang	1002.40		1002.40	0.22	1002.62
5	Kalimanah	960.25	135.41	1095.66	32.66	1128.32
6	Karanganyar	648.01	5.62	653.64	17.13	670.76
7	Karangjambu	1226.05	130.34	1356.39	12.09	1368.48
8	Karangmoncol	281.85	15.34	297.19	133.30	430.48
9	Karangreja	1892.55	53.95	1946.51	26.93	1973.44
10	Kejobong	1884.42	99.88	1984.29	48.44	2032.73
11	Kemangkong	196.32	16.08	212.40	138.31	350.71
12	Kertanegara	728.45	120.94	849.39	17.24	866.63
13	Kutasari	844.66		844.66	659.52	1504.18
14	Mrebet	1127.48	20.76	1148.23	304.51	1452.74
15	Padamara	947.01		947.01	3.26	950.27

No.	Kecamatan	Kawasan Pertanian Lahan basah (Ha)	Sempadan Sungai (Ha)	Total Kawasan Pertanian Lahan Basah (Ha)	Kawasan Pertanian Lahan Kering	Total KP2B
16	Pengadegan	74.88	6.06	80.94	119.85	200.80
17	Purbalingga	368.44	0.68	369.12	1.28	370.40
18	Rembang	840.95	79.63	920.58	111.49	1032.07
	Jumlah	15724.82	823.85	16548.67	2034.91	18583.58

Catatan : Kawasan sempadan sungai termasuk dalam Kawasan Pertanian Lahan Basah
 Sumber : DPUPR Kabupaten Purbalingga, Digitasi KP2B tanggal 10 Mei 2019

b. Kawasan Pertanian Holtikultura

Pertanian hortikultura sayuran dan bunga-bunga, meliputi: pertanian hortikultura sayuran yang dipanen sekali (bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, petsai/sawi, wortel, dan lobak, termasuk bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya); hortikultura sayuran yang dipanen lebih dari sekali (kacang panjang, kacang merah, cabe, tomat, terong, buncis, ketimun, labu siam, bayam, kangkung dan jamur); hortikultura buah-buahan dan biofarmaka. Lokasi kawasan holtikultura di Kabupaten Purbalingga terdapat di seluruh wilayah kabupaten. Luas kawasan holtikultura di Kabupaten Purbalingga mencapai 1.453 ha.

c. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan adalah kawasan bagi tanaman/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industry. Kawasan perkebunan atau kawasan pengembangan perkebunan adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan (sesuai UU No. 18/2004). Kawasan perkebunan dapat berupa kawasan yang telah ada maupun lokasi baru yang sesuai dengan persyaratan bagi masing-masing jenis budidaya tanaman perkebunan, dan lokasinya disatukan oleh agroekosistem yang sama. Kawasan dengan peruntukan perkebunan di Kabupaten Purbalingga berupa kebun campur (agroforestri) seluas ± 17.564 ha yang berada di seluruh wilayah kabupaten.

d. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha pengembangan perikanan. Kawasan perikanan terdiri dari kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya dan kawasan pengolahan ikan. Kawasan

perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha perikanan darat, baik berupa kegiatan budidaya perikanan secara khusus maupun kegiatan budidaya perikanan secara tumpang sari dengan pertanian lahan basah beririgasi. Jenis ikan yang dikembangkan di Kabupaten Purbalingga antara lain : nila merah, lele, patin, mas, gurami, bawal, tawes dan melem. Ikan-ikan tersebut selain dibudidayakan juga berkembang di perairan umum.

Kawasan budidaya perikanan darat meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, dan pemasaran yang tersebar di wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumberdaya air untuk kegiatan budidaya perikanan seperti: Kecamatan Purbalingga, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Kalimanah, Bojongsari dan Padamara.

(3) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan. Kawasan peruntukan pertambangan yang memiliki potensi bahan tambang yang bernilai ekonomis, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, yang pemanfaatannya perlu dikendalikan agar terjaga kelestariannya sehingga tidak menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Penetapan kawasan pertambangan merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Kawasan peruntukan pertambangan meliputi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan kawasan peruntukan panas bumi.

a. Kawasan Pertambangan Mineral

Kawasan pertambangan mineral adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud mineral. Kawasan ini berupa Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Di Kabupaten Purbalingga hanya terdapat WUP Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi seluruh wilayah kecamatan, dengan potensi bahan galian mineral bukan logam dan batuan berupa : batu gamping, andesit, diorit, pasir dan batu (sirtu), tanah liat, tanah urug dan tras. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi seluruh wilayah kecamatan.

Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan yang memungkinkan untuk dilakukan kegiatan pertambangan mineral non logam dan batuan adalah sebagai berikut :

- Bahan galian terletak di daerah dataran, perbukitan yang bergelombang atau landai kemiringan lereng antara (0% - 17%), curam (17% - 36%) hingga sangat curam
- (>36%)), pada alur sungai dan cara pencapaian
- Lokasi tidak berada di kawasan hutan lindung;
- Lokasi tidak terletak pada bagian hulu dari alur-alur sungai (yang umumnya bergradien dasar sungai yang tinggi);
- Lokasi penggalian di dalam sungai harus seimbang dengan kecepatan sedimentasi;
- Jenis dan besarnya cadangan/deposit bahan tambang secara ekonomis menguntungkan untuk dieksplorasi;
- Lokasi penggalian tidak terletak di daerah rawan bencana alam seperti gerakan tanah, banjir dan sebagainya.

b. Kawasan Panas Bumi

Kawasan panas bumi berupa Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturraden, dimana sebagian wilayah Kabupaten Purbalingga masuk dalam WKP tersebut.

Kawasan peruntukan panas bumi merupakan kawasan yang masuk dalam sistem panas bumi yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi. Lokasinya adalah wilayah Kabupaten Purbalingga yang masuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturraden meliputi :

- sebagian wilayah Kecamatan Bojongsari;
- sebagian wilayah Kecamatan Karangreja; dan
- sebagian wilayah Kecamatan Kutasari.

Kegiatan pemanfaatan sumber energi dari panas bumi dilakukan dengan mempertimbangkan potensi panas bumi, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan; Kegiatan pemanfaatan sumber energi dari panas bumi dilakukan dengan prinsip konservasi dan keberlanjutan; Meminimalisir bukaan lahan, terutama kawasan lindung dan menggantinya dengan lahan yang lain; Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya

dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan pemanfaatan potensi panas bumi, sekaligus disertai pengendalian yang ketat.

Pelaku kegiatan pemanfaatan potensi panas bumi dapat membangun prasarana jalan khusus untuk mendukung kegiatan pemanfaatan potensi panas bumi setelah memperoleh izin Pemerintah Daerah. Kegiatan yang diizinkan adalah penelitian, pemanfaatan potensi panas bumi serta pemantauan dan pengawasan kawasan. Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan pemanfaatan potensi panas bumi berupa power plant pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTB) dan bangunan penunjangnya; sumur eksplorasi, sumur eksploitasi dan penunjangnya; jaringan pipa dan penunjangnya; pos pengawasan; serta kantor pengelola.

(4) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga meliputi wilayah industri dan kawasan industri. Menurut PP No 142 Tahun 2014, pengertian kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Kawasan Industri dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 hektar dalam satu hamparan. Kawasan peruntukan industri memiliki fungsi antara lain:

- 1) Memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
- 2) Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
- 3) Meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah yang bersangkutan; dan
- 4) Mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Tabel 2.4.
Kriteria Pemilihan Lokasi Industri

No	Kriteria Pemilihan Lokasi	Faktor Pertimbangan
1	Jarak ke Pusat Kota	Maksimal 15 – 20 Km
2	Jarak terhadap permukiman	Minimal 2 (dua) km
3	Jaringan jalan yang melayani	Arteri primer
4	Sistem jaringan yang melayani	Jaringan listrik Jaringan telekomunikasi
5	Prasarana angkutan	Tersedia pelabuhan laut / outlet (export /import)
6	Topografi / kemiringan tanah	Maks 0 - 15 derajat
7	Jarak terhadap sungai	Maks 5 (lima) km dan terlayani sungai tipe C dan D atau kelas III dan IV
8	Daya dukung lahan	Sigma tanah : 0,7 – 1,0 kg/cm ²
9	Kesuburan tanah	Relatif tidak subur (non irigasi teknis)
10	Peruntukan lahan	Non Pertanian Non Permukiman Non Konservasi
11	Ketersediaan lahan	Minimal 25 Ha
12	Harga lahan	Relatif (bukan merupakan lahan dengan harga yang tinggi di daerah tersebut)
13	Orientasi lokasi	Aksessibilitas tinggi Dekat dengan potensi Tenaga kerja
14	<i>Multiplier Effects</i>	Bangkitan lalu lintas= 5,5 smp/ha/hari. Kebutuhan lahan industri dan multipliernya = 2 x luas perencanaan KI. Kebutuhan rumah .(1,5 TK ~ 1 KK) Kebutuhan Fasum – Fasos.

Sumber: Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 50/M/SK/1997 tentang Standar Teknis Kawasan Industri

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka untuk industri rumah tangga maupun industri kecil dan menengah memerlukan pembinaan dalam rangka pemberdayaan kualitas usaha. Untuk industri rumah tangga/kecil dan menengah, lokasinya dapat tersebar di seluruh wilayah seperti industri kerajinan, pengolahan hasil pertanian dan makanan lainnya. Selain itu, dari industri rumah tangga/kecil tersebut diharapkan akan muncul keterkaitan ekonomi yang luas agar timbul dampak lanjutan yang positif, sehingga dapat menunjang perkembangan industri yang lebih besar. Sedangkan untuk industri besar perlu ditempatkan pada kawasan yang potensial bagi perkembangan dalam skala luas.

Pengaturan bagi kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga sebaiknya disesuaikan dengan kriteria-kriteria di atas. Rujukan yang dapat dipakai dalam menentukan klasifikasi lokasi industri di antaranya Keputusan Kepala Bapedal No. 56 tahun 1994 tentang Pedoman mengenai ukuran Dampak Penting, serta Keputusan Meneg Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Dalam pengembangan aktivitas industri di Kabupaten Purbalingga perlu ada spesifikasi. Spesifikasi ini secara makro dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan terhadap teknologi, sumberdaya dan modal seperti :

1. Lokasi di kota besar (*city location*) untuk kota inti adalah industri yang membutuhkan :
 - Diperlukan tenaga kerja terampil dalam jumlah yang besar;
 - Proses produksi sangat tergantung pada fasilitas-fasilitas yang umumnya hanya terdapat di kota besar saja seperti listrik, gas, dll.;
 - Kontak dengan supplier dekat dan cepat; dan - Sarana transportasi dan komunikasi mudah didapatkan.
2. Lokasi di pinggir kota :
 - Semi-skilled atau female labor mudah diperoleh.
 - Menghindari pajak yang berat seperti halnya kalau lokasi yang terletak di kota besar;
 - Tenaga kerja dapat tinggal berdekatan dengan lokasi pabrik;
 - Rencana ekspansi pabrik dapat dengan mudah dibuat; dan
 - Populasi tidak begitu besar sehingga masalah lingkungan tidak banyak timbul.

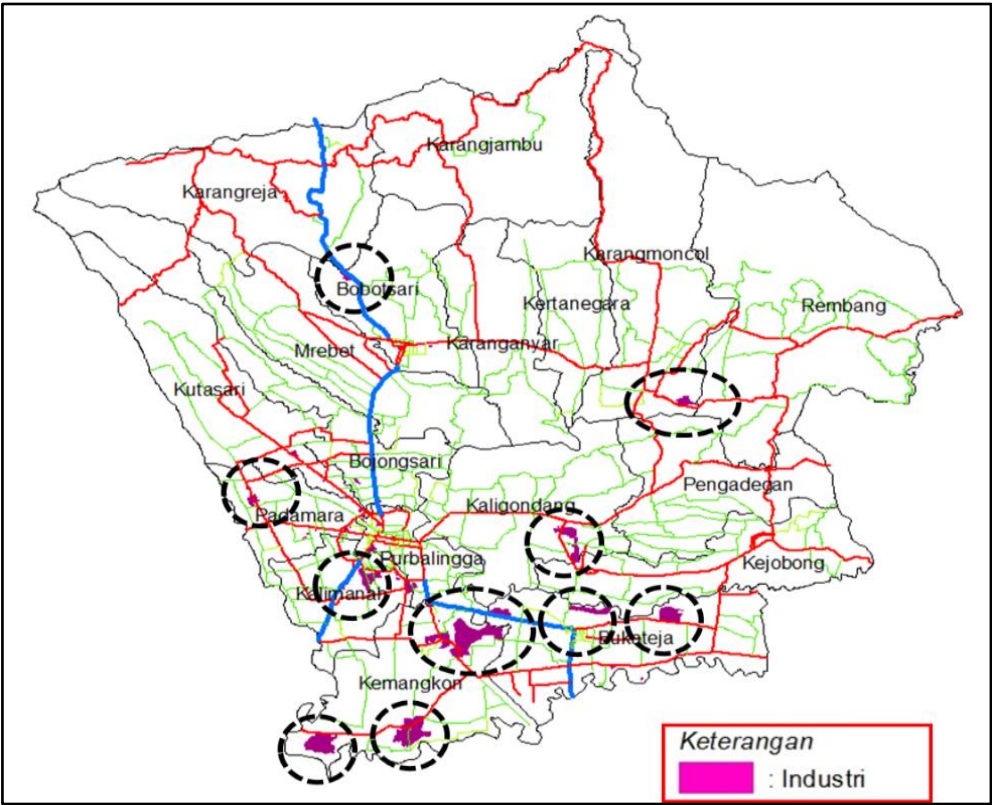
Kawasan peruntukan industri berupa kawasan peruntukan industri besar dan menengah. Luas kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga mencapai 875 ha yang meliputi kawasan industri menengah dan kawasan industri besar. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga berada di Kecamatan Bobotsari, Bojongsari, Bukateja, Kaligondang, kalimanah, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Kejobong, Kemangkon, Kutasari, Padamara dan Purbalingga. Untuk kegiatan industri kecil dapat dilaksanakan pada kawasan peruntukan lain yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Pengelolaan kawasan peruntukan industri tergantung oleh jenis pengelompokan industri yang akan dikelola. Selain itu, perlu juga disediakan sarana dan prasarana ke dan di kawasan yang akan dijadikan kawasan bagi peruntukan industri, seperti prasarana jalan, listrik dan telepon, fasilitas air bersih untuk kegiatan industri, fasilitas pengolahan dan pembuangan limbah. Pengelolaan limbah buangan hasil kegiatan industri (baik limbah cair atau limbah padat), yang bersifat B3 (berbahaya dan beracun) harus diolah terlebih

dahulu, sehingga kapasitas bahan B3 yang terkandung pada limbah berada di bawah ambang batas yang telah diperkenankan sebelum dibuang ke perairan umum.

Kegiatan industri, terutama yang menggunakan fasilitas penanaman modal (industri besar) yang berpotensi menimbulkan pencemaran tidak diperkenankan membangun industri di luar wilayah kawasan yang diperuntukkan bagi industri. Kegiatan industri menengah yang mengandung polusi dan industri besar diarahkan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri.

Pengembangan industri rumah tangga, kecil, menengah, dan pergudangan yang tidak menimbulkan polusi dan/atau limbah berbahaya dapat bercampur dengan kawasan permukiman dengan memperhatikan keserasian kawasan dan dukungan infrastruktur kawasan. Pengembangan industri melalui plasma industri yang tidak menimbulkan polusi dan/atau limbah berbahaya dapat bercampur dengan kawasan permukiman dengan memperhatikan keserasian kawasan dan dukungan infrastruktur kawasan. Pengembangan industri rumah tangga, kecil, dan pergudangan yang berpotensi mencemari lingkungan disatukan di kawasan peruntukan industri dan dilengkapi dengan dengan IPAL serta kawasan sabuk hijau.



Gambar 2.6.
Peta Rencana Lokasi Industri Kabupaten Purbalingga

(5) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki potensi (baik alam, ilmu pengetahuan, sejarah dan budaya) yang dapat dikembangkan sebagai kawasan yang dapat dikunjungi. Kegiatan berwisata sebagai kebutuhan manusia bertujuan untuk mendapatkan ketenangan, rasa puas dan kesegaran kembali melalui suatu aktivitas dalam ruang dan waktu tertentu. Dengan konsep ini, maka kegiatan wisata harus memberikan pengalaman/*experience* baru bagi seseorang, sehingga kejenuhan yang dialami dalam keseharian akan bergeser ke kondisi yang segar/fresh baik secara fisik maupun psikis. Mengingat kegiatan wisata erat kaitannya dengan keberadaan tempat (*place*) dan ruang (*space*), maka untuk mendapatkan kesegaran dan kenikmatan dalam berwisata, seseorang seringkali harus melakukan perjalanan dalam rangka mencapai tujuan berwisata.

Sesuai dengan SK Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM. 98/PW. 1 02/MPPT.87, SK Dirjen Pariwisata KEP 18/4/11/88 tentang Kawasan Pariwisata ditetapkan dengan kriteria : keindahan alam dan panorama; masyarakat dan kebudayaan tinggi dan diminati oleh wisatawan; bangunan peninggalan budaya dan/atau mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Kawasan pariwisata di Kabupaten Purbalingga meliputi :

1. Pariwisata alam meliputi :

- a. Pendakian Gunung Slamet di Kecamatan Karangreja;
- b. Goa Lawa (GOLAGA) di Kecamatan Karangreja;
- c. Agrowisata Serang di Kecamatan Karangreja;
- d. Bumi Purba di Kecamatan Kutasari;
- e. Leren View di Kecamatan Karangreja;
- f. Klawing Riverside di Kecamatan Purbalingga;
- g. Sirau The Lost Paradise di Kecamatan Karangmoncol; dan
- h. pengembangan potensi pariwisata alam lainnya di seluruh kecamatan.

2. Pariwisata budaya meliputi :

- a. Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman yang berada di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang;
- b. Museum Profesor Soegardha Poerbakawatja yang berada di Kecamatan Purbalingga ;
- c. Masjid Agung Darussalam yang berada di Kecamatan Purbalingga;
- d. Situs cagar budaya yang berada di seluruh wilayah kabupaten;
- e. Desa Wisata yang berbasis budaya; dan

- f. pengembangan potensi pariwisata budaya lainnya di seluruh kecamatan.
- 3. Pariwisata buatan meliputi :
 - a. Kolam Renang Tirto Asri Walik di Kecamatan Kutasari;
 - b. Obyek Wisata Air Bojongsari (OWABONG) di Kecamatan Bojongsari;
 - c. Akuarium Air Tawar Purbasari Pancuran Mas di Kecamatan Padamara;
 - d. Sanggaluri Park di Kecamatan Kutasari;
 - e. Bumi Perkemahan Munjul Luhur di Kecamatan Kutasari;
 - f. Pancuran Ciblon di Kecamatan Bobotsari;
 - g. Soedirman Point di Kecamatan Rembang;
 - h. Purbalingga City Park (Taman Usman Janatin) di Kecamatan Purbalingga; dan
 - i. pengembangan potensi pariwisata buatan lainnya di seluruh kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengelola kawasan pariwisata dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat serta bekerja sama dengan sektor swasta. Dalam hal ini pemerintah daerah berperan dalam fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana guna memberikan kenyamanan bagi para wisatawan serta melakukan promosi destinasi wisata yang terdapat di Kabupaten Purbalingga dalam berbagai event pariwisata dan kebudayaan.

(6) Kawasan Peruntukan Permukiman

Menurut UU No. 1 Tahun 2011, kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman atau dengan kata lain untuk menampung penduduk yang ada di Kabupaten Purbalingga sebagai tempat hunian dengan fasilitas sosialnya. Kawasan permukiman dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

a. Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman kota mencakup wilayah pengembangan kota (untuk ibukota Kabupaten dan ibukota kecamatan). Kebijakan pemanfaatan ruangnya didasarkan pada tujuan pengembangan sarana prasarana penunjangnya yang

meliputi: penataan ruang kota yang mencakup penyusunan dan peninjauan kembali (evaluasi, revisi) rencana tata ruang kota. Permukiman perkotaan Kabupaten Purbalingga terdapat di kawasan perkotaan di Kabupaten Purbalingga. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 6.101 hektar, tersebar di seluruh pusat pelayanan kecamatan.

b. Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan adalah ruang yang diperuntukkan bagi pengelompokkan permukiman penduduk yang terikat dengan pola lingkungan pedesaan, yang dominasi usahanya adalah di bidang pertanian dan sarana prasarana pertanian.

Kebijaksanaan pemanfaatan ruang Permukiman Pedesaan didasarkan pada tujuan untuk mengembangkan kawasan permukiman yang terkait dengan kegiatan budidaya pertanian yang meliputi pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang terdapat dalam KTP2D. Sedangkan, permukiman pedesaan di luar KTP2D mencakup perkampungan yang ada dan arahan bagi perluasannya.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 14.277 hektar, tersebar di luar kawasan perkotaan. Perencanaan luas tiap kawasan permukiman harus sesuai kebutuhan dan seoptimal mungkin sehingga tidak ada lahan yang terbuang yang mengakibatkan pengurangan bagi peruntukan lahan yang lain terutama pertanian.

Penempatan kawasan sebaiknya membentuk kelompok dan tidak berhubungan langsung dengan jalan utama untuk menghindari terbentuknya lorong pada jalan utama yang ber dinding bangunan di kiri-kanannya, namun kemudahan mencapai sarana angkutan umum terdekat tetap perlu diperhitungkan. Pertimbangan ini juga bertujuan menambah faktor kenyamanan dan keamanan bagi pelaku aktivitas dan pemakai jalan.

Penetapan lokasi harus mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung, untuk kawasan perlindungan setempat, sekitar mata air harus memperhatikan faktor fisik litologi, bila kesarangan dan kelulusan air tinggi diusahakan potensi air tanah yang ada tidak terganggu yang pada akhirnya kondisi sumber air yang seharusnya dilindungi tetap terjaga walaupun kawasan permukiman dikembangkan di dekatnya.

Sumur resapan sampai saat ini dianggap salah satu solusi pelestarian sumber daya air tanah yang efektif, sebab mampu menjaga kedalaman muka air

tanah dangkal dan memperkecil fluktuasi di musim penghujan - musim kemarau. Selain itu adanya sumur resapan akan mengurangi limpasan air permukaan (*runoff*) ke areal yang tidak diinginkan seperti pekarangan dan jalan. Sosialisasi dan perencanaan konstruksi sumur resapan perlu di lakukan pada kawasan permukiman.

Lahan kawasan terbuka hijau perlu di siapkan dan direalisasikan untuk tujuan estetika dan kenyamanan selain sebagai paru-paru dan areal resapan. Perencanaan dan pembangunan instalasi pengolahan limbah air perlu dipertimbangkan pada suatu kawasan permukiman, akan lebih baik lagi bila mampu melakukan proses daur ulang sehingga air limbah dapat dipergunakan kembali, walaupun mengalami degradasi mutu dan kegunaan langkah tersebut merupakan upaya pelestarian sumber daya air yang sangat berarti.

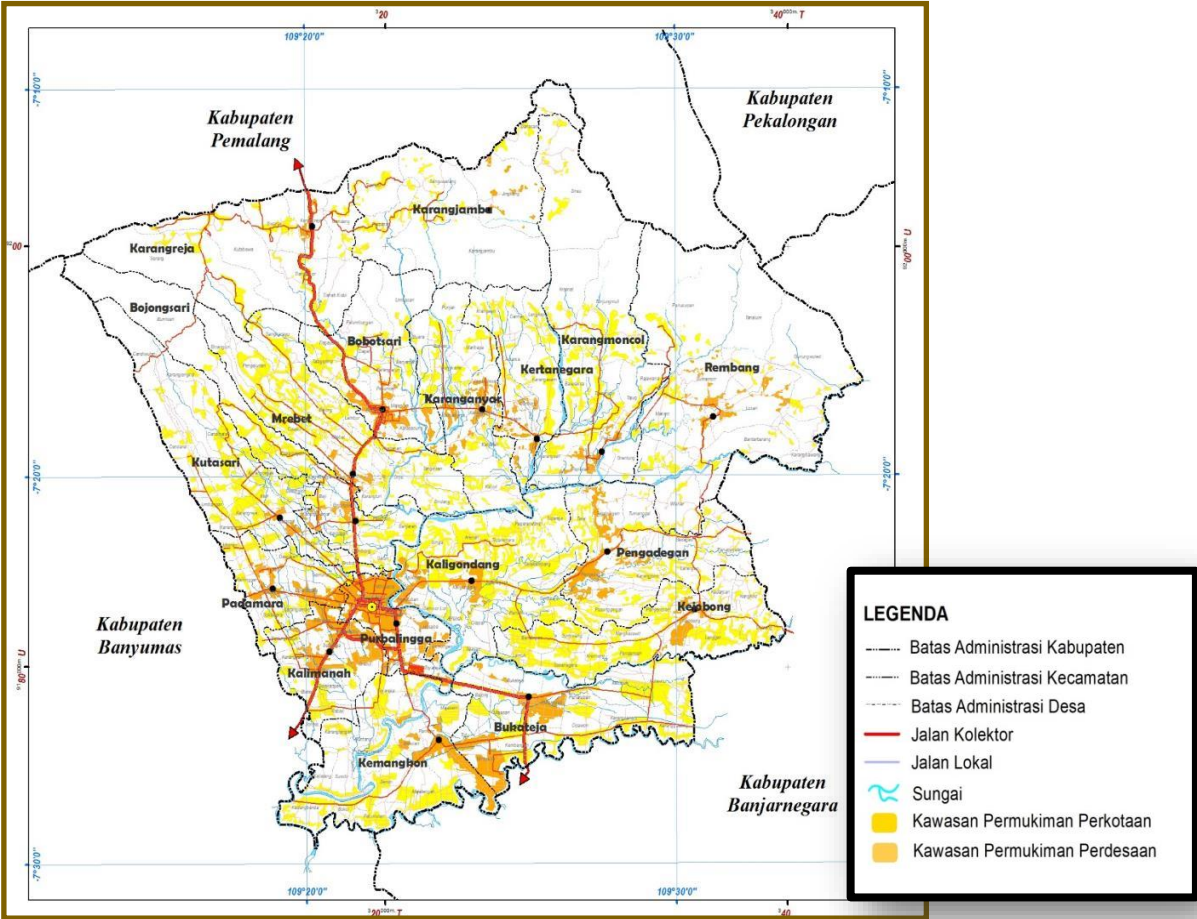
Kebutuhan prasarana suatu kawasan permukiman (jalan, listrik, air, telepon, sistem sanitasi dan drainase dll.) perlu dipersiapkan dengan baik dan seoptimal mungkin sehingga kawasan tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan mempermudah manusia yang beraktivitas di dalamnya dan tetap mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.

Perencanaan fasilitas sektor kegiatan yang akan di sediakan perlu memperhatikan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi atau potensi lokal tiap kota kecamatan, agar penyediaan fasilitas tidak menjadi optimal.

Penataan ruang tiap sektor kegiatan perlu memperhatikan tata letak dan aspek geometris sirkulasi sehingga teratur, efisien dan nyaman, pemberian izin mendirikan bangunan perlu memperhatikan keselarasan fungsi, desain, dan kebutuhan lahan. Sistem permukiman Kabupaten Purbalingga diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Permukiman perdesaan akan menjadi penyeimbang pertumbuhan perkotaan, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara perdesaan dan perkotaan.
- 2) Permukiman perdesaan diarahkan menjadi tempat transformasi fungsi perkotaan kepada kawasan perdesaan dan menjadi pusat distribusi dan koleksi sumber daya yang diperlukan bagi pengembangan wilayah perdesaan.
- 3) Peningkatan penyediaan prasarana dan fasilitas pelayanan untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian dan pelayanan, memperkuat keterkaitan (*linkage*) sehingga terwujud pemerataan pembangunan.

Sedangkan pembangunan perumahan diarahkan agar lebih dapat berbentuk pola-pola kawasan terbangun yang menyebar, tidak terkonsentrasi di sepanjang jalur jalan. Pola permukiman intensif (bangunan bertingkat) perlu dikembangkan untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif. Dengan membentuk pola permukiman dan membentuk kantung-kantung unit lingkungan, akan mempermudah pengembangan struktur pelayanan fasilitas. Dengan demikian pemakaian, perawatan dan pemeliharaan prasarana yang ada dapat lebih efektif dan efisien.



Gambar 2.7.
Peta Rencana Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga

(7) Kawasan Pertahanan dan Keamanan

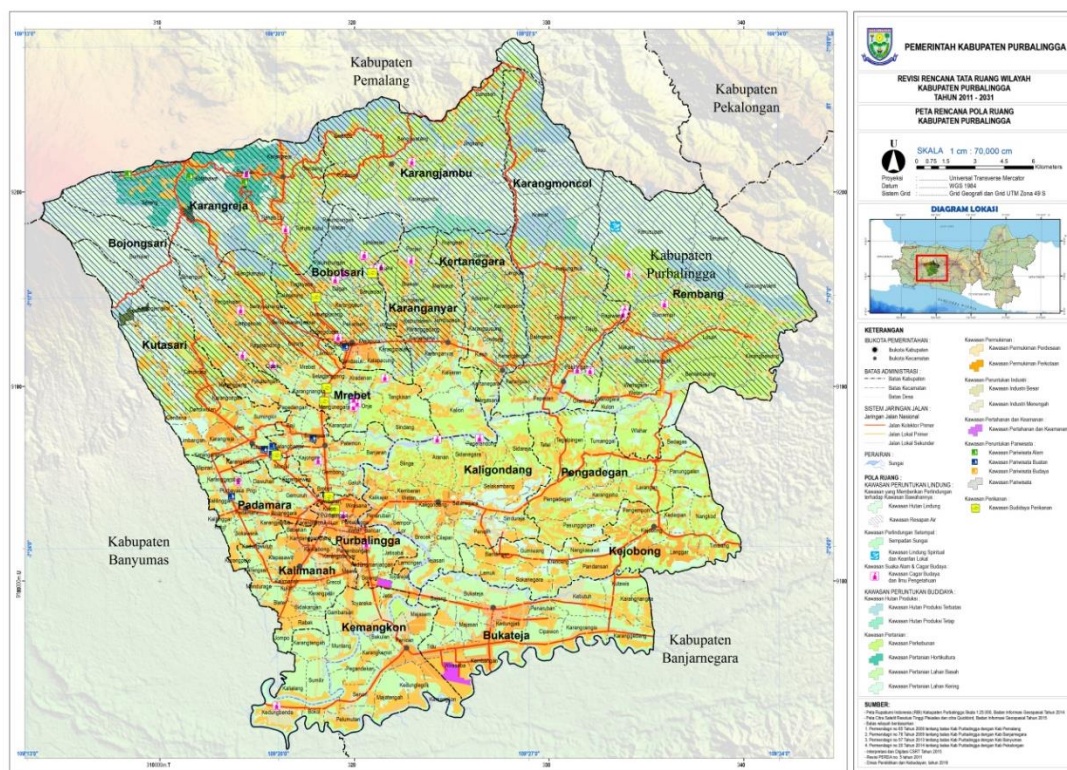
Dalam PP No.68 Tahun 2014 tentang Wilayah Pertahanan ditetapkan oleh Pemerintah untuk memberi jaminan kepastian terhadap keberadaan Wilayah Pertahanan. Wilayah Pertahanan ditetapkan dengan memperhatikan kepentingan daerah dan fungsi pertahanan. Pelaksanaan penataan Wilayah Pertahanan dilakukan secara terintegrasi dengan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Penetapan ini dilakukan untuk menyediakan ruang untuk tempat kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan negara agar dapat menjamin kondisi negara yang kondusif, tempat pelatihan para prajurit dan pasukan hankam sebagai garda depan negara yang khusus dibina untuk menjamin keberlangsungan keamanan dan pertahanan Negara.

Luas kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Purbalingga mencapai 122 ha. Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari:

- a. Komando Distrik Militer (Kodim 0702/Purbalingga) berada di Kecamatan Purbalingga;
- b. Batalyon Infanteri (Yonif 406/Candra Kusuma) berada di Kecamatan Purbalingga
- c. Daerah Latihan Militer berada di Kecamatan Kutasari;
- d. Gudmulap-A 04-23-01 berada di Kecamatan Bojongsari;
- e. Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba Purbalingga berada di Kecamatan Bukateja;
- f. Komando Rayon Militer yang tersebar di wilayah kabupaten.

Perencanaan luas tiap kawasan khusus harus sesuai kebutuhan dan seoptimal mungkin mampu melayani dinamika masyarakat yang terus berkembang. Penempatan kawasan sebaiknya disesuaikan dengan jangkauan pelayanan yang akan ditangani. Hal ini untuk memenuhi kriteria jarak dan kemudahan informasi yang berkembang antara fasilitas dengan permukiman masyarakat.



Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Purbalingga, 2019

Gambar 2.8.
Peta Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Purbalingga

I. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Purbalingga berupa kawasan rawan bencana gerakan tanah dan kawasan rawan bencana letusan gunung api. Pada kawasan-kawasan seperti ini perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana yang ada tersebut.

Ancaman bencana alam yang dianggap memiliki tingkat kerawanan paling tinggi di Wilayah Kabupaten Purbalingga yaitu ancaman letusan Gunung Api Slamet dan gerakan tanah. Gunung Api Slamet merupakan gunung api yang masih aktif. Secara administrasi Gunung Api Slamet berada dalam beberapa wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Pemalang, Banyumas, Brebes, Tegal dan Kabupaten Purbalingga. Sebagian kawasan puncak hingga kaki Gunung Api Slamet berada dalam wilayah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan catatan sejarah letusan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM, pada umumnya letusan Gunung Api Slamet adalah letusan abu disertai lontaran sekoria dan batu pijar, kadang-kadang mengeluarkan lava pijar. Letusannya berlangsung beberapa hari, pada keadaan luar biasa mencapai beberapa minggu. Menurut

PVMBG, sebagian Wilayah Kabupaten Purbalingga masuk dalam kawasan rawan bencana (KRB) Gunung Api Slamet. Beberapa diantaranya desa-desa di Kecamatan Karangreja, Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Kutasari.

Kawasan rawan bencana gerakan tanah merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/bergerak, karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak atau wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Berdasarkan kriterianya, kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Purbalingga merupakan daerah yang rentan terhadap gerakan tanah dan termasuk kawasan gerakan tanah dengan tingkat menengah dan tinggi. Kawasan rawan bencana tanah longsor yang terdapat di Kabupaten Purbalingga, terdiri atas zona kerentanan tingkat menengah yang memiliki kelerengan 30 – 50 %, sedangkan zona tingkat kerentanan tinggi memiliki kelerengan sekitar 50 - 70 % sampai > 70 %. Beberapa diantaranya desa-desa di Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Mrebet.

(1) Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah

Kawasan rawan bencana gerakan tanah merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/bergerak, karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak atau wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Berdasarkan kriterianya, kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Purbalingga merupakan daerah yang rentan terhadap gerakan tanah dan termasuk kawasan gerakan tanah dengan tingkat menengah dan tinggi. Kejadian bencana tanah longsor diakibatkan karena kondisi geomorfologi terutama faktor kemiringan lereng, kondisi batuan maupun tanah penyusun lereng dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Selain itu, adanya aktivitas yang tidak terkendali seperti eksploitasi alam,

Kawasan rawan bencana tanah gerakan tanah/longsor yang terdapat di Kabupaten Purbalingga, terdiri atas zona kerentanan tingkat menengah yang memiliki kelerengan 30 – 50 %, sedangkan zona tingkat kerentanan tinggi memiliki kelerengan sekitar 50 - 70 % sampai > 70 %. Beberapa diantaranya desa-

desa di Kecamatan Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Mrebet.

(2) Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api

Menurut Permen ESDM No 11 Tahun 2016, Kawasan rawan bencana gunungapi adalah kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terancam bahaya erupsi gunungapi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kawasan rawan bencana gunungapi terdiri dari :

- Rawan bencana gunungapi III atau Kawasan Rawan bencana Gunungapi tinggi.
- Rawan bencana gunungapi II atau Kawasan Rawan bencana Gunungapi menengah.
- Rawan bencana gunungapi I atau Kawasan Rawan bencana Gunungapi rendah.

Kawasan rawan bencana gunungapi di Kabupaten Purbalingga sebagian wilayah kabupaten termasuk dalam KRB Gunung Api Slamet. Beberapa diantaranya desa - desa di Kecamatan Karangreja, Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Kutasari.

2.1.1.2 Aspek Demografi

Penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 sebanyak $\pm$ 1.003.246 jiwa yang terdiri dari 508.036 laki-laki (50,63 %) dan 495.210 perempuan (49,36 %). Jumlah tersebut naik 78.053 jiwa dari jumlah penduduk tahun 2018 yang sebanyak $\pm$ 925.193 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar 102,59 menunjukkan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga menurut kecamatan dan jenis kelamin pada tahun 2019 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.5.
Penduduk Kabupaten Purbalingga menurut Kecamatan dan
Jenis Kelamin Tahun 2018 - 2019

No	Kecamatan	2018			2019		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	Kemangkon	27.810	28.948	56.758	32.509	32.174	64.680
2.	Bukateja	35.208	35.924	71.132	39.675	39.241	78.920
3.	Kejobong	22.288	23.631	45.919	25.997	25.521	51.520
4.	Pengadegan	18.776	19.394	38.170	33.394	32.948	41.230
5.	Kaligondang	29.009	31.291	60.300	29.278	29.908	66.340
6.	Purbalingga	29.426	31.093	60.519	28.848	28.328	59.190
7.	Kalimanah	27.023	27.746	54.769	32.784	31.704	57.180
8.	Padamara	21.351	22.393	43.744	39.572	38.485	45.510
9.	Kutasari	29.845	30.150	59.995	27.794	27.272	64.490
10.	Bojongsari	30.471	30.143	60.614	22.993	22.067	62.570
11.	Mrebet	35.231	35.947	71.178	21.055	20.066	78.060
12.	Bobotsari	25.139	25.549	50.688	29.995	28.574	55.070
13.	Karangreja	21.284	21.379	42.663	35.236	33.585	45.060
14.	Karangjambu	12.839	12.627	25.466	31.962	30.603	27.290
15.	Karanganyar	18.289	18.385	36.674	22.902	22.611	41.120
16.	Kertanegara	15.919	16.329	32.248	20.721	20.504	37.650
17.	Karangmoncol	26.488	26.682	53.170	14.122	13.172	58.570
18.	Rembang	30.653	30.533	61.186	19.199	18.447	68.820
	Jumlah	457.049	468.144	925.193	508.036	495.210	1.003.246

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2019, Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2020

Berdasarkan data BPS selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk Purbalingga mengalami peningkatan. dari 0.98 pada tahun 2017 menjadi 1.05 pada tahun 2018 dan 0,95 pada tahun 2019. Sedangkan kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 yaitu 1.290 per km².

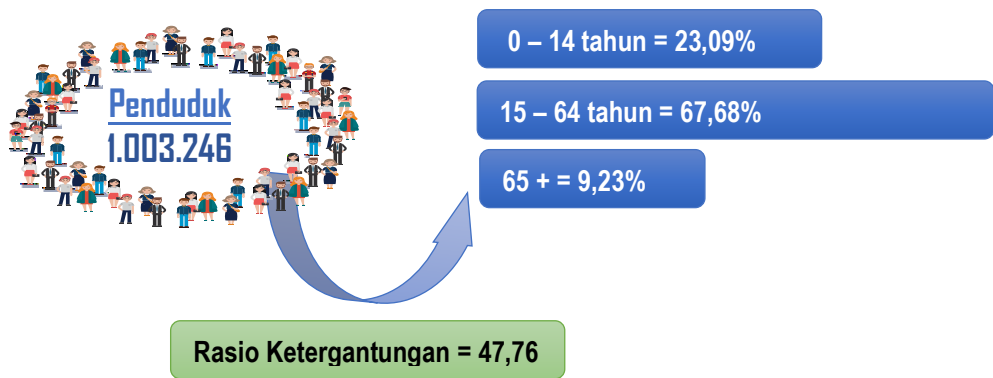
Untuk Angka kelahiran dan kematian (CBR dan CDR) di Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun mengalami pergerakan yang sulit untuk diterka. *Crude Birth Ratio* (CBR) menunjukkan banyaknya kelahiran per 1.000 penduduk ada sekitar 15 kelahiran dalam 1.000 penduduk. Sedangkan *Crude Death Ratio* (CDR) menunjukkan banyaknya 6 kematian per 1.000 penduduk. Pada tahun 2017 angka kelahiran (CBR) berada pada posisi 15.09 sedangkan pada tahun 2018 diangka 14.95%. Sedangkan angka kematian (CDR) pada tahun 2017 sebanyak 6.55 dan pada tahun 2018 sebanyak 6.49.

Tabel 2.6.
Kepadatan Penduduk dan Faktor yang Mempengaruhinya Tahun 2016-2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	1.167	1.178	1.190	1.290
CBR (/1.000 Penduduk)	15.24	15.09	14.95	-
CDR (/1.000 Penduduk)	6.55	6.55	6.49	-
Jumlah Rumah Tangga	227.419	228.973	231.468	-
Rata-rata ART (jiwa/ruta)	4.01	4.00	3.99	-

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2019, Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2020

Perubahan struktur umur penduduk menentukan rasio ketergantungan penduduk. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) dengan penduduk produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi. Pada tahun 2019, persentase penduduk menurut kelompok umur yaitu sebagai berikut.



Sumber : Dindukcapil Kab. Purbalingga. 2020

Gambar 2.9.
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Dari hasil pendataan Tahun 2019 tercatat 23,09 persen adalah kelompok umur anak-anak (0-14 tahun); 67,68 persen adalah kelompok umur produktif (15-

64 tahun); dan 9,23 persen adalah kelompok umur lansia. Dari struktur umur penduduk tersebut dapat dihitung rasio ketergantungan penduduk sebesar 47,76. Hal ini berarti diantara 100 orang penduduk produktif harus menanggung 47 orang penduduk yang tidak produktif. Adapun rincian jumlah penduduk kabupaten purbalingga menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2019 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.7.
Penduduk Kabupaten Purbalingga menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Kelompok Umur	2019		
		L	P	Jumlah
1	0 – 4	36900	34487	71387
2	5 – 9	41668	39010	80678
3	10 – 14	41083	38535	79618
4	15 – 19	32208	31614	63822
5	20 – 24	40435	39050	79485
6	25 – 29	40535	38447	78982
7	30 – 34	38523	36540	75063
8	35 – 39	41363	40479	81842
9	40 – 44	38120	37368	75488
10	45 – 49	34244	33968	68212
11	50 – 54	29415	30819	60234
12	55 – 59	26273	27987	54260
13	60 – 64	20403	21200	41603
14	65-69	17428	16795	34223
15	70-74	11696	12005	23701
16	=>75	17742	16906	34648
	Jumlah	508036	495210	1003246

Sumber : Dindukcapil Kab. Purbalingga. 2020

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi pada saat ini

menggunakan tahun dasar 2010. Persentase PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8.
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2019

	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29.27	28.56	27.50	27.25	26.22
B.	Pertambangan dan Penggalian	5.04	4.85	4.71	4.62	4.54
C.	Industri Pengolahan	25.85	26.55	26.78	26.81	27.24
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10
F.	Konstruksi	5.72	5.74	5.99	6.13	6.24
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.40	12.37	12.55	12.58	12.74
H.	Transportasi dan Pergudangan	3.19	3.13	3.14	3.08	3.19
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.27	2.27	2.27	2.30	2.39
J.	Informasi dan Komunikasi	1.52	1.53	1.70	1.78	1.87
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.19	2.25	2.29	2.28	2.23
L.	Real Estate	1.05	1.05	1.06	1.07	1.06
M.N.	Jasa Perusahaan	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.84	2.83	2.77	2.68	2.63
P.	Jasa Pendidikan	5.52	5.65	5.89	6.01	6.18
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.02	1.04	1.08	1.10	1.12
R.S.T.U.	Jasa lainnya	1.77	1.85	1.92	1.96	2.01
Produk Domestik Regional Bruto		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, 2016-2020

Struktur perekonomian menurut lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga sedikit demi sedikit bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Dimana kategori lapangan usaha Industri di Kabupaten Purbalingga menggeser peranan Pertanian yaitu dengan angka 27.24 %. Sedangkan lapangan usaha pertanian di angka 26.22 %. Peranan terendah terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya memberikan peran sebesar 0.05 %.

Sedangkan Persentase PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9.
Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015- 2019

	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.03	3.05	2.43	4.05	1.54
B.	Pertambangan dan Penggalian	0.55	0.24	1.01	4.80	4.52
C.	Industri Pengolahan	6.01	5.24	5.99	5.13	7.33
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	2.35	3.95	4.63	4.79	5.62
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.62	2.10	6.80	6.73	5.38
F.	Konstruksi	6.39	7.63	9.35	5.82	6.25
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.19	4.91	6.44	5.56	6.50
H.	Transportasi dan Pergudangan	8.37	5.56	6.31	5.08	9.12
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.01	5.79	6.46	8.51	10.06
J.	Informasi dan Komunikasi	8.77	8.35	15.95	12.80	11.65
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.50	8.93	5.27	3.50	3.63
L.	Real Estate	7.52	6.73	6.08	5.92	5.69
M.N.	Jasa Perusahaan	8.34	10.42	9.13	9.77	10.95
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.30	2.39	1.97	3.54	3.74
P.	Jasa Pendidikan	7.56	7.70	7.31	7.80	7.64
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.53	9.70	9.29	8.76	6.99
R.S.T.U.	Jasa lainnya	3.23	8.53	9.25	9.61	9.23
Produk Domestik Regional Bruto		5.47	4.85	5.37	5.42	5.65

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, 2016-2020

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga tahun 2019 mencapai 5.65 % sedikit meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan pertumbuhan 5.42 %. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir pertumbuhan ditahun 2019 adalah yang tertinggi dibanding tahun sebelumnya. Sementara pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 11.65 %. Laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu kategori usaha jasa perusahaan sebesar 10.95 %. Diikuti dengan kategori jasa lainnya sebesar 9.23 %, transportasi dan pergudangan sebesar 9.12 %,jasa pendidikan sebesar 7.64 %, industri pengolahan 7.33 %, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6.99 %, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6.50 %, konstruksi sebesar 6.25 %, real estate sebesar 5.69 %, pengadaan listrik dan gas sebesar 5.62 %, pengadaan air. pengelolaan sampah. limbah dan daur ulang sebesar 5.38 % dan diikuti lapangan usaha yang lain yangmengalami pertumbuhan dibawah 5 %.

B. PDRB Perkapita

PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu. maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2.10.
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Rp.) 2015 – 2019

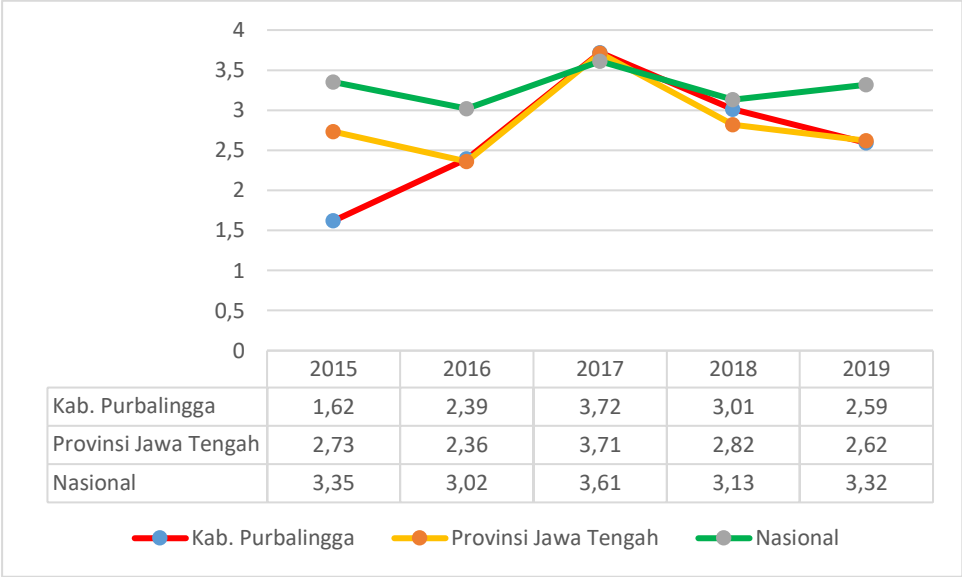
TAHUN	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)		Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)	PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)	PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan PDRB per Kapita
2015	18.426,16	20.509	14.131,61	15.728	5.47
2016	19.984,16	22.021	14.816,43	16.327	4.85
2017	21.430,65	23.395	15.612,29	17.036	5.37
2018	23.190,33	25.062	16.458,71	17.787	5.42
2019	24.190,08	26.680	17.387,94		5.65

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, 2016-2020

Pada tahun 2019 PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 26.680 miliar rupiah. dengan pertumbuhan sebesar 5.65 %. Selama kurun waktu lima tahun pertumbuhan PDRB perkapita terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 5.65 % dan pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2016 sebesar 4.85 %. Jika diperhitungkan dengan harga konstan dari tahun 2015 – 2019 pertumbuhan pendapatan perkapita berada pada kisaran 3 hingga 6 % setiap tahunnya. Hal ini berarti pada kenyataannya masyarakat Purbalingga dalam kurun waktu empat tahun terakhir pendapatannya meningkat rata-rata kurang dari 5 % setiap tahun. Berbeda pada perhitungan atas dasar harga berlaku yang memperhatikan adanya perubahan harga (inflasi). rata-rata setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir pendapatan perkapita bertambah sekitar 6 hingga 9 %.

C. Laju Inflasi

Perkembangan inflasi tahun kalender setiap tahunnya tren perubahan yang terjadi di Purbalingga, Jawa Tengah serta nasional menunjukkan pola yang hampir sama. Pada tahun 2018 inflasi Kabupaten Purbalingga berada pada 3.01 persen diatas inflasi provinsi dan nasional yang masing-masing sebesar 2.82 dan 3.13 persen. Sedangkan inflasi Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar 2.59 persen. sedikit lebih rendah dari inflasi provinsi sebesar 2.62 persen dan lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3.32 persen.



Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2016-2020

Gambar 2.10.
Laju Inflasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

D. Penduduk Miskin dan IPM

1. Penduduk Miskin

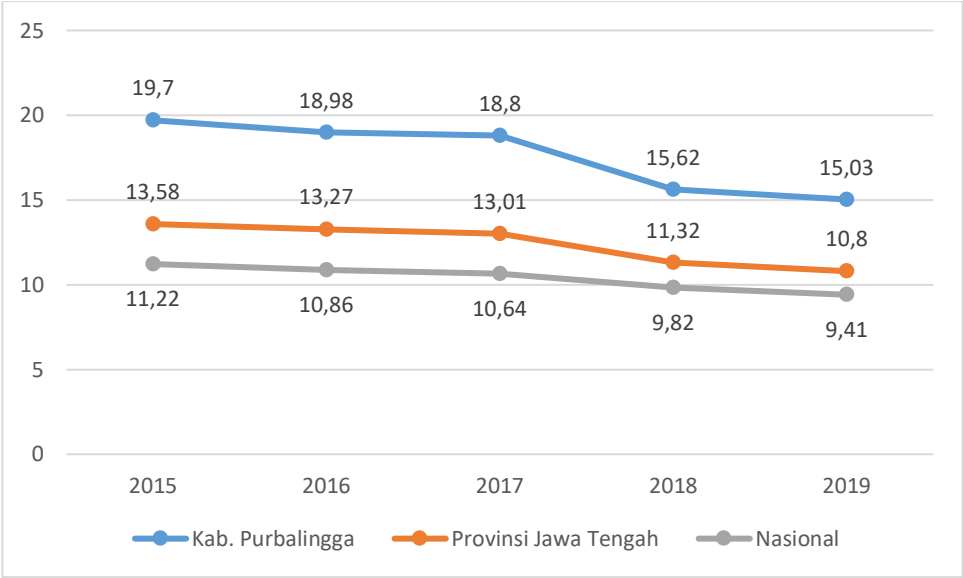
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 sebesar 15.03 persen menurun dari tahun 2017 sebesar 15.62 persen walaupun masih lebih tinggi dari Jawa Tengah sebesar 10.80 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 tercatat sekitar 140.10 (ribu orang) dengan garis kemiskinan sebesar 355.702 rupiah perkapita perbulan. Dibanding tahun 2018 jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.59 persen atau sebesar 4.09 ribu orang.

Tabel 2.11.
Karakteristik Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga 2015-2019

Karakteristik Kemiskinan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penduduk miskin (ribu orang)	176.49	171.78	171.88	144.16	140.10
Persentase penduduk miskin (P0)	19.70	18.98	18.80	15.62	15.03
Garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	283.366	301.862	313.343	324.735	355.702
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3.37	3.85	2.79	2.79	2.24
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.85	1.20	0.68	0.74	0.47

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga. 2016-2020

Baik Indeks Kedalaman Kemiskinan maupun Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2019 (2.24 dan 0.47) mengalami perbaikan di banding tahun 2018 (2.79 dan 0.74). Penurunan nilai indeks tersebut mengindikasikan bahwa semakin mendekatnya rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan semakin berkurangnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Adapun kinerja penurunan persentase penduduk miskin tahun 2015 sampai dengan 2019 di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, 2016-2020

Gambar 2. 11.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penurunan kemiskinan Kabupaten Purbalingga cukup signifikan namun demikian pencapaian angka tersebut masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kinerja pembangunan manusia Kabupaten Purbalingga tercermin pada angka IPM. Selama lima tahun terakhir IPM Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 67.03 di tahun 2015 menjadi 68.99 pada tahun 2019. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. IPM Purbalingga pada rentang 60 hingga 70 yang artinya berada pada klasifikasi sedang. Meskipun begitu IPM Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2015-2019. Perkembangan IPM Kabupaten Purbalingga dan kabupaten sekitarnya dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini :

Tabel 2.12.
Nilai IPM Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya
Tahun 2015-2019

Kabupaten	Nilai IPM				
	2015	2016	2017	2018	2019
Cilacap	67.77	68.60	68.90	69.56	69.98
Banyumas	69.89	70.49	70.75	71.30	71.96
Purbalingga	67.03	67.48	67.72	68.41	68.99
Banjarnegara	64.73	65.52	65.86	66.54	67.34
Kebumen	66.87	67.41	68.29	68.80	69.60
Jawa Tengah	69.49	69.98	70.52	71.12	71.92

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga. 2016-2020

Nilai IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2019 tercatat 68.99. Walaupun nilai ini masih dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 71.92. Bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar IPM Kabupaten Purbalingga masih berada diatas Kabupaten Banjarnegara tetapi masih dibawah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap.

Perkembangan indikator komposit IPM Kabupaten Purbalingga secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini:

Tabel 2.13.
Komponen IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

Komponen IPM	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup (tahun)	72.81	72.86	72.91	72.98	73.02
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11.78	11.93	11.94	11.95	11.98
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6.85	6.86	6.87	7.00	7.14
Pengeluaran perkapita disesuaikan : 96 komoditas (ribu rupiah PPP)	8.938	9.159	9.340	9.786	10.131

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga. 2016-2020

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa angka harapan hidup Kabupaten Purbalingga terus mengalami kenaikan dari 72.81 pada tahun 2015 menjadi 72.86 pada tahun 2016 dan terus meningkat lagi hingga menjadi 73.02 pada tahun 2019. Ini berarti bahwa bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 73.02 tahun.

Sedangkan untuk bidang pendidikan diukur dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Untuk harapan lama sekolah ada peningkatan dari 11.78 pada tahun 2015 menjadi 11.93 pada tahun 2016 dan terus naik pada tahun 2019

menjadi 11.98. Rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai sekolah diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 11.98 tahun atau setara dengan SLTA.

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Purbalingga tahun 2015 adalah 6.85 tahun naik menjadi 6.86 pada tahun 2016 dan naik lagi menjadi 7.14 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan rata-rata penduduk Kabupaten Purbalingga usia 25 tahun ke atas telah menempuh 7.14 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan pendidikan setara kelas VII (kelas 1 SMP).

Sementara itu besarnya paritas daya beli penduduk Kabupaten Purbalingga dihitung berdasarkan pengeluaran perkapita 96 komoditas. Tahun 2015 tercatat sebesar 8.938 ribu rupiah, terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2019 tercatat sebesar 10.131 ribu rupiah.

Keberhasilan dalam pembangunan manusia tidak dapat langsung dilihat dari besaran angka IPM pada saat ini, tetapi dapat dilihat dari besaran kenaikannya. Untuk mempercepat peningkatan IPM perlu dilihat setiap komponennya dan diketahui makna dari datanya.

E. Angka Melek Huruf

Melek Huruf adalah kondisi dimana orang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab/hijaiyah atau huruf lainnya (contoh huruf jawa, kanji). Yang dimaksud kalimat sederhana adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan setidaknya mengandung subyek dan predikat.

Angka Melek Huruf menunjukkan persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis. Kondisi ini berkebalikan dengan angka buta huruf. Semakin tinggi angka melek huruf maka semakin rendah angka buta hurufnya.

Salah satu keberhasilan pendidikan adalah menurunnya angka buta huruf atau tingkat buta huruf. Tingkat buta huruf merupakan bagian dari indikator kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Kemampuan baca tulis merupakan pengetahuan minimum yang dibutuhkan untuk mencapai hidup sejahtera.

Tabel 2.14.
Persentase Angka Melek Huruf Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 - 2019

Angka Melek Huruf	2016	2017	2018	2019
Laki-laki	96.28	95.80	97.67	
Perempuan	94.09	92.13	92.30	
Total	95.16	93.93	94.92	99.11

Sumber : Susenas 2018, Dindikbud Kab. Purbalingga, 2019

Tercatat pada tahun 2018 persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang melek huruf sebanyak 94.92 %. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki yang melek huruf persentasenya lebih tinggi dengan persentase sebesar 97.67 %. Adapun untuk penduduk perempuan angka melek hurufnya mencapai 92.30 %. Selama tiga tahun terakhir Angka Melek Huruf (AMH) laki-laki selalu lebih tinggi dari pada perempuan. Sedangkan pada tahun 2019 persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang melek huruf sebanyak 99.11 % atau sebanyak 749.984 orang jumlah penduduk melek huruf usia 15 tahun ke atas.

F. Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk melalui partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu : tidak/belum pernah bersekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi.

Tabel 2.15.
Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah dan Karakteristik Demografi Kabupaten Purbalingga Tahun 2018

Karakteristik Demografi	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	4.08	21.67	74.25
Jenis Kelamin			
Laki-laki	3.23	22.21	74.56
Perempuan	4.89	21.16	73.95
Kelompok Umur			
7 – 12	0.43	99.57	-
13 – 15	-	94.24	5.76
16 – 18	-	59.45	40.55
19 – 24	-	10.04	89.96
7 – 24	0.15	64.76	35.09

Sumber : Susenas 2018

Hasil Susenas tahun 2018 menunjukkan bahwa penduduk umur 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah sebesar 4.08 persen. penduduk yang masih bersekolah sebesar 21.67 persen. dan yang tidak bersekolah lagi sebesar 74.25 persen.

Penduduk umur 7-24 tahun merupakan rentang umur sekolah sehingga hendaknya mereka yang berada pada kelompok umur ini masih aktif dalam pendidikan di bangku sekolah. Pada tabel 12.1 menunjukkan penduduk dengan kelompok umur 7-24 tahun yang masih bersekolah sebesar 64.76 persen. Hal ini berarti enam dari sepuluh penduduk dengan kelompok umur 7-24 masih bersekolah sedangkan sisanya tidak/belum pernah bersekolah dan tidak bersekolah lagi. Hal ini wajar terjadi karena mereka yang berpartisipasi aktif untuk mengenyam pendidikan terkonsentrasi pada kelompok umur sekolah 7-24 tahun. Disisi lain. masih terdapat penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah pada rentang umur 7-24 tahun sebesar 0.15 persen. Hal ini yang harus kita cermati apakah penyebab masih adanya penduduk usia sekolah yang tidak/belum pernah sekolah. Apakah karena adanya gangguan disabilitas. ekonomi atau karena alasan lain.

Bila dilihat lebih detail lagi semakin tinggi kelompok umur sekolah. maka akan semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Penduduk Kabupaten Purbalingga yang masih bersekolah pada kelompok umur 7 – 12 tahun tercatat 99.57 persen. kelompok umur 13 – 15 tahun tercatat 94.24 persen, kelompok umur 16 – 18 tahun tercatat 59.45 persen dan kelompok umur 19 – 24 tahun tercatat 10.04 persen. Alasan ekonomi diperkirakan menjadi alasan utama masih rendahnya partisipasi sekolah pada kelompok umur ini.

Persentase terbesar penduduk yang masih bersekolah terdapat pada kelompok umur 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun (yaitu kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan Sekolah Dasar sederajat dan Sekolah Menengah Pertama sederajat. Tingginya persentase ini menunjukkan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan Pemerintah telah cukup berhasil. Sedangkan partisipasi sekolah kelompok umur yang bersesuaian dengan perguruan tinggi masih cukup rendah yaitu hanya sebesar 10.04 persen.

G. Keluhan Kesehatan Dan Angka Kesakitan

Keadaan kesehatan penduduk pada suatu saat tertentu dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang status kesehatan penduduk pada umumnya. Tingkat kesehatan masyarakat dapat diketahui dengan melihat persentase keluhan kesehatan yang dialami penduduk pada satu bulan sebelum pencacahan. Jika seseorang mengalami dua keluhan pada saat yang bersamaan maka akan dihitung satu untuk masing-masing keluhan.

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan. baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas. pilek. diare. pusing. sakit kepala. maupun karena penyakit akut. penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan). kecelakaan. kriminalitas atau keluhan lainnya.

Hasil Susenas 2018 menunjukkan 36.29 persen penduduk di Kabupaten Purbalingga mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Jika dilihat menurut jenis kelamin. penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki (37.77 persen berbanding 34.76 persen).

Tabel 2.16.
Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2018

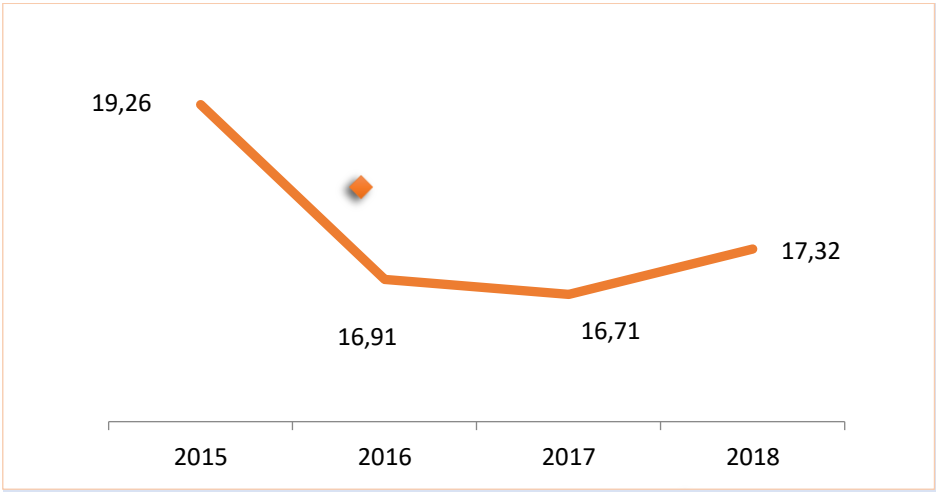
Jenis Kelamin	Mengalami Keluhan Kesehatan	Angka Kesakitan
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	34.76	16.83
Perempuan	37.77	17.81
Total	36.29	17.32

Sumber : Susenas.2018

Seseorang dikatakan sakit jika keluhan kesehatan yang dialami menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara normal sebagaimana biasanya. Persentase penduduk yang sakit disebut angka kesakitan. Pada table 2.15 terlihat bahwa persentase penduduk yang sakit (angka kesakitan) mencapai 17.32 persen. Berdasarkan jenis kelamin. angka kesakitan penduduk perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki (17.81 persen berbanding 16.83 persen).

Bila dikaitkan antara keluhan kesehatan dan angka kesakitan, dapat dijelaskan bahwa dari 36.29 persen penduduk di kabupaten Purbalingga yang mengalami keluhan kesehatan terdapat 17.32 persen yang sakit. Artinya, dapat dikatakan dari 100 penduduk di kabupaten Purbalingga, 36 orang diantaranya mengalami keluhan kesehatan dan 17 orang diantaranya mengalami sakit dalam sebulan terakhir.

Dalam empat tahun terakhir, angka kesakitan penduduk Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada gambar di bawah angka kesakitan tahun 2018 mengalami kenaikan 0.61 persen dari tahun 2017 dan 0.41 persen dari tahun 2016. Meskipun kenaikannya masih relatif kecil, namun hal ini mengisyaratkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Purbalingga selama dua tahun terakhir mengalami penurunan. Namun, keadaan kesehatan penduduk Purbalingga pada tahun 2018 masih lebih baik dari pada tahun 2015.



Sumber : Susenas.2018

Gambar 2.12.
Angka Kesakitan Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2018

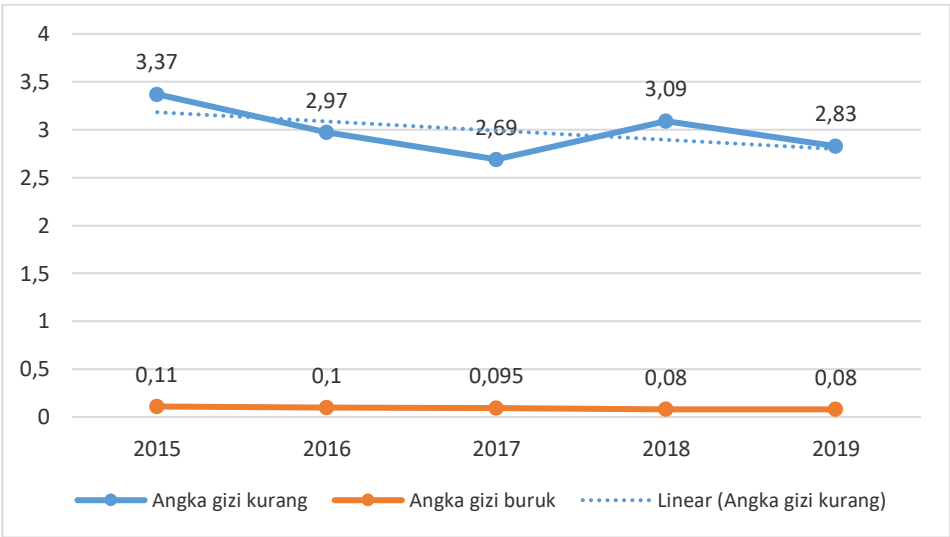
H. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Masalah gizi yang belum selesai di Kabupaten Purbalingga adalah masalah gizi kurang dan pendek (stunting).

Salah satu cara penilaian status gizi balita adalah dengan pengukuran antropometri yang menggunakan indeks Berat Badan dan Tinggi Badan (BB/TB). Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2015-

2019 cenderung mengalami penurunan dari 0.11 pada tahun 2015 turun menjadi 0.08 pada tahun 2019.

Sedangkan prevalensi balita gizi buruk cenderung fluktuatif, pada tahun 2015 sebesar 3.37 menurun menjadi 2.68 pada tahun 2017, naik menjadi 3.09 pada tahun 2018 dan kembali mengalami kenaikan sebesar 2.83 pada tahun 2019. Pada tahun 2019 terdapat kasus gizi buruk sebanyak 56 kasus dan semuanya telah mendapatkan penanganan. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menangani adanya gizi buruk diantaranya melalui pemberian makanan tambahan dan perawatan kepada balita gizi buruk.



Sumber: Dinkes Kabupaten Purbalingga, 2019

Gambar 2.13.
Tren Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Tahun 2015 – 2019

Stunting atau penurunan tingkat pertumbuhan pada manusia utamanya disebabkan oleh kekurangan gizi. Lebih jauh lagi, kekurangan gizi ini disebabkan oleh rusaknya mukosa usus oleh bakteri fecal yang mengakibatkan terjadinya gangguan absorpsi zat gizi. Hasil Riskesdas 2019 menunjukkan, peningkatan cakupan sanitasi dan perilaku hygiene sebesar 99% dapat membantu menurunkan insiden diare sebesar 30% dan menurunkan prevalensi stunting sebesar 2.4%. Pada tahun 2013 kasus stunting di Purbalingga masih mencapai 36.7 persen. Turun di tahun 2016 menjadi sekitar 28 persen. Sedangkan 2017-2018 turun menjadi 26.4 persen.

I. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Secara umum perkembangan pemberdayaan gender pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan yaitu dari sebesar 72.08 menjadi 75.51 pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin menuju ke arah yang lebih baik terlihat semakin meningkatnya kesetaraan peran gender.

Tabel 2.17.
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

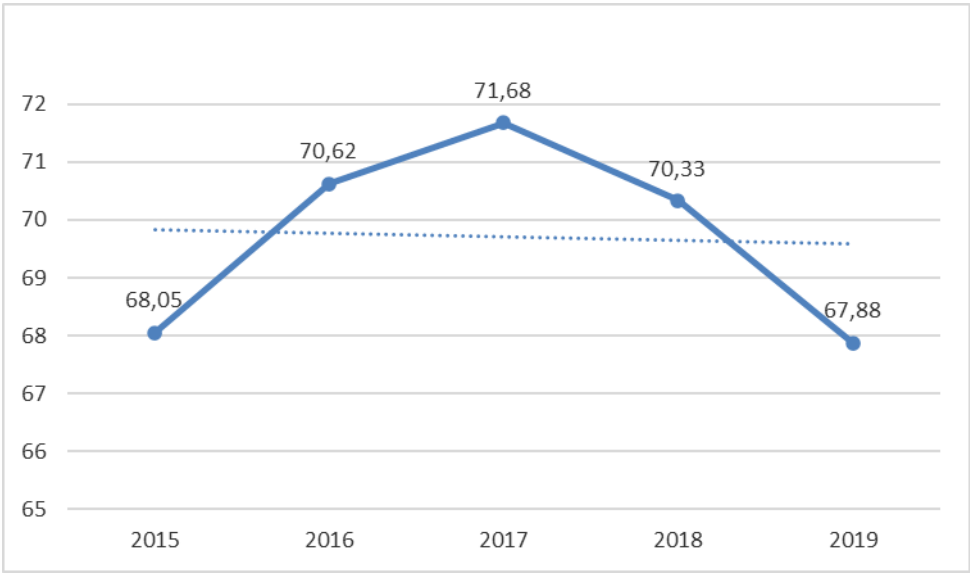
Wilayah Jateng	Indeks Pemberdayaan Gender				
	2015	2016	2017	2018	2019
PROVINSI JAWA TENGAH	74.80	74.89	75.10	74.03	74.03
CILACAP	63.53	63.53	62.52	62.11	62.11
BANYUMAS	67.37	67.37	67.32	68.11	68.11
PURBALINGGA	72.08	72.08	73.11	75.51	75.51
BANJARNEGARA	65.72	65.72	66.44	65.12	65.12

Sumber : DinsosdaldukP3A Kab. Purbalingga, 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Angka Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Purbalingga tahun 2019 lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten di Eks Karesidenan Banyumas bahkan Provinsi Jawa Tengah.

J. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purbalingga dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu cenderung mengalami kenaikan. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. begitu pula sebaliknya. Pada tahun 2017 TPAK Purbalingga sebesar 71.68 ini berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas tersedia 71 orang yang siap bekerja.Dan untuk tahun 2018 cenderung mengalami penurunan dari pada tahun 2017 menjadi 68.56 berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas tersedia 68 orang yang siap bekerja. Demikian pula pada tahun 2019 menurun lagi pada angka 67.88. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagaimana dalam grafik berikut ini.



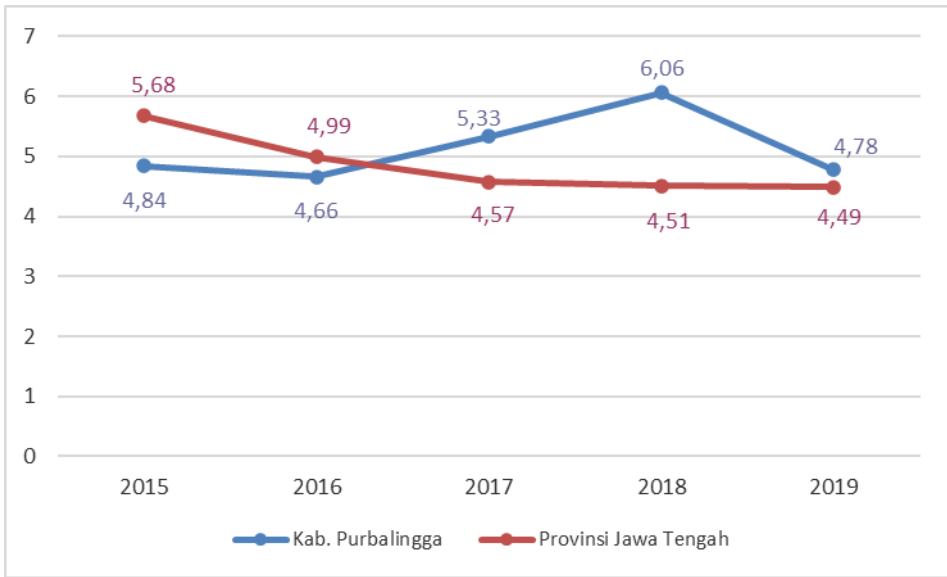
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2016-2020

Gambar 2.14.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 -2019

K. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian selain angka kemiskinan.

Tingkat pengangguran secara tidak langsung dapat memberikan gambaran sesungguhnya mengenai kesehatan ekonomi suatu negara, karena tingkat pengangguran merupakan persentase individu yang ingin bekerja dan belum memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 4.84 mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 4.66 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 5.33 serta pada tahun 2018 sebesar 6.06. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4.78.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2016-2020

Gambar 2.15.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Purbalingga
Tahun 2015-2019

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah penduduk adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka ini dihitung berdasarkan perbandingan antara anak yang sekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibagi dengan penduduk umur yang seharusnya anak duduk pada tingkat pendidikan tertentu. APK Kabupaten Purbalingga menurut tingkat pendidikan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18.
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI	118.77	112.87	104.69	110.88	120.37
SMP/MTs	85.08	90.74	92.69	92.87	139.47

Sumber :Dindikbud Kab. Purbalingga, 2020

Pada kurun waktu lima tahun terakhir APK SD mengalami penurunan dari 118.77 pada tahun 2015 menurun menjadi 112.87 pada tahun 2016 dan menurun menjadi 104.69 pada tahun 2017. Sementara itu pada tahun 2018 dan 2019 meningkat menjadi 110.88 dan 120.37. APK SD berada diatas 100 persen yang artinya jumlah penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SD lebih besar dibandingkan jumlah penduduk kelompok umur 7-12 tahun. Hal ini disebabkan adanya siswa yang berumur di atas 12 tahun tetapi saat ini masih bersekolah di tingkat SD dikarenakan kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Selain itu, juga adanya siswa yang lebih muda dibanding umur standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah diumur yang lebih muda (kurang dari 7 tahun). Ditambah lagi adanya siswa dari kabupaten tetangga yang bersekolah di Kabupaten Purbalingga sehingga menambah jumlah penduduk yang sedang bersekolah.

Untuk APK SMP selama empat tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan yaitu dari 85.08 pada tahun 2015 menjadi 90.74 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 92.69 serta pada tahun 2018 menjadi 92.87 dan pada tahun 2019 menjadi 139.47.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Ukuran lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah penduduk adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM menunjukkan proporsi anak sekolah di suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka ini dihitung dengan perbandingan antara jumlah siswa umur tertentu pada pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok umur pendidikan yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Purbalingga dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.19.
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)				
	2015	2016	2017	2018	2019
SD	98.06	97.01	95.51	95.15	105.70
SMP	79.50	75.80	78.91	78.23	102.51

Sumber : Dindikbud Kab. Purbalingga, 2020

Pada tabel di atas terlihat bahwa APM Kabupaten Purbalingga tahun 2019 untuk tingkat Sekolah Dasar adalah 105.70 dan untuk SMP adalah 139.47. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa untuk APM SD menunjukkan bahwa sebanyak 105.70 persen penduduk usia 7-12 tahun yang saat ini sedang bersekolah di SD. Hal ini menandakan bahwa penduduk Kabupaten Purbalingga sudah tepat waktu dalam menyekolahkan anak-anaknya ke SD setelah anak berumur 7 tahun. APM SMP sebesar 102.51 artinya ada sebanyak 73.19 persen penduduk usia 13-15 tahun yang saat ini sedang sekolah di SMP.

c. Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang Pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah.

Sejalannya dengan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan dasar tingkat SD/MI.dan SMP/MTs sedikit mengalami perubahan. Pada jenjang SD/MI pada tahun 2018 tersedia SD / MI sebanyak 650 unit dan pada tahun 2019 menjadi berjumlah 649 unit. Sedangkan pada jenjang SMP / MTs pada tahun 2015 terdapat 115 unit sekolah pada tahun 2019 menjadi 117 unit sekolah karena terdapat pendirian beberapa sekolah baru.

Tabel 2.20.
Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah
Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Purbalingga
Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah SD/MI	644	647	650	650	649
2	Jumlah SMP/MTs	115	114	117	117	117
3	Jumlah penduduk usia 7 s.d 12 th	91.247	91.247	91.401	93.445	99.530
4	Jumlah penduduk usia 13 s.d 15 th	44.510	44.510	44.202	45.899	43.824

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. 2019

Berdasarkan data rasio ketersediaan sekolah SD/MI per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 rasio

ketersediaan sekolah sebesar 69.56 dan pada tahun 2019 rasio tersebut sedikit mengalami penurunan menjadi 65.21. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rasio ketersediaan SD/MI di Kabupaten Purbalingga cukup memadai. Untuk SMP/MTs dalam kurun waktu 2015 – 2018 mengalami peningkatan dari 25.29 menjadi 26.70 per 10.000 siswa. Data rasio ketersediaan sekolah selengkapnya tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.21.
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio SD/MI per 10.000 penduduk Usia 7-12 tahun	70.23	70.91	71.11	69.56	65.21
2	Rasio SMP/MTs per 10.000 penduduk Usia 13-15 tahun	25.29	25.61	26.47	25.49	26.70

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. 2019

d. Rasio Guru terhadap Siswa

Rasio guru terhadap siswa adalah jumlah guru per 10.000 jumlah siswa berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah pendidik dan jumlah ideal siswa untuk satu guru agar tercapai proses pembelajaran yang berkualitas.

Pada periode waktu tahun 2015-2019 rasio guru terhadap siswa SD/MI di Kabupaten Purbalingga meningkat dari 6.38 menjadi 6.50 yang menggambarkan ketersediaan guru telah relatif memenuhi kondisi ideal. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs tahun 2019 rasio guru dan siswa sebesar 5.83. Secara lebih lengkap jumlah guru dan siswa pada jenjang pendidikan dasar Kabupaten Purbalingga tahun 2015 - 2019 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.22.
Guru dan Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Purbalingga
Tahun 2015-2019

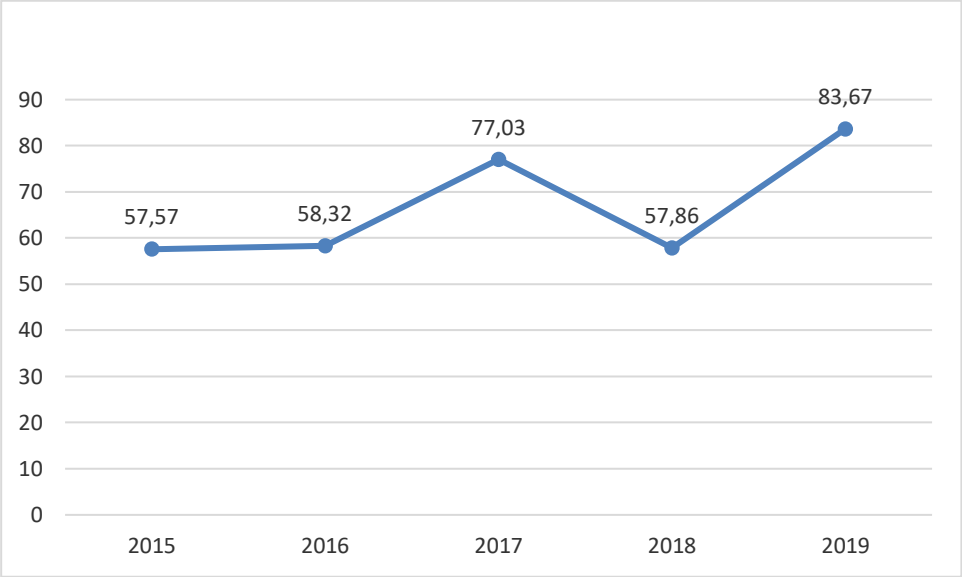
No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
I	SD/MI					
	Jumlah guru	5.868	5.839	5.291	6.309	6.435
	Jumlah siswa	91.990	91.247	99.292	99.997	98.929
	Rasio	6.38	6.40	5.33	6.31	6.50
II	SMP/MTs					
	Jumlah guru	2.436	2.416	2.263	2.511	2.511
	Jumlah siswa	45.381	44.672	44.487	44.724	43.047
	Rasio	5.37	5.41	5.09	5.61	5.83

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. 2019

e. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran strategis dalam mempersiapkan anak-anak Indonesia. menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. PAUD mempersiapkan pendidikan anak sejak dini sehingga tumbuh kembang anak dan perkembangan emosional dan juga psikomotorik anak menjadi tarpantau dan terbina. PAUD mendidik anak menjadi insan yang berkualitas di kemudian hari.

Keberhasilan kinerja program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diukur melalui Indikator Angka Partisipasi Kasar. Capaian APK PAUD Kabupaten Purbalingga tahun 2015 – 2019 fluktuatif. namun cenderung meningkat. Pada tahun 2015 capaian APK PAUD sebesar 57.57 persen dan meningkat menjadi 58.32 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 77.03 dan pada tahun 2018 menjadi 57.86. Pada tahun 2019 ini capaian APK PAUD mencapai 83.67 persen. Secara rinci APK PAUD di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. 2019

Gambar 2.16.
Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten Purbalingga
Tahun 2015 – 2019

f. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar pada tahun 2015–2019 mengalami fluktuasi. Pada jenjang SD/MI tahun 2015 sebesar 0.24 persen dan menurun menjadi 0.07 persen pada tahun 2018, namun kemudian naik menjadi 0.74 karena ada tambahan dari siswa MI yang terhitung di dalamnya.

Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs angka putus sekolah pada tahun 2015 sebesar 0.61 persen terus menurun menjadi 0.46 persen pada tahun 2018, namun kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 0.80 karena ada tambahan dari siswa MTs yang terhitung di dalamnya sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.23.
Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2019

No	Jenjang	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI/SDLB	0.24	0.32	0.03	0.07	0.74
2	SMP/MTs/SMPLB	0.61	0.44	0.48	0.46	0.80

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. 2019

g. **Angka Kelulusan**

Angka kelulusan menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian Angka Kelulusan jenjang pendidikan dasar pada tahun 2015 – 2019 mengalami trend yang membaik.

Tabel 2.24.
Angka Kelulusan Pendidikan Dasar
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2019

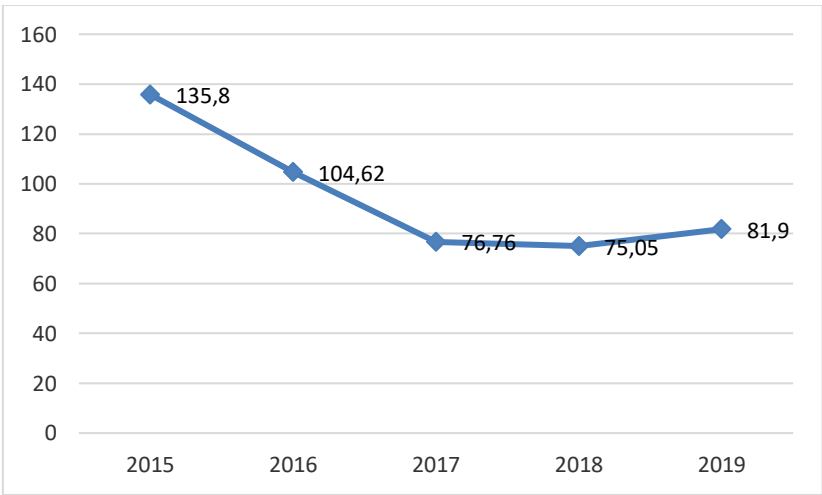
No	Jenjang	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI/SDLB	99.99	99.70	100	100	99.99
2	SMP/MTs/SMPLB	99.75	99.45	99.72	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2019

2. **Kesehatan**

a. **Kasus/ Angka Kematian Ibu (AKI)**

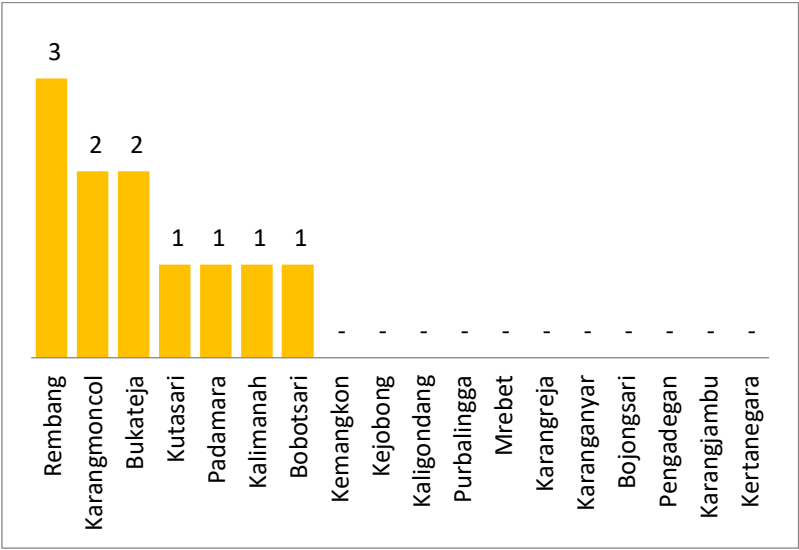
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Purbalingga terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 angka kematian ibu sebesar 135.80 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2018 menurun drastis menjadi 75.05 per 100.000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2019 naik menjadi 81.9 per 100.000. Rata-rata kematian ibu disebabkan oleh kasus pendarahan dan eklamsia. Secara lebih jelas grafik angka kematian ibu di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagaimana dalam grafik berikut ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga, 2019

Gambar 2.17.
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Purbalingga
Tahun 2015 – 2019

Kasus kematian Ibu tertinggi pada tahun 2019 terdapat di Puskesmas Rembang dengan 3 kasus kematian dan di Puskesmas Karangmoncol dan Bukateja masing – masing dengan 2 kasus kematian. Sedangkan di Puskesmas Kutasari, Padamara, Kalimanah dan Bobotsari masing-masing 1 kasus, dan untuk Puskesmas lainnya sebanyak 0 kasus atau tidak ada kasus kematian. Grafik kasus kematian ibu di Puskesmas wilayah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam grafik berikut ini.



Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2019

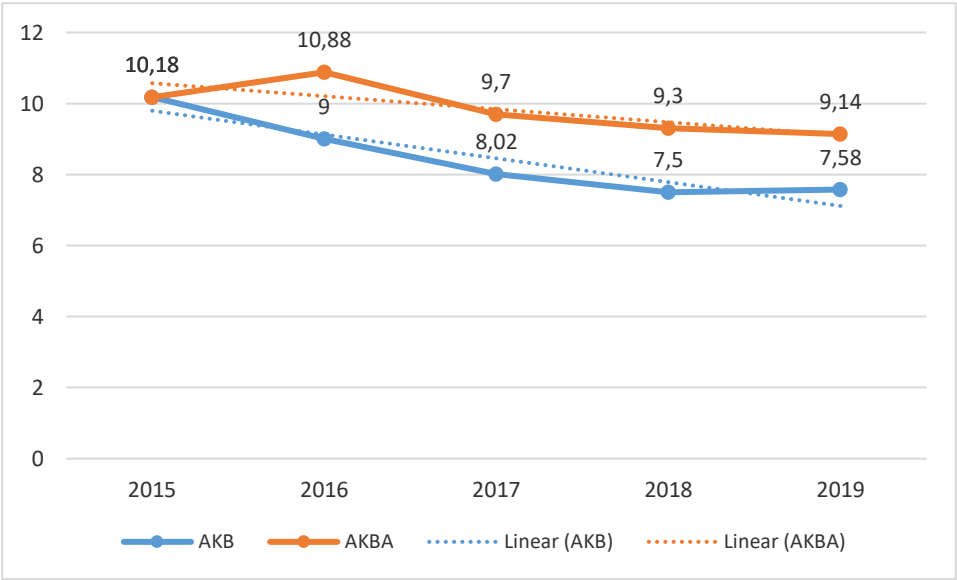
Gambar 2.18.
Jumlah Kematian Ibu menurut Puskesmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

b. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA)

Perkembangan AKB di Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2015 – 2019 terus mengalami fluktuasi. AKB di Kabupaten Purbalingga tahun 2015 sebesar 10.18 per 1.000 kelahiran hidup dan angka ini mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2018 menjadi sebanyak 7.50 per 1.000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 7.58 per 1.000 kelahiran hidup. Angka tersebut mengalami sedikit kenaikan disebabkan antara lain kehamilan resiko tinggi, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil sehingga menyebabkan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) maupun kelainan *kongental*, asfiksia, premature, sepsis, ikterius dan lain-lain.

Sedangkan Angka Kematian Balita (AKBA) mengalami perkembangan dan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2015 capaian AKBA sebesar 10.18 per 1.000 kelahiran hidup dan menurun pada tahun 2019 menjadi 9.14 per 1.000 kelahiran

hidup. Tren Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Purbalingga sebagaimana gambar di bawah ini.



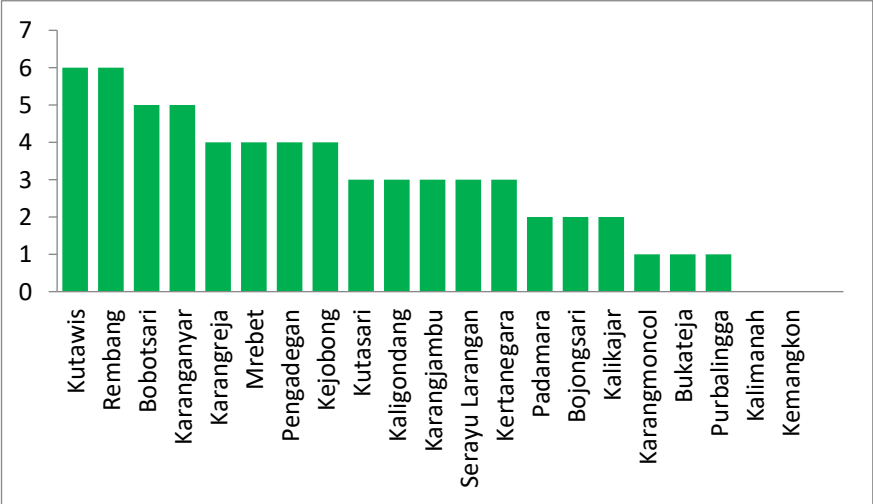
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga, 2019

Gambar 2.19.
Tren Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Tahun 2015 – 2019

c. Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal (AKN) merupakan jumlah kematian bayi umur kurang dari 28 hari (0-28 hari) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKN menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk *antenatal care*, pertolongan persalinan dan *postnatal* ibu hamil. Semakin tinggi angka kematian neonatal berarti semakin rendah tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Angka Kematian Neonatal Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar 4.16 (61 kasus) per 1.000 kelahiran hidup dan dibandingkan dengan tahun 2018 Angka Kematian Neonatal mengalami penurunan dari 5.19 (76 kasus) per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian neonatal tertinggi terdapat di Puskesmas Kutawis dan Rembang sebanyak 6 kasus. Disamping itu juga terdapat di Puskesmas Bobotsari dan Karanganyar masing-masing sebanyak 5 kasus, serta Puskesmas Karangreja, Mrebet, Pengadegan dan Kejobong yaitu masing-masing sebanyak 4 kasus. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2019

Gambar 2.20.
Sebaran Kematian Neonatal menurut Puskesmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

d. Angka Kesakitan dan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan

Keadaan kesehatan penduduk pada suatu saat dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang status kesehatan penduduk pada umumnya. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan, status kesehatan memberikan pengaruh pada tingkat produktivitas. Untuk mengetahui tingkat kesehatan masyarakat dengan melihat persentase keluhan kesehatan yang dialami penduduk pada satu bulan sebelum pencacahan atau angka kesakitan. Untuk seseorang yang mengalami dua keluhan pada saat yang bersamaan dihitung satu untuk masing-masing keluhan. Pada tahun 2018, penduduk dengan keluhan kesehatan sebesar 36.29 persen. Apabila dipilah, penduduk perempuan mengalami keluhan kesehatan lebih besar yakni sebesar 37.77 persen sedangkan penduduk laki – laki sebesar 34.76 persen.

Seseorang dikatakan sakit jika keluhan kesehatan yang dialami menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara normal sebagaimana biasanya. Persentase penduduk yang sakit disebut angka kesakitan. Angka kesakitan penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 mencapai mencapai 17.32 persen. Berdasarkan jenis kelamin, angka kesakitan penduduk perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki (17.81 persen berbanding 16.83 persen).

Tabel 2.25.
Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015- 2018

Rincian	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
Angka Kesakitan 2015	19.50	19.03	19.26
Angka Kesakitan 2016	16.52	17.30	16.91
Angka Kesakitan 2017	16.56	16.86	16.71
Angka Kesakitan 2018	16.83	17.81	17.32

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, 2016-2019

Kondisi yang agak berbeda terjadi pada tahun 2015 dimana perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih sedikit dibandingkan laki-laki yaitu perempuan 19.03 persen sementara laki-laki 19.50 persen. Namun secara umum kondisi di tahun 2017 lebih baik dibanding tahun 2015.

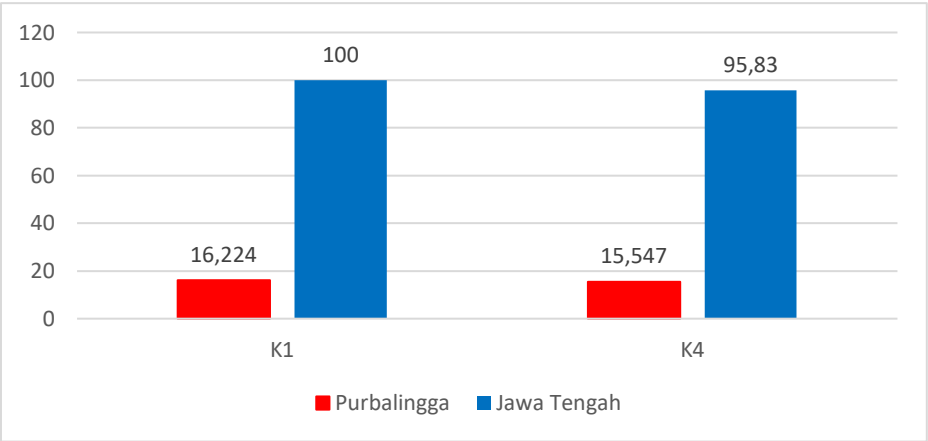
e. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4

Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimal 1 kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu) dan minimal 2 kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu-lahir). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor resiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kebidanan.

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat.

Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang telah dianjurkan, dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Gambaran cakupan K1

dan K4 Kabupaten Purbalingga dengan Jawa Tengah tahun 2018 sebagaimana gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga. 2018

Gambar 2.21.
Cakupan K1 dan K4 Kabupaten Purbalingga dan Jawa Tengah Tahun 2018

f. Pemanfaatan Fasilitas dan Sarana Kesehatan

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. sehingga penduduk dapat mengaksesnya dengan mudah tanpa mengalami kesulitan.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan. serta kualitas pelayanan. Salah satu indikator pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan.

Tabel dibawah ini menyajikan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan. Penduduk yang berobat jalan pada tahun 2017 tercatat 52.55 persen. dan pada tahun 2018 menjadi 60.22 persen.

Tabel 2.27.
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Berobat Jalan dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2018

Rincian	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+ Perempuan	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Berobat Jalan (%)	49.93	61.09	54.93	59.35	52.55	60.22
Tidak berobat jalan (%)	50.07	38.91	45.07	40.65	47.45	39.78

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga. 2018

Berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa perempuan memiliki kecenderungan berobat jalan ke fasilitas kesehatan bila mengalami gangguan kesehatan dibandingkan laki-laki. Tercatat 59.35 persen dari kaum perempuan yang berobat jalan sedangkan pada kaum laki-laki sebesar 61.09 persen yang berobat jalan pada tahun 2018.

Pada tahun 2017 masih terdapat 47.45 persen penduduk yang tidak berobat jalan. dan menurun menjadi 39.78 pada tahun 2018. Kemungkinan yang dilakukan masyarakat adalah mengobati sendiri penyakitnya (swamedikasi) atau merasa tidak perlu untuk mengobati penyakitnya. Untuk itu perlu diketahui alasan apa saja yang menjadi penyebab masyarakat tidak berobat jalan. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan.

Dengan semakin membanjirnya obat-obatan yang beredar bebas di pasaran dan semakin gencarnya promosi atau iklan obat di media cetak maupun elektronik serta semakin meningkatnya pendidikan dan pengetahuan. sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengatasi penyakitnya. Masyarakat cenderung mengobati sendiri penyakitnya dengan cara mengkonsumsi obat yang dibeli dari apotik ataupun toko obat terutama untuk penyakit-penyakit ringan. Dari tabel dibawah terlihat bahwa sebagian besar penduduk yang tidak berobat jalan memilih untuk mengobati sendiri penyakitnya yaitu tercatat 50.13 persen di tahun 2016, kemudian 62.66 persen di tahun 2017 dan 64.64 pada tahun 2018.

Tabel 2.28.
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut
Alasan Utama Tidak Berobat Jalan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2018

Alasan Tidak Berobat Jalan	2016	2017	2018
Tidak punya biaya berobat	0.78	1.18	0.00
Tidak ada biaya transport	0.24	-	0.21
Waktu tunggu pelayanan lama	0.84	0.85	2.64
Mengobati sendiri	50.13	62.66	64.64
Tidak ada yang mendampingi	0.48	0.79	0.19
Merasa tidak perlu	45.97	32.81	29.92
Lainnya	1.56	1.71	2.40
Jumlah	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga. 2018

Selain itu alasan utama lain penduduk sehingga tidak berobat jalan adalah karena merasa tidak perlu untuk diobati penyakitnya sebanyak 45.97 persen di tahun 2016 sebanyak 32.81 persen di tahun 2017 dan sebanyak 29.92 pada tahun 2018. Walaupun persentasenya cukup rendah. masih ada penduduk yang tidak berobat jalan dengan alasan tidak punya biaya berobat, tidak ada biaya transport, dan tidak ada sarana transport dan lainnya.

Salah satu indikator lain pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan. Tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa pada tahun 2018 untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. fasilitas kesehatan (tempat pengobatan) yang banyak dikunjungi penduduk adalah tenaga kesehatan medis seperti praktek dokter/bidan/ klinik/praktek dokter bersama/ UKBM (34.76 persen) puskesmas/pustu (43.31 persen). rumah sakit pemerintah (6.17 persen) dan rumah sakit swasta (6.80 persen). Untuk pengobatan non medis seperti praktek pengobatan tradisional/alternatif dan lainnya persentasenya sangat kecil masing-masig 1.37 persen dan 0.15 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran penduduk akan pengobatan pada tenaga medis sudah cukup baik. Selain itu fenomena ini juga dapat menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan sudah banyak dijumpai di hampir seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga baik di pedesaan maupun perkotaan sehingga akses masyarakat cukup mudah dan murah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan medis. Untuk tempat rawat jalan seperti rumah sakit baik pemerintah maupun swasta. persentasenya tidak terlalu

besar. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Kabupaten Purbalingga sudah mempunyai asuransi kesehatan baik Askes ataupun Jamkesmas sehingga untuk berobat yang pertama adalah di dokter keluarga atau puskesmas sebagai pelayanan pertama. Penyakit yang diderita sebagian besar juga masih penyakit ringan.

Tabel 2.29.
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan
Menurut Tempat Berobat Jalan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2018

Tempat/Cara Berobat	2016	2017	2018
Rumah Sakit Pemerintah	3.31	4.12	6.17
Rumah Sakit Swasta	3.87	7.10	6.80
Praktek Dokter/Bidan/ Klinik/ Praktek Dokter Bersama/ UKBM	58.39	56.51	34.76
Puskesmas/Pustu	36.62	33.67	43.31
Praktek Batra/Alternatif	0.56	1.20	1.37
Lainnya	0.99	0.96	0.15

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga. 2018

Derajat kesehatan masyarakat diharapkan semakin membaik dengan adanya fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat. sehingga dapat secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada perubahan pola pikir tentang pola hidup sehat. Selain itu akses masyarakat juga semakin mudah, murah dan merata terhadap pelayanan kesehatan.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menggalakkan program jaminan kesehatan nasional. Dengan adanya jaminan kesehatan maka seluruh warga Indonesia berkesempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan lebih baik. Dengan hanya menyisihkan sebagian kecil uangnya. maka mereka akan memperoleh manfaatnya. Pemerintah juga berupaya menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Semua rakyat miskin atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) akan ditanggung premi jaminan kesehatannya oleh pemerintah. Dari sini maka tidak ada alasan lagi bagi rakyat miskin untuk memeriksa penyakitnya ke fasilitas kesehatan. Dengan adanya jaminan kesehatan tersebut. diharapkan kebutuhan untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang optimal dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.30.
Persentase Penduduk Menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2018

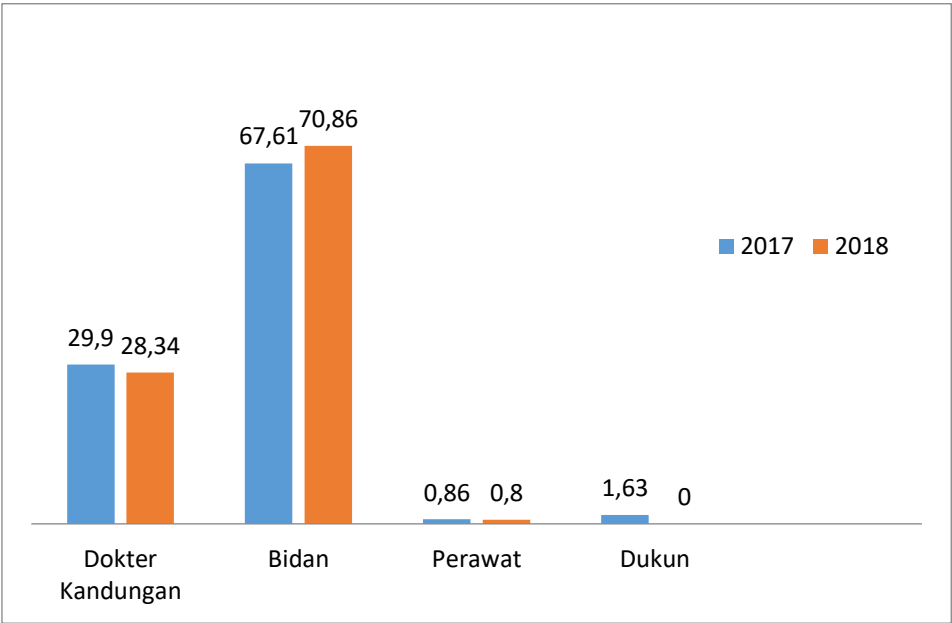
Jaminan Kesehatan	2016	2017	2018
BPJS Kesehatan	11.19	63.98	16.18
BPJS Ketenagakerjaan	1.45		
Askes/Asabri/Jamsostek	2.16		
Jamkesmas/PBI	45.70		54.31
Jamkesda	6.99	4.54	4.03
Asuransi Swasta	0.03	0.09	0.28
Perusahaan/Kantor	0.13	3.44	0.35
Tidak Memiliki	33.34	27.95	25.22

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga. 2018

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Purbalingga tahun 2018 adalah Jamkesmas/PBI sebesar 54.31 persen. dan masih terdapat 25.22 persen masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan.

g. Penolong Kelahiran Terakhir

Selain ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan. data mengenai penolong proses kelahiran dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Jenis tenaga penolong proses kelahiran menentukan keberhasilan kelahiran dan akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan bayi yang ditolong pasca kelahiran yaitu mengurangi kematian bayi dan kematian ibu (kematian maternal). Pelayanan yang aman dilakukan oleh dokter atau bidan pada saat proses kelahiran bayi.



Gambar 2.22.
Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin Menurut
Penolong Kelahiran Anak Terakhir Kabupaten Purbalingga
Tahun 2017 dan 2018

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin di Kabupaten Purbalingga dalam proses kelahiran anaknya ditolong oleh tenaga bidan yaitu sebesar 67.61 persen di tahun 2017 dan sebesar 70.86 di tahun 2018. Mudahnaya akses yang didapat masyarakat serta biaya yang terjangkau maka sebagian besar masyarakat cenderung lebih untuk melahirkan di bidan. Sementara itu perempuan yang persalinannya ditolong oleh tenaga dokter sebesar 29.9 persen di tahun 2017 dan 28.34 di tahun 2018.

Di tahun 2017 masih ada 1.63 persen perempuan 15-49 tahun di Kabupaten Purbalingga yang menggunakan tenaga non medis yaitu dukun bersalin. Hal ini kemungkinan terjadi di wilayah pedesaan yaitu masalah biaya dan jarak ke akses fasilitas kesehatan di daerah tersebut yang cukup jauh serta tingkat pemahaman kesehatan yang masih rendah. Namun demikian, di tahun 2018 sudah tidak ada masyarakat Kabupaten Purbalingga yang mempercayakan proses kelahirannya kepada dukun bersalin.

Berdasarkan hal tersebut, secara umum masyarakat lebih cenderung memilih tenaga medis dalam proses penolong kelahiran. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa tingkat kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Purbalingga selama tahun 2017 dan tahun 2018 sudah cukup baik.

h. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

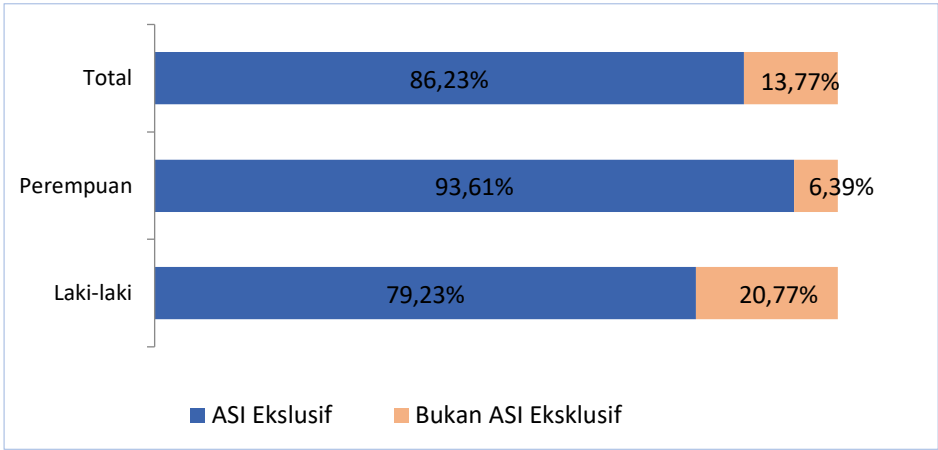
Selain penolong kelahiran, pemberian air susu ibu (ASI) sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak. Pola dan lama pemberian ASI memberikan pengaruh yang sangat positif pada kondisi kesehatan dan proses tumbuh kembang anak balita secara optimal.

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi yang paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selain mengandung zat kekebalan yang memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit, ASI juga mengandung enzim yang akan membantu pencernaan.

Melihat pentingnya manfaat ASI, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa “Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain”.

Pada awalnya Pemerintah Indonesia menganjurkan para ibu menyusui bayinya hingga usia empat bulan. Seiring dengan kajian WHO mengenai ASI eksklusif, Menkes lewat Kepmen No 450/2004 menganjurkan perpanjangan pemberian ASI eksklusif hingga enam bulan.

ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi tanpa ada makanan tambahan cairan lain misalnya air putih, susu formula, segala buah dalam bentuk jus, air the, madu maupun tanpa ada makanan tambahan padat seperti halnya pisang, pepaya, bubur nasi, biskuit dan makanan lain yang sejenis. Jika dilihat menurut jenis kelamin bayi perempuan yang berumur kurang dari 6 bulan lebih banyak yang diberi ASI eksklusif dari pada laki-laki (93.61 persen berbanding 79.23 persen). Secara umum hal ini menggambarkan bayi perempuan lebih baik dalam pemberian ASI eksklusif dibanding laki-laki. Lama pemberian ASI memberikan pengaruh positif pada kesehatan dan tumbuh kembang anak.



Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga. 2017

Gambar 2.23.
Persentase bayi berumur 0-5 Bulan Menurut Jenis Kelamin yang Diberi ASI Eksklusif di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017

Pemberian ASI di Kabupaten Purbalingga sudah cukup baik. Menurut data Susenas, persentase bayi di bawah usia 2 tahun (baduta 0-23 bulan) yang pernah diberi ASI sebanyak 97.84 persen atau dengan kata lain sebanyak 2.16 persen dari seluruh baduta di Kabupaten Purbalingga tidak disusui pada tahun 2016. Dibandingkan tahun tahun 2017 terjadi peningkatan karena pada tahun ini semua baduta telah disusui. Persentase baduta menurut lamanya menyusui Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 dan tahun 2017 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.31.
Persentase Baduta (0-23 bulan) Menurut Lamanya Disusui Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2017

Susm	Lamanya Disusui (bulan)	2016	2017
	Tidak disusui	2.16	0.00
	0 - 5	33.63	25.53
	6 - 11	34.06	31.48
	12 – 17	19.12	21.54
	18 – 23	11.03	21.45
	Jumlah	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga. 2018

Pemberian ASI dianjurkan oleh para ahli kesehatan karena dipercaya mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi ibu maupun untuk kesehatan bayi. Pada tahun 2017. Baduta 0-23 bulan yang diberi ASI selama 0-5 bulan sebanyak 25.53 persen. pemberian ASI 6-11 bulan 31.48 persen. Sementara

itu untuk pemberian ASI dalam kurun waktu 12-17 bulan. tercatat 21.54 persen dan pemberian ASI 18-23 bulan 21.45 persen.

i. Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dengan demikian beban pelayanan puskesmas semakin berat dan berpengaruh pada kualitas pelayanan. Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk setiap tahunnya belum memenuhi standar Kementerian Kesehatan RI yaitu satu Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Data selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.32.
Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Puskesmas (unit)	Jumlah Penduduk (orang)	Rasio
2015	22	903.181	1 : 41.054
2016	22	907.507	1 : 42.250
2017	22	916.427	1 : 41.656
2018	22	985.543	1 : 44.797
2019	22	1.003.246	1 : 45.602

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. 2019

j. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Dalam kurun waktu tahun 2012 – 2018 rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Purbalingga cenderung fluktuatif. Namun demikian secara umum. berdasarkan standar rasio ideal kebutuhan tenaga medis tersebut masih membutuhkan penambahan jumlah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Data perkembangan rasio dokter dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.33.
Perkembangan Rasio Dokter Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2018

Tahun	Dokter Umum		Dokter Spesialis		Dokter Gigi	
	Jumlah	Ratio	Jumlah	Ratio	Jumlah	Ratio
2015	94	10.41	21	2.33	17	1.88
2016	88	9.41	21	2.25	17	1.82
2017	140	15.43	69	7.60	24	2.64
2018	158	17.24	127	13.86	33	3.60

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga. 2018

k. Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2015-2018 cenderung meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.34.
Perkembangan Rasio Tenaga Paramedis
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2018

Tahun	Perawat		Bidan		Ahli Gizi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2015	455	50.38	218	24.14	33	3.65
2016	455	48.67	218	23.32	33	3.53
2017	1.088	119.89	582	64.13	54	5.95
2018	1.095	119.49	562	61.33	45	4.91

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, 2018

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum merupakan salah satu urusan yang menangani pemenuhan infrastruktur dasar pada suatu daerah. Pelayanan urusan pekerjaan umum difokuskan pada pelayanan urusan jalan dan jembatan, drainase, persampahan.

1). Jalan dan Jembatan

Jalan sebagai infrastruktur atau prasarana dasar mempunyai fungsi strategis dalam mendukung aksesibilitas masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. Jalan dalam kondisi baik dan sedang di Kabupaten Purbalingga tiap tahun mengalami peningkatan. Kondisi panjang jalan di Kabupaten Purbalingga sejak tahun 2017 sudah mencapai 888.087 km dan tidak mengalami penambahan panjang hingga akhir tahun 2019. Pada tahun 2017, ada peningkatan persentase panjang jalan baik dan sedang sebesar 80.75%, dan terus mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 85.66% dan pada tahun 2019 menjadi 87.68%. Kondisi pada tahun 2019 berfokus pada pelebaran jalan untuk jalan-jalan berstatus jalan kabupaten yang lebarnya masih di bawah 5.5 meter.

Tabel 2.35.
Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Panjang jalan	Km	784.233	784.233	888.087	888.087	888.087
2.	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	86.57	89.59	80.75	85.66	87.68

Sumber : DPU PR Kabupaten Purbalingga. 2019

2). Sumber Daya Air

Kabupaten Purbalingga mempunyai potensi sumber daya air yang cukup berlimpah. baik sebagai sumber air baku layanan penyediaan air bersih maupun air irigasi pertanian. Namun potensi sumber daya air yang ada tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya secara optimal. Pemanfaatan potensi sumber daya air untuk irigasi pertanian berdasar capaian kinerja pada indikator rasio jaringan irigasi selama 5 tahun terakhir 2015-2019 mengalami perubahan/peningkatan yaitu 17.2 m/ha pada tahun 2017 menjadi 17.29 m/ha pada tahun 2018 dan kembali menjadi 17.2 m/ha pada tahun 2019. Sedangkan luas jaringan irigasi dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Tahun 2015. persentase luas irigasi dalam kondisi baik mencapai 38.56% dan meningkat di tahun 2016 menjadi 45.0%. Meski mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 2.8% menjadi 42.2%. tahun 2018 dan 2019 terus mengalami peningkatan masing-masing menjadi 44% dan 45%.

Tabel 2.36.
Perkembangan Jaringan Irigasi dan Ketersediaan Air Irigasi
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio Jaringan Irigasi	m/ha	17.2	17.2	17.2	17.29	17.20
2.	Luas irigasi dalam kondisi baik	m2	7.388	8.643	8.085	8.429	8.621.55
3.	Luas Irigasi	m2	19.159	19.207	19.207	19.159	19.159
4.	Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	%	38.56	45.0	42.2	44	45

Sumber : DPU-PR Kabupaten Purbalingga 2019

b. Penataan Ruang

Kabupaten Purbalingga telah mengalami perkembangan yang pesat seiring berkembangnya berbagai aktivitas di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian. Kegiatan yang akan terus berkembang seiring meningkatnya jumlah penduduk dan peningkatan kualitas pelayanan adalah perdagangan-

jasa, khususnya di sektor pariwisata. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Purbalingga adalah : “Mewujudkan Ruang Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di bagian Barat-Selatan Jawa Tengah Berbasis Agribisnis, Industri dan Pariwisata Yang Berkelanjutan”. Dari tujuan tersebut mengandung makna:

a. Pengembangan Pusat Kegiatan

Perkotaan Purbalingga yang tumbuh menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yaitu kawasan yang menjadi hirarki pertama dan memiliki skala pelayanan untuk kegiatan tingkat regional yang berada di bagian Barat-Selatan provinsi Jawa Tengah, yang didukung dengan pengembangan pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan di sekitarnya.

b. Pengembangan Agribisnis

Purbalingga yang tumbuh berbasis usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian, yang meliputi pengusahaan input pertanian dan/atau pengusahaan produksi itu sendiri atau pun juga pengusahaan pengelolaan hasil pertanian, yang didukung dengan sistem pengelolaan pertanian berteknologi tinggi serta sistem pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang handal. Aktivitas pertanian disusun dalam kerangka sistematis dan strategis yang siap bersaing dalam pasar global.

c. Pengembangan Industri dan Pariwisata

Sektor industri sebagai pilar pembangunan ekonomi masyarakat didorong untuk lebih mampu menyerap dan memanfaatkan hasil-hasil pertanian. Pariwisata yang tumbuh dan berkembang dari potensi masyarakat Purbalingga baik berupa wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya maupun wisata buatan perlu terintegrasi dengan sistem infrastruktur wilayah. Pengembangan industri dan pariwisata diarahkan untuk mampu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka mewujudkan pola pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

d. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks esensial ditujukan untuk mewujudkan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini (intra generation) serta kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang (inter generation). Sedangkan pembangunan dalam konteks spasial

ditujukan untuk mewujudkan ruang Kabupaten Purbalingga yang serasi, selaras dan seimbang, serta mengurangi dampak negatif dari keterhubungan antar fungsi yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga (intra region) maupun terhadap wilayah kabupaten disekitarnya (inter region).

Dalam dokumen peninjauan kembali RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 menunjukkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Purbalingga mempunyai nilai 2,60 dimana beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pemanfaatan ruang yaitu adanya konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun di wilayah Kabupaten Purbalingga relatif tinggi, khususnya di sekitar kawasan perkotaan Purbalingga. Disamping itu luasan Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan perkotaan Purbalingga juga menunjukkan besaran hanya sebesar 19.13 % dari luas wilayah perkotaan. Dimana luasan RTH publik yang disarankan seharusnya sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

Dokumen perencanaan tata ruang daerah yang ada di Kabupaten Purbalingga yang menjadi dasar pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang adalah RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 yang sampai dengan saat ini masih dilakukan proses revisi. Sementara itu dokumen perencanaan untuk kawasan perkotaannya (RDTR) masih belum ada yang di Perdakan. RDTR nantinya dapat menjadi panduan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih rinci untuk kawasan perkotaan di Kabupaten Purbalingga. RDTR yang direncanakan di Kabupaten Purbalingga yaitu: Kawasan perkotaan Purbalingga, perkotaan Bobotsari, perkotaan Bukateja. Sedangkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis yang direncanakan yaitu: Kawasan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba; Kawasan Agropolitan Bungakondang; dan Kawasan Agropolitan Lereng Gunung Slamet.

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, rekomendasi kesesuaian ruang yang telah diterbitkan dari tahun ke tahun mengalami terus kenaikan dimana pada tahun 2018 capaiannya 75.5 % naik menjadi 80.32 % pada tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang menjadi hal utama yang dilakukan terlebih dahulu oleh masyarakat dan investor sebelum melakukan pembangunan pada suatu ruang. Hal tersebut

dilatarbelakangi karena masih banyak bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), sehingga pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang diperlukan agar peruntukan lahan sesuai dengan perencanaan ruang yang ada di Kabupaten Purbalingga.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah sehat, menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) antara lain adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai minima 110 m² per kapita. Luasan ini memberikan kenyamanan anggota rumah tangga beraktifitas sehari-hari. Dari hasil Susenas diperoleh informasi persentase rumah yang luas lantai per kapita kurang dari atau sama dengan 10 m². Rumah tangga yang menempati bangunan dengan luas lantai kurang dari atau sama dengan 10 m² di Kabupaten Purbalingga cenderung menurun. Hal ini menunjukkan kondisi yang semakin baik dalam tata perumahan di Purbalingga.

Kinerja pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari beberapa indikator seperti: luas kawasan kumuh, persentase rumah tidak layak huni, persentase rumah tangga bersanitasi, dan persentase rumah tangga menggunakan air bersih. Secara umum dalam kurun waktu tahun 2016 - 2019 penataan lingkungan permukiman perlu ditingkatkan. Persentase rumah tangga bersanitasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika di tahun 2016 persentase rumah tangga bersanitasi mencapai 78.58%, terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya yaitu 84.27% di tahun 2017, kemudian 87.84% di tahun 2018 dan puncaknya di tahun 2019 mencapai 90.77%.

Sementara persentase rumah tangga menggunakan air bersih juga terus meningkat. Dari 82.78% di tahun 2016 terus melonjak hingga mencapai 90.43% di tahun 2019. Walaupun demikian kedepan perlu ditingkatkan agar akses masyarakat terhadap air bersih dan sarana sanitasi semakin baik, menuju *universal access* 100-0-100. Adapun secara lengkap kondisi perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.37.
Kondisi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2019

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2016	2017	2018	2019
1	Luas kawasan kumuh	Ha	18.3	4.42	9.67	3.37
2	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	20.527	19.302	15.433	14.078
3	Persentase rumah tidak layak huni	%	8.32	7.83	6.26	7.83
4	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	78.58	84.27	87.84	90.77
5	Persentase rumah tangga menggunakan air bersih	%	82.78	87.60	88.69	90.43

Sumber: *Dinrumkim Kabupaten Purbalingga. 2019*

5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) di Kabupaten Purbalingga dalam jangka waktu 2015 – 2019 mengalami trend meningkat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat penyelesaian pelanggaran K3 pada tahun 2015 sebesar 93 persen, selanjutnya pada tahun 2017 meningkat menjadi 100 persen dan tetap pada angka 100 persen pada tahun 2018. Sedangkan angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Purbalingga juga mengalami trend menurun, dimana angka kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 13 persen, selanjutnya menurun pada tahun 2017 menjadi 2.46 persen dan kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 1.85 persen per 10.000 penduduk.

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat petugas Satpol PP dalam 24 jam sebanyak 3 (tiga) kali sehari selama kurun waktu 2013 – 2018 berjalan secara konsisten yaitu sebesar 162 kali. Dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Satpol PP didukung sejumlah aparat. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga per 10.000 penduduk pada tahun 2013 sebesar 1.5 dan pada tahun 2018 menurun menjadi 1.048 karena beberapa telah purna tugas dan beralih penugasan.

Tugas Satpol PP menjaga ketertiban dan keamanan dibantu oleh masyarakat yang bertugas sebagai perlindungan masyarakat (linmas). Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Pendudukpada tahun 2013 sebesar 63.15 menurun di tahun 2018 hanya pada angka 25.8. Penurunan tersebut diantaranya disebabkan

oleh meningkatnya jumla penduduk yang tidak diimbangi dengan pengangkatan linmas baru.

Sementara untuk mendukung tugas linmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan tersedia sarana berupa Pos Siskamling pada tahun 2015 rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan sebesar 6.80 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 84.50. Peningkatan rasio pos siskamling tersebut karena adanya pengembangan kegiatan siskamling dari Polri. Adapun Perkembangan Kinerja Urusan Ketenteraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38.
Perkembangan Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	93	93	100	100	100
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan) di Kabupaten	%	93	94.40	100	100	100
3.	Angka kriminalitas	Kasus	188	NA	225	171	
4.	Angka kriminalitas yang tertangani	Kasus	135	NA	156	134	
		%	71.81	NA	69.33	78.36	
5.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Kali	162	162	162	162	162
6.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja	per 10.000 penduduk	0.95	1.09	0.677	1.048	
7.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	per 10.000 penduduk	60.97	60.97	26.1	25.8	
8.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Poskamling	6.80	6.80	41.84	41.84	84.50

Sumber: Satpol PP dan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga. 2019

6. Sosial

Pembangunan sosial bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang melalui kebutuhan fisik sampai sosial dan lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial.

a. Sarana Sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial salah satu diantaranya dikaitkan dengan panti sosial yang dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun swasta.

Kabupaten Purbalingga sudah memiliki Rumah Singgah Dharma Perwira Purbalingga yang diresmikan pada tanggal 8 April 2019 dengan kapasitas 11 shelter, 4 shelter untuk ruang isolasi dan dapat menampung 25 orang PMKS. Rumah singgah diperuntukkan sebagai transit/penampungan sementara pengemis gelandangan oerang terlantar (PGOT). Wanita Tuna Susila (WTS). anak jalanan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Tabel 2.39.
Data jumlah PMKS yang terkena operasi Tahun 2018-2019

PMKS	Tahun 2018 (orang)	Tahun 2019 (orang)
Anak Jalanan	73	117
Anak Nakal	2	-
Eks Napi	1	-
Gelandangan	12	4
Lansia terlantar	2	7
Pemulung	35	-
Pengamen	34	30
Pengemis	69	42
Psikotik Jalanan	21	37
Tunasosial	6	16
Waria	2	2
Orang Terlantar		1
Total	232	256

Sumber : DinsosdaldukKBP3A Kab. Purbalingga. 2019

b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa negara menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat bagi rakyatnya sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945. serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana. terarah. dan berkelanjutan. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah. terpadu. dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah. pemerintah daerah. dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. yang meliputi rehabilitasi sosial. jaminan sosial. pemberdayaan sosial. dan perlindungan sosial.

Persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Purbalingga dalam penanganan masalah sosial adalah jumlah PMKS yang jumlahnya cukup banyak. Pada tahun 2018 jumlah PMKS sebanyak 108.014 orang; yang sudah menerima

bantuan sebanyak 92.438 orang atau sebesar 85.58 %. dan yang belum menerima bantuan sebesar 15.576 orang. Capaian layanan penerimaan bantuan PMKS tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 68.56 %. Apabila mendasarkan pada PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Syandar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, cakupan PMKS di Kabupaten Purbalingga penerima bantuan sosial perlu ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dalam rangka peningkatan capaian PMKS yang terlayani perlu sinergitas lintas sektor berupa kemitraan dengan seluruh stakeholder sehingga mampu memberikan optimalisasi layanan PMKS baik dari sisi pengaduan, kedaruratan, penyediaan permakanaan sandang penyediaan perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual dan social, akses pendidikan dasar dan reunifikasi keluarga.

B. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja 15 tahun ke atas dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yaitu dari 64.76 % menjadi 71.68%. Namun kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 66.07 % dan di tahun 2019 menjadi 67.88%. Secara absolut juga mengalami peningkatan dari 430.097 orang menjadi 454.098 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.40.

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1	2015	430.097	664.192	64.76
2	2016	479.808	697.402	68.79
3	2017	463.809	683.554	71.68
4	2018	457.918	693.034	66.07
5	2019	454.098	702.533	67.88

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga. 2020

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Kabupaten Purbalingga. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut jenis kelamin pada tahun 2015 hingga tahun 2019 di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.41.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut
Jenis Kelamin Tahun 2015-2019

Jenis Kelamin	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Laki-laki	83.81	85.48	83.52	83.17	81.67
Perempuan	53.02	55.61	60.39	58.10	54.74
Total	68.05	70.62	71.68	70.33	67.88

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016-2020

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja. Menurut Sakernas pengangguran mencakup mereka yang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena putus asa sudah berkali-kali mencari pekerjaan namun belum berhasil. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Purbalingga menurut jenis kelamin pada tahun 2015 – 2019 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.42.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

Jenis Kelamin	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Laki-laki	6.86	6.43	6.30	6.79	5.07
Perempuan	1.79	1.52	4.07	5.05	4.37
Total	4.84	4.66	5.33	6.06	4.78

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016-2020

d. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan terhadap pencari kerja yang terdaftar dalam kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami peningkatan dari 32.05 % menjadi 50.22 %. Namun demikian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 32.04 %. Hal tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.43.
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2015-2019

Tahun	Pencari Kerja Terdaftar	Pencari Kerja Ditempatkan	Persentase
2015	12.913	4.138	32.05
2016	13.558	4.345	32.04
2017	13.048	6.152	41.50
2018	NA	NA	47.15
2019	15.587	8.625	50.29

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2016-2020

e. Penduduk yang Bekerja

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan/keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Indikator yang mengukur tingkat kesempatan kerja penduduk adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yaitu perbandingan penduduk usia kerja yang bekerja dengan angkatan kerja. Indikator ini berkebalikan dengan tingkat pengangguran.

Penduduk Kabupaten Purbalingga yang bekerja dari penduduk yang tamat SD sebanyak 15.578 orang, tamat SMP sebanyak 672 orang, tamat SLTA 8625 orang, dan Diploma I/II/Sarjana Muda/Sarjana sebanyak 20.075 orang. Masih besarnya penduduk bekerja dengan pendidikan SMP ke bawah menggambarkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga sebagian besar adalah tenaga kerja terampil yang tidak mengharuskan pendidikan tinggi. Secara lengkap Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.44.
Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Pendidikan	Laki-Lai	Perempuan	Jumlah
Buta Huruf dan Tidak Tamat SD	-	-	-
Tamat SD	36	504	15578
Tamat SLTP	132	2600	672
Tamat SLTA	234	4286	8625
DI/DII	1	6	7824
Tamat Sarjana Muda	1	5	12234
Tamat Sarjana	3	14	17
Jumlah	407	7415	62725

Sumber :BPS Kabupaten Purbalingga. 2020

Sementara itu jika dilihat menurut lapangan usaha utama penduduk usia kerja sebagian besar penduduk Kabupaten Kabupaten Purbalingga bekerja di lapangan usaha jasa yaitu sebanyak 186,057 orang, disusul oleh manufaktur sebanyak 171,600 orang dan lapangan usaha pertanian sebanyak 96,441 orang.

Untuk lapangan usaha pertanian lebih banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki sebanyak 71,726 orang dan penduduk perempuan hanya 24,715 orang. Sementara untuk lapangan manufaktur hampir berimbang dilakukan oleh penduduk laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki sebanyak 90,122 orang dan perempuan 81,478 orang. Secara lebih lengkap Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha Tahun 2019 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.45.
Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha 3 Kategori dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Lapangan UsahaUtama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian	71,726	24,715	96,441
Manufaktur	90,122	81,478	171,600
Jasa	103,981	82,076	186,057
Jumlah	265,829	188,269	454,098

Sumber :BPS Kabupaten Purbalingga. 2020

Selanjutnya penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama sebagian besar didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sejumlah 179,095 orang yang terdiri dari laki-laki 93,899 orang dan perempuan 85,196 orang. Banyak penduduk Kabupaten Purbalingga yang menjadi buruh/ karyawan/ pegawai di sektor industri yang menyerap tenaga kerja seperti industri rambut palsu dan bulu mata palsu.

Tabel 2.46.
Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	62,876	33,815	96,691
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tdk dibayar	48,626	27,545	76,171
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	11,954	4,219	16,173
Buruh/Karyawan/Pegawai	93,899	85,196	179,095
Pekerja Bebas	15,687	7,075	22,762
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	22,862	5,663	28,525
Jumlah	265,829	188,269	454,098

Sumber :BPS Kabupaten Purbalingga. 2020

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK perempuan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebesar 54.74 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 10 penduduk perempuan terdapat 6 penduduk perempuan bekerja, mempersiapkan pekerjaan atau mencari pekerjaan dan 4 lainnya sedang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya.

Tabel 2.47.
TPAK dan TTK Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan 2019

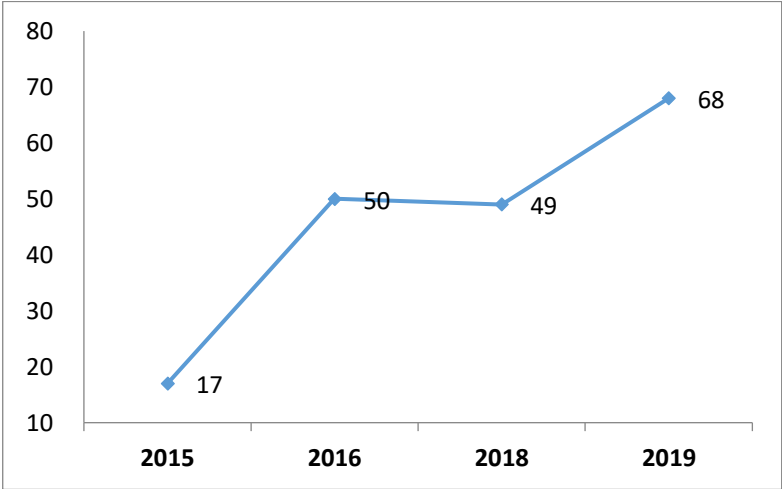
Penduduk	TPAK 2019	TKK 2018
Laki-laki	81.67	93
Perempuan	54.74	94.95
Total	67.88	93.94

Sumber: Sakernas Agustus 2018, BPS Provinsi Jawa Tengah 2020

Disisi lain Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) perempuan tahun 2018 sebesar 94.95 persen. sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan TKK laki-laki yang sebesar 94.95 persen. Hal ini menegaskan bahwa dalam hal ketenagakerjaan kesempatan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan bisa dikatakan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

b. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian karena pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 angkanya meningkat cukup signifikan, sehingga diperlukan langkah – langkah antisipatif dari segenap pihak yang terkait. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga tahun 2015 sampai dengan 2019 digambarkan dalam grafik di bawah ini.



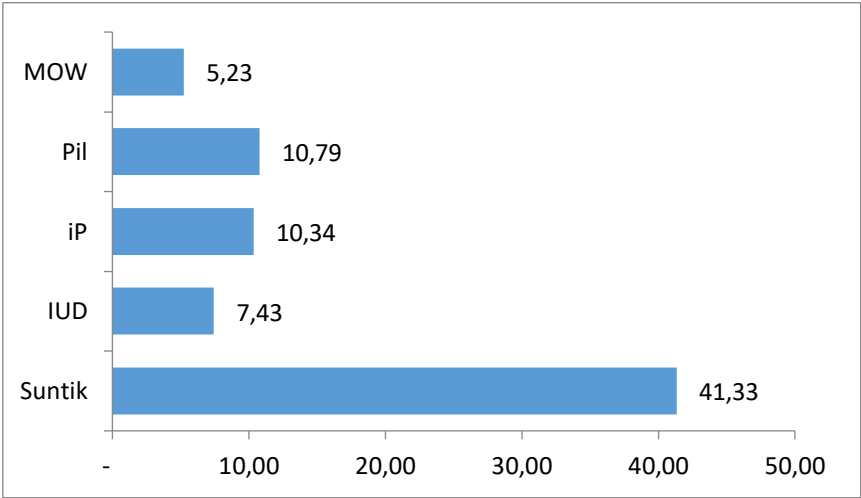
Sumber: DinsosdaldukKB dan P3A. 2018

Gambar 2.24.
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan penduduk yang drastis menjadi permasalahan yang cukup serius di negara berkembang. seperti Indonesia. Keluarga Berencana (KB) masih dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 75.11 persen perempuan berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin sedang mengikuti program KB. Jenis alat/cara ber-KB yang paling banyak digunakan oleh perempuan berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin adalah Suntikan KB yang mencapai 41.33 persen. Cukup besarnya persentase perempuan pernah kawin yang

menggunakan alat kontrasepsi suntik KB karena lebih praktis, aman dan mudah di dapatkan. Sedangkan jenis/cara ber-KB seperti IUD, iP, Pil dan MOW/Tubektomi juga cukup diminati dimana masing-masing memiliki persentase sebesar 7.43 persen, 10.34 persen, 10.79 persen dan 5.23 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : DinsosdaldukKB dan P3A, 2019

Gambar 2.25.
Persentase Perempuan Berumur 15-49 tahun yang Pernah Kawin Menurut Jenis Alat KB yang Digunakan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Adapun secara umum perkembangan kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2015-2019 di Kabupaten Purbalingga seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48.
Kondisi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

No	Uraian dan Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Laju pertumbuhan penduduk	1.02	1.02	0.98	1.05	0.95
2	Jumlah ketersediaan alat dan obat kontrasepsi	143.826	148.456	NA	NA	NA
3	Persentase kepesertaan KB	76.40 %	77.96 %	78.89 %	77.69 %	81 %
4	Jumlah peserta aktif KB pria	4.593	2.735	6.418	6.120	7.398
5	Cakupan peserta KB aktif/Contraceptive Prevalence Rate	143.826	148.456	147.167	147.650	146.794

No	Uraian dan Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
6	Jumlah penanganan kasus terkait layanan KB	1	1	0	0	0
7	Persentase penanganan kasus terkait layanan KB	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinsosdalduk KB dan P3A. dan BPS. 2019

4. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan. (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi. pemasaran. perdagangan. informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; (d) keamanan pangan melalui sanitasi. pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga secara umum semakin baik. yang ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:

- a. Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif;
- b. Ketersediaan pangan utama cukup mantap dan mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk. bahkan surplus 69.797.4 ton beras;
- c. Harga pangan relatif terkendali dan terjangkau masyarakat. baik secara umum maupun menjelang hari besar keagamaan;
- d. Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat.

Adapun capaian urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2019 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.49.
Capaian Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016 - 2019

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019
1	Ketersediaan pangan utama	kg/kap/th	164.5	167	168	93,5

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019
2	Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok dan Strategis Tk. Konsumen (Stabilisasi Harga)	%	Beras 5.05	Beras premium 5.5. beras medium 8.91 % dan beras murah 5.20 %	>5	>5
3	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	83.34	85.23	85.6	86,62
4	Persentase pangan yang aman (pangan segar)	%	80	85	>85	90
5	Jumlah sertifikasi Prima 3 (PSAT)	Komoditas	3	2	-	5
6	Lumbung pangan	unit	127	118	109	117

Sumber: DKPP Kabupaten Purbalingga. 2018

Jumlah lumbung pangan pada tahun 2016 sejumlah 127 unit dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 117 unit. Penurunan ini disebabkan karena adanya kemacetan pada usaha simpan pinjam di beberapa lumbung. sehingga mengakibatkan tutup. Selain itu adanya kevakuman kepengurusan lumbung serta terbatasnya regenerasi pengurus.

5. Pertanian

Pelayanan umum kepada masyarakat urusan pertanahan. bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian. serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

Tabel 2.50.
Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2018

Penggunaan Tanah	2015		2016		2017		2018
	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)
Sawah	21.845	28.1	21.841	28.1	21.830	28.07	25.714.70
Perkampungan	19.087	24.54	19.091	24.54	19.100	24.56	19.088.70
Kebun Campur	4.532	5.83	4.532	5.83	4.532	5.83	4.532.40
Tegalan	17.344	22.3	17.344	22.3	17.344	22.30	17.343.80
Perkebunan	16	0.02	16	0.02	16	0.02	16.40
Perikanan	95	0.12	95	0.12	95	0.12	95.50
Hutan	11.328	14.57	11.328	14.57	11.328	14.57	11.328.10

Penggunaan Tanah	2015		2016		2017		2018
	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)
Lain-lain	3.516	4.52	3.516	4.52	3.517	4.52	3.515.90
Jumlah	77.764	100.00	77.764	100.00	77.764	100	81.635.50

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2016-2018

6. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga dapat ditunjukkan dengan penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Lingkungan Hidup. yaitu informasi status mutu air. informasi status mutu udara dan jumlah pengaduan dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti. Selengkapnnya untuk kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Kabupaten Purbalingga selama tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.51.
Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Informasi status mutu air (SPM) sungai	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu
2	Informasi status mutu udara ambien (SPM)	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu
3	Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) %	100	100	100	100	100

Sumber: DLH Kabupaten Purbalingga, 2019

7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status pekerjaan dan lain sebagainya. Jumlah Kepala Keluarga dan kepemilikan Kartu Keluarga per Kecamatan tahun 2019 di Kabupaten Purbalingga sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.52.
Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga Per Kecamatan 2019

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga			Jumlah Kepemilikan KK			
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	%
1	Kemangkon	18595	3933	22528	18398	3700	22098	6.68
2	Bukateja	21946	4450	26396	21753	4160	25913	7.83
3	Kejobong	15185	2712	17897	15044	2524	17568	5.31
4	Kaligondang	18932	3964	22896	18829	3788	22617	6.84
5	Purbalingga	16424	4280	20704	16278	4065	20343	6.15
6	Kalimanah	16281	3346	19627	16143	3174	19317	5.84
7	Kutasari	18315	2934	21249	18185	2799	20984	6.34
8	Mrebet	22745	3830	26575	22565	3600	26165	7.91
9	Bobotsari	15498	3118	18616	15352	2947	18299	5.53
10	Karangreja	13192	1325	14517	13107	1186	14293	4.32
11	Karanganyar	11522	2151	13673	11407	2024	13431	4.06
12	Karangmoncol	16116	2563	18679	15947	2272	18219	5.51
13	Rembang	19026	3046	22072	18805	2677	21482	6.49
14	Bojongsari	17848	2916	20764	17728	2741	20469	6.19
15	Padamara	12926	2390	15316	12836	2240	15076	4.56
16	Pengadegan	12122	1903	14025	12049	1774	13823	4.18
17	Karangjambu	7854	875	8729	7794	743	8537	2.58
18	Kertanegara	10355	1980	12335	10267	1856	12123	3.67
Jumlah		284882	51716	336598	282487	48270	330757	100.00

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purbalingga. 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 336.598 kepala keluarga di Kabupaten Purbalingga yang sudah memiliki Kartu Keluarga sampai akhir 2019 sebanyak 330.757 kepala keluarga. Jika menurut wilayah kecamatan, dapat dilihat bahwa wilayah Kecamatan Mrebet merupakan wilayah dengan kepemilikan KK tertinggi sebanyak 26.165 KK yang diikuti wilayah Kecamatan Bukateja yakni 25.913 KK. Sedangkan persentase kepemilikan kartu keluarga terendah terdapat di wilayah Kecamatan Karangjambu sebanyak 8.537 KK.

b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk hampir selalu menjadi persyaratan publik lainnya di Kabupaten Purbalingga sehingga hampir semua Penduduk (legal) memiliki KTP-el. Sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang memiliki KTP dan telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 747.592 jiwa (99.99%) dari wajib KTP sebanyak 747.646 jiwa. Hampir setiap kecamatan persentase

kepemilikan KTP-el yaitu telah mencakup wajib KTP yang ada di setiap kecamatannya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.53.
Hasil Pelaksanaan Perekaman KTP-el
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No	Kecamatan	Wajib KTP			Kepemilikan KTP-el			Persentase Kepemilikan KTP-el (%)
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	Kemangkon	24326	24425	48751	24326	24424	48750	100.00
2	Bukateja	29410	29356	58766	29408	29355	58763	99.99
3	Kejobong	19383	19352	38735	19382	19350	38732	99.99
4	Kaligondang	24861	24844	49705	24859	24843	49702	99.99
5	Purbalingga	21927	22935	44862	21923	22935	44858	99.99
6	Kalimanah	21547	21619	43166	21546	21618	43164	100.00
7	Kutasari	23663	23042	46705	23662	23041	46703	100.00
8	Mrebet	29244	28804	58048	29241	28799	58040	99.99
9	Bobotsari	20641	20588	41229	20640	20588	41228	100.00
10	Karangreja	16898	16277	33175	16898	16274	33172	99.99
11	Karanganyar	15650	14972	30622	15649	14972	30621	100.00
12	Karangmoncol	22254	21564	43818	22254	21564	43818	100.00
13	Rembang	26082	25151	51233	26078	25145	51223	99.98
14	Bojongsari	23490	22774	46264	23488	22772	46260	99.99
15	Padamara	16859	16862	33721	16861	16861	33722	100.00
16	Pengadegan	15434	15422	30856	15428	15421	30849	99.98
17	Karangjambu	10362	9705	20067	10362	9704	20066	100.00
18	Kertanegara	14167	13756	27923	14166	13755	27921	99.99
Jumlah		376198	371448	747646	376166	371421	747592	99.99

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purbalingga 2020

c. Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

Akta catatan sipil merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan berdampak hukum terhadap status keperdataan seseorang. Oleh karenanya setiap penduduk yang mengalami peristiwa penting wajib dicatat untuk mendapatkan akta pencatatan sipil.

Akta kelahiran menimbulkan hukum keperdataan antara anak dan kedua orang tuanya. Akta perkawinan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara suami dan isteri serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akta kematian merupakan dokumen untuk dapat dibukanya

pembagian waris, pensiun, asuransi dan lain-lain. Akta perceraian merupakan dokumen legal yang membuktikan putusnya sebuah perkawinan. Akta pengakuan anak merupakan dokumen legal yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak yang lahir diluar perkawinan dengan ayah biologis.

Belum lengkapnya informasi yang diberikan oleh penduduk dalam mengisi Formulir F.1.01 khususnya informasi tentang kepemilikan akta pencatatan sipil seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak dan akta pengesahan anak, menyebabkan sulitnya memperoleh informasi tentang kepemilikan akta-akta catatan sipil oleh penduduk dari database kependudukan SIAK.

1) Kepemilikan Akta Kelahiran

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjamin setiap anak untuk dicatatkan kelahirannya. Untuk meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dimana terdapat 3 (tiga) item penting yang berkaitan dengan percepatan capaian kepemilikan akta pencatatan sipil yaitu:

- a. Pelayanan gratis untuk memperoleh dokumen akta Pencatatan Sipil;
- b. Dihapuskannya denda keterlambatan pembuatan akta pencatatan sipil.

Perubahan azas pencatatan sipil yang semula pada asas peristiwa menjadi azas domisili dimana penduduk dapat membuat akta pencatatan sipil di tempat domisili walaupun tempat terjadinya peristiwa penting berbeda. Adapun kepemilikan akta kelahiran berdasarkan DKB (Data Konsolidasi Bersih) Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.54.
Kepemilikan Akta Kelahiran per Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Kepemilikan Akta Kelahiran			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (%)
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	Kemangkon	32509	32174	64683	14385	13429	27814	43.00
2	Bukateja	39675	39241	78916	18975	18167	37142	47.07
3	Kejobong	25997	25521	51518	11187	10949	22136	42.97

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Kepemilikan Akta Kelahiran			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (%)
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
4	Kaligondang	33394	32948	66342	16478	15515	31993	48.22
5	Purbalingga	29278	29908	59186	14298	14038	28336	47.88
6	Kalimanah	28848	28328	57176	15544	14565	30109	52.66
7	Kutasari	32784	31704	64488	16655	15409	32064	49.72
8	Mrebet	39572	38485	78057	17177	16199	33376	42.76
9	Bobotsari	27794	27272	55066	12671	12129	24800	45.04
10	Karangreja	22993	22067	45060	9336	8808	18144	40.27
11	Karanganyar	21055	20066	41121	9553	8991	18544	45.10
12	Karangmoncol	29995	28574	58569	12908	12005	24913	42.54
13	Rembang	35236	33585	68821	14974	13941	28915	42.01
14	Bojongsari	31962	30603	62565	14404	13479	27883	44.57
15	Padamara	22902	22611	45513	10894	10376	21270	46.73
16	Pengadegan	20721	20504	41225	8860	8599	17459	42.35
17	Karangjambu	14122	13172	27294	6017	5432	11449	41.95
18	Kertanegara	19199	18447	37646	9480	8852	18332	48.70
Jumlah		508036	495210	1003246	233796	220883	454679	45.32

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purbalingga, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2019 jumlah kepemilikan akta kelahiran yaitu sebanyak 454.679355 akta lahir atau sebesar 45.32 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga. Persentase kepemilikan akta kelahiran terbesar adalah Kecamatan Kalimanah yaitu sebanyak 52.66 persen. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Karangreja yaitu sebanyak 40.27 persen. Sedangkan untuk penerbitan akta kelahiran di Tahun 2019 yaitu sebanyak 33.102 akta lahir dengan rincian jumlah akta lahir laki-laki sebanyak 17.434 dan jumlah akta lahir perempuan sebanyak 15.668.

2) Kepemilikan Akta Perkawinan

Akta Perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Namun perlu digaris bawahi bahwa data kepemilikan akta perkawinan ini dilayani oleh Dindukcapil Kabupaten Purbalingga hanya bagi

penduduk yang beragama non Islam. Sementara bagi penduduk yang beragama Islam data kepemilikan akta perkawinan dalam bentuk surat nikah berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Jumlah penduduk non muslim di Kabupaten Purbalingga yang bersatatus menikah dan mengurus akta perkawinan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 342 orang. Data kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.55.
Jumlah Pelayanan Akta Perkawinan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2019

No	Agama	Perkawinan	Akta Kawin
1	Islam	0	0
2	Katholik	234	241
3	Protestan	94	94
4	Hindu	1	1
5	Budha	3	3
6	Konghucu	3	3
7	Kepercayaan	0	0
8	Pengadilan	0	0
Jumlah		335	342

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purbalingga. 2020

8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi. sosial budaya. politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan. lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari. oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan. pelaksanaan. pengendalian. pemanfaatan. dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. provinsi. dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Kabupaten Purbalingga memiliki 224 desa dan 15 kelurahan yang tersebar di 18 Kecamatan. Masing-masing desa tersebut memiliki status dan

potensi desa yang berbeda-beda. Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di desa. Dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa

Berdasar perkembangannya. desa terbagi menjadi 4 kelompok yakni Desa Tradisional. Desa Swadaya. Desa Swakarya dan Desa Swasembada. Adapun Desa Swasembada adalah desa yang paling maju di antara ketiga desa sebelumnya. Desa Swasembada seperti ini biasanya berada di kota kecamatan atau dekat dengan kota tapi bukan kelurahan. Perikehidupan warga desa ini sudah sangat maju dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sudah menguasai teknologi dan memiliki berbagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka karena warga desa ini memiliki pendidikan tinggi. pekerjaan yang beragam dan pola berpikir yang udah sangat rasional. Warga desa Swasembada sudah tidak terikat adat-istiadat dan tidak lagi terisolir. Lokasinya yang dekat dengan kota membuat desa ini memiliki berbagai pilihan bagi warga untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Desa dimaksud antara lain Panunggalan, Tejasari, Penaruban, Grecol, Karangsari, Patemon, Karangbanjar, dan Karangjambu.

Adapun capaian indikator pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2018 sebagai berikut:

Tabel 2.56.
Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019

No.	Urusan PMD	Satuan	2017	2018	2019
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0.6394	0.65422	0.667642
2	Jumlah Desa Swasembada	Desa	1	5	8
3	Jumlah Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat	Swadaya (Rp)	2.170.000.000.-	2.600.000.000.-	3.121.114.000
4	Cakupan Desa dengan BUMDes Sehat	Persen	22.32 (50 Desa)	22.32 (50 Desa)	0.46% (105 desa)

Sumber : Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga. 2019

9. Perhubungan

Peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas prasarana jalan. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan angkutan darat agar kenyamanan

layanan angkutan dan keselamatan lalu lintas juga ikut meningkat. Penyelenggaraan perhubungan perlu dikembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang barang dan jasa yang dinamis.

Dibandingkan tahun 2018 fasilitas lalu lintas Kabupaten Purbalingga di tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah km maupun unit. Jika di tahun 2018 marka jalan di Kabupaten Purbalingga tercatat sepanjang 224.4 Km dengan jumlah rambu-rambu 817 unit dan 3.184 m2 guardraill, maka di tahun 2019 terdata marka sepanjang 410.872 km, rambu-rambu sebanyak 867 unit dan 3.354 unit guardrail. Secara lengkap fasilitas lalu lintas di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.57.
Fasilitas Lalu Lintas Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2019

No.	Uraian	Satuan	2018	2019
1	Fasilitas Lalu Lintas			
1.1	Marka	Km	224.4	410.872
1.2	Rambu-rambu	Unit	817	867
1.3	RPPJ	Unit	113	116
1.4	Deliniator	Unit	146	146
1.5	Safety Mirror	Unit	26	26
1.6	Guardraill	M2	3.184	3.354
1.7	Trafic light	Unit	13	13
1.8	Warning light	Unit	38	40
1.9	Road Barrier	Buah	125	125
1.10	Halte	Buah	7	7
1.11	Paku marka	buah	559	659
1.12	Trafic Cone	Unit	100	100
2	Peningkatan Pelayanan Angkutan			
2.1	Cakupan kendaraan angkutan umum yang laik operasi (lulus uji KIR)	kendaraan	12.700	10.882
2.2	Jumlah kendaraan angkutan umum masuk terminal	kendaraan	136.376	47.592
2.3	Jumlah penumpang terlayani angkutan	penumpang	1.134.184	380.736

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, 2019

Dalam rangka menunjang kegiatan transportasi di Kabupaten Purbalingga terdapat 4 buah terminal. Dua terminal tipe C yaitu Terminal Bukateja dan Kejobong, satu terminal Tipe B yaitu Terminal Purbalingga dan satu terminal Tipe A yaitu terminal Bobotsari. Persentase kendaraan angkutan umum masuk terminal dan jumlah penumpang terlayani angkutan mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun 2018 ke tahun 2019. Hal ini karena adanya perubahan status dan pengelolaan terminal-terminal yang ada. Terminal Kutasari telah dialih fungsi menjadi Puskesmas Kutasari. Terminal Purbalingga saat ini menjadi terminal Tipe B yang dikelola Pemerintah

Provinsi. Sementara Terminal Bobotsari menjadi terminal Tipe A yang dikelola Pemerintah Pusat. Sehingga persentase kendaraan angkutan umum masuk terminal dan jumlah penumpang terlayani angkutan hanya didasarkan yang terdata di Terminal Bukateja dan Terminal Kejobong yang masih Tipe C dengan pengelolaan oleh Pemkab Purbalingga.

10. Komunikasi dan Informasi

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi saat ini menjadi sebuah keniscayaan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik. Sampai dengan tahun 2019 jumlah lembaga pemerintahan yang memiliki website sebanyak 1 web bupati. 1 web wakil bupati. 27 OPD. 18 Kecamatan. 115 Desa. 15 Kelurahan. 1 web PKK dan 1 web puskesmas. Kesemuanya dengan intensitas updating setiap hari kerja. Sementara itu jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan aktif sebanyak 34 unit. Sedangkan jumlah pelayanan publik perangkat daerah yang telah dilaksanakan secara online baru 6 unit.

11. Koperasi dan UKM

Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat maka kebijakan yang perlu diambil adalah pengembangan serta peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian dalam arti luas perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri kecil dan industri rumah tangga, serta koperasi.

Jumlah UKM non BPR/LKM kecenderungan fluktuatif dari tahun ke tahun di Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2015 sebanyak 127.433 unit kemudian di tahun 2016 menjadi 127.123 unit dan pada tahun 2017 turun menjadi 86.877. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 meningkat menjadi 88.402. Pemerintah Kabupaten Purbalingga sangat mendukung terhadap pemberdayaan UKM lokal. beberapa kebijakan guna pengembangan UKM diantaranya subsidi bunga yang disalurkan lewat lembaga keuangan, program *Bela Beli*, serta penggunaan batik asli Purbalingga untuk pakaian dinas. Adapun capaian Kinerja Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.58.
Perkembangan Capaian Kinerja Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah UKM non BPR/LKM	Unit	127.433	127.123	86.877	87.901	88.402
2	Prosentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UMKM	%	-	-	99.71	89	89
3	Prosentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	1.20	1.70	2.54	3	3.2
4	Prosentase omset usaha mikro / rumah tangga terhadap total omset UMKM (%)	%	54.60	54.92	NA	NA	NA
5	Jumlah Produk UMKM yang bersertifikat Depkes dan MUI	Jenis	390	421	456	496	536
6	Prosentase Koperasi Aktif	%	69	79	71.86	72	74
7	Prosentase Koperasi Sehat	%	59	60	62	65	68

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, 2019

12. Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Jumlah ijin yang diterbitkan DPMPTSP selama 5 tahun terakhir berfluktuatif. pada tahun 2015 sebanyak 4.016 ijin kemudian pada tahun 2016 naik cukup signifikan menjadi sebesar 4.618 ijin. Pada tahun 2017 naik sebanyak 4.329 ijin dan pada tahun 2018 turun sebanyak 2.500 ijin. Pada tahun 2019 naik menjadi 3.563 ijin dimana yang diterbitkan paling banyak adalah Izin Bidang Kesehatan dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Perkembangan capaian kinerja perijinan Kabupaten Purbalingga dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.59.
Jumlah Ijin yang Diterbitkan Tahun 2015-2019

No	Jenis Izin	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Izin Lokasi / Pemanfaatan Lahan	19	10	11	10	380
2	Izin Gangguan (HO)	787	772	619	0	
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	572	641	922	633	655
4	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	755	1.004	1.036	644	442
5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	708	1.016	1.046	657	694
6	IUI/TDI	21	30	42	50	38
7	IUI PHHK	-	-	-	-	
8	Izin Reklame	962	913	512	390	463
9	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	147	143	87	90	67
10	Izin Mendirikan Perush. Pengangkutan	15	22	7	2	1
11	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	9	15	11	10	16
12	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	21	52	36	14	10

No	Jenis Izin	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
13	Izin Bidang Kesehatan					797
	Jumlah	4.016	4.618	4.329	2.500	3.563

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Purbalingga. 2019

Adapun perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga selama tujuh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.60.
Realisasi Investasi Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Realisasi (Rp)
4	2015	314.812.853.495
5	2016	230.003.281.000
6	2017	483.271.457.226
7	2018	617.870.000.000
8	2019	679.695.974.000

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Purbalingga. 2019

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu pendukung upaya pembangunan manusia. Salah satu tujuan dari pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga adalah memupuk dan mengembangkan semangat kepeloporan, patriotism, nasionalisme serta mengembangkan jiwa sportifitas disamping juga dalam rangka meningkatkan kualitas jasmani generasi muda.

Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Purbalingga masih perlu untuk ditingkatkan. Dalam tahun 2017 fasilitasi kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebanyak 6 (enam) kegiatan, sedangkan fasilitasi kegiatan olahraga sebanyak 26 kegiatan. Adapun jumlah prestasi olahraga Kabupaten Purbalingga di tingkat regional sebanyak 6 (enam) prestasi dan di tingkat nasional sebanyak 60 (enam puluh) prestasi. Selanjutnya pada tahun 2018. terjadi peningkatan prestasi olah raga. Pada tingkat regional / provinsi. terdapat 112 prestasi. sedangkat pada tingkat nasional terdapat 54 prestasi olah raga. Dalam rangka optimalisasi pelayanan masyarakat bidang olah raga sekaligus upaya peningkatan olah raga prestasi. pemerintah daerah terus berupaya melakukan peningkatan prasarana dan sarana pendukung olah raga. antara lain dengan dilakukannya revitalisasi GOR Goentoer Darjono dan pembangunan fasilitas lapangan olah raga indoor.

Salah satu tantangan dalam upaya pembangunan manusia khususnya dalam pembangunan kepemudaan adalah adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba. Untuk itu perlu peningkatan sosialisasi bahaya narkoba khususnya di kalangan generasi muda.

14. Statistik

Statistik memiliki peranan sebagai penyedia bahan maupun keterangan dalam berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan. Statistik juga sebagai peralatan analisis dan interpretasi data kuantitatif guna memperoleh suatu kesimpulan yang nantinya dijadikan bahan rumusan kebijakan. Dalam tahun 2019 terdapat kegiatan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang berisi 31 jenis data dan 2.691 elemen data. Dan juga kegiatan penyediaan data dasar pembangunan daerah dengan output tersedianya publikasi buku Purbalingga Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, evaluasi IPM dan buku-buku evaluasi kinerja pembangunan daerah yang berisi data-data PDRB, IHK dan data-data sosial seperti data susenas dan sakernas. Data statistik dimaksud dimanfaatkan dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah.

15. Persandian

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan persandian meliputi: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota. Pengelolaan persandian di Kabupaten Purbalingga secara umum telah berjalan dengan baik. Namun demikian kemampuan petugas dalam penggunaan peralatan santel perlu ditingkatkan guna mengantisipasi kebocoran atau penyadapan informasi pemerintah daerah oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

16. Kebudayaan

Pembangunan bidang seni budaya merupakan salah satu upaya pembangunan karakter bangsa. Seni budaya khususnya seni budaya nasional merupakan wahana internalisasi nilai-nilai luhur yang perlu untuk terus ditanamkan dan dikembangkan untuk memperkuat karakter dan integritas bangsa. Disamping itu seni budaya secara umum dapat menjadi media untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Di tengah kehidupan yang semakin materialistis dan semakin menguatnya gelombang

globalisasi. ada kecenderungan semakin menurunnya apresiasi terhadap seni budaya bangsa.

Oleh karena itu. perlu adanya kebijakan dan program yang nyata dalam rangka peningkatan apresiasi terhadap seni budaya khususnya yang bersifat tradisional, intensitas kegiatan kajian, fasilitasi, pementasan serta pengiriman duta seni maupun pembinaan organisasi dan kelompok kesenian yang ada perlu terus ditingkatkan. Demikian juga berbagai kekayaan warisan sejarah berupa benda-benda cagar budaya yang sangat banyak di Kabupaten Purbalingga perlu terus dipelihara dan dijaga agar tetap lestari sehingga generasi yang akan datang dapat mengetahui akar budayanya.

17. Perpustakaan

Peningkatan kualitas manusia tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan masyarakat. Ilmu yang dapat diserap oleh peserta didik di bangku pendidikan sangatlah terbatas dan lebih bersifat sebagai bekal dasar dan stimulasi bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu perlu dikembangkan semangat untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi serta wawasan pengetahuan lainnya dalam masyarakat khususnya bagi anak-anak dan generasi muda antara lain melalui pengembangan budaya membaca. Peran perpustakaan sangat penting dalam rangka mendorong dan mendukung pengembangan budaya membaca. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 sebanyak 930 unit yang terdiri dari 2 unit perpustakaan umum, 80 perpustakaan Desa/Kel, 811 perpustakaan Sekolah/Madrasah, 8 perpustakaan Pondok Pesantren, 8 perpustakaan Rumah Ibadah dan 4 Perpustakaan Khusus.

18. Kearsipan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah: (a) menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara. pemerintahan daerah. Lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional; (b) menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; (c) menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-

hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; (e) mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; (f) menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (g) menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan (h) meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan, serta lembaga kearsipan.

Cakupan OPD/ormas/BUMD/lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2019 sebanyak 181 unit, dan jumlah arsip daerah yang telah didokumentasikan dalam bentuk elektronik sebanyak 45.703 berkas. SIDOMAS merupakan upaya inovatif untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan kearsipan, dengan Alih Media Sistem Informasi Dokumentasi Masyarakat (SIDOMAS) mampu melayani kearsipan sebanyak 40.616 KK.

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Perikanan

Kinerja pembangunan perikanan salah satunya dapat dilihat dari produksi perikanan budidaya. Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 terjadi kenaikan produksi perikanan kolam dari sebesar 4.872 ton pada tahun 2015 menjadi sebesar 6.886 pada tahun 2019.

Sedangkan tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Purbalingga masih pada tahun 2015 tingkat konsumsi ikan sebanyak 8.27 menjai 21.9 per kapita pertahun pada tahun 2019. Kondisi itu masih jauh

dengan tingkat konsumsi ikan nasional yang berada di angka 35 kilogram per kapita pertahun. Masih minimnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat karena ketersediaan ikan di masyarakat belum maksimal. Salah satunya mengenai akses masyarakat untuk mendapatkan ikan di pasar. Penyebab lainnya yaitu masih belum dikenalnya produk olahan ikan di masyarakat. Selain itu masih ada anggapan olahan ikan masih berbau menyengat (amis). Sehingga masyarakat masih enggan mengonsumsi olahan ikan itu. Produksi ikan, tingkat konsumsi ikan, produksi hasil olahan ikan dan jumlah pasar ikan di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.61.
Produksi Ikan, Tingkat Konsumsi Ikan, Produksi Hasil Olahan Ikan Dan Jumlah Pasar Ikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015– 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Produksi Ikan di kolam	Ton	4.872	5.001	6.303	6.083	6.886
2	Produksi Ikan di Sungai	Ton	249.500	254.000	253.400	230.570	267.356
3	Produksi ikan di UPR	Ekor (ribu)	115.442	116.379	174.293	228.352	252.271
4	Tingkat konsumsi ikan penduduk	kg/kapita /tahun	8.27	8.73	13	14.66	21,9
5	Jumlah produksi hasil olahan ikan	Ton	1.590	1.511	1.742.9	1.896.5	2.035,17
6	Jumlah Pasar Ikan	Unit	12	12	12	12	12

Sumber: DKPP Kab. Purbalingga. 2019

2. Pariwisata

Sektor Pariwisata saat ini sangat penting dalam pengembangan perekonomian daerah. Sektor pariwisata dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang potensial. Pariwisata tumbuh dari upaya memanfaatkan potensi alam maupun dengan membuat obyek wisata buatan yang memiliki kekhasan dan keunggulan suatu daerah. Rincian daerah wisata di Kabupaten Purbalingga terdiri dari wisata alam (Gua Lawa, Pendakian Gunung Slamet), wisata budaya (MTL Jend. Soedirman, Petilasan Ardi Lawet), wisata buatan (Owabong, Sanggaluri Park, Kolam Renang Tirto Asri Walik, TWP Purbasari Pancuran Mas, Buper Munjulluhur, Taman Usman Janatin Purbalingga, Kolam Renang Ciblon Bobotsari, Kutabawa Flower Garden, Rainbow Garden Kutabawa, Kampung Warna Bobotsari, Rest Area RM Siregol, Wisata

Edukasi Kampung Marketer, Kampung Duku Kembaran Wetan, Rest Area Berkah Mulia/Cheng Hoo) dan desa wisata/rintisan desa wisata sebanyak 28 desa.

Pendapatan dari sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar bagi APBD Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar Rp 44.781.457.446,-. Data jumlah wisatawan dan pendapatan dari sektor pariwisata sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.62.
Jumlah Wisatawan dan Pendapatan dari Obyek Wisata Menurut Bulan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Bulan	2019		
	Wisatawan		Pendapatan (rupiah)
	Manca Negara	Domestik	
Januari	10	251.106	3.824.956.480
Februari	7	238.236	3.117.867.656
Maret	7	361.049	4.393.695.939
April	7	295.022	4.075.620.548
Mei	5	142.060	1.418.687.669
Juni	17	484.722	8.911.814.799
Juli	25	233.031	3.186.420.185
Agustus	38	175.998	1.954.537.342
September	7	269.555	2.802.710.286
Oktober	16	190.408	2.539.375.895
November	8	250.778	2.187.406.350
Desember	2	387.327	6.368.364.297
Jumlah	149	3.279.292	44.781.457.446

Sumber : Dinporapar Kab. Purbalingga 2019

Di Kabupaten Purbalingga terdapat beberapa obyek wisata unggulan yaitu 5 (lima) obyek wisata unggulan yaitu Owabong, Gua Lawa, Sanggaluri Park, Pancuran Mas Purbayasa dan Desa Wisata Serang. Perkembangan wisata di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.63.
Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah obyek wisata unggulan	Unit	5	5	12	12	10
2	Jumlah wahana baru pada obyek wisata	Unit	9	9	-	-	-

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
3	Jumlah kelompok sadar wisata / pemandu wisata	Kelompok	11	13	15	15	30
4	Jumlah kunjungan wisatawan (Wisman dan Wisnus)	Org	1.318.883	1.343.147	1.748.009	3.793.272	3.279.292
5	Rata-rata tingkat hunian hotel	%	17.86	20.97	35.21	-	NA
6	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	2	4	1.32	-	NA
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1.822	1.86	1.9	-	2.4
8	Jumlah restoran	Unit	20	20	20	40	43
9	Jumlah penginapan/ hotel	Unit	11	11	11	14	14

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan Dinporapar Kab. Purbalingga, 2019

3. Pertanian

Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan Sarana Pertanian; pengembangan prasarana pertanian; pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian; serta pemberian Perizinan Usaha Pertanian.

Sektor pertanian masih memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dimana kategori lapangan usaha pertanian menempati urutan kedua dalam PDRB setelah lapangan usaha industri yaitu sebesar 26.22%. Potensi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Purbalingga meliputi padi sebesar 205.172 ton, jagung 48,153 ton, ubi kayu 49.874 ton dan kedelai 3.152 ton.

Dilihat dari produktivitasnya baik padi, ubi kayu maupun kedelai dalam kurun waktu tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan dan penurunan. Hal ini didukung dengan berbagai upaya revitalisasi pertanian serta peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur pertanian.

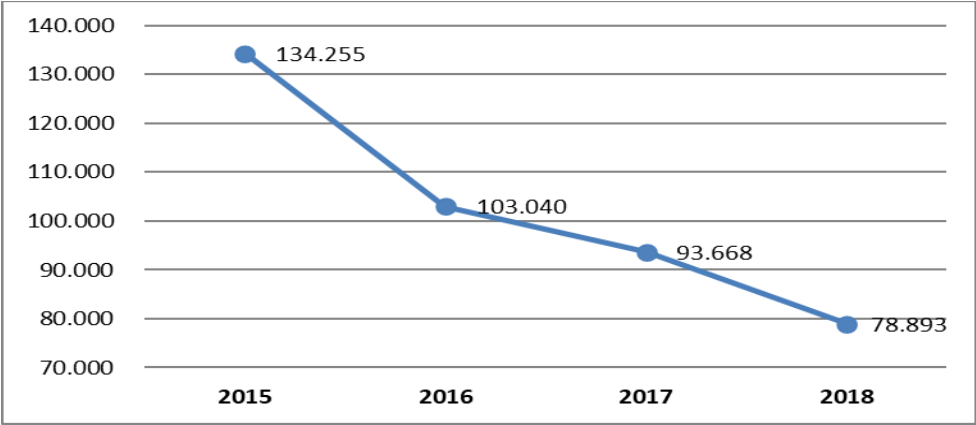
Penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian pun juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Namun di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan. Secara rinci perkembangan produksi pertanian tanaman pangan, pupuk dan peternakan sebagaimana termuat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.64.
Perkembangan Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan dan
Penggunaan Pupuk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Produksi pertanian tanaman pangan (per jenis komoditas)						
	Padi	Ton	219.211	226.707	237.887	281.368	205.172
	Jagung	Ton	35.704	43.095	52.151	36.835	48,153
	Kedele	Ton	201	134	126	11.461	3.152
	Ubi kayu	Ton	68.448	62.513	64.303	82.556	49.874
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						
	Padi Sawah	Kw/Ha	56.48	55.79	54.71	66.44	54,46
	Jagung	Kw/Ha	56.34	52.64	61.13	53.71	60,67
	Kedele	Kw/Ha	14.15	15.07	14.98	13.61	18,67
	Ubi kayu	Kw/Ha	272.16	280.07	274.37	323.85	300,37
3	Tingkat penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian (Ton)						
	Urea	Ton	14.819	15.425	16.490	13.182.5	11.761
	ZA	Ton	891	865	1.000	580.2	564
	SP36	Ton	1.340	1.402	1.053	NA	573
	Phonska (NPK)	Ton	5.101	5.998	7.500	5.035	4.683
	Organik (Pabrikan)	Ton	3.172	992	171.9	351.8	788

Sumber: BPS Ksumber: BPS Kabupaten Purbalingga. 2019

Adapun jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian dalam kurun waktu 3 tahun mengalami penurunan. dari 134.255 orang di tahun 2015 menjadi 78.893 orang pada tahun 2018. Sebagaimana gambar berikut ini.



Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, 2019

Gambar 2.26.
Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2018

Potensi peternakan di Kabupaten Purbalingga yang utama adalah sapi potong, kambing, ayam ras petelur, ayam buras, dan ayam ras potong. Jumlah ternak sapi potong cenderung mengalami penurunan. tahun 2015 tercatat sebanyak 13.522 ekor turun menjadi sebesar 11,472 dan 11.509 ekor di tahun 2016 dan 2017. Kemudian dan meningkat menjadi sebesar 12.029 di tahun 2018 dan 12.335 ekor di tahun 2019. Sedangkan untuk populasi kambing pada tahun 2015 berjumlah 375.471 ekor dan pada tahun 2018 dan 2019 turun menjadi 259.181 ekor. Jumlah populasi ternak dan produksi hasil peternakan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.65.
Jumlah Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah populasi ternak per jenis:						
	Sapi potong	Ekor	13.522	11.472	11.509	12.029	12.335
	Sapi perah	Ekor	116	110	80	81	67
	Kerbau	Ekor	1.152	1.215	948	930	925
	Kambing	Ekor	375.471	394.245	194.747	259.180	259.181
	Domba	Ekor	56.821	59.662	22.489	25.781	25.781
	Ayam buras	Ekor	2.139.738	2.246.725	2.996.084	1.115.359	765.723
	Ayam Ras petelur	Ekor	738.009	774.909	326.067	828.918	954.550
	Ayam Ras pedaging	Ekor	4.570.760	4.799.298	1.006.678	4.072.000	4.953.102
	Itik	Ekor	119.326	62.636	54.277	75.600	66.140
	Puyuh	Ekor	57.610	82.894	2.993	114.700	120.925
2.	Jumlah produksi hasil peternakan						
	Daging	Kg	NA	NA	1.031.719	15.864.990	339.72
	Telur	Ton	5.396	5.835	7.835	14.970	13.198
	Susu	Liter	269.941	157.562	157.562	205.279	238.462

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. 2019

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kewenangan pemerintah daerah pada urusan energi dan sumberdaya mineral sangat terbatas. hanya terkait dengan pengembangan energi baru dan terbarukan yaitu Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota. Kinerja pembangunan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rasio elektrifikasi. dan Jumlah sumber energi / pembangkit listrik non PLN.

Rumah tangga yang menggunakan listrik (PLN) selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. dari 166.984 rumah tangga pada tahun 2012 meningkat menjadi 228.036 rumah tangga pada tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 26.8 persen. Meningkatnya kebutuhan listrik diikuti pula dengan peningkatan daya listrik terpasang yang semula sebesar 142.065.896 KVA di tahun 2012 naik menjadi 199.645.416 KVA pada tahun 2016.

Data tahun 2015. rasio elektrifikasi di wilayah Kabupaten Purbalingga sebesar 81.41%. dan tahun 2017 sebesar 92.75% artinya masih ada 7.25% rumah yang belum terjangkau listrik. Keterbatasan pelayanan listrik PLN di Kabupaten Purbalingga di wilayah yang agak terpencil menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan listrik. Untuk meningkatkan ketersediaan listrik pada wilayah yang belum terjangkau PLN. telah dikembangkan pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan. Jumlah sumber energi / pembangkit listrik non PLN pada tahun 2016 sebanyak 3 unit. Tentunya diperlukan penambahan pembangkit listrik non PLN agar rasio elektrifikasi rumah tangga meningkat.

Kebutuhan air bersih di Kabupaten Purbalingga. diantaranya berasal dari sumber mata air yang dikelola oleh PDAM. Penyalurannya dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Data air PDAM yang telah disalurkan di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.66.
Jumlah Air PDAM yang Disalurkan, Debit Mata Air dan Debit Sungai di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2018

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja			
			2015	2016	2017	2018
1	Air PDAM disalurkan	m ³	8.748.210	9.607.779	10.808.023	11.613.926
2	Debit mata air	m ³ /dtk	75 - 975	75 – 975	75 – 975	75 – 975
3	Debit sungai	m ³ /dtk	0.026-17.33	0.026-17.33	0.026-17.33	0.026-17.33

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga. 2018

5. Perdagangan

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perdagangan mencakup Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; Sarana Distribusi Perdagangan; Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Pengembangan Ekspor; serta Standardisasi dan Perlindungan

Konsumen. Di Kabupaten Purbalingga kinerja urusan perdagangan menunjukkan perkembangan yang baik. Penyelenggaraan perizinan dan pendaftaran diselenggarakan oleh DPMPTSP. Berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana, terlihat bahwa Persentase pasar yang memenuhi persyaratan capaiannya hanya sebesar 90%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat pasar yang memerlukan perbaikan sehingga kondisinya menjadi layak. Sementara itu berkaitan dengan PKL kinerjanya sudah baik, dengan capaian persentase PKL yang tertata sebesar 10%.

Total nilai ekspor dalam kurun waktu empat tahun cenderung meningkat dari sebesar Rp 13.116.675.176.271.- pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 3.042.711.573.350.- pada tahun 2017 dan Rp 3.029.223.587.134.- pada tahun 2018. Tentunya jumlah ekspor ini perlu ditingkatkan dengan menambah produk yang bisa diterima pasar internasional melalui pemasaran dan perbaikan mutu produk industri. Adapun berkaitan dengan perlindungan konsumen, kinerjanya sudah optimal ditunjukkan dengan indikator tingkat terlindunginya konsumen yang mencapai 100%, artinya dari seluruh pasar tradisional dan pasar modern yang ada telah dilakukan pengawasan. Data perkembangan kondisi perdagangan di Kabupaten Purbalingga sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.67.
Perkembangan Kondisi Perdagangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tingkat Terlindunginya konsumen	%	100	100	100	100	100
2	Penanganan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
3	Total nilai ekspor	Rupiah	3.116.675.176.271	3.334.842.438.610	3.042.711.573.350	3.029.223.587.134	18.169.076.070.223
4	Pembangunan promosi perdagangan Internasional	%	10	10	10	10	10
5	Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional	Produk	4	4	4	4	4
6	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	10	10	10	10	10
7	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	90	90	90	90	90

No	Uraian	Satuan	Tahun				2019
			2015	2016	2017	2018	
8	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga. 2019

6. Perindustrian

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perindustrian mencakup Perencanaan Pembangunan Industri; Perizinan; dan Sistem Informasi Industri Nasional. Jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu empat tahun dari sebesar 42.719 unit pada tahun 2015 menjadi sebanyak 43.239 unit pada tahun 2018. Jumlah sentra industri juga menunjukkan peningkatan dari sebanyak 205 pada tahun 2015 menjadi 230 pada 2018.

Berkaitan dengan inovasi iptek. jumlah industri mikro kecil dan menengah menggunakan inovasi teknologi sampai dengan tahun 2015 sebanyak 645 unit dan meningkat pada tahun 2018 menjadi sebanyak 655 unit. Sementara itu persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi selama 4 tahun menunjukkan peningkatan. dari 26.22% pada tahun 2015 menjadi 28.80% di tahun 2018. Berkaitan dengan menggunakan bahan baku. Jumlah industri berbahan baku lokal meningkat dari sebanyak 25.120 unit pada tahun 2014 menjadi 30.250 unit pada tahun 2018. Adapun perkembangan indikator kinerja urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68.
Perkembangan Kondisi Perindustrian Kabupaten Purbalingga 2015-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	3.25	3.72	3.75	3.80
2	Jumlah industri (rumah tangga. kecil. menengah) yang menggunakan inovasi teknologi	Unit	645	649	652	655
3	Jumlah penerapan standar-isasi produk industri (SNI)	Unit	7	8	8	9
4.	Jumlah industri kecil dan menengah	Unit	42.719	42.929	43.127	43.239
5.	Persentase IKM. yang telah mengikuti pameran promosi produk	Unit	2-3	2-3	2-4	2-4
6.	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	26.22	28.74	28.77	28.80

7.	Persentase klaster industri yang berkembang	%	41.02	42.18	43.15	43.20
8.	Jumlah sentraindustri	Unit	205	212	225	230
9.	Jumlah industri berbahan baku lokal	Unit	25.374	25.405	30.225	30.250

Sumber : Dinperindag Kab. Purbalingga. 2019

7. Transmigrasi

Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk salah satunya dilakukan dengan transmigrasi penduduk. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari daerah yang kepadatan penduduknya tinggi ke daerah yang kepadatan penduduknya rendah. Tujuan dari transmigrasi yaitu melakukan penempatan penduduk secara merata diseluruh daerah. Realisasi pemberangkatan transmigrasi dari Kabupaten Purbalingga limatahun terakhir seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69.
Pemberangkatan Transmigrasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2019

No	Pemberangkatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Transmigran Umum	2 KK/ 7 jiwa	10 KK/33 jiwa	0	0	0

Sumber :Dinaker Kabupaten Purbalingga. 2019

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Kecenderungan praktik pemerintahan dewasa ini menunjukkan kuatnya semangat untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kecenderungan ini didorong oleh semakin derasnya tuntutan demokrasi. transparansi. dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (termasuk hak memperoleh informasi yang benar). Praktik pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa pengelolaan dan keputusan manajemen publik harus dilakukan secara terbuka dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat. Konsekuensi dari transparansi pemerintahan adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi. terutama dalam proses pengambilan keputusan.

Ada beberapa ukuran untuk menilai tata kelola pemerintahan daerah antara lain kepuasan masyarakat, pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja sebuah pemerintahan. Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 menunjukkan kinerja yang baik dengan nilai 79 dan meningkat pada

tahun 2019 dengan nilai 82.30. Sedangkan opini laporan keuangan sudah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Indikator kinerja lain yang menunjukkan pengelolaan pemerintahan yang profesional adalah nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tahun 2017 dan 2018 terakhir nilai AKIP baru mencapai nilai CC, sedangkan pada tahun 2019 menjadi B dengan nilai 61.50. Selengkapnya nilai akuntabilitas secara rinci tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.70.
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2015 – 2019

Komponen		Skor					Skor Maksimum
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Perencanaan Kinerja	18.45	17.84	18.88	19.15	20.02	30
2	Pengukuran Kinerja	7.47	9.55	12.24	12.39	13.26	25
3	Pelaporan Kinerja	9.71	8.96	10.05	10.32	10.60	15
4	Evaluasi Internal	5.25	5.62	5.27	6.06	6.21	10
5	Capaian Kinerja	9.32	8.06	11.31	10.86	11.41	20
Nilai Hasil Evaluasi		50.20	50.03	57.75	58.79	61.50	100
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	CC	CC	B	AA

Sumber : Kemenpan dan RB. 2016 –2020

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Rata-Rata Pengeluaran Penduduk

Pengeluaran rata-rata penduduk per kapita sebulan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 sebesar Rp 897.401.-.Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp 742.830.- per kapita sebulan.Kenaikan ini dimungkinkan karena naiknya harga berbagai jenis kebutuhan penduduk yang ditandai dengan adanya inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2018.

Pada tahun 2018. rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Purbalingga digunakan untuk kebutuhan makanan sebesar Rp. 471.610.- atau

sebesar 52.55 persen. sedangkan sisanya sebesar Rp 425.791.- atau 47.45 persen untuk kebutuhan bukan makanan. Secara lengkap Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2018 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.71.
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis
Pengeluaran Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2018

Jenis Pengeluaran	2015		2016		2017		2018	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
Makanan	318.784	49.11	335.432	51.38	387.634	52.18	471.634	52.55
Bukan Makanan	330.363	50.89	317.361	48.62	355.196	47.82	425.791	47.45
Jumlah	649.147	100	652.793	100	742.830	100	897.401	100

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, 2018

Persentase pengeluaran untuk kebutuhan makanan selama kurun waktu 2015-2018 mengalami kenaikan dari 49.11 persen pada tahun 2015 menjadi 52.55 persen pada tahun 2018. Sebaliknya persentase pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan menurun dari 50.89 persen di tahun 2015 menjadi 47.45 persen di tahun 2018.

Pola pengeluaran penduduk seharusnya bergeser dari yang sebelumnya sebagian besar untuk pengeluaran makanan menuju pengeluaran untuk non makanan. Perubahan pendapatan seseorang diharapkan akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan. diharapkan semakin tinggi pengeluaran bukan makanan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

B. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan angka yang menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani di pedesaan pada tahun tertentu dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan pada tahun dasar.

Secara umum penghitungan NTP menghasilkan 3 (tiga) pengertian yaitu:

- 1. NTP > 100 yang berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar. Pada kondisi ini, berarti

petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga barang dan jasa konsumsi serta biaya produksi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik disbanding tingkat kesejahteraan petani periode sebelumnya

2. $NTP = 100$ berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar. Artinya petani mengalami impas/*break even*. Kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang dan jasa konsumsi serta biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani dapat dikatakan tidak mengalami perubahan.
3. $NTP < 100$ yang berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar. Kondisi ini berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan petani serta biaya produksi. Sehingga dapat dikatakan tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2018 secara umum sebesar 103,90 persen, dan secara year on year mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen dari Tahun 2017. Ini artinya petani di Kabupaten Purbalingga dari hasil penjualan produksi pertanian bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan barang modal untuk usaha pertaniannya, dan masih surplus sebesar 3,90 persen.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Aspek daya saing daerah di bidang infrastruktur/fasilitas wilayah menunjukkan tingkat pencapaian daerah dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktifitas masyarakat pada bidang sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan dan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. Di sisi lain hal tersebut juga menunjukkan daya tarik daerah untuk investasi dilihat dari ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur.

A. Infrastruktur Jalan

Sejak tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai

mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pelebaran jalan Kolektor Primer antar ibukota kecamatan dan untuk jalan-jalan strategis tertentu. Kondisi jalan kabupaten dengan lebar minimal 5.5 meter pada tahun 2019 mencapai 83.00% dan telah melampaui target RPJMD sebesar 19.13% meskipun belum mencakup seluruh ruas jalan utama antar kecamatan.

Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Purbalingga terus ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir. Adapun kondisi di Tahun 2019 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.72.
Kondisi Infrastruktur Jalan Mendasarkan Kewenangannya di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Kewenangan Jalan	Kondisi Ruas Jalan								Total Panjang (km)
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
	km	%	km	%	km	%	km	%	km
Provinsi	26,08	66,84	5,69	14,58	5,75	14,74	1,50	3,84	39,02
Kabupaten	376,277	42,37	360,449	40,59	104,904	11,81	46,457	5,23	888,087
Jumlah	402,357	43,40	366,139	39,49	110,654	11,94	47,957	5,17	927,107

Sumber : DPU PR Kabupaten Purbalingga. 2019

B. Bandara JB Soedirman

Keberadaan Bandara JB Soedirman yang saat ini masih dalam tahap pembangunan dapat menjadi “pengungkit” perkembangan ekonomi di wilayah Jawa Tengah bagian Tengah Barat. Target beroperasinya bandara pada tahun 2020 ini akan membuka peluang investasi yang seluas-luasnya.

Kemudahan transportasi melalui jalur udara. terbukanya akses pintu tol Pemalang. serta rencana Reaktivasi jalur KA Purwokerto – Wonosobo menjadikan letak geografis Kab. Purbalingga menjadi sangat penting. Menjadi titik simpul pengembangan ekonomi wilayah Banyumas. Banyumas. Cilacap. Kebumen. Wonosobo. dan juga Pemalang.

C. Drainase

Drainase adalah saluran pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan tanah. Saluran drainase merupakan prasarana yang melekat dengan lingkungan permukiman. yang dirancang bangun untuk menata lingkungan hidup yang aman, nyaman, bersih dan sehat serta keberlanjutan.

Tabel 2.73.
Kondisi Jaringan Drainase di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
1.	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm. selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	%	45.45	45.45	45.45	45.45
2	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	%	10.87	9.56	6.33	6.18

Sumber : DPU-PR Kabupaten Purbalingga. 2019

Drainase di Kabupaten Purbalingga perlu direncanakan secara sistematis dalam lingkup kewilayahan yang terintegrasi dengan infrastruktur jalan. bangunan gedung dan permukiman sesuai karakteristik lingkungannya. Pada tahun 2013sampai dengan 2018 drainase dalam kondisi baik mencapai 45.45%. Kondisi ini menunjukkan masih banyak saluran drainase dalam kondisi rusak. bahkan terdapat drainase yang tidak berfungsi. Kerusakan maupun penurunan fungsi drainase perlu segera mendapat penanganan secara teknis dan terintegrasi. Penurunan fungsi drainase sangat berpengaruh terhadap daya angkut air/pengaliran air permukaan yang dapat menyebabkan genangan. banjir maupun berimbas pada kerusakan infrastruktur jalan. bangunan. drainase itu sendiri. lingkungan sekitar. maupun infrastruktur drainase itu sendiri.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

A. Keamanan dan Ketertiban

Salah satu pertimbangan bagi calon investor untuk berinvestasi adalah faktor keamanan dan ketertiban. Keamanan adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Adapun pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan.

ketertiban. dan tegaknya hukum. serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal. mencegah. dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Tugas Satpol PP menjaga ketertiban dan keamanan dibantu oleh masyarakat yang bertugas sebagai perlindungan masyarakat (linmas). Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk pada tahun 2013 sebesar 63.15 menurun di tahun 2018 hanya pada angka 25.8. Penurunan tersebut diantaranya disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pengangkatan linmas baru.

Sementara untuk mendukung tugas linmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan tersedia sarana berupa Pos Siskamling. pada tahun 2013 rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan sebesar 3.58 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 41.84. Peningkatan rasio pos siskamling tersebut karena adanya pengembangan kegiatan siskamling dari Polri. Adapun Perkembangan Kinerja Urusan Ketenteraman. Ketertiban Umum. dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74.
Perkembangan Kondisi Keamanan dan Kertertiban
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	93	93	100	100	100
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan) di Kabupaten	%	93	94.40	100	100	100
3.	Angka kriminalitas	Kasus	188	NA	225	171	163
4.	Angka kriminalitas yang tertangani	Kasus	135	NA	156	134	139
		%	71.81	NA	69.33	78.36	85.28

Sumber: Satpol PP dan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga. 2019

B. Kemudahan Perijinan

Dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan pelayanan public di Kabupaten Purbalingga dikeluarkan kebijakan dengan pemberian kemudahan perijinan melalui perijinan terpadu satu pintu (PTSP) serta layanan perijinan secara online. Adapun kemudahan perijinan di Kabupaten Purbalingga dapat

dilihat dari indikator sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.75.
Indikator Kemudahan Perijinan di Kabupaten Purbalingga 2017-2019

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019
1	Lama Waktu Perijinan Investasi	Hari	5.2	5.0	4.4
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan	Angka	78.51	79.37	81.39

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Purbalingga. 2019

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

A. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk tidak produktif lagi (65 tahun+) dengan penduduk produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi. Selanjutnya akan semakin besar pula hambatan tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Dari seluruh penduduk Kabupaten Purbalingga di tahun 2019 sebanyak 23.09 % adalah kelompok umur anak-anak (0-14 tahun); 67.68 % adalah kelompok umur produktif (15-64 tahun) dan 9.23 % adalah kelompok umur tua (65 tahun ke atas).

Tabel 2.76.
Rasio Ketergantungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2015– 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio ketergantungan muda	41.17	39.38	38.26	34.27	34.12
Rasio ketergantungan tua	12.18	13.01	13.25	17.87	13.63
Rasio ketergantungan	53.35	52.72	52.14	51.51	47.76

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga dan Dindukcapil Kab. Purbalingga. 2020

Rasio ketergantungan penduduk pada tahun 2019 sebesar 47.76 yang artinya diantara 100 orang penduduk produktif harus menanggung sekitar 47 orang penduduk tidak produktif. Rasio ketergantungan ini mengalami penurunan dibanding tahun 2018 dimana 100 penduduk produktif harus menanggung beban 52 orang penduduk tidak produktif yaitu 34 anak-anak dan 18 orang lansia.

Angka rasio ketergantungan muda lebih tinggi dibandingkan rasio ketergantungan tua. Hal ini menunjukkan perlunya program-program pembangunan yang diprioritaskan untuk memperkecil rasio ketergantungan

anak. misalnya penguatan program Keluarga Berencana (KB) dan program pendidikan untuk penduduk usia muda.

B. Rasio Lulusan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk juga dapat dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Penduduk dengan pendidikan hingga SD termasuk mereka yang belum pernah sekolah tercatat sekitar 65.00 persen. dengan rincian; tidak/belum pernah sekolah sebanyak 2.71 persen. tidak/belum menamatkan pendidikannya di bangku Sekolah Dasar sebanyak 24.07 persen. dan yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai Sekolah Dasar sebesar 38.22 persen. Proporsi yang cukup tinggi ini membawa konsekuensi antara lain upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun keterampilan mereka yang cukup minim.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021

2.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan pendidikan sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.78.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pendidikan Anak Usia Dini									
1	APK PAUD	%	100	97.7	69.86	83.67	85.64	83.67	
2	Cakupan Guru PAUD memenuhi kualifikasi	%	43	42	83.07	83.07	197.79	193.19	
Program Wajar Dikdas 9 Tahun									
3	APK SD/Sederajat	Angka	110	109.59	106.32	120.37	109.84	109.43	
4	APM SD/Sederajat	Angka	93.5	91.35	92.32	105.7	115.71	113.05	
5	APK SMP/Sederajat	Angka	100.3	100.26	101.62	139.47	139.11	139.05	
6	APM SMP/Sederajat	Angka	72.5	69.99	73.19	102.51	146.46	141.39	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pendidikan Non Formal									
7	Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi	%	100	88	15	25	28.41	25.00	▼
8	Persentase pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi	%	100	72	22.2	55.56	77.16	55.56	▼
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
9	Jumlah Pendidik/tenaga kepedidikan berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Org	8	7	2	3	42.86	37.50	▼
10	Persentase tingkat kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan	%	100	100	94.43	94.88	94.88	94.88	▶
11	Persentase sertifikasi pendidik	%	100	100	82.52	74.73	74.73	74.73	▼
12	Persentase pendidik lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	100	95	24.53	25.67	27.02	25.67	▼
Program Manajemen Pendidikan									
13	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip manajemen berbasis Sekolah	%	100	100	100	100	100.00	100	●
14	Persentase akreditasi PAUD	%	45	42	24.1	74	176.19	164.44	●
15	Persentase akreditasi SD/Sederajat	%	45	42	97.85	91	216.05	201.65	●
16	Persentase akreditasiSMP/ sederajat	%	85	84	94.83	95	112.94	111.61	●
17	Cakupan capaian SPM :SD/ sederajat	%	98.04	93.44	90.89	93	99.08	94.43	▶
18	Cakupan capain SPM: SMP/ sederajat	%	90.52	83.65	84.91	80	95.19	87.97	▶
19	Persentase angka kelulusan : SD/ sederajat	%	100	100	100	99.9	99.90	99.90	▶
20	Persentase angka kelulusan SMP/ sederajat	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
21	% angka melanjutkan: SD/ sederajat	%	86.07	86.25	81.98	81.98	95.05	95.25	▶
22	% angka melanjutkan: SMP/ sederajat	%	84.29	84.39	76.07	76.07	90.14	90.25	▶
23	% angka putus sekolah : SD/ sederajat	%	0.17	0.18	0.03	0.03	600.00	566.67	●
24	% angka putus sekolah SMP/ sederajat	%	0.69	0.71	0.47	0.47	151.06	146.81	●

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
25	% angka mengulang:SD/ sederajat	%	4.80	4.96	3.68	2.21	224.35	217.11	●
26	% angka mengulang : SMP/ sederajat	%	0.20	0.21	0.24	0.26	79.55	75.76	▼
27	Indek integritas UN	%	96	94	100	100	106.38	104.17	●

- Sumber : Dindikbud Kabupaten Purbalingga. 2019

- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pendidikan tahun 2019 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 5 program dan 27 indikator RPJMD 2016-2021. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 14 indikator telah tercapai. 7 indikator akan tercapai dan 6 indikator perlu perhatian/upaya keras. Indikator yang perlu perhatian untuk pencapaian target kinerjanya. seperti Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi. Persentase pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi yang keduanya masuk dalam Program Pendidikan Non Formal; Jumlah Pendidik/tenaga kepedidikan berprestasi tingkat provinsi dan nasional. Persentase sertifikasi pendidik. Persentase pendidik lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) yang masuk dalam Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ; dan % angka mengulang : SMP/ sederajat yang masuk dalam Program Manajemen Pendidikan. Ketiga program dalam urusan pendidikan tersebut perlu upaya keras dalam mencapai target yang diharapkan pada tahun berikutnya.

B. Urusan Kesehatan

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan kesehatan sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.79.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pelayanan KIA. Remaja dan Usila									
1	Angka Kematian Ibu	per 100.000	110	120	75.05	81.19	147.80	135.48	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
2	Kasus Kematian Bayi	per 1.000	9.2	9.3	7.5	7.58	122.69	121.37	●
3	Angka Kematian Balita	per 1.000	11.65	11.68	9.28	9.1	128.35	128.02	●
Program Pengelolaan Farmasi Publik dan Perbekalan Kesehatan									
4	Persentase sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	100	100	96	85	85.00	85.00	▶
5	Persentase ketersediaan obat generik dan esensial sesuai standar dan kebutuhan	%	95	90	100	100	111.11	105.26	●
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan									
6	Jumlah Puskesmas perawatan	Unit	13	13	11	11	84.62	84.62	▶
7	Jumlah puskesmas mampu bersalin	Unit	22	22	14	16	72.73	72.73	▼
8	Jumlah Puskesmas poned	Unit	7	7	7	7	100.00	100.00	●
9	Jumlah RS Ponek	Unit	2	2	2	3	150.00	150.00	●
10	Jumlah Puskesmas terakreditasi	Unit	22	22	22	22	100.00	100.00	●
11	Jumlah RS terakreditasi	Unit	3	3	6	6	200.00	200.00	●
Program Perbaikan Gizi Masyarakat									
12	Prevalensi balita gizi kurang	%	2.5	2.5	3.09	2.83	88.34	88.34	▶
13	Cakupan bayi dengan BBLR	%	5	5.1	5.2	5.51	92.56	90.74	▶
14	Cakupan kecamatan bebas rawan gizi	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
15	Cakupan desa/kelurahan dengan konsumsi beryodium baik	%	100	100	100	94.70	94.70	94.70	▶
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan serta Penyehatan Lingkungan									
16	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
17	Cakupan kepemilikan jamban keluarga	%	90	83	73.91	76.4	92.05	84.89	▶
18	Cakupan akses jamban keluarga	%	100	100	87.59	92	91.50	91.50	▶
19	Cakupan desa memenuhi syarat kesehatan lingkungan	%	100	100	87	62.30	62.30	62.30	▼
20	Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	100	90	75.1	87	96.67	87.00	▶
21	Cakupan desa open Defecation Free (ODF)	%	100	76	44.77	62.30	81.97	62.30	▼

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
22	Cakupan per rumah tangga ber PHBS	%	93	90	85	81	90.00	87.10	▶
23	Cakupan Posyandu Mandiri	%	100	70	87	69.67	99.53	69.67	▼
24	Cakupan kepesertaan KB aktif	%	95	92	79.91	81	88.04	85.26	▶
25	Cakupan rumah sehat	%	87	82	71.3	76.55	93.35	87.99	▶
26	Cakupan desa/kelurahan melakukan STBM	%	100	100	95.82	100	100.00	100.00	●
27	Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal	%	100	95	100	100	105.26	100.00	●
28	Proporsi Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) yang memenuhi syarat	%	85	75	75.3	69.80	93.07	82.12	▶
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Kesehatan Matra									
29	Cakupan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
30	Prevalensi malaria	%	0.04	0.04	0	0	0.00	100.00	●
8.5	Case Notification Rate (CNR) TBC per 10.000	%	121.24	121.24	125	149	81.37	81.37	▶
32	Prevalensi HIV/AIDS	%	0.001	0.001	0.03	0.03	3.33	3.33	▼
33	Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani	%	5.45	5.45	5.45	5.45	100.00	100.00	●
34	Angka penemuan kasus baru kusta	Ks	24	24	18	23	104.35	104.35	●
35	Accute Flacid Paralysis (AFP)	Ks	4	4	2	6	66.67	66.67	▼
36	Incident Rate DBD per 10.000	ks/10.000	27.4	27.4	21	58	47.24	47.24	▼
37	Case Fatality Rate (CFR) DBD	%	2	2	1.58	0.8	250.00	250.00	●
38	Cakupan balita diare yang ditangani	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
39	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan									
40	Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi	%	100	100	62.65	100	100.00	100.00	●
41	Cakupan pelatihan tenaga kesehatan	%	100	100	92.27	98	98.00	98.00	▶
42	Rasio dokter umum per jumlah penduduk	%	40	40	15.84	19.75	49.38	49.38	▼

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
43	Rasio dokter spesialis per jumlah penduduk	%	6	6	4.48	13.86	231.00	231.00	●
44	Rasio tenaga paramedis per jumlah penduduk	%	118	85	61.93	155.12	182.49	131.46	●
45	Rasio bidan per jumlah penduduk	%	77	60	48.95	61.33	102.22	79.65	▼
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat									
46	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100.00	100.00	100.00	●
47	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	%	100	100	100	100.00	100.00	100.00	●
48	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan	%	100	100	93	86.30	86.30	86.30	▶
Program Pengawasan Obat dan Makanan									
49	Cakupan pengawasan peredaran obat	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
50	Cakupan pemeriksaan makanan dan minuman yang diperdagangkan	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan									
51	Cakupan BLUD pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah	Unit	23	23	0	23	100.00	100.00	●
52	Cakupan Puskesmas terakreditasi	%	22	22	22	22	100.00	100.00	●
53	Cakupan Rumah Sakit terakreditasi	%	3	3	2	3	100.00	100.00	●
54	Cakupan pelayanan perijinan/registrasi kesehatan	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
55	Cakupan pemanfaatan SIM pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah	%	1	1	1	1	100.00	100.00	●
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan									
Pelayanan Kesehatan Dasar									
56	Jumlah layanan rawat jalan Puskesmas	Orang/hari	250	125	0	0	0.00	0.00	▼
57	Bed Occupancy Ratio (BOR)		80	80	44.11	74.58	93.23	93.23	▶
58	Net Death Rate (NDR)		10	10	0.6	6.1	61.00	61.00	▼
59	Gross Death Rate (GDR)		20	20	0.59	12.9	64.50	64.50	▼
60	Length Of Stay (LOS)		9	9	3	61.58	684.22	684.22	●

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
61	Turn Over Interval (TOI)		3	3	34.44	24.53	817.67	817.67	●
62	Bed Turn Over (BTO)		50	50	7.6	153.91	307.82	307.82	●

- Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. 2019

- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan kesehatan tahun 2019 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 11 program dan 62 indikator RPJMD 2016-2021. Dari keseluruhan indikator tersebut. sebanyak 34 indikator telah tercapai. 16 indikator akan tercapai dan 12 indikator perlu perhatian/upaya keras.

Beberapa indikator kinerja program yang perlu upaya keras untuk pencapaian target kinerjanya. yaitu pada Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan dimana Jumlah puskesmas mampu bersalin perlu mendapat perhatian lebih. Kemudian dalam Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan serta Penyehatan Lingkungan dimana indikator Cakupan desa memenuhi syarat kesehatan lingkungan. Cakupan desa open Defecation Free (ODF) dan Cakupan Posyandu Mandiri perlu mendapat perhatian lebih. Kemudian dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Kesehatan Matra indikator Prevalensi HIV/AIDS. Accute Flacid Paralysis (AFP) dan Incident Rate DBD per 10.000 masih belum mencapai target kinerja. hal ini menunjukkan bahwa HIV/AIDS di Kabupaten Purbalingga masih tinggi.

Sementara itu dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan. indikator kinerja yang perlu mendapat perhatian yaitu Rasio dokter umum per jumlah penduduk dan Rasio bidan per jumlah penduduk. Selain itu dalam Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan beberapa indikator kinerjanya yang terkait dengan kualitas pelayanan kesehatan seperti Jumlah layanan rawat jalan Puskesmas. NDR. dan GDR belum menunjukan capaian kinerja yang mendekati target yang diharapkan. Guna pencapaian target akhir RPJMD. maka perlu dilakukan percepatan dan konsistensi pencapaian kinerja khususnya pada indikator yang perlu mendapat perhatian tersebut.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sampai dengan triwulan IV tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.80.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Penataan Ruang Daerah									
1	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang daerah	Doku-Men	1	0	0	2	0	200.00	●
2	Cakupan rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan	%	100	100	75.5	80.32	80.32	80.32	▶
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan									
3	Persentase bangunan cagar budaya yang terpelihara	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
4	Tersedianya produk hukum penataan bangunan dan lingkungan	Doku-men	1	1	0	0	0.00	0.00	▼
Program Pengelolaan Pertamanan dan Kawasan Perkotaan									
5	Jumlah taman kota	Bh	12	12	12	12	100.00	100.00	●
6	Luas taman	Ha	5.37	4.97	5.38	4.97	100.00	92.55	▶
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan									
7	Penambahan jalan	M	826.186	813.866	888.080	889.196	109.26	107.63	●
8	Jumlah jembatan	Unit	275	275	275	275	100.00	100.00	●
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Irigasi dan Sumberdaya Air									
9	Persentase bendung dan irigasi kondisi baik	%	40	39	41.57	43.95	112.69	109.88	●
10	Jumlah bendung	Bh	184	182	180	180	98.90	97.83	▶
11	Jumlah irigasi	Bh	256	256	258	256	100.00	100.00	●
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Pemerintahan									
12	Persentase bangunan pemerintah kondisi baik	%	60	50	50	50	100.00	83.33	▶

- Sumber : DPU-PR Kabupaten Purbalingga. 2019
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2019 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 6 program dan 12 indikator RPJMD 2016-2021. Dari keseluruhan indikator tersebut 7 indikator telah tercapai. 14 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu perhatian/upaya keras. Salah satu indikator yang perlu perhatian yaitu Tersedianya produk hukum penataan bangunan dan lingkungan pada Program Penataan Bangunan dan Lingkungan. Hal tersebut dikarenakan memang belum ada produk hukum selain Perda Bangunan Gedung untuk mendukung penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten Purbalingga. Diharapkan sampai dengan tahun akhir RPJMD 2021 nanti indikator tersebut dapat tercapai target kinerja yang ditetapkan.

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sampai dengan triwulan IV tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.81.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan									
1	Penurunan jumlah rumah tidak layak huni	%	6.10	0.79	1.14	1.23	64.23	495.93	
Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Prasarana Permukiman									
2	Cakupan penanganan prasarana air bersih	%	100	97	90.43	91.01	93.82	91.01	
3	Cakupan penanganan prasarana sanitasi	%	100	94	87.48	90.77	96.56	90.77	

- Sumber : Dinrumkim Kabupaten Purbalingga. 2019
-  : Telah Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan perumahan rakyat dan permukiman tahun 2019 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 program dan 3 indikator RPJMD 2016-2021. Dari keseluruhan indikator yang ada 1 indikator telah tercapai dan 2 indikator akan tercapai. Indikator Penurunan jumlah RTLH. Cakupan penanganan prasarana air bersih dan Cakupan penanganan prasarana sanitasi menunjukkan kinerja yang bagus dalam mendukung Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Prasarana Permukiman. Diharapkan ketercapaian

indikator kinerja program tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun berikutnya khususnya untuk indikator yang akan tercapai. agar dapat juga mendukung program perwujudan 100 – 0 - 100 yang merupakan program ketersediaan 100 persen air minum. 0 persen kawasan kumuh. dan 100 persen fasilitas sanitasi serta drainase di seluruh wilayah Indonesia.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sampai dengan tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.82.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
OPD Pengampu BPBD									
Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam									
1	Cakupan pelayanan korban bencana	%	100	100	100	102	102.00	102.00	
2	Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	Desa	5	3	3	3	100.00	60.00	
OPD Pengampu Pol PP									
Program Penanggulangan Bencana Kebakaran									
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	80	80	15.06	100	125.00	125.00	
4	Tingkat waktu tanggap	%	75	75	100	41.24	54.98	54.98	
5	Presentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	85	100	100	16.67	16.67	19.61	
6	Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 - 5000 liter pada WMK	%	90	100	14	35.71	60.00	66.67	
Program Peningkatan Keamanan. Ketertiban. dan Perlindungan Masyarakat.									
7	Persentase penanganan pelanggaran K3	%	100	100	100	100	100.00	100.00	
Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba									
8	Intensitas sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba		100	100	100	100	100.00	100.00	
OPD Pengampu Kesbangpol									
Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik									
9	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada	%	0	NA	NA	NA	NA	NA	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
10	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg	%	100	100	0	77.6	77.6	77.60	▼
11	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres	%	100	100	0	77.6	77.6	77.60	▼
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan									
12	Penurunan kegiatan aksi massa bernuansa SARA	%	100	100	0	90.00	90.00	90.00	▶
Program Pembinaan Kehidupan Beragama									
13	Tingkat fasilitasi kegiatan keagamaan	Kgt	215	215	175	172.00	80.00	80.00	▶

- Sumber : BPBD, Kesbangpol dan Pol PP Kabupaten Purbalingga, 2019
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2019 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 6 program dan 12 indikator RPJMD 2016-2021. Dari keseluruhan indikator tersebut, 4 indikator telah tercapai 2 indikator akan tercapai dan 6 indikator perlu perhatian/upaya keras. Ada 1 indikator yang memang tidak ada capaian kinerjanya pada tahun ini dikarenakan pada tahun 2019 ini tidak ada Pemilukada.

Untuk indikator yang perlu perhatian/upaya keras yaitu pada indikator Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam yang diampu oleh OPD BPBD dimana Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana masih belum mencapai target kinerja sampai dengan tahun 2019. Kemudian untuk Program Penanggulangan Bencana Kebakaran yang diampu oleh OPD Satpol PP beberapa indikator yang belum mencapai target kinerja yaitu Tingkat waktu tanggap, Presentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, dan Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 - 5000 liter pada WMK. Sedangkan untuk Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik yang diampu oleh OPD Kesbangpol ada 2 indikator yang perlu perhatian/upaya keras yaitu Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg dan Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres. Diharapkan sampai dengan tahun akhir RPJMD 2021 nanti indikator tersebut dapat tercapai target kinerja yang ditetapkan.

F. **Urusan Sosial**

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan sosial sampai dengan triwulan IV tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.83.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pelayanan. Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial									
1	Cakupan PMKS yang terlayani	%	100	100	100	100	100.00	100.00	
2	Cakupan Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	%	100	100	100	100	100.00	100.00	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial									
3	Cakupan LKS yang dibina	%	100	100	100	100	100.00	100.00	
4	Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	%	100	100	100	100	100.00	100.00	
Program Fasilitas. Penanganan dan Rehabilitasi Korban Bencana									
5	Cakupan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100.00	100.00	
6	Cakupan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100.00	100.00	

- Sumber : Dinas Sosial KB, PP dan P3A Kabupaten Purbalingga. 2019
- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan sosial tahun 2019 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 program dan 6 indikator RPJMD 2016-2021. Semua indikator program di urusan sosial, telah mencapai kinerja yang baik karena telah mencapai target sampai dengan tahun 2019. Diharapkan ketercapaian indikator kinerja program tersebut dapat dipertahankan pada tahun berikutnya.

2.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan tenaga kerja sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.84.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada
Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pembinaan. Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja									
1	Cakupan pencari kerja yang ditempatkan	%	75	66	47.15	50.29	76.20	67.05	▼
2	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	%	2	2	5.2	4.28	214.00	214.00	●
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial									
3	Rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama	%	90	95	100	100	105.26	111.11	●
4	Cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial	%	90	83	81.07	85.98	103.59	95.53	▶
5	Rasio tenaga kerja terhadap upah sesuai UMK	%	95	92	94.88	98.12	106.65	103.28	●

- Sumber : Dinas tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga. 2019
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan tenaga kerja tahun 2019 di atas, bahwa terdapat 2 program dan 5 indikator RPJMD 2016-2021. Dari keseluruhan indikator tersebut 3 indikator telah tercapai dan 1 indikator akan tercapai dan 1 indikator yang perlu perhatian/upaya keras yaitu indikator Cakupan pencari kerja yang ditempatkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencari kerja yang ada saat ini masih belum sesuai. Oleh karena itu perlu dievaluasi pelaksanaan Program Pembinaan, Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja yang dilaksanakan agar target RPJMD pada tahun berikutnya dapat tercapai.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.85.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pengarusatuamaan Gender. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Jumlah Pekerja di bawah umur	Orang	127	156	0	0	100.00	100.00	
2	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap peremuan dan anak yang tertangani	Orang	44	8	10	19	237.50	475.00	
3	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Orang	4.600	4.505	5.054	3.945	87.57	85.76	
4	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta	Orang	44.592	40.884	35.521	34.523	84.44	77.42	
5	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga Politik	Orang	15	15	20	20	133.33	133.33	

- Sumber : Dinas Sosial KB, PP dan P3A Kabupaten Purbalingga. 2019

- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 program dan 5 indikator RPJMD 2016-2021. Dari 5 indikator tersebut 3 indikator telah tercapai. 1 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu perhatian/upaya keras. Indikator yang akan tercapai yaitu berkaitan dengan Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Sedangkan indikator yang belum tercapai yaitu Tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan sedang dalam proses upaya menuju pada kesetaraan gender baik dalam lingkungan pekerjaan di pemerintahan maupun di swasta.

C. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.86.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Peningkatan Pelayanan. Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB									
1	Cakupan pasangan usia subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet needKB)	%	9	10.5	12.19	10.26	102.34	87.72	
2	Drop Out KB	%	15	19	10	11.83	160.61	126.80	
3.	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100.00	100.00	
4.	Jumlah penanganan kasus terkait layanan KB		10	15	0	1	1500.00	1000.00	
5	Jumlah peserta KB aktif Pria	%	5250	5200	6120	7398	142.27	140.91	
Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja									
6	Persentase kelompok PIK-R yang dibina	%	100	100	100	100	100.00	80.00	
Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB									
7	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) dibanding jumlah desa/Kelurahan		1:1	1:2	1:1	1:6	106.45	108.20	
8	Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) dibanding jumlah desa/kelurahan		1:1	1:1	1:1	1:1	100.00	100.00	
9	Rasio sub PPKBD dibanding jumlah desa/kelurahan		1:1	1:1	1:1	7:1	690.16	690.16	
10	Persentase kelompok prio utomo yang dibina.	%	100	100	100	100	100.00	100.00	
Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera									
11	Jumlah NKKBS		3.6	3.6	4	3.26	90.56	90.56	
12	Cakupan keluarga mengikuti UPPKS	%	13.61	13.61	5.17	15.66	115.03	115.03	
13	Cakupan anggota UPPKS yang mengikuti KB	%	77.20	77.20	61.93	79.56	103.06	103.06	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
14	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
15	Bina Keluarga Balita	%	34.7	34.6	28.63	60.3	174.28	173.78	●
16	Bina Keluarga Remaja	%	25	24.75	20.30	70.4	284.44	281.60	●
17	Bina Keluarga Lansia	%	26	25.75	22.85	73.4	285.05	282.31	●
18	Cakupan anggota BKB Ber-KB	%	86.95	86.50	67.34	76.11	87.99	87.53	▶

- Sumber : Dinsosdalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga. 2019
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di atas dapat dilihat bahwa terdapat 4 program dan 18 indikator RPJMD 2016-2021. Sebanyak 15 indikator telah tercapai dan 3 indikator akan tercapai. Beberapa indikator yang berstatus akan tercapai terdapat pada Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera yang terkait dengan Jumlah NKKBS dan Cakupan anggota UPPKS yang mengikuti KB; serta pada Program Peningkatan Pelayanan. Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB yang terkait dengan Cakupan pasangan usia subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (*unmet need* KB).

D. Urusan Pangan

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan ketahanan pangan sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.87.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Peningkatan Ketahanan Pangan									
1	Angka Konsumsi Energi	kkal/cap /tahun	2200	2200	2125	2150	97.73	97.73	
2	Angka Konsumsi Protein	kkal/cap /tahun	71.81	66.27	55	57	86.01	79.38	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	angka	99.51	94.45	85.6	86.2	91.27	86.62	▶
4	Persentase pangan aman yang beredar di masyarakat	%	99	95	87	90	94.74	90.91	▶
5	Persentase pangan segar bersertifikat prima 3	%	8	6	5	5	83.33	62.50	▼
Program Penguatan Kelembagaan Pangan Pemerintah dan Masyarakat									
6	Cakupan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	%	30.13	28.45	16	78	274.17	258.88	●
7	Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton SB	22.5	17.5	12	23.40	133.74	104.02	●

- Sumber : DKPP Kabupaten Purbalingga. 2019

- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan ketahanan pangan di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 program dan 7 indikator RPJMD 2016-2021. Sebanyak 2 indikator telah tercapai. 3 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu perhatian/upaya keras. Indikator tersebut yaitu Persentase pangan segar bersertifikat prima 3 yang merupakan indikator pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Diharapkan kinerja indikator program tersebut dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya agar dapat mencapai target yang diharapkan.

E. Urusan Pertanahan

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan pertanahan sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.88.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada
Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pengelolaan Pertanahan									
1	Rasio tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat	%	100	80	63.81	64.98	81.23	64.98	▼
2	Cakupan penandaan tanah-tanah milik Pemerintah Daerah	%	100	90	66.28	66.85	74.28	66.85	▼
3	Cakupan penyelesaian proses pengadaan tanah pemerintah daerah	%	90	90	61.53	61.53	68.37	68.37	▼

- Sumber : Dinrumkim Kabupaten Purbalingga. 2019

-  : Telah Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator program pada urusan pertanahan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 1 program dan 3 indikator RPJMD 2016-2021. Semua indikator pada program pengelolaan pertanahan perlu perhatian/upaya keras karena belum mencapai target di tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan adanya beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan tanah pemda. Perlu dilakukan percepatan dan konsistensi pencapaian kinerja agar di tahun selanjutnya agar terdapat peningkatan ketercapaian kinerjanya.

F. Urusan Lingkungan Hidup

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan lingkungan hidup sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.89.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada
Urusan Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem									
1	Jumlah mata air yang dilindungi	Lokasi	13	11	11	11	100.00	84.62	
2	Jumlah wilayah/desa yang telah memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Desa	8	6	11	2	33.33	25.00	
Program pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup									
3	Cakupan perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL,SP PL)	Perusa- haan	781	781	781	609	77.98	77.98	
4	Cakupan Perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran air sesuai persyaratan teknis	Perusa- haan	32	28	32	30	107.14	93.75	
5	Cakupan perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran udara sesuai persyaratan khusus	Perusa- haan	16	14	15	22	157.14	137.50	
6	Indek Kualitas Udara (minimal 84)	%	85	83	82.145	88.76	106.94	104.42	
7	Indek Kualitas Air (minimal 55)	%	56	54	80	46.67	86.43	83.34	

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
8	Indek Tutupan Lahan (minimal 62)	%	63	61	54.15	65.38	107.18	103.78	●
9	Jumlah kelom[pok masyarakat yang berperan aktif dan berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kelom-pok	21	19	50	66	347.37	314.29	●
10	Jumlah perusahaan yang memiliki IPAL	Perusa-haan	14	12	20	34	283.33	242.86	●
Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3									
11	Cakupan pengelolaan air limbah rumah tangga	%	90.2	85	87.48	90.77	106.79	100.63	●
12	Cakupan industri yang memiliki TPS B3	%	73.05	196	185	173	88.27	236.82	●
13	Persentase pengurangan timbunan sampah melalui bank sampah	%	2	2	1.25	5.0	250.00	250.00	●
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup									
14	Cakupan aduan kasus lingkungan yang tertangani	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
15	Cakupan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan	Perusa-haan	180	50	5	88	176.00	48.89	▼

- Sumber : DLH Kabupaten Purbalingga. 2019

- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator program pada urusan lingkungan hidup tersebut di atas. dapat dilihat bahwa terdapat 4 program dan 15 indikator RPJMD 2016-2021. Dari keseluruhan indikator 9 indikator telah tercapai. 3 indikator akan tercapai dan 3 indikator perlu perhatian. Indikator yang perlu perhatian yaitu terdiri dari: Jumlah wilayah/desa yang telah memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Cakupan perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL.UKL/UPL.SPPL) dan Cakupan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja program mulai dari Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sampai dengan Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 masih ada indikator yang perlu ditingkatkan kinerjanya agar dapat tercapai di tahun berikutnya.

G. **Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan kependudukan dan catatan sipil sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.90.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Penataan Administrasi Kependudukan									
1	Cakupan kepemilikan KK	KK	100	100	98.54	99.63	99.63	99.63	
2	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	Org	100	100	37.68	86.90	86.90	86.90	
3	Tersedianya profil Kependudukan	Buku	100	100	100	100.00	100.00	100.00	
4	K T P	Org	100	100	99.65	99.00	99.00	99.00	

- Sumber : Dindukcapil Kabupaten Purbalingga. 2019
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator program pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tersebut di atas. dapat dilihat bahwa ada 1 program dan 4 indikator RPJMD 2016-2021. 1 indikator telah tercapai dan 3 indikator akan tercapai. Diharapkan ketercapaian indikator kinerja program tersebut dapat dipertahankan pada tahun berikutnya.

H. **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.91.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa									
1	Cakupan desa yang melaksanakan musrenbangdes tepat waktu	%	100	100	100	80	80.00	80.00	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
2	Cakupan desa/kelurahan yang menyusun profil desa secara tepat waktu	%	100	100	100	89.12	89.12	89.12	▶
3	Cakupan desa yang memiliki BUMDes yang sehat	desa	18	18	18	85	472.22	472.22	●
4	Rasio lembaga Rukun Tetangga (RT) yang aktif	RT	5.081	5.081	5.069	5113	100.63	100.63	●
5	Jumlah pasar desa yang dibina	pasar	38	38	36	38	100.00	100.00	●
6	Cakupan desa yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tepat waktu	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa									
7	Cakupan Posyandu aktif	Unit	1.194	1.194	1.219	1.225	102.60	102.60	●
8	Cakupan lumbung desa sehat	Unit	12	12	50	45	375.00	375.00	●
9	Rasio Karang Taruna aktif	Desa dan kel	224 ds	224 ds	224 ds	224 ds	100.00	100	●
			15 kel	15 kel	15 kel	15 kel			
10	Rasio PKK Desa/Kelurahan aktif	Desa dan kel	224 ds	224 ds	224 ds	224 ds	100.00	100	●
			15 kel	15 kel	15 kel	15 kel			
11	Cakupan BP-SPAM aktif	Klp	10	10	140	156	1560.00	1560.00	●
12	Cakupan KPP Sanitasi Lingkungan aktif	Klp	60	60	66	66	110.00	110.00	●

- Sumber : Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga. 2019
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator program pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di atas. dapat dilihat bahwa terdapat 2 program dan target 12 indikator RPJMD 2016-2021. Sebanyak 10 indikator telah tercapai dan 2 indikator akan tercapai, yaitu Cakupan desa yang melaksanakan musrenbangdes tepat waktu dan Cakupan desa/kelurahan yang menyusun profil desa secara tepat waktu. Diharapkan indikator kinerja tersebut akan dapat dicapai pada tahun berikutnya.

I. **Urusan Perhubungan**

Capain kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan perhubungan sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.92.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada
Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas									
1	Cakupan ruas jalan kolektor primer bermarka	M2	1.170	1.035	6.635	3.391	327.63	289.83	●
Cakupan ketersediaan fasilitas lalu lintas :									
2	Trafic light	Unit	2	2	1	3	150.00	150.00	●
3	Warning light	Unit	2	2	5	7	350.00	350.00	●
4	Rambu penunjuk arah	Buah	4	4	13	16	400.00	400.00	●
5	Rambu standar	Buah	100	100	44	50	50.00	50.00	▼
6	Guardraill	M2	500	500	200	180	36.00	36.00	▼
7	Paku Marka	Buah	100	200	559	100	50.00	100.00	●
8	Trafic cone	Buah	100	100	100	100	100.00	100.00	●
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan									
9	Cakupan kendaraan angkutan umum yang laik operasi (lulus uji KIR)	buah	12.600	12.400	12.700	2.837	22.88	22.52	▼
10	Persentase kendaraan angkutan umum masuk terminal	%	177.035	146.310	136.376	11.971	8.18	6.76	▼
11	Jumlah penumpang terlayani angkutan	Org	100	100	93	100	100.00	100.00	●

- Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga. 2019
- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan perhubungan di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 program dan 11 indikator RPJMD 2016-2021. Dari keseluruhan indikator sebanyak 7 indikator telah tercapai dan 4 indikator perlu perhatian/upaya keras. Indikator yang membutuhkan perhatian khususnya pada Cakupan ketersediaan fasilitas lalu lintas. berupa: Rambu standar dan Guardraill. Cakupan kendaraan angkutan umum yang laik operasi (lulus uji KIR) dan Persentase kendaraan angkutan umum masuk terminal. Indikator pada

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan yaitu Persentase kendaraan angkutan umum masuk terminal mempunyai nilai yang kecil. hal tersebut dikarenakan Terminal Bobotsari yang sudah menjadi Terminal Tipe A menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Terminal Purbalingga yang menjadi Terminal Tipe B merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu. Pemerintah Kabupaten Purbalingga hanya mengurus terminal tipe C yang ada di Kab. Purbalingga.

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan komunikasi dan informatika sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.93.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada
Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi									
1	Persentase SKPD yang memiliki website	SKPD	43	37	34	179	483.78	416.28	
2	Intensitas updating informasi pada website Pemerintah Daerah		setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	100.00	100.00	
3	Cakupan sistem informasi manajemen (SIM) milik Pemerintahan Daerah yang berfungsi dan aktif	SKPD	43	37	34	211	570.27	490.70	
4	Jumlah pelayanan publik secara online		15	9	6	32	355.56	213.33	
Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik									
5	Cakupan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terpublikasi		100	900	800	1456	161.78	1456.00	
6	Cakupan wilayah yang terjangkau oleh siaran radio Pemerintah Daerah	Strem-ing	65	45	18	18	40.00	27.69	
7	Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan	KIM	18	15	12	13	86.67	72.22	
8	Cakupan kegiatan penyebaran informasi dan dialog melalui TV dan radio	kali	12	12	12	11	91.67	91.67	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
9	Cakupan kegiatan komunikasi kehumasan antar SKPD dan instansi vertikal	kali	2	2	2	20	1000.00	1000.00	●
10	Cakupan komunikasi dan kerjasama dengan media massa (cetak dan online)	kali	30	30	30	468	1560.00	1560.00	●
11	Cakupan kegiatan desiminasi informasi ke masyarakat melalui media massa	media	20	20	23	363	1815.00	1815.00	●
12	Cakupan penyusunan naskah kebijakan Pemda	naskah	250	250	250	0	0.00	0.00	▼

- Sumber : Dinas Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. 2019
- ● : Telah Tercapai; ▲ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan komunikasi dan informatika di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 program dan 12 indikator RPJMD 2016-2021. Sebanyak 8 indikator telah tercapai. 1 indikator akan tercapai dan 3 indikator perlu perhatian/upaya keras. Indikator yang belum tercapai terdiri dari Cakupan wilayah yang terjangkau oleh siaran radio Pemerintah Daerah. Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan dan Cakupan penyusunan naskah kebijakan Pemda. Ketiga indikator tersebut merupakan indikator kinerja pada Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik. Hal tersebut perlu lebih diperhatikan pada tahun berikutnya agar target RPJMD pada akhir tahun dapat tercapai secara optimal untuk dapat memberikan pelayanan informasi publik bagi masyarakat.

K. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.94.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Penumbuhan. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi									
1	Jumlah Koperasi Sehat	Unit	135	125	144	169	135.20	125.19	●
2	Jumlah Anggota Koperasi	Orang	52928	52708	54.871	61.331	116.36	115.88	●
Program Pengembangan. Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Produk UMKM									
3	Pertumbuhan jumlah UMKM (Jumlah UMKM)	Unit	766.500	86.877	86.877	96.592	111.18	12.60	▼
4	Pertumbuhan UMKM Berorientasi Ekspor (jmlh UMKM Berorientasi Ekspor)	Unit	45	40	36	36	90.00	80.00	▶
Program Kemitraan. Promosi. dan pemasaran Produk UMKM									
5	Cakupan UMKM Yang Difasilitasi Promosi Pemasaran	Unit	300	200	278	315	157.50	105.00	●
6	Cakupan UMKM Yang Difasilitasi Promosi Melalui Internet	Unit	250	100	424	245	245.00	98.00	▶

- Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga. 2019

- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator program pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah tersebut di atas. dapat dilihat bahwa terdapat 3 program dan 6 indikator RPJMD 2016-2021. Sebanyak 3 indikator telah tercapai. 2 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu perhatian/upaya keras. Indikator yang perlu ditingkatkan kinerjanya yaitu Pertumbuhan jumlah UMKM (Jumlah UMKM) dimana untuk target tahun 2019 sudah tercapai namun status capaian RPJMD sampai dengan tahun 2021 target kinerjanya masih perlu perhatian/upaya keras sehingga perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya.

L. Urusan Penanaman Modal

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan penanaman modal sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.95.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada
Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Program	Satu-an	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Promosi. Pemasaran Potensi dan Fasilitas Investasi									
1	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMDN (baru)	Unit	800	700	464	561	80.14	70.13	
2	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMA (baru)	Unit	2	2	1	11	550.00	550.00	
3	Pertumbuhan nilai investasi PMDN (baru/Rp.000)	Rp. (000)	750.000.000	550.000.000	497.675.366	671.447.640	122.08	89.53	
4	Pertumbuhan nilai investasi PMA (baru/Rp.000)	Rp. (000)	20.000.000	20.000.000	120.194.949	8.248.334	41.24	41.24	
5	Realisasi investasi total (baru/Rp.000)	Rp. (000)	770.000.000	570.000.000	617.870.315	679.695.974	119.24	88.27	
Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu									
6	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perijinan		82.25	81.9	81.9	81.39	99.38	98.95	
7	Rata-rata jangka waktu proses perijinan	Hari	4.2	4.8	5	4.3	89.58	102.38	
8	Jumlah ijin yang dilayani di PTSP	Jenis	24	20	27	35	175.00	145.83	

- Sumber : DMPTSP Kabupaten Purbalingga. 2019. data diolah
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator program pada urusan penanaman modal dan perijinan di atas. dapat dilihat bahwa terdapat 2 program dan 8 indikator RPJMD 2016-2021. Dari keseluruhan indikator. 3 indikator telah tercapai. 3 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu perhatian/upaya keras. Indikator yang perlu perhatian/upaya keras yaitu Pertumbuhan jumlah perusahaan PMDN (baru) dan Pertumbuhan nilai investasi PMA (baru/Rp.000) yang keduanya merupakan indikator pada Program Promosi. Pemasaran Potensi dan Fasilitas Investasi. Diharapkan indikator kinerja tersebut dapat ditingkatkan kinerjanya agar dapat mencapai target RPJMD di tahun berikutnya.

M. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan kepemudaan dan olah raga sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.96.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda									
1	Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi	Organi-sasi	69	11	11	13	118.18	18.84	▼
2	Cakupan kegiatan kepemudaan yang difasilitasi	Kelompo k/Orang	132	21	2.662	24	114.29	18.18	▼
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga									
3	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional/Provinsi	Piagam/ Medali	450	100	54	60	60.00	60.00	▶
4	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional	Piagam/ Medali	135	20	112	8	40.00	450.00	●
5	Cakupan kelompok/organisasi olah raga yang difasilitasi	Organi-sasi	6	1	30	3	300.00	50.00	▼
6	Jumlah kegiatan olah raga yang difasilitasi	Kegiatan	195	30	48	26	86.67	166.67	●

- Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga. 2019

- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator program pada urusan kepemudaan dan olah raga tersebut di atas. dapat dilihat bahwa terdapat 2 program dan 6 indikator RPJMD 2016-2021. Sebanyak 2 indikator telah tercapai. 1 indikator akan tercapai dan 3 indikator perlu perhatian/upaya keras. Beberapa indikator yang perlu perhatian yaitu diantaranya Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi. Cakupan kegiatan kepemudaan yang difasilitasi dan Cakupan kelompok/organisasi olah raga yang difasilitasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beberapa indikator pada Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga belum berjalan dengan optimal. Diharapkan indikator-indikator tersebut dapat ditingkatkan kinerjanya agar tercapai pada tahun berikutnya.

N. **Urusan Statistik**

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan kepemudaan dan olah raga sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.97.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada
Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah									
1	Cakupan ketersediaan data dasar pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	

- Sumber : Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. 2019
-  : Telah Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan statistik di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 program dan 1 indikator RPJMD 2016-2021 dimana indikator program dalam Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah telah tercapai sehingga perlu dipertahankan pada tahun berikutnya

O. **Urusan Persandian**

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan persandian sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.98.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada
Urusan Persandian

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s/d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pengelolaan Persandian									
1	Cakupan informasi pemerintah daerah melalui SANTEL yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	100	100	100	100	100	100	

- Sumber : Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. 2019
-  : Telah Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan statistik di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 program dan 1 indikator RPJMD 2016-2021 dimana indikator program dalam Program Pengelolaan Persandian telah tercapai sehingga perlu dipertahankan pada tahun berikutnya.

P. **Urusan Kebudayaan**

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan kebudayaan sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.99.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada
Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah									
1	Cakupan kajian seni	%	68	68	55.56	21	30.88	30.88	▼
2	Cakupan fasilitasi seni	%	143	143	208	182	127.27	127.27	●
3	Cakupan gelar seni	%	100	100	77	69	69.00	69.00	▼
4	Cakupan misi kesenian	%	100	100	11	16	16.00	16.00	▼
5	Cakupan sumber daya manusia kesenian	%	100	100	152	168	168.00	168.00	●
6	Cakupan tempat gelar seni	%	100	100	17	10	10.00	10.00	▼
7	Cakupan organisasi kesenian yang aktif	%	307	307	333	313	101.95	101.95	●
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya									
8	Cakupan jumlah juru pelihara cagar budaya	%	70	35	45	45	112.50	64.29	▼
9	Jumlah kunjungan museum dan monumen	Orang	300.000	260.000	203.406	259.115	99.66	86.37	▶
10	Jumlah cagar budaya	Buah	360	298	287	295	98.99	81.94	▶
11	Cakupan cagar budaya yang dikonservasi	Situs	1	1	1	6	600.00	600.00	●

- Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.2019
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator program pada urusan kebudayaan di atas. dapat dilihat bahwa terdapat 2 program dan 11 indikator RPJMD 2016-2021. Dari keseluruhan indikator. 4 indikator telah tercapai. 2 indikator akan tercapai dan 5 indikator perlu perhatian/upaya keras. Beberapa indikator yang perlu diperhatikan yaitu Cakupan kajian seni. Cakupan gelar seni. Cakupan misi kesenian. Cakupan tempat gelar seni yang merupakan indikator kinerja dalam Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah serta Cakupan jumlah juru pelihara cagar

budaya yang merupakan indikator kinerja dalam Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukan percepatan dan konsistensi pencapaian kinerja khususnya pada indikator yang perlu mendapat perhatian tersebut agar target akhir RPJMD dapat tercapai.

Q. Urusan Perpustakaan

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan perpustakaan sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.100.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada
Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan									
Jumlah Perpustakaan									
1	Umum	Bh	2	2	2	1	50.00	50.00	▼
2	Desa/kel	Bh	239	120	80	153	127.50	64.02	▼
3	Sekolah/ Madrasah	Bh	811	811	811	811	100.00	100.00	●
4	Pondok pesantren	Bh	18	12	8	4	33.33	22.22	▼
5	Rumah Ibadah	Bh	50	18	8	8	44.44	16.00	▼
6	Khusus	Bh	12	8	4	3	37.50	25.00	▼
7	Rasio perpustakaan per jumlah penduduk	%	0.001415	0.00121375	0.00158113	0.01	823.89	706.71	●
8	Rasio pengunjung pepustakaan per jumlah penduduk	%	0.125	0.875	0.053556726	0.12	137.14	96.00	▶
Jumlah perpustakaan yang dibina :									
9	Umum	Bh	2	2	2	2	100.00	100.00	●
10	Desa/kel	Bh	108	72	54	153	212.50	141.67	●
11	Sekolah/ Madrasah	Bh	518	186	124	151	81.18	29.15	▼
12	Pondok pesantren	Bh	8	6	5	18	300.00	225.00	▶
13	Rumah Ibadah	Bh	14	10	8	10	100.00	71.43	▼
14	Khusus	Bh	8	6	5	6	100.00	75.00	▼

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Perpustakaan yang memenuhi standar:									
15	Umum	Bh	1	1	1	1	100.00	100.00	
16	Desa/kel	Bh	90	78	76	78	100.00	86.67	
17	Sekolah/ Madrasah	Bh	622	550	606	550	100.00	88.42	
18	Pondok pesantren	Bh	18	12	9	7	58.33	38.89	
19	Rumah Ibadah	Bh	14	10	8	10	100.00	71.43	
20	Khusus	Bh	8	6	5	3	50.00	37.50	
21	Jumlah koleksi buku perpustakaan	Bh	98.283	80.283	80.121	81.619	101.66	83.04	
22	Jumlah judul buku perpustakaan	Bh	41.857	35.857	41.665	42.748	119.22	102.13	
23	Jumlah anggota perpustakaan berkartu	orang	40000	30.000	2.451	30.722	102.41	76.81	
24	Jumlah layanan perpustakaan keliling	Bh	520	460	471	537	116.74	103.27	
25	Jumlah SDM perpustakaan yang telah mengikuti bintek perpustakaan	orang	900	700	40	700	100.00	77.78	
26	Jumlah pustakawan bersertifikat kompetensi perpustakaan	orang	7	5	0	5	100.00	71.43	

- Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. 2019
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator program pada urusan perpustakaan di atas. dapat dilihat bahwa terdapat 1 program dan 26 indikator RPJMD 2016-2021. Sebanyak 7 indikator telah tercapai. 5 indikator akan tercapai dan 14 indikator belum tercapai atau perlu perhatian. Masih banyak indikator yang perlu upaya keras guna pencapaian target akhir RPJMD.

Indikator yang perlu diperhatikan yaitu Jumlah Perpustakaan (Umum. Desa/kel. Pondok pesantren. Rumah Ibadah. Khusus). Jumlah perpustakaan yang dibina (Sekolah/ Madrasah. Rumah Ibadah. Khusus). Perpustakaan yang memenuhi standar (Pondok pesantren. Rumah Ibadah. Khusus). Jumlah anggota perpustakaan berkartu. Jumlah SDM perpustakaan yang telah mengikuti bintek perpustakaan dan Jumlah pustakawan bersertifikat kompetensi perpustakaan. Beberapa indikator

tersebut perlu diperhatikan kinerja ke depannya karena akan mempengaruhi budaya literasi masyarakat dalam rangka meningkatkan minat baca bagi generasi ke depan.

R. **Urusan Kearsipan**

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan kearsipan sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.101.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada
Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pengelolaan Arsip									
1	Cakupan SKPD/ormas /BUMD / lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Unit	622	577	181	577	100.00	92.77	
2	Jumlah arsip daerah yang telah didokumentasikan dalam bentuk elektronik (berkas)	Berkas	50.000	30.000	45.703	90.322	301.07	180.64	
3	Alih media Sistem Informasi Dokumen Masyarakat (SIDOMAS)	Kk	59.659	59.659	40.616	66.610	111.65	111.65	

- Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. 2019
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator program pada urusan kearsipan di atas. dapat dilihat bahwa terdapat 1 program dan 3 indikator RPJMD 2016-2021 dimana sebanyak 2 indikator telah tercapai dan 1 indikator akan tercapai yaitu Cakupan SKPD/ormas /BUMD / lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Program Pengelolaan Arsip masih sudah optimal kinerjanya dan 1 indikator perlu lebih ditingkatkan ketercapaiannya pada akhir tahun RPJMD.

2.2.3 **Urusan Pilihan**

A. **Urusan Kelautan dan Perikanan**

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan kelautan dan perikanan sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.102.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada
Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pengembangan Perikanan Budidaya									
1	Produksi Ikan Konsumsi	Ton	5.293	5.153	6.083	1.434.51	27.84	27.10	▼
2	Produksi Benih Ikan	Ekor	137	133	228.352	325.08	245.34	237.29	●
3	Produksi Ikan Hias	Ekor	980	889	3028	5.086	572.10	518.98	●
Program Pengembangan. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan									
4	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap/ tahun	12	11.7	14.66	17.56	150.09	146.33	●
5	Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	3.200	3.000	1.897	517.64	17.25	16.18	▼
Program Pengembangan Perikanan Tangkap									
6	Produksi Ikan Sungai	Ton	230	235	230.56	283.76	120.75	123.37	●

- 3Sumber : DKPP Kabupaten Purbalingga. 2019. data diolah

- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan perikanan di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 program dan 6 indikator RPJMD 2016-2021. Dari keseluruhan indikator sebanyak 4 indikator telah tercapai dan 2 indikator perlu perhatian/upaya keras.

Beberapa indikator yang perlu upaya keras untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya yaitu Produksi Ikan Konsumsi dan Produksi Olahan Hasil Perikanan. Kinerja indikator tersebut perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya karena dapat mendukung optimalisasi perwujudan budaya makan ikan yang sedang digalakkan saat ini.

B. Urusan Pariwisata

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan pariwisata sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.103.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada
Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pengembangan Destinasi Wisata									
1	Jumlah Destinasi Wisata yang difasilitasi/dikembangkan	DTW	36	6	5	7	116.67	19.44	▼
2	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	Desa	27	4	4	7	175.00	25.93	▼
Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata									
3	Angka kunjungan wisatawan (orang)	orang	2.979.000	2.779.000	3.706.984	3.279.000	117.99	110.07	●
4	Jumlah/event pameran pariwisata yang diikuti	event	18	3	0	10	333.33	55.56	▼
Program Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Wisata									
5	Jumlah Pokdarwis yang dibina	Kelompok	24	25	22	29	120.83	120.83	●

- Sumber : Dinporapar Kabupaten Purbalingga. 2019

- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian indikator program pada urusan pariwisata di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 3 program dan 5 indikator RPJMD 2016-2021. Dari keseluruhan indikator sebanyak 2 indikator telah tercapai dan 3 indikator perlu perhatian/upaya keras. Indikator yang perlu diperhatikan yaitu Jumlah Destinasi Wisata yang difasilitasi/dikembangkan, Jumlah desa wisata yang dikembangkan dan Jumlah/event pameran pariwisata yang diikuti. Kondisi tersebut menunjukkan bawa Program Pengembangan Destinasi Wisata terhadap desa-desa wisata yang sudah ada di Kabupaten Purbalingga belum berjalan optimal, sehingga perlu peningkatan kinerja guna pencapaian target akhir RPJMD. Desa wisata yang ada dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata yang lebih baik dengan menambah variasi event/atraksi wisata dan keanekaragaman paket wisata melalui optimalisasi destinasi wisata yang ada.

C. Urusan Pertanian

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan pertanian sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.104.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada
Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan									
1	Padi	Ton	265.053	259.830	261.140	259.890	100.02	98.05	▶
2	Jagung	Ton	41.759	40.936	39.674	41.016	100.19	98.22	▶
3	Kedelai	Ton	235	230	10474	1.313	570.70	558.56	●
Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura									
4	Ubi Kayu	Ton	78.721	77.170	17.141	77.215	100.06	98.09	▶
5	Kentang	Ton	4.092	4.011	4.599	423	10.55	10.34	▼
6	Kobis	Ton	3.421	3.354	4.315	2.903	86.55	84.86	▶
7	Wortel	Ton	2.113	2.071	9.847	6.276	303.04	297.02	●
8	Stroberi	Ton	486	476	128	64	13.45	13.17	▼
9	Cabai besar	Ton	764	749	2987.1	467	62.28	61.06	▼
10	Cabai rawit	Ton	607	595	1.125	463	77.75	76.21	▼
Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perkebunan									
11	Duku	Ton	8.033	7.874	13.049	525.00	6.67	6.54	▼
12	Durian	Ton	4.003	3.924	5.356	2.662.60	67.85	66.52	▼
13	Pisang	Ton	14.912	14.619	10.489	9.718.20	66.48	65.17	▼
14	Nanas	Ton	433	425	123759.5	83.451.10	19635.55	19272.77	●
15	Pepaya	Ton	5.071	4.971	2.552	1.298.10	26.11	25.60	▼
16	Manggis	Ton	760	745	586.6	567.00	76.11	74.61	▼
17	Kapulaga	Ton	12.78	12.65	2.281	84.71	669.64	662.83	●
18	Kopi	Ton	614	601	283.3	615.52	102.42	100.25	▼
19	Lada	Ton	186	182	288	832.10	457.20	447.37	●
20	Kelapa Dalam	Ton	13.432	13.168	14.709	25.212.13	191.47	187.70	●
21	Kelapa Deres	Ton	56.399	55.287	70.206	139.888.64	253.02	248.03	●
22	Cengkeh	Ton	59	58	31.3	73.76	127.17	125.02	●

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
23	Glagah Arjuna	Ton	741	726	377	836.71	115.25	112.92	●
24	Nilam	Ton	754	739	465.6	1277.14	172.82	169.38	●
25	Tebu	Ton	986	967	1674.41	500.06	51.71	50.72	▼
26	Karet	Ton	134	131	157.18	254.91	194.59	190.23	●
Cakupan Fasilitas Penanganan Pasca Panen Produk Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan									
27	Power Thresher	Unit	1.050	1030	1010	1.036	100.58	98.67	▶
28	Pemipil Jagung	Unit	114	94	74	80	85.11	70.18	▼
29	Rice Mill Unit	Unit	451	451	451	451	100.00	100.00	●
30	Penggunaan Pupuk Organik	Ton	3.572	3.433	351.8	798	23.24	22.33	▼
Program Pengembangan Budidaya Peternakan									
31	Sapi	Ton	1.300.35	1274.73	1.276.60	1.285.48	100.84	98.86	▶
32	Kerbau	Ton	1.26	1.23	1.6	1.06	86.18	84.13	▶
33	Kambing	Ton	294.4	288.60	761.1	763.68	264.61	259.40	●
34	Domba	Ton	86.12	84.42	149.4	140.14	166.00	162.72	●
35	Kelinci	Ton	0.82	0.8	1.8	1.61	201.25	196.34	●
36	Babi	Ton	0	0	0	0.00	100.00	100.00	●
37	Ayam Layer	Ton	49.694	48.671	52	44.777.32	92.00	90.11	▶
38	Ayam Broiler	Ton	4.897.006	4.800.538	10.889	5.952.667.12	124.00	121.56	●
39	Ayam Buras	Ton	8.742.751	8.570.524	2.643	12.084.438.84	141.00	138.22	●
40	Itik	Ton	19.998	19.604	54.2	37.443.64	191.00	187.24	●
41	Burung Puyuh	Ton	10.146	9.946	4	22.975.26	231.00	226.45	●
42	Angsa	Ton	77	75	0.9	109.50	146.00	142.21	●
43	Entog	Ton	5.403	5.297	30.8	13.825.17	261.00	255.88	●
44	Merpati	Ton	1.622	1.590	0.8	1.605.90	101.00	99.01	▶
45	Produksi Hasil Peternakan (Susu)	Liter	305.982	299.953	205.279	238462.64	79.50	77.93	▼
46	Produksi Hasil	Ton	13.071	12.814	14970.9	13198.42	103.00	100.97	●

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
	Peternakan (Telur)								
Program Pengembangan. Pengolahan dan Pemasaran Produk Pertanian									
47	Produksi Olahan Daging (ton)	Ton	456	447	274.4	339.72	76.00	74.50	▼
48	Produksi Olahan Telur (ton)	Ton	97.963	96.033	105	104.68	0.11	0.11	▼
49	Produksi Olahan Susu (liter)	Ton	101.746	99.741	96.807	139.637.40	140.00	137.24	●
Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner									
50	Prevalensi Penyakit (%)	%	17.89	22.08	26.8	22.30	99.03	80.24	▶
51	Penyakit Zoonosis (%)	%	4.54	5.61	4.7	5.66	99.08	80.18	▶

- Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan pada capaian indikator program pada urusan pertanian tersebut di atas. bahwa terdapat 6 program dan target 51 indikator RPJMD 2016-2021. Dari keseluruhan indikator sebanyak 24 indikator telah tercapai. 11 indikator akan tercapai dan 16 indikator perlu perhatian/upaya keras. Beberapa indikator yang perlu perhatian untuk ditingkatkan kinerjanya pada tahun berikutnya yaitu indikator dalam Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura khususnya untuk komoditas Kentang. Stroberi. Cabai besar. dan Cabai rawit; Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perkebunan khususnya untuk komoditas Duku. Durian. Pisang. Pepaya. Manggis. Kopi. dan Tebu; Program Pengembangan Budidaya Peternakan khususnya untuk Produksi Hasil Peternakan (Susu); serta dalam Program Pengembangan. Pengolahan dan Pemasaran Produk Pertanian khususnya untuk Produksi Olahan Daging (ton) dan Produksi Olahan Telur (ton).

Beberapa indikator tersebut perlu mendapat perhatian untuk segera dioptimalkan pada tahun berikutnya agar menunjukkan kinerja yang optimal.

D. **Urusan Perdagangan**

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan perdagangan sampai dengan triwulan IV tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.105.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada
Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan									
1	Jumlah pasar tradisional yang memenuhi standar SNI	Pasar	3	3	0	0	0.00	0.00	▼
2	Cakupan Pedagang Kaki Lima yang ditata dan diberdayakan	PKL	16	12	10	3	25.00	18.75	▼
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan									
3	Cakupan pemantauan terhadap distribusi barang penting dan strategis	Lokasi	3	3	3	3	100.00	100.00	●
Program Standarisasi, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan									
4	Cakupan pengawasan terhadap komoditas barang yang peredarannya diawasi	Komoditi	3	24	24	24	100.00	800.00	●
5	Cakupan pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus	Lokasi	44	8	32	8	100.00	18.18	▼
6	Cakupan jumlah sengketa konsumen yang diselesaikan oleh BPSK	Kasus	25	15	15	11	73.33	44.00	▼
7	Cakupan jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	UTTP	32.000	28.000	24.868	8581	30.65	26.82	▼
8	Cakupan pasar tertib ukur	Pasar	2	2	1	0	0.00	0.00	▼
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor									
9	Jumlah eksportir	Perusa- haan	29	34	37	38	111.76	131.03	●

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
10	Jumlah/jenis barang yang diekspor	Produk	80	60	42	35	58.33	43.75	▼
11	Nilai ekspor (Milyar)	Rp.	3.800	2.030	7.204	18169.07	895.03	478.13	●

- Sumber : Dinperindag Kabupaten Purbalingga. 2019
- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan pada capaian indikator program pada urusan perdagangan di atas. bahwa terdapat 4 program dan 11 indikator RPJMD 2016-2021. Sebanyak 4 indikator telah tercapai dan 7 indikator perlu perhatian/upaya keras. Masih banyak terdapat indikator kinerja program yang belum mencapai target RPJMD seperti Jumlah pasar tradisional yang memenuhi standar SNI. Cakupan Pedagang Kaki Lima yang ditata dan diberdayakan. Cakupan pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus. Cakupan jumlah sengketa konsumen yang diselesaikan oleh BPSK. Cakupan jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang. Cakupan pasar tertib ukur dan Jumlah/jenis barang yang diekspor.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan serta Standarisasi. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dan Peningkatan dan Pengembangan Ekspor masih belum optimal. Diharapkan ketercapaian target dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya.

E. **Urusan Perindustrian**

Adapun untuk capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan perindustrian sampai dengan triwulan IV tahun 2019 sebagaimana ditampilkan secara rinci pada tabel di bawah ini

Tabel 2.106.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada
Urusan Perindustrian

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi Industri Rakyat									
1	Cakupan fasilitasi HKI	%	100	100	100	100	100.00	100.00	

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
2	Cakupan penerapan standarisasi produk industri	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
3	Cakupan fasilitasi sertifikasi halal	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●

- Sumber : Dinperindag Kabupaten Purbalingga. 2019
- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan pada capaian indikator program pada urusan perindustrian di atas. bahwa terdapat 1 program dan 3 indikator RPJMD 2016-2021 dimana ketiga indikator telah tercapai. Semua indikator program di urusan perindustrian. telah mencapai kinerja yang baik karena telah mencapai target sampai dengan tahun 2019. Diharapkan ketercapaian indikator kinerja program tersebut dapat dipertahankan pada tahun berikutnya.

F. Urusan Transmigrasi

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan transmigrasi sampai dengan triwulan IV tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.107.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Transmigrasi

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Ketransmigrasian									
1	Jumlah Calon Transmigran yang difasilitasi	KK	15	15	3	4	26.67	26.67	▼

- Sumber : Dinaker Kabupaten Purbalingga.2019
- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan pada capaian indikator program pada urusan transmigrasi di atas. bahwa terdapat 1 program dan 1 indikator RPJMD 2016-2021 dimana indikator tersebut perlu perhatian atau upaya keras. Kinerja indikator pada Program Ketransmigrasian memang kecil karena di Kabupaten Purbalingga tidak banyak jumlah calon transmigran yang melaksanakan program transmigrasi.

2.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Urusan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan perencanaan dan penelitian pengembangan sampai dengan triwulan IV tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.108.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah									
1	Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100	100	90	98	98.00	98.00	
2	Tingkat Keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	%	100	100	100	60	60.00	60.00	
3	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran	%	78	76	23	75	98.68	96.15	
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
4	Tingkat Pencapaian Target Kinerja sasaran Pembangunan	%	100	100	94.7	85	85.00	85.00	
Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi									
5	Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga iptek	Lem-baga	7	7	11	15	214.29	214.29	
6	Frekuensi diseminasi hasil litbang	Desi-minasi	4	4	3	6	150.00	150.00	

- Sumber : Bappelibangda Kabupaten Purbalingga. 2019
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras
-

Berdasarkan pada capaian indikator program pada urusan perencanaan dan penelitian pengembangan tersebut di atas. bahwa terdapat 3 program dan 6 indikator RPJMD 2016-2021. Dari keseluruhan indikator. sebanyak 2 indikator telah tercapai. 3 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu perhatian/upaya keras yaitu Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran. Diharapkan ketercapaian indikator kinerja program tersebut dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya.

B. **Urusan Pengawasan**

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan pengawasan sampai dengan triwulan IV tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.109.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada
Urusan Pengawasan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah									
1	Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa	Unit	548	152	144	490	78.95	89.42	
2	Persentase penanganan kasus/khusus	%	100	100	100	100	100.00	100.00	
3	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	%	100	85	82	85.75	100.88	85.75	
4	Level kapabilitas APIP	Tingkat	5	3	3	3	100.00	60.00	

- Sumber : Inspektorat Kabupaten Purbalingga. 2019; data diolah
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan pada capaian indikator program pada urusan pengawasan tersebut di atas. bahwa terdapat 1 program dan 4 indikator RPJMD 2016-2021. Sebanyak 1 indikator telah tercapai. 2 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu perhatian/upaya keras yaitu Level kapabilitas APIP. dimana untuk tahun 2019 sudah mencapai target. namun untuk status capaian RPJMD sampai dengan target akhir tahun RPJMD masih perlu perhatian.

C. **Urusan Keuangan**

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan keuangan sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.110.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada
Urusan Keuangan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah									

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
1	Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
2	Persentase SKPD yang melaksanakan penatausahaan aset sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
3	Ketepatan waktu pengiriman Laporan Keuangan sesuai ketentuan	%	100	96	100	100	104.17	100.00	●
4	Ketepatan waktu pengiriman Laporan Aset sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah									
5	Persentase PBB yang terbayar oleh wajib pajak	%	100	100	105.95	105.67	105.67	105.67	●
6	Capaian PAD	%	100	100	109.37	101.55	101.55	101.55	●

- Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga. 2019; data diolah
- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan pada capaian indikator program pada urusan keuangan tersebut di atas. bahwa terdapat 2 program dan 6 indikator RPJMD 2016-2021. Semua indikator program baik dalam Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maupun dalam Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah telah tercapai sehingga perlu dipertahankan pada tahun berikutnya.

D. Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja program pembangunan berdasarkan indikator program pada urusan pemerintahan sampai dengan akhir tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.111.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program pada Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
Sekretariat Daerah									
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Angka	80.05	79	79	82.30	104.18	102.81	
Program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan									
2	Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	OPD	6	6	0	4	66.67	66.67	
3	Nilai Evaluasi SAKIP	Angka	65	60	57.75	58.75	97.92	90.38	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
	Kabupaten								
4	Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi	%	100	95	587	106	111.58	106.00	●
5	Tingkat capaian bantuan hukum dan penyuluhan hukum	%	100	31	32	169	545.16	169.00	●
6	Tingkat capaian informasi peraturan perundang – undangan	%	100	235	242	100.10	42.60	100.10	●
7	Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	%	100	100	94.18	94	94.00	94.00	▶
8	Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	%	100	100	98.72	96.80	96.80	96.80	▶
9	Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	%	3	3	10.54	14.71	490.33	490.33	●
10	Tingkat capaian target laba perusda (ribu rupiah)	Rp. 000	45.213.213	37.366.292	0	21.385.537	57.23	47.30	▼
11	Tingkat capaian target deviden perusda (ribu rupiah)	Rp. 000	22.334.772	18.458.489	21.406.072	10.407.048	56.38	46.60	▼
12	Jumlah LKM berbadan hukum (unit)	Unit	224	56	9	14	25.00	6.25	▼
13	Tingkat kesesuaian perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	%	90	90	100	90	100.00	100.00	●
14	Tingkat keberhasilan pelaksanaan Pilkades	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
15	Persentase kecamatan yang menerapkan standar PATEN	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
16	Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	%	100	100	314	102	102.00	102.00	●
Sekretariat DPRD									
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah									
17	Persentase usulan Raperda yang disetujui	%	100	100	86.86	57.14	57.14	57.14	▼
BKPPD									
Program fasilitasi dan pengembangan kepegawaian daerah									
18	Presentase ASN yang mengikuti diklat sesuai standar	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●
19	Presetanse penempatan SDM aparatur sipil sesuai formasi dan kompetensi	%	100	100	100	99.75	99.75	99.75	▶
20	Presentase pelayanan adminstrasi kepegawaian	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Realisasi		Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status Capaian RPJMD s.d 2019
					Tahun 2018	Tahun 2019			
21	Presentase administrasi file kepegawaian yang terupdate	%	100	100	100	100	100.00	100.00	●

- Sumber : Setda . Set. DPRD. BKPPD Kabupaten Purbalingga. 2019

- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Perhatian/ Upaya Keras

Berdasarkan pada capaian indikator program pada urusan pemerintahan di atas. bahwa terdapat 4 program dan 21 indikator RPJMD 2016-2021. Dari keseluruhan indikator. sebanyak 12 indikator telah tercapai. 4 indikator akan tercapai dan 5 indikator perlu perhatian/upaya keras. Beberapa indikator yang perlu perhatian yaitu Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK. Tingkat capaian target laba perusda (ribu rupiah). Tingkat capaian target deviden perusda (ribu rupiah). Jumlah LKM berbadan hukum (unit) dan Persentase usulan Raperda yang disetujui. Diharapkan ketercapaian indikator kinerja program tersebut dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya.

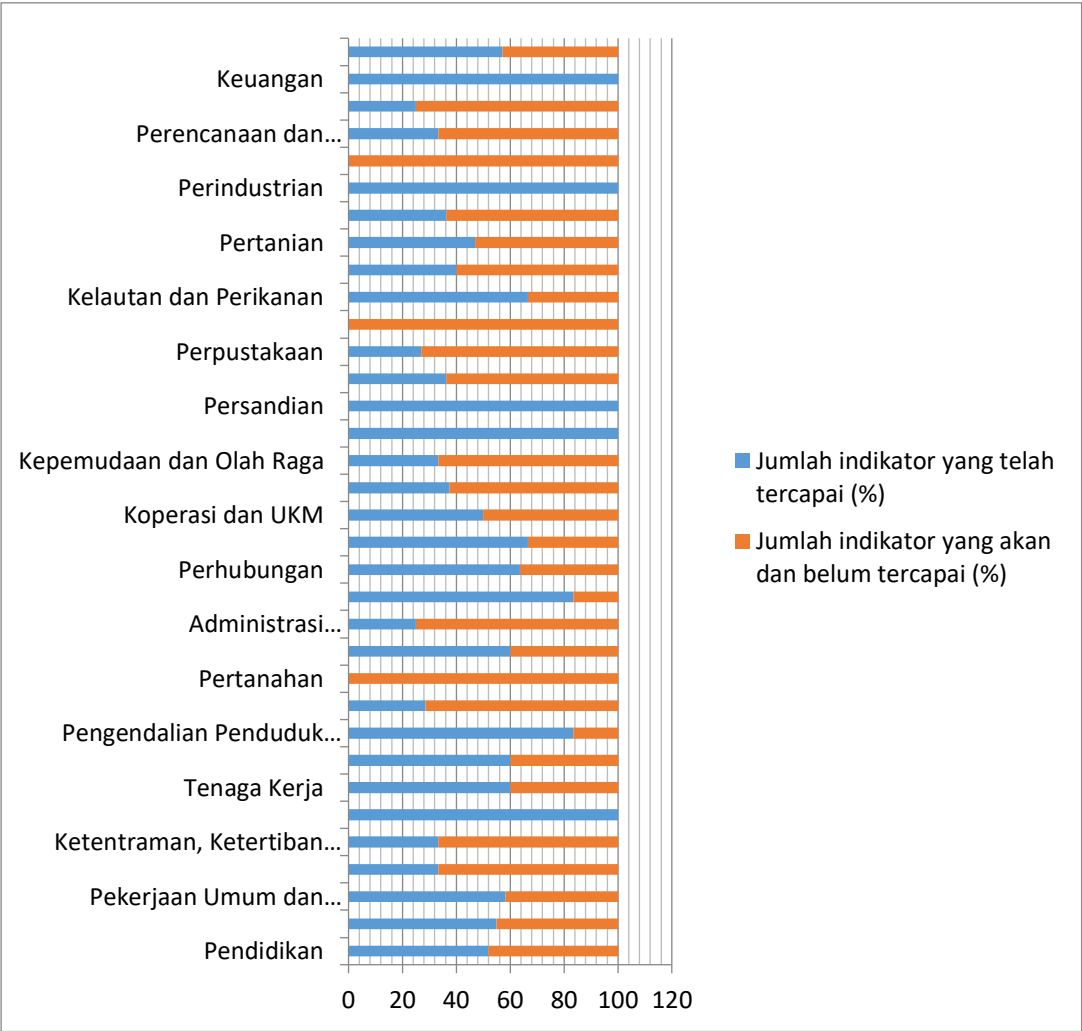
Secara umum capaian kinerja program Tahun 2019 dari 390 indikator menunjukkan kinerja yang baik dimana 53% dari total indikator telah tercapai. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya perlu perhatian/upaya keras yang tersebar dalam 30 urusan. dengan kondisi sebagai berikut :

1. Urusan pendidikan terdapat 13 indikator yang akan dan belum tercapai dari 27 total indikator;
2. Urusan kesehatan terdapat 28 indikator yang akan dan belum tercapai dari 62 total indikator;
3. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat 5 indikator yang akan dan belum tercapai dari 12 total indikator;
4. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman terdapat 2 indikator yang akan dan belum tercapai dari 3 total indikator;
5. Urusan ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdapat 8 indikator yang akan dan belum tercapai dari 12 total indikator;
6. Urusan sosial tidak terdapat indikator yang belum tercapai dari 6 total indikator;
7. Urusan tenaga kerja terdapat 2 indikator yang akan dan belum tercapai dari 5 total indikator;
8. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat 2 indikator yang akan dan belum tercapai dari 5 total indikator;

9. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdapat 3 indikator yang akan dan belum tercapai dari 18 total indikator;
10. Urusan pangan terdapat 5 indikator yang akan dan belum tercapai dari 7 total indikator;
11. Urusan lingkungan hidup terdapat 6 indikator yang akan dan belum tercapai dari 15 total indikator;
12. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdapat 3 indikator yang belum tercapai dari 4 total indikator;
13. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat 2 indikator yang akan dan belum tercapai dari 12 total indikator;
14. Urusan perhubungan terdapat 4 indikator yang akan dan belum tercapai dari 11 total indikator;
15. Urusan komunikasi dan informasi terdapat 4 indikator yang akan dan belum tercapai dari 12 total indikator;
16. Urusan koperasi dan UKM terdapat 3 indikator yang belum tercapai dari 6 total indikator;
17. Urusan penanaman modal dan perizinan terpadu terdapat 5 indikator yang akan dan belum tercapai dari 8 total indikator;
18. Urusan kepemudaan dan olah raga terdapat 4 indikator yang akan dan belum tercapai dari 6 total indikator;
19. Urusan kebudayaan terdapat 7 indikator yang akan dan belum tercapai dari 11 total indikator;
20. Urusan perpustakaan terdapat 19 indikator yang akan dan belum tercapai dari 26 total indikator;
21. Urusan kearsipan terdapat 1 indikator yang akan dan belum tercapai dari 3 total indikator;
22. Urusan kelautan dan perikanan terdapat 2 indikator yang akan dan belum tercapai dari 6 total indikator;
23. Urusan pariwisata terdapat 3 indikator yang akan dan belum tercapai dari 5 total indikator;
24. Urusan pertanian terdapat 27 indikator yang akan dan belum tercapai dari 51 total indikator;
25. Urusan perdagangan terdapat 7 indikator yang akan dan belum tercapai dari 11 total indikator;

- 26. Urusan perindustrian tidak terdapat indikator yang akan dan belum tercapai dari 3 total indikator;
- 27. Urusan transmigrasi terdapat 1 indikator yang akan dan belum tercapai dari 1 total indikator;
- 28. Urusan perencanaan dan penelitian pengembangan terdapat 4 indikator yang akan dan belum tercapai dari 6 total indikator;
- 29. Urusan pengawasan terdapat 3 indikator yang akan dan belum tercapai dari 4 total indikator;
- 30. Urusan keuangan tidak terdapat indikator yang belum tercapai dari 6 total indikator;
- 31. Urusan pemerintahan terdapat 9 indikator yang akan dan belum tercapai dari 21 total indikator.

Secara ringkas gambaran status penilaian capaian indikator kinerja masing-masing urusan tergambar pada grafik berikut.



Gambar 2.27.
Capaian Indikator Kinerja Masing-Masing Urusan Tahun 2019

2.2.5 Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Urusan Pendidikan

Mendasarkan Pasal 18 dan pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Adapun pelayanan dasar dimaksud adalah Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; serta Sosial. Sesuai Permendagri Nomor 100 Tahun 2108 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar tingkat kabupaten/ kota untuk Urusan Pendidikan adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan. Mengingat bahwa saat ini rumusan teknis SPM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri 100 Tahun 2018 masih dalam proses perumusan pada masing – masing urusan wajib pelayanan dasar, maka capaian indikator SPM Kabupaten Purbalingga tahun 2017 dan 2018 bidang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.112.
Indikator SPM Urusan Pendidikan

No	Indikator SPM	Capaian SPM	
		2017	2018
1	Pendidik SD/SDLB/MI berkualifikasi S1 / D4 (%)	97.04	97.45
2	Pendidik SMP/SMPLB/MTs berkualifikasi S1/D4 (%)	95.85	97.61
3	Pendidik SD/SDLB/MI bersertifikat pendidik (%)	57.65	60.29
4	Pendidik SMP/SMPLB/MTs bersertifikat pendidik (%)	50.45	57.51
5	SD/SDLB/MI terakreditasi (%)	47.44	97.25
6	SMP/SMPLB/MTs terakreditasi (%)	45.41	97.41
7	SD/MI melaksanakan MBS dengan baik (%)	98.85	100
8	SMP/SMPLB/MTs melaksanakan MBS dengan baik (%)	99.34	100
9	Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI (%)	0.03	0.07
10	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs (%)	0.48	0.47
11	Angka Kelulusan SD/SDLB/MI (%)	100	100
12	Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs (%)	100	100
13	Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs sesuai standar	100	100
14	APK SD/SDLB/MI/Paket A	99.92	107.01
15	APM SD/SDLB/MI/Paket A	101.97	94.37
16	APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	102.05	97.44
17	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	101.70	72.03
18	Angka Kelulusan Kesetaraan Paket A, B, C (jumlah)	650	590
19	Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 (%)	156.53	58.77

No	Indikator SPM	Capaian SPM	
		2017	2018
20	Pendidik PAUD bersertifikat pendidik (%)	30.58	37.29
21	APK PAUD/TK (3 – 6 tahun)	77.03	57.86
22	Lembaga PAUD terakreditasi (%)	45.14	47.21

2. **Urusan Kesehatan**

Sesuai Permendagri Nomor 100 Tahun 2108 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar tingkat kabupaten/ kota untuk Urusan Kesehatan adalah a). pelayanan kesehatan ibu hamil; b). pelayanan kesehatan ibu bersalin; c). pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d). pelayanan kesehatan balita; e). pelayana n kesehatan pada usia pendidikan dasar; f). pelayanan kesehatan pada usia produktif; g). pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h). pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i). pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; j). pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k). pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan l). pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif. Mengingat bahwa saat ini rumusan teknis SPM sesuai Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri 100 Tahun 2018 masih dalam proses perumusan pada masing – masing urusan wajib pelayanan dasar. maka capaian indikator SPM Kabupaten Purbalingga tahun 2017 dan 2018 bidang kesehatan sebagai berikut :

Tabel 2.113.
Indikator SPM Urusan Kesehatan

No	Indikator SPM	Capaian SPM	
		2017	2018
1	Cakupan K 4 (%)	100	98
2	Bumil KEK (%)	100	231.4
3	Ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan (%)	100	100
4	Ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah (%)	100	100
5	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	100	101
6	Cakupan persalinan faskes (%)	101	99.2
7	Cakupan pelayanan nifas (%)	100	98
8	Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	100	105.3
9	Cakupan KN lengkap	99.4	96.3
10	Cakupan neonatal komplikasi ditangani (%)	100	100
11	Cakupan kunjungan bayi (%)	100	104.9
12	Prevalensi bayi dengan BBLR (%)	100	102.4
13	Bayi lahir diberi IMD (%)	100	105.7
14	Angka kematian balita (per 1.000 KH)	86.7	111.1
15	Cakupan ASI eksklusif (%)	100	98.4

No	Indikator SPM	Capaian SPM	
		2017	2018
16	Cakupan pelayanan anak balita (%)	96.5	96.6
17	Prevalensi balita gizi buruk (%)	100	84.2
18	Prevalensi balita gizi kurang (%)	100	108.4
19	Balita kurus mendapat PMT (%)	100	111.1
20	Cakupan balita gibur yang mendapat perawatan (%)	100	100
21	Cakupan penemuan kasus pneumonia pada balita (%)	100	102.2
22	Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani (%)	100	100
23	Cakupan penemuan kasus diare pada balita (%)	98.1	76.7
24	Cakupan balita diare yang ditangani (%)	100	100
25	Cakupan UCI (%)	100	100

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Daerah Kabupaten/Kota. Adapun jenis pelayanan sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi :

- a. Pelayanan jaringan jalan
 - 1. Akseibilitas
 - Tersediannya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota
 - 2. Mobilitas
 - Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat
 - 3. Keselamatan
 - Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat
- b. Pelayanan ruas jalan
 - 1. Kondisi jalan
 - Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman
 - 2. Kecepatan
 - Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana
- c. Sumber daya air

Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat :

1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
 2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
 3. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
- d. Penataan bangunan dan lingkungan
- Harga standar bangunan gedung negara (HSBGN)
- Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di Kabupaten/Kota
- e. Penataan ruang
1. Informasi penataan
 2. Pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan RTR
 3. Pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang

Tabel 2.114.
Indikator SPM urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator SPM	Capaian SPM 2018
1	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten/Kota	100
2	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan	85
3	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	85
4	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	85
5	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	85
6	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	90
7	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	85
8	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm sekama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	91
9	Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di Kabupaten/Kota	100
10	Informasi peta analog RTRW Kabupaten Purbalingga	100
11	Informasi peta analog RDTR	100
12	Informasi peta digital RTRW	100
13	Informasi peta digital RDRTW	100
14	Konsultasi publik penyusunan Rencana Tata Ruang	100

No	Indikator SPM	Capaian SPM 2018
	Wilayah (RTRW)	
15	Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota beserta rencana rincian	100
16	Terlaksananya tindakan awal terhadap	100

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Bidang perumahan rakyat merupakan urusan wajib untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan bidang perumahan rakyat meliputi :

- a. Rumah Layak Huni dan Terjangkau :
 - 1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni
 - 2. Cakupan layanan rumah layak huni
- b. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Capaian indikator SPM Kabupaten Purbalingga tahun 2017 dan 2018 bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.115.
Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator SPM	Capaian SPM	
		2017	2018
1	Persentase rumah layak huni (%)	92.14	93.29
2	Cakupan kepemilikan rumah / persentase rumah per KK (%)	78.55	77.46

5. **Urusan Sosial**

Sesuai Permendagri Nomor 100 Tahun 2108 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar tingkat kabupaten/ kota untuk Urusan Sosial adalah a). rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti; b). rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti; c). rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti; d). rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan e). perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Mengingat bahwa saat ini rumusan teknis SPM sesuai Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri 100 Tahun 2018 masih dalam proses perumusan pada masing – masing urusan wajib pelayanan dasar. maka capaian indikator SPM Kabupaten Purbalingga tahun 2017 dan 2018 bidang sosial sebagai berikut :

Tabel 2.116.
Indikator SPM Urusan Sosial

No	Indikator SPM	Capaian SPM	
		2017	2018
1	PMKS yang mendapat bantuan sosial (%)	132.669 (68.56)	92.438 (85.58)
2	Jumlah KUBE / kelompok ekonomi sejenis	20	20
3	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	25	25
4	Cakupab korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat bencana (KK)	197	150

6. **Urusan Trantibumlinmas**

SPM Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 telah tercakup dalam program sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Keamanan. Ketertiban. dan Perlindungan Masyarakat (SATPOL PP)
 - a. Operasional Petugas Teknis Operasional Polisi Pamong Praja
 - b. Pengamanan Pemilihan Kepala Desa
 - c. Pengamanan Lebaran. Natal. Tahun Baru dan Tamu VIP
 - d. Pembinaan dan Pengerahan Pasukan
 - e. Pembinaan Korps Musik
 - f. Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat Inti
 - g. Pembinaan dan Penertiban PKL

- h. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam teknik Penegakan Peraturan Daerah
 - i. Pembinaan Satlinmas Eks Tuti Purbalingga. Bobotsari dan Bukateja
 - j. Razia Reklame
 - k. Razia PGOT
 - l. Pengawasan/Pemberantasan Barang Kena Cukai (DBH-CHT)
 - m. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - n. Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
 - o. Pengamanan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018
 - p. Patroli Terpadu
 - q. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - r. Penertiban Pelanggaran Hukum Terhadap Ketentuan Pidana Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - s. Pembinaan Khusus Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Inti
 - t. Razia Anak Sekolah
 - u. Pemantauan Daerah Rawan Bencana dan Kejadian Bencana
 - v. Pendataan dan Pembuatan Kartu Perlindungan Masyarakat
 - w. Pelatihan SAR Air dan SAR Gunung Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Kebakaran (SATPOL PP)
- a. Operasional Pemadam Kebakaran
 - b. Pengadaan Alat Kerja Petugas Pemadam Kebakaran
 - c. Pemantauan APAR dan Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - d. Pelatihan Pemadam Kebakaran Bagi Karyawan Perusahaan dan Rumah Sakit
 - e. Pembentukan Kader Kesiapsiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Bagi Pemuda dan Organisasi Masyarakat
- 3) Program Penanggulangan Bencana (BPBD)
- a. Pengadaan Alat Berat dan Mobil Operasional Penanggulangan Bencana

- b. Penanganan Darurat Bencana/Penyediaan Stock Logistik
- c. Fasilitasi Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)
- d. Pembangunan Gudang alat di BPBD Kabupaten Purbalingga
- e. Pembentukan Desa Tangguh Bencana
- f. Simulasi Penanganan Bencana
- g. Pelatihan dan sosialisasi Budaya Sadar Bencana
- h. Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana dan Pos Pelayanan Bencana
- i. Penyelesaian Kegiatan Penanganan Longsor SDN 2 Gunungwuled
- j. Penyelesaian Rehabilitasi Longsor Jalan SDN 1 Karangbawang
- k. Pengadaan Jembatan Knockdown
- 4) Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOL)
 - a. Pemberdayaan Badan Koordinasi dan Informasi
 - b. Keamanan Terpadu
 - c. Pengamanan Tertutup Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Tamu VIP
 - d. Fasilitasi Jaringan Komunikasi Masyarakat

2.2.6 Evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDGs) didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk 10 tahun ke depan hingga tahun 2030. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Berbeda dengan MDGs yang lebih bersifat birokratis dan teknokratis, penyusunan butir-butir SDGs lebih inklusif melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization* (CSO). Penyusunan SDGs sendiri memiliki beberapa tantangan karena masih terdapat beberapa butir-butir target MDGs yang belum bisa dicapai dan harus diteruskan di dalam SDGs. Seluruh tujuan, target dan indikator dalam dokumen SDGs juga perlu mempertimbangkan perubahan situasi global saat ini. Berbeda halnya dengan

MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang. SDGs memiliki sasaran yang lebih universal dan dihadirkan untuk menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia. Adapun 17 *global goals* dari SDGs adalah sebagai berikut :

1. **Tanpa Kemiskinan**

Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.

2. **Tanpa Kelaparan**

Tidak ada lagi kelaparan. mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

3. **Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan**

Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

4. **Pendidikan Berkualitas**

Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

5. **Kesetaraan Gender**

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

6. **Air Bersih dan Sanitasi**

Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

7. **Energi Bersih dan Terjangkau**

Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

8. **Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak**

Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. lapangan kerja yang penuh dan produktif. serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9. **Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

Membangun infrastruktur yang berkualitas. mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10. **Mengurangi Kesenjangan**

Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas

Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

13. Aksi Terhadap Iklim

Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. Kehidupan Bawah Laut

Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

15. Kehidupan di Darat

Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian

Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Capaian indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Purbalingga tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.117.
Indikator SDGs Kabupaten Purbalingga

Indikator SDGs			Kabupaten Purbalingga	Provinsi Jawa Tengah
•Pilar Sosial				
	1. Tanpa Kemiskinan			
	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	15.03	11.32
	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	74.78	-
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	81.00	9.85
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	52.351	1.537.360
	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	98.80	97.71
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	81.20	74.69
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	88.84	84.16
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	87.48	82.04
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	105.70	99.03
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	102.51	80.15
	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	67,19	69,15
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	92.43	90.00
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	100.00	4.754.00

Indikator SDGs			Kabupaten Purbalingga	Provinsi Jawa Tengah
	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		9.00
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.		74.00
	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.		146.40
	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (Juta Rupiah)	2.147.40	51.274.87
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		1.00
	2. Tanpa Kelaparan			85.30
	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).		85.30
	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	2.83	-
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.		100.00
	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	1.976.57	8.50
	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.		-
	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.		-
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.		-
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	55.42	-
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	85.82	87.30

Indikator SDGs			Kabupaten Purbalingga	Provinsi Jawa Tengah
	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	162.086.67	-
3. Kehidupan Sehat & Sejahtera				-
	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	81.9	-
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	75.62	-
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	97.35	-
	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	9.14	9.48
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.		-
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	7.58	8.36
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	103.08	100.00
	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	59 orang	1.283.00
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	124.18	-
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0.60	0.02
	3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun	32.11	
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	17.39	-
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	8.56	0.29
	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	22.00	37.00
	3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi		69.00
	3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan		40.00

Indikator SDGs			Kabupaten Purbalingga	Provinsi Jawa Tengah
	3.5.1 (d)	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu		8.00
	3.6.1 (indikator global) (ditanyakan kembali)	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas		38.00
	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	16.86	74.69
	3.7.1.(b)	Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	35.51	27.43
	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	14.656.00	-
	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.		13.06
	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.		88.31
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	93.02	88.31
	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	143.50	15.00
	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	3.20	-
4. Pendidikan Berkualitas				
	4.1.1 (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	97.25	
	4.1.1 (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	97.41	
	4.1.1 (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	7.00	
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	120.37	109.49
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	139.47	100.75
	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	85,08	88,14
	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	83.67	80.04
	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	-	-
	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	11.79	18.22

Indikator SDGs			Kabupaten Purbalingga	Provinsi Jawa Tengah
	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat;	100.37	-
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat	115.06	
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/ sederajat	115.58	
	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	94.92	93.45
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur [1]15-24 tahun dan umur [2]15-59 tahun.		-
	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik		76.01
5. Kesenjangan Gender				
	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.		100.00
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.		100.00
	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	43.40	-
	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	68.08	80.01
	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	61.03	60.47
Pilar Ekonomi				
10. Berkurangnya Kesenjangan				
	10.1.1 (a) Sama persis 1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	15.62	-

Indikator SDGs			Kabupaten Purbalingga	Provinsi Jawa Tengah
	10.1.1 (f) KEW KAB/KOTA	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal		
	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	-	
	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	15.00	100.00
	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.		-
	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		
	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		1.698.265
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan				
	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	8.40	-
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0.25	-
	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		
	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		
	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.		99.67
	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.		-
	17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian		-
	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		
	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.		

Indikator SDGs			Kabupaten Purbalingga	Provinsi Jawa Tengah
	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	100.00	
	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.		38.51
7. Energi Bersih & Terjangkau				
	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	99.89	98.52
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.		708.04
	7.1.2 (a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	-	
	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	85.25	89.13
8. Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi				
	10.1.1*	Koefisien Gini.		0.37
	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	5.65	4.61
	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	26.68	36.78
	8.10.1*	Jumlah kantor (1) Bank dan (2) ATM per 100.000 penduduk dewasa		
	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)		
	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit		-
	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.		4.96
	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian. berdasarkan jenis kelamin.		51.02
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.		39.06
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.		91.72
	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.		11.428.00
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	6.06	4.51
	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).		21.22

Indikator SDGs			Kabupaten Purbalingga	Provinsi Jawa Tengah
	8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).		33.481
	8.8.1	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.		2.05
	8.8.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.		
	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	NA	-
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	149	4.90
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	3.279.292	10.00
	8.9.2*	Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	NA	
	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	27.24	34.50
	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		
	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB		-
9. Industri, Inovasi, & Infrastruktur				
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	5.94	5.57
	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.		1.176.31
	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	100.00	
	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	55.69	60.47
	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet		38.51
Pilar Hukum dan Tata Kelola				
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh				
	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.		36.00
	16.1.2(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	-	-

Indikator SDGs			Kabupaten Purbalingga	Provinsi Jawa Tengah
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		1.05
	16.10.2*	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	3.00	
	16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	27.00	88.00
	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi	100.00	39.00
	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	-	4.00
	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.		3.86
	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	9.00	
	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		-
	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	WTP
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	58.75	80.18
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	86.09	-

Indikator SDGs			Kabupaten Purbalingga	Provinsi Jawa Tengah
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	60.61	74.49
	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	100.00	-
	16.7.1(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	22.22	-
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	3.13	-
	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil. menurut umur.		90.00
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	93.01	92.08
	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	86.90	90.00
	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	-	5.93
•Pilar Lingkungan				
11. Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan				
	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	93.74	
	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kawasan Perkotaan Metropolitan	NA	
	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.		

Indikator SDGs			Kabupaten Purbalingga	Provinsi Jawa Tengah
	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.		2.228.658
	11.2.1.(b).	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	-	
	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.		-
	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	134.54	-
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).		-
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.		-
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		2.00
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (Juta Rupiah)	2.147.40	51.274.87
	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	11.64	70.00
	11.7.2.(a).	Proporsi korban kekerasan dalam 12bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.		
	11.b.1*.	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.		
	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		1.00
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab				-
	12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking Biru		-
	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		-
	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	64.00	-
	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		70.00
	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.		
	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).		-

Indikator SDGs			Kabupaten Purbalingga	Provinsi Jawa Tengah
	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.		1.655.86
13. Penanganan Perubahan Iklim				1.00
	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		1.00
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	134.54	-
15. Ekosistem Daratan			2.00	-
	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	2.00	-
6. Air Bersih & Sanitasi Layak			77.24	84.16
	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	77.24	84.16
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.		60.89
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	76.95	84.16
	6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat		
	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.		87.74
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	70.90	82.04
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	229	28
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	107	4.767

Indikator SDGs			Kabupaten Purbalingga	Provinsi Jawa Tengah
	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota. kawasan dan komunal.		35
	6.3.1 (a)	Jumlah Kab/Kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)		
	6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.		
	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).		21

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Program RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 terhadap target kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021 dan hasil evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimum serta capaian SDG's sebagaimana telah dijelaskan di atas, beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan yang menjadi prioritas dimana berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan dengan mencermati permasalahan yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran RPJMD serta prioritas lain dari kebijakan tingkat nasional dan tingkat provinsi dengan menelaah kembali capaian indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga. Maka permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia sangat berkaitan erat dengan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, dan peningkatan apresiasi terhadap seni budaya daerah dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan, khususnya terkait pembangunan manusia di suatu daerah dengan menggunakan tolok ukur *Physical Quality of Life Index* (PQLI) atau yang lebih dikenal Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit yang di bentuk oleh Indeks Kesehatan yang dicerminkan dengan Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan yang terdiri dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta Indeks Hidup Layak yang digambarkan melalui Pengeluaran Rill per Kapita. Berkaitan dengan pencapaian pembangunan manusia, nilai IPM Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2018 berada dalam klasifikasi sedang yaitu sebesar 68.74 dan terdapat kenaikan pada setiap komponen IPM. Meskipun demikian, nilai IPM Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah angka Provinsi Jawa Tengah sebesar 71.12 hal ini mengindikasikan perlu adanya akselerasi dalam peningkatan kinerja guna menangani isu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Purbalingga.

2. Penurunan Angka Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan tidak hanya menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Purbalingga namun juga menjadi prioritas pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga masih mengalami kelambatan. hal ini dapat dicermati dari tingkat persentase penurunan angka kemiskinan yang rata-rata hanya berkisar sekitar 1% per tahun. Meskipun angka kemiskinan di kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2019 mengalami tren penurunan. namun demikian angka kemiskinan Kabupaten purbalingga pada tahun 2019 yang berkisar pada angka 15.03% menempatkan Kabupaten Purbalingga pada posisi 5 terbawah dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu. angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga masih lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (10.8%). dan Nasional (9.41%). Perbaikan perekonomian dirasa belum banyak memberikan dampak pada penurunan angka kemiskinan. Kondisi yang dihadapi oleh sebagian besar penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga adalah tidak cukupnya akses terhadap sumber daya ekonomi. Oleh sebab itu upaya penanggulangan kemiskinan mendatang harus menitikberatkan kebijakan yang berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan akses sumber daya ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin.

3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 sebesar 5.42 persen. meningkat dari 5.37 persen pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada kenyataannya belum juga mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Sektor pertanian menjadi penyumbang paling dominan dalam PDRB Kabupaten Purbalingga. Meskipun demikian. terjadi transformasi pada struktur perekonomian daerah ke fase industrialisasi. hal ini dapat dilihat dari menurunnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun dan tumbuh melambat dikarenakan masalah produktivitas. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi mendatang perlu didorong oleh sumber-sumber sektor sekunder dan tersier namun dengan tetap memperhatikan sektor pertanian sebagai penyangga perekonomian daerah. akselerasi pertumbuhan

ekonomi ini juga diarahkan untuk dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

4. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur seperti jalan. jembatan. prasarana irigasi. prasarana perkotaan. prasarana permukiman. serta prasarana pelayanan sosial dan ekonomi dengan kapasitas dan kualitas yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan sangat dibutuhkan untuk kelancaran distribusi barang dan jasa. Kondisi jalan dan jembatan yang tidak memadai akan menyebabkan terhambatnya angkutan barang dan orang sehingga akan menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sampai dengan saat ini. meskipun seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga telah dapat diakses melalui angkutan kendaraan bermotor roda empat. tetapi masih perlu peningkatan kapasitas jalan untuk meningkatkan akses ke beberapa wilayah tertentu. Di samping itu. untuk meningkatkan efisiensi transportasi. juga perlu dilakukan pembangunan beberapa jalan dan jembatan baru untuk menghubungkan beberapa wilayah tertentu agar diperoleh jarak tempuh yang lebih pendek. Untuk meningkatkan umur ekonomi jalan juga diperlukan pembuatan saluran drainase dan talud pengaman jalan pada titik-titik tertentu di seluruh wilayah.

Pembangunan infrastruktur dengan kualitas yang baik dan merata di seluruh wilayah kabupaten Purbalingga diharapkan mampu memperkecil ketimpangan antarwilayah sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Bahkan dapat dikatakan pembangunan infrastruktur merupakan jantung pertumbuhan ekonomi. yang berperan penting mendukung peningkatan daya saing daerah.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. APK PAUD masih jauh dibawah angka ideal 100%. masih sebesar 57.86 persen;

- b. Kualifikasi guru PAUD masih rendah (Kualifikasi S1 baru 50 persen)
 - c. Jumlah Lembaga PAUD yang terakreditasi masih rendah
 - d. Masih rendahnya partisipasi sekolah penduduk usia sekolah khususnya untuk usia sekolah jenjang menengah (SMA sederajat) dan perguruan tingginya yang angkanya baru sebesar 59.4 persen dan 10.04 persen. Anak usia sekolah yang tidak bersekolah jumlahnya juga cukup banyak, yaitu sebesar 1.950 anak.
 - e. APS belum mencapai 100% artinya program wajar dikdas 9 Tahun belum tercapai meskipun sudah diatas 90%
 - f. sudah hampir 100% guru sekolah dasar di purbalingga berkualifikasi s1/D4 namun baru 60.3% saja yang bersertifikat pendidik.
 - g. Masih ada 17% sekolah belum melaksanakan proses pembelajaran dengan jumlah siswa per rombongan belajar maksimum 28 orang.
 - h. Masih ada 54% sekolah belum memiliki luas lahan sesuai ketentuan luas minimum.
 - i. Masih 86% bangunan sekolah belum memiliki instalasi listrik dengan daya yang mencukupi kebutuhan.
 - j. Masih banyak ruang kelas SD/MI yang rusak. Dari jumlah kelas 3.358, sebanyak 2.108 rusak ringan (62.7%), 187 rusak sedang (5.5%), 118 rusak berat (3.5%), 62 rusak total (1.8%) dan 883 kelas dalam kondisi baik (26.8 %)
 - k. Sertifikasi baru separuh dari guru SMP yang ada (57.51 persen).
2. Kesehatan
- a. Masih tingginya angka kesakitan dan keluhan kesehatan di Kabupaten Purbalingga. Dari 36.29 persen penduduk di kabupaten Purbalingga yang mengalami keluhan kesehatan terdapat 17.32 persen yang sakit.
 - b. Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi meskipun sudah turun dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 AKI sebesar 75.05 per 100.000 kelahiran hidup.
 - c. Masih cukup tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) yaitu sebanyak 7.51 per 1.000 kelahiran hidup, disebabkan antara lain kehamilan resiko tinggi, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil sehingga menyebabkan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), kelainan *konginental* pada bayi dan kehamilan yang tidak dikehendaki.

- d. Masih tingginya prevalensi balita gizi buruk. masih terdapat 56 kasus. yang juga berdampak pada tingginya prevalensi stunting sebesar 26.3 persen.
 - e. Masih tingginya prevalensi HIV-AIDS. data terakhir 437 penderita dan 46 orang diantaranya sudah meninggal.
 - f. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Masih belum meratanya kondisi prasarana dan bangunan pelengkap jalan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Purbalingga
 - b. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung Bandara JB Soedirman
 - c. Perlunya antisipasi terkait kondisi jalan alternatif sebagai efek pintu tol pemalang yang meningkatkan pergerakan lalu lintas di wilayah Kabupaten Purbalingga
 - d. Perlunya upaya yang terintegrasi antara pembangunan sarana dan prasarana irigasi dengan upaya konservasi Sumber Daya Alam
 - e. Perlunya penyusunan regulasi terkait bangunan gedung dang lingkungannya dan juga peningkatan pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi bangunan
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Cakupan rumah layak huni yang belum optimal. sehingga perlu adanya percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga
 - b. Perlunya percepatan penanganan air bersih dan sanitasi guna peningkatan cakupan akses air bersih dan cakupan sanitasi.
5. Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- a. Masih terbatasnya cakupan pelayanan kebakaran
 - b. Masih terbatasnya fasilitasi keagamaan
 - c. Belum optimalnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana pada daerah rawan bencana
 - d. Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum
6. Sosial
- a. Terbatasnya SDM pengelola dan pendampingan verifikasi dan validasi DTKS

- b. Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya jumlah anak jalanan. psikotik jalanan dan tuna sosial di Kabupaten Purbalingga
- c. Belum optimalnya upaya penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi kesejahteraan bagi penyandang masalah sosial. anak-anak terlantar dan lansia.
- d. Minimnya panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial
- e. Belum optimalnya peran potensi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan kesejahteraan sosial guna mendukung usaha kesejahteraan sosial

2.3.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Permasalahan krusial pada urusan tenaga kerja erat kaitannya dengan laju pertumbuhan penduduk usia kerja sehingga meningkatkan jumlah angkatan kerja. kualitas sumber daya manusia tenaga kerja juga erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada urusan tenaga kerja sebagai berikut:

- a. Masih banyaknya tenaga kerja dengan mutu dan produktivitas tenaga kerja yang rendah
- b. Terbatasnya perluasan lapangan kerja sehingga menyebabkan belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja yang ada
- c. Masih rendahnya daya saing tenaga kerja
- d. Daya saing tenaga kerja yang masih relatif rendah
- e. Masih relatif rendahnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja baik yang berbasis kompetensi. masyarakat. maupun kewirausahaan
- f. Masih belum optimalnya perlindungan tenaga kerja terhadap hak-hak normatif ketenagakerjaan maupun hak-hak sosial lainnya
- g. Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Cukup banyaknya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan seksual dan fisik;
 - b. Kabupaten Purbalingga belum memenuhi klasifikasi Kabupaten Layak Anak (KLA)
 - c. Meskipun angka indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Purbalingga lebih tinggi di banding Provinsi Jawa Tengah, namun belum menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraaya sebagai bukti yang menunjukkan bahwa program2 pembangunan sepenuhnya berpedoman pada strategi pengarusutamaan gender.
3. Pangan
- Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena hal tersebut, permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam kehidupan sosial masyarakat. Adapun permasalahan dalam pembangunan daerah pada urusan pangan adalah sebagai berikut:
- a. Tingkat konsumsi pangan yang belum berimbang dengan indikasi nilai skor Pola Pangan harapan (PPH) Kabupaten Purbalingga dimana baru mencapai angka 91.27 dari nilai ideal sebesar 100.
 - b. Instabilitas harga bahan-bahan pokok strategis terutama beras dan cabe
 - c. Ketersediaan cadangan pangan semakin berkurang akibat tingkat produktivitas lahan per hektar semakin menurun
 - d. Belum optimalnya kelancaran distribusi dan akses pangan
 - e. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan produsen pangan (khususnya industri mikro, kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan
4. Pertanian
- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan lahan milik Pemerintah Daerah
 - b. Masih terbatasnya jumlah lahan milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat
 - c. Perlu inventarisasi dan optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah
5. Lingkungan Hidup

- a. Masih terjadinya alih fungsi lahan
 - b. Perlunya peningkatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna menjaga ketahanan pangan
 - c. Masih terbatasnya perusahaan/pelaku industri rambut palsu dan tapioka yang memiliki instalasi limbah B3
 - d. Masih rendahnya indeks kualitas air mengindikasikan terjadinya pencemaran air
 - e. Masih relatif rendahnya cakupan pengurangan timbunan sampah dikarenakan keterbatasan daya tampung TPA
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- a. Cakupan kepemilikan akta kelahiran sampai dengan tahun 2018 masih relatif rendah yakni 37.68%
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai sector pembangunan
 - c. Masih terbatasnya sarana penunjang kegiatan administrasi kependudukan
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Masih rendahnya jumlah pasar desa yang dibina. baru sebanyak 41.8 persen. pasar.
 - b. Masih belum optimalnya peran lembaga ekonomi desa seperti BUMDes dalam mendukung perekonomian desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Tingginya *unmet need* KB antara lain disebabkan jumlah penyuluh KB (PLKB) yang relatif sedikit;
 - b. Masih rendahnya kepesertaan KB aktif (CPR) dan Kepesertaan KB Pria. Hasil Susenas tahun 2018 menunjukkan bahwa 56.21 persen perempuan berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin sedang mengikuti program KB. 16.86 persen pernah ikut KB tetapi sekarang sudah tidak lagi. dan 26.93 persen tidak pernah mengikuti program KB.
 - c. Tingginya persentase hamil usia muda (wanita pernah kawin 15 – 21 tahun rata-rata hamil pertama usia 13 tahun). dan tingginya persentase usia kawin muda (menikah pada usia di bawah 17 tahun ada 21.45 persen).
9. Perhubungan

- a. Perlunya penyusunan Rencana Induk Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna mengantisipasi perubahan kondisi lalu-lintas dan pertumbuhan ekonomi
 - b. Masih belum memadainya kondisi prasarana Terminal guna mendukung peningkatan tipe terminal Bobotsari menjadi Tipe A dan Terminal Purbalingga menjadi tipe B
 - c. Perlunya integrasi sistem angkutan di Kabupaten Purbalingga dengan keberadaan bandara JB Soedirman
10. Komunikasi dan Informatika
- a. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas informasi yang disampaikan melalui website resmi perangkat daerah guna mendukung keterbukaan informasi publik
 - b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung perwujudan e-government oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
11. Koperasi dan UKM
- Koperasi sangat diharapkan menjadi penggerak ekonomi di suatu wilayah dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Peran koperasi juga sangat penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan potensi usaha kecil yang dimiliki oleh masyarakat. penyediaan informasi serta sebagai lembaga distribusi dan pemasaran. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan dalam urusan Koperasi dan UKM. antara lain:
- a. Kompetensi pengelola/manajemen koperasi yang masih relatif rendah
 - b. Masih terdapat koperasi yang tidak aktif dalam menjalankan fungsi lembaga koperasi
 - c. Belum tersedianya data pelaku UMKM yang diperbarui secara berkala dengan baik (by name, by address, by product) untuk kepentingan perencanaan dan implementasi program-program pemberdayaan UMKM
 - d. Rendahnya daya saing (kemasan produk, sertifikasi hak merk, sertifikasi halal, inovasi, dll) produk UMKM
 - e. Lemahnya akses permodalan, pasar dan jejaring pemasaran produk UMKM

- f. Kurang optimalnya kerja sama antara pemerintah, pelaku UMKM, perguruan tinggi, pihak swasta dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal
- g. Belum adanya produk lokal yang kuat untuk menjadi branding Kabupaten Purbalingga
- h. Lemahnya akses pasar dan jejaring pemasaran produk UMKM

12. Penanaman Modal Daerah

Dengan adanya iklim investasi yang kondusif di kabupaten Purbalingga, hal ini tentu sangat berpotensi untuk meningkatkan laju investasi yang dilaksanakan baik oleh Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian karena jumlah investasi yang masuk menjadi salah satu indikator pertumbuhan di suatu wilayah. Namun demikian, guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki, beberapa permasalahan yang ada di lapangan harus dapat segera ditangani, antara lain:

- a. Keterbatasan ketersediaan lahan yang sesuai untuk investasi (industri, perdagangan dan perumahan)
- b. Masih terbatasnya ruang pemberian insentif dan disinsentif investasi di Kabupaten Purbalingga
- c. Belum optimalnya promosi dan kerja sama dalam rangka peningkatan investasi
- d. Masih terbatasnya data informasi mengenai peluang usaha/sektor/bidang usaha unggulan

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Kurang optimalnya pembinaan kepemudaan dan olah raga prestasi terutama pada level nasional, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga

14. Kebudayaan

Kurangnya apresiasi terhadap seni budaya daerah yang terlihat dari sedikitnya frekuensi pagelaran seni budaya, pengiriman duta kesenian dan kurangnya kegiatan kajian kesenian. Juru pelihara cagar budaya yang kurang memadai dan tingkat kunjungan museum yang masih rendah.

15. Perpustakaan

Rendahnya minat baca – literasi masyarakat, masih rendahnya jumlah perpustakaan desa/kelurahan, serta belum terpenuhinya standar

perpustakaan daerah sesuai Standar Nasional Perpustakaan/SNP (standar koleksi. sarana prasarana. pelayanan. tenaga. penyelenggaraan. dan pengelolaan perpustakaan)

16. Kearsipan

Masih rendahnya sarana prasarana kearsipan dan kurangnya SDM kearsipan serta belum semua Perangkat Daerah menerapkan pengelolaan arsip secara baku

2.3.2.3 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Perikanan di Kabupaten Purbalingga sebagian besar berupa perikanan darat. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan potensi perikanan darat di Kabupaten Purbalingga. namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang perlu dicermati. antara lain:

- a. Tingkat produksi ikan masih sulit untuk ditingkatkan karena relatif rendahnya efisiensi usaha budidaya dan harga jual ikan yang juga relatif rendah.
- b. Terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul
- c. Keterbatasan dalam penyediaan fasilitas kolam air yang baik bagi budidaya
- d. Tingginya harga pakan dan bahan baku pakan
- e. Keterbatasan aspek permodalan. teknologi. dan pasar
- f. Masih rendahnya produksi hasil olahan ikan
- g. Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha perikanan

2. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan sektor pariwisata secara tidak langsung berpotensi sebagai basis sumber penerimaan pajak hotel. pajak restoran. dan pajak hiburan. Dengan demikian. pengembangan pariwisata berdampak pula pada peningkatan penerimaan daerah sehingga diharapkan dapat memperbesar kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dan mengurangi ketergantungan pada jenis transfer dari pemerintah pusat. Meskipun demikian. pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten

Purbalingga masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan sebagai berikut:

- a. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana menuju kawasan wisata
- b. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas SDM Pariwisata yang profesional
- c. Belum optimalnya kinerja lembaga forum pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif
- d. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan serta pengembangan desa wisata
- e. Belum adanya city branding yang kuat untuk lebih mengenalkan pariwisata di Purbalingga
- f. Belum optimalnya interlink antara pelaku UMKM dengan dunia pariwisata
- g. Belum adanya Pusat Informasi Wisata / *Tourist Information Centre* (TIC) dan pusat oleh-oleh khas Kabupaten Purbalingga yang representatif.

3. Pertanian

Kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Purbalingga memiliki potensi yang sangat menjanjikan mengingat kondisi geografis dan masyarakat Kabupaten Purbalingga sebagian besar bekerja pada sektor pertanian. Pertanian dalam hal ini adalah pertanian dalam arti luas, termasuk pertanian tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, peternakan dan perkebunan. Meskipun memiliki potensi yang menjanjikan, terdapat beberapa permasalahan yang mendapat perhatian antara lain:

- a. Indikasi penurunan kualitas lahan antara lain karena penggunaan pupuk kimia yang belum berimbang.
- b. Teknik tanam yang masih konvensional, dan pengaruh perubahan iklim sehingga masa tanam tidak menentu
- c. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain
- d. Mayoritas petani adalah penggarap, bukan pemilik lahan
- e. Sulitnya akses petani terhadap bantuan permodalan
- f. Sulitnya mencari tenaga kerja di sektor pertanian dan menurunnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian

- g. Kelembagaan petani belum mengakar di masyarakat. dan belum mempunyai posisi tawar yang kuat
- h. Kerusakan jaringan irigasi tersier masih tinggi dan perlu penanganan segera
- i. Masih rendahnya minat masyarakat untuk melakukan budidaya pertanian organik
- j. Kurang optimalnya pembudidayaan dan pengembangan tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

4. Perdagangan

Urusan perdagangan memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. karena sumbangan sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga relatif besar/ kedua setelah sektor pertanian. Permasalahan dalam urusan perdagangan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

- a. Masih adanya pasar-pasar tradisional milik Pemerintah Daerah yang belum layak/memenuhi standar
- b. Masih terbatasnya distributor kebutuhan barang pokok dan strategis di setiap wilayah
- c. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) belum diketahui dan dirahasiakan manfaatnya oleh masyarakat
- d. Rendahnya pengawasan produk makanan dan minuman yang diuji
- e. Belum optimalnya penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL)

5. Perindustrian

Permasalahan dalam urusan perindustrian mencakup aspek belum adanya kawasan industri yang representatif di Kabupaten Purbalingga. belum adanya industri manufaktur yang bisa menjadi role model pengembangan industri lokal Kabupaten Purbalingga. belum optimalnya keberadaan dan penataan UPT Logam sebagai penyangga industri logam (knapot) di Kabupaten Purbalingga dan sumber PAD bagi Pemerintah Daerah. serta belum adanya sentra-sentra industri yang saling terkait dan sejenis untuk memudahkan proses produksi.

6. Transmigrasi

Tujuan pelaksanaan transmigrasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kegiatan transmigrasi dilaksanakan oleh

pemerintah provinsi Jawa Tengah melalui kerja sama antar daerah. Namun demikian minat masyarakat di Kabupaten Purbalingga untuk mengikuti transmigrasi masih relatif rendah.

2.3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Beberapa permasalahan terkait dengan unsur pendukung urusan pemerintahan diantaranya:

1. Setda
 - a. Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP masih relatif rendah
 - b. Masih kurang optimalnya pencapaian target kinerja pembangunan
 - c. Tingkat capaian target laba Perusda masih sangat rendah
2. Setwan
 - a. Masih kurang optimalnya pencapaian target kinerja terkait dengan usulan Raperda yang disetujui

2.3.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan
 - a. Masih relatif rendahnya tingkat pengakomodiran aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum musrenbang dalam dokumen penganggaran
 - b. Belum optimalnya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan
2. Litbang
 - a. Kurangnya penelitian dan pengembangan guna menunjang inovasi dan pengembangan IPTEK
 - b. Belum adanya Dewan Riset Daerah (DRD)
 - c. Belum ada Forum Masyarakat Pecinta IPTEK
3. Keuangan
 - a. Masih ada beberapa obyek pajak yang tidak diketahui keberadaannya. sehingga menyulitkan penagihan serta kurang inovasi untuk meningkatkan target PAD
4. Kepegawaian
 - a. Belum optimalnya penempatan SDM aparatur sipil yang belum sesuai dengan formasi dan kompetensi
5. Diklat
 - a. Belum optimalnya ASN yang mengikuti diklat sesuai standar

2.3.2.6 Unsur Pengawas

Beberapa permasalahan terkait dengan unsur pengawas diantaranya:

- a. Masih terbatasnya jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa
- b. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan masih relatif rendah
- c. Level kapabilitas APIP yang masih relatif rendah dan perlu ditingkatkan.

2.4 Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas. Adapun isu strategis daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan (*poverty*) yang merupakan permasalahan fundamental harus segera ditangani melalui implementasi langkah-langkah penanggulangan dan pendekatan yang sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Berdasarkan data Susenas BPS, selama periode Tahun 2015 – 2019, angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga sudah menunjukkan kecenderungan yang semakin penurunan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2015 sebanyak 176.490 jiwa atau sebesar 19.70 persen, menurun cukup signifikan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 140.070 jiwa atau sebesar 15.03 persen. Meskipun demikian, angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga masih menempati peringkat ke-5 di Provinsi Jawa Tengah. Relatif tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga menyebabkan relatif rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya.

Kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan, secara normatif pelaksanaannya terfokus pada **pengurangan beban penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah (40 % terbawah)**. Berikut ini jumlah rumah tangga dan individu hasil PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) dimana Pengelompokan rumah tangga dalam BDT rumah tangga dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut Desil. Desil adalah kelompok persepuluhan sehingga seuruh rumah tangga dapat dibagi dalam 10 desil. Pengelompokan tersebut berdasarkan rata-rata pengeluaran rumah tangga perkapita per bulan.

Tabel 2.118.
Jumlah Rumah Tangga PBDT Tahun 2015

NO	KECAMATAN	DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	JUMLAH
1	BOBOTSARI	2.216	1.930	1.261	1.147	6.554
2	BOJONGSARI	2.461	2.307	1.368	1.156	7.292
3	BUKATEJA	3.405	3.027	2.139	1.549	10.120
4	KALIGONDANG	2.004	2.414	1.648	1.392	7.458
5	KALIMANAH	717	1.195	1.015	1.116	4.043
6	KARANGANYAR	1.764	1.644	998	941	5.347
7	KARANGJAMBU	1.609	1.023	464	262	3.358
8	KARANGMONCOL	1.747	1.795	1.258	1.124	5.924
9	KARANGREJA	2.736	2.181	1.036	798	6.751
10	KEJOBONG	2.020	2.392	1.578	1.058	7.048
11	KEMANGKON	2.054	2.695	1.874	1.779	8.402
12	KERTANEGARA	1.409	1.362	934	806	4.511
13	KUTASARI	3.286	3.002	1.742	1.417	9.447
14	MREBET	3.534	2.894	1.614	1.238	9.280
15	PADAMARA	1.047	1.551	1.179	1.172	4.949
16	PENGADEGAN	2.057	1.929	1.177	904	6.067
17	PURBALINGGA	678	1.050	840	1.067	3.635
18	REMBANG	2.782	2.276	1.322	1.086	7.466
JUMLAH TOTAL		37.526	36.667	23.447	20.012	117.652

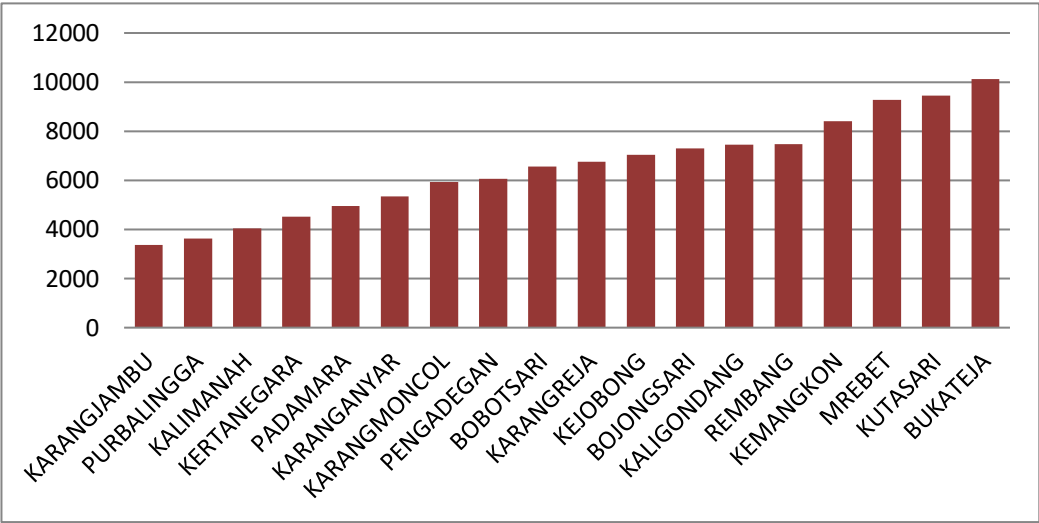
Sumber: PBDT 2015. diolah

Tabel 2.119.
Jumlah Individu PBDT Tahun 2015

NO	KECAMATAN	DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	JUMLAH
1	BOBOTSARI	11.347	7.788	4.283	3.785	27.203
2	BOJONGSARI	12.495	8.971	4.558	3.971	29.995
3	BUKATEJA	15.672	10.607	6.335	5.184	37.798
4	KALIGONDANG	9.346	8.787	5.231	4.163	27.527
5	KALIMANAH	3.323	4.273	3.010	3.345	13.951
6	KARANGANYAR	8.935	6.530	3.195	3.006	21.666
7	KARANGJAMBU	7.704	3.590	1.379	719	13.392
8	KARANGMONCOL	8.617	6.775	4.136	3.545	23.073
9	KARANGREJA	13.822	8.335	3.591	2.691	28.439
10	KEJOBONG	9.174	8.172	4.363	3.187	24.896
11	KEMANGKON	9.427	9.589	5.957	5.901	30.874
12	KERTANEGARA	7.115	5.296	3.171	2.727	18.309
13	KUTASARI	16.412	11.430	5.696	4.592	38.130
14	MREBET	17.750	10.536	4.969	3.787	37.042
15	PADAMARA	5.203	6.219	4.151	3.943	19.516
16	PENGADEGAN	9.382	6.851	3.658	2.967	22.858
17	PURBALINGGA	3.240	3.949	2.744	3.237	13.170
18	REMBANG	13.821	8.423	4.158	3.399	29.801

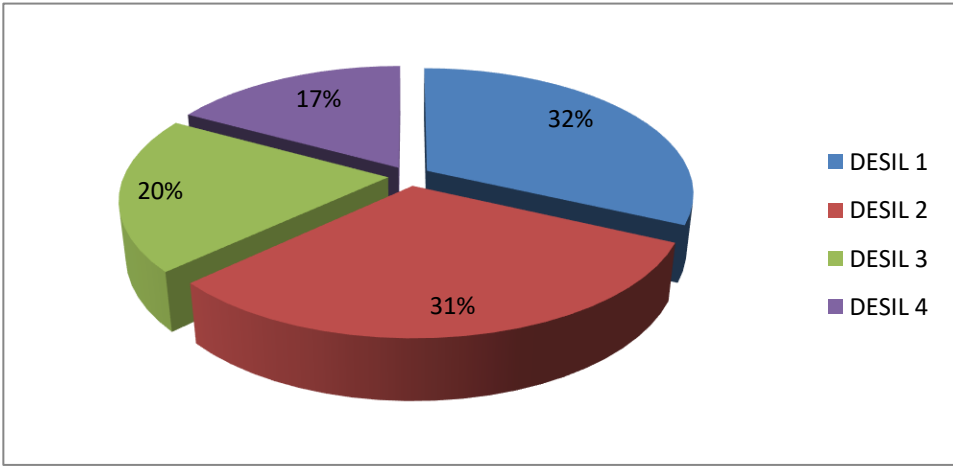
NO	KECAMATAN	DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	JUMLAH
	JUMLAH TOTAL	182.785	136.121	74.585	64.149	457.640

Sumber: PBDT 2015, diolah



Sumber: PBDT 2015, diolah

Gambar 2.28.
Grafik Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Purbalingga



Sumber: PBDT 2015, diolah

Gambar 2.29.
Persentase Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Desil 1-4 Kabupaten Purbalingga

2. Pembangunan Manusia

Pada hakekatnya tujuan utama pembangunan adalah membangun manusia melalui upaya peningkatan kualitas manusia baik dari aspek lahiriah maupun dalam dimensi yang lebih luas termasuk aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pembangunan fisik prasarana, ekonomi, sosial dan sebagainya dilaksanakan

dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan mewujudkan kehidupan manusia yang bermartabat. Dan untuk mengetahui gambaran komprehensif mengenai tingkat pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah dapat dilihat berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Capaian IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 sebesar 67.03 mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 67.48, tahun 2017 menjadi 67.72 dan tahun 2018 menjadi 68.41. Meskipun mengalami kenaikan sampai dengan 68.41 di tahun 2018, namun masih di bawah rata – rata capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 71.12.

Perubahan angka yang terjadi pada komponen IPM sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau indikator pendukung, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran riil yang disesuaikan.

Angka Harapan Hidup menggambarkan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. Komponen Angka Harapan Hidup sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup, memberikan indikasi semakin sejahtera dan tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Angka Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2016 angka harapan hidup penduduk Kabupaten Purbalingga adalah 72.86 tahun, kemudian pada tahun 2017 peluang hidup meningkat sedikit menjadi 72.91 tahun, hingga pada tahun 2018 menjadi 72.98 tahun. Angka ini memang masih relatif jauh dari AHH tertinggi yaitu 85 tahun. Dan bila dibandingkan dengan kabupaten lain di eks karesidenan Banyumas, AHH Purbalingga adalah yang paling rendah. Jika angka harapan hidup di pisahkan menjadi laki-laki dan perempuan maka akan tampak bahwa angka harapan hidup perempuan jauh lebih tinggi dari angka harapan hidup laki-laki. Angka harapan hidup untuk perempuan sebesar 74.76 pada tahun 2017 dan 74.83 pada tahun 2018. Sedangkan untuk laki-laki tahun 2017 sebesar 70.95 dan tahun 2018 sebesar 71.02.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7

tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Kondisi HLS Kabupaten Purbalingga masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 12.63. Pada 2018, nilai HLS Purbalingga adalah 11.95 tahun. artinya diharapkan anak usia 7 tahun saat ini dapat merasakan pendidikan selama hampir 12 tahun atau kira-kira setara kelas 3 SLTA. Selama beberapa tahun terakhir, data survei menunjukkan ada perubahan yang cukup signifikan. Angka HLS Kabupaten Purbalingga meningkat sedikit demi sedikit dari 10.71 tahun pada 2010 menjadi 10.84 tahun pada 2011, hingga meningkat menjadi 11.95 di tahun 2018. Lonjakan yang cukup berarti terjadi di tahun 2014 di mana saat itu HLS 2014 sebesar 11.51 tahun, meningkat 0.41 tahun dibandingkan tahun 2013. Pencapaian Angka HLS tahun 2018 Kabupaten Purbalingga menempati urutan ke-30 dari 35 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP. Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar 7.00 tahun, sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2017 RLS mencapai 6.87 tahun. Dengan kata lain penduduk di Kabupaten Purbalingga baru bisa bersekolah rata-rata hampir tujuh tahun atau sampai kelas 1 SLTP. RLS di Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 7.35 tahun. Bila dilihat secara peringkat, RLS Purbalingga menduduki peringkat ke 24 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Sebagai indeks komposit, IPM mengandung beberapa komponen yang merepresentasikan kondisi aspek yang terkait. Komponen ekonomi direpresentasikan melalui aspek pengeluaran. Karena besarnya pengeluaran yang berbeda-beda di setiap distrik, desa bahkan di setiap rumah tangga, maka angka pengeluaran Riil diwujudkan dalam nilai rata-rata Kabupaten. Dari hasil penghitungan, diperoleh gambaran rata-rata pengeluaran riil penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2018, yaitu sekitar Rp 9.340.000,- per orang per tahun. Dibanding dengan pencapaian pengeluaran riil Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp 10.377.000,- dan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah, pengeluaran riil per kapita Kabupaten Purbalingga berada di urutan ke-17 dari

29 Kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan pembangunan manusia di Kabupaten Purbalingga pada dimensi pembangunan ekonomi. cukup baik dibandingkan dimensi Kesehatan dan Pendidikan terutama jika dilihat dari peringkatnya di Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat bahwa pembangunan manusia mencakup begitu banyak aspek dan menjadi komitmen global. maka pembangunan manusia ditetapkan sebagai isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga. Pembangunan manusia sangat berkaitan erat dengan pembangunan bidang pendidikan. kesehatan. penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. dan peningkatan apresiasi terhadap seni budaya daerah dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa.

3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Bekerja

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi perekonomian Kabupaten Purbalingga tahun 2018 relatif cukup baik. Ditinjau dari sisi Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) PDRB mengalami kenaikan dari Rp. 15.60 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp. 16.46 triliun pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan selama tahun 2018 Purbalingga mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5.42 persen. lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Purbalingga tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan yang mencapai 27.05 persen. lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan juga sebesar 27.05 persen. serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebesar 12.52 persen. Dari sisi pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan Komunikasi sebesar 12.80 persen yaitu dari penjualan paket internet yang menjadi penunjang utama kategori tersebut. Sementara itu PDRB per kapita Purbalingga tahun 2018 atas dasar harga riil tercatat Rp. 17.79 juta. Angka ini bisa dijadikan salah satu indikator proxy tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah.

Sisi lain yang dapat menggambarkan keadaan perekonomian penduduk adalah dari sisi konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran rata-rata penduduk perkapita sebulan. Pada tahun 2018 rata-rata pengeluaran perkapita Kabupaten

Purbalingga adalah sebesar Rp. 794.124. Dari angka tersebut tercatat bahwa 51.65 persen atau Rp. 410.153 pengeluaran penduduk di Kabupaten Purbalingga digunakan untuk kebutuhan makanan, sedangkan sisanya sebesar 48.35 persen atau Rp. 383.971 dikeluarkan untuk kebutuhan bukan makanan.

Dilihat dari PDRB sisi pengeluaran, nilai PDRB Purbalingga atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 mencapai Rp. 23.190.33 miliar yang sebagian besar digerakkan oleh konsumsi rumah tangga, PMTB dan konsumsi pemerintah. Sayangnya ekonomi Purbalingga masih tergerus dengan tingginya impor sampai dengan tahun 2018. Net ekspor yang bernilai negatif menandakan bahwa nilai impor lebih banyak daripada ekspor. Sedangkan komponen konsumsi LNPRRT dalam lima tahun terakhir masih merupakan komponen yang berkontribusi paling kecil dalam struktur PDRB. Hal ini wajar mengingat hampir semua daerah menunjukkan bahwa komponen konsumsi LNPRRT merupakan yang paling kecil nilainya. Dalam struktur PDRB, peranan konsumsi rumah tangga masih yang terbesar akan tetapi dalam lima tahun terakhir dominasinya semakin kecil. Peranan ini diambil alih oleh PMTB (investasi) yang semakin meningkat. Di tahun 2017 nilai PMTB sebesar Rp. 4.344.16 miliar dan meningkat di tahun 2018 menjadi Rp. 4.953.24 miliar. Kondisi ini cukup menggembirakan mengingat PMTB amat penting dalam meningkatkan kapasitas produksi di daerah Purbalingga. Dengan dimudahkannya alur dan perijinan bagi investor yang akan melakukan investasi di Purbalingga. Maka diharapkan komponen PMTB ini akan menjadi komponen yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Purbalingga.

Masalah ketenagakerjaan juga menjadi salah satu aspek yang menonjol dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang terus meningkat tanpa diikuti pertambahan lapangan pekerjaan dapat menjadi pemicu bertambahnya pengangguran. Banyaknya penduduk angkatan kerja yang menganggur dapat diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kabupaten Purbalingga tahun 2018 tercatat 6.06 persen yang berarti bahwa ada 6.06 angkatan kerja yang tidak terserap ke dalam pasar kerja yang ada di Kabupaten Purbalingga. Mereka adalah yang tidak bekerja, sedang mempersiapkan usaha, atau sedang mencari pekerjaan. Sementara itu jika dilihat dari jenis kelamin, TPT perempuan (5.05 persen) lebih rendah dari TPT laki-laki (6.79 persen). Kondisi ini bisa terjadi karena banyak kegiatan industri di Kabupaten Purbalingga lebih

banyak menyerap tenaga kerja perempuan seperti industri rambut palsu dan bulu mata palsu.

Berdasarkan data sakernas tahun 2018 juga menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja di Kabupaten Purbalingga sekitar 457.918 jiwa atau sekitar 66.07 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja). Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja didominasi oleh penduduk lulusan SD ke bawah termasuk diantara tidak/belum pernah sekolah, yaitu tercatat 52.01 persen, tamat SMP/ sederajat sebesar 24.93 persen, SMA/ sederajat 15.27 persen, sedangkan yang berpendidikan perguruan tinggi hanya sebesar 7.79 persen.

Berdasarkan sektor lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja, maka sektor industri pengolahan adalah yang terbesar penyerapnya yaitu mencapai 29.83 persen tenaga kerja di Purbalingga, disusul sektor Pertanian, perkebunan dan perikanan yang menyerap 20.56 persen tenaga kerja, serta sektor perdagangan besar dan eceran dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 18.41 persen.

Kondisi perekonomian daerah yang stabil akan memberikan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha yang semakin luas. Akan tetapi persoalan kualitas calon tenaga kerja dan tenaga kerja menjadi hal penting untuk diperhatikan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Purbalingga berdampak pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dengan dominasi pendidikan sekolah dasar pada usia angkatan kerja, dan pengangguran terbesar pada pendidikan SMK, diperlukan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, program *link and match* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha, penguasaan teknologi dan inovasi, serta hasil litbang sebagai instrumen peningkatan perekonomian dan daya saing daerah. Kondisi ini berkaitan juga dengan kualitas dan daya serap tenaga kerja yang mampu bersaing dengan tenaga kerja daerah lain. Maka tantangan ke depan adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja global.

4. Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur seperti prasarana jalan dan jembatan, prasarana irigasi, prasarana perumahan dan permukiman, dan prasarana lainnya menjadi sangat penting sebagai wujud pelayanan dasar pemerintah. Pertumbuhan ekonomi

sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak bisa lepas dari ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Untuk kelancaran aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat keberadaan infrastruktur jalan yang memadai sangat dibutuhkan dari segi kuantitas dan kualitasnya. Penyediaan jalan dan jembatan harus memperhatikan dinamika ekonomi dan pengembangan wilayah. Pembangunan bandara harus disikapi dengan pemenuhan infrastruktur jalan pendukungnya. dengan demikian dapat sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pembukaan pintu tol Pemalang juga memberikan efek peningkatan kendaraan yang melalui wilayah Purbalingga. perlu konsep matang dalam perencanaan pembangunan jalan agar mampu menampung seluruh pergerakan yang ditimbulkannya.

Pemerataan pembangunan antar kecamatan juga menjadi sangat penting sehingga pelebaran jalan antar kecamatan harus terus dilaksanakan. Jalan dengan lebar lebih dari 5.5 meter menjadi pintu gerbang pengembangan ekonomi kecamatan.

Pembangunan bendung dan jaringan irigasi merupakan faktor penting untuk menjaga ketahanan pangan. Di sisi lain pemberdayaan petani melalui P3A atau GP3A perlu terus ditingkatkan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dalam ikut serta memelihara prasarana irigasi yang ada.

Pembangunan Bendung Slinga oleh Kementerian PUPR beserta jaringan irigasi primernya. harus segera ditindaklanjuti dengan pembangunan jaringan irigasi sekunder dan tersier yang menjadi kewenangan kabupaten. sehingga bisa segera memberikan manfaat bagi para petani khususnya di wilayah Kec. Kaligondang. Kec. Pengadegan. Kec. Kejobong dan Bukateja.

Menjaga ketersediaan air baku irigasi khususnya pada musim kemarau harus dibarengi dengan program konservasi sumber daya alam. Perlunya sinergi semua pihak agar sumber air yang menjadi kebutuhan dasar kita semua selalu terjaga sepanjang masa.

Penataan kawasan perkotaan dan wilayah destinasi wisata juga menjadi peran penting dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Menjaga agar penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang juga memberikan manfaat dalam perlindungan lingkungan.

Penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan tidak akan memadai apabila tidak didukung konsep manajemen lalu lintas dan manajemen

angkutan. Penyusunan Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan menjadi sangat penting. Keberadaan terminal hingga saat ini belum optimal menjadi titik pusat pergerakan angkutan umum.

5. Pelestarian Lingkungan Hidup

Eksplorasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia seperti pencemaran air dan udara, meningkatnya angka kesakitan penyakit degeneratif, meningkatnya kerusakan lahan, menurunnya populasi ikan di perairan umum, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna, terjadinya banjir dan tanah longsor, serta meningkatnya pemanasan global yang semakin terasa.

Kelestarian lingkungan juga telah menjadi isu global karena berkaitan pula dengan isu perubahan iklim. Upaya menjaga daya tampung dan daya dukung lingkungan juga menjadi parameter dalam pembangunan infrastruktur. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dapat mendegradasi lingkungan sehingga harus dikendalikan secara maksimal. Peningkatan pencemaran air juga menjadi dampak dari pembangunan dengan semakin banyaknya lini usaha penghasil limbah B3. Penanganan isu strategis ini dapat dilaksanakan melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan hidup.

6. Penciptaan Pemerintahan yang Efektif dan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum

Visi Pemerintah Daerah akan dapat dicapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip-prinsip *good governance* antara lain efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memiliki visi strategis (*strategic vision*). Luasnya cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipikul pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan yang terbatas mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus menghasilkan output secara optimal agar seluruh elemen organisasi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara efektif dengan mendayagunakan sumberdaya secara efisien. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga harus dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat dan

pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui serta dapat memberikan masukan dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tata kelola keuangan dan aset Kabupaten Purbalingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Diharapkan pada masa yang akan datang kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah akan semakin meningkat sehingga dapat terus mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara itu sesuai hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) untuk menilai Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam tiga tahun berturut-turut masuk dalam peringkat 10 besar nasional, dengan mendapat skor dengan kategori sangat tinggi sehingga mendapatkan tropi Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha dari kementerian Dalam Negeri. Sedangkan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan setiap tahun oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga baru berada pada kategori B (Baik).

Aktivitas seluruh elemen pemerintah daerah harus mengarah kepada visi yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Elemen organisasi dan struktur jabatan yang bersifat koordinatif harus berperan optimal dalam mengarahkan dan menggerakkan lini organisasi dalam rumpun koordinasinya agar masing-masing dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan visi daerah. Untuk itu seluruh elemen pemerintah daerah harus memahami visi daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap elemen organisasi pemerintah daerah harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sehingga secara efektif akan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan maka pada gilirannya akan dapat diwujudkan visi pemerintah daerah.

Agar setiap elemen pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat melaksanakan program-program dan kegiatan pembangunan yang secara efektif mampu mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah, harus didukung dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional. Profesionalitas aparatur pemerintah daerah mensyaratkan adanya integritas, kapasitas dan kompetensi. Oleh karena itu sistem karir aparatur harus benar-benar dilaksanakan berdasarkan *merit system*. Organisasi perangkat daerah harus disusun dengan struktur yang ramping tetapi mampu melaksanakan seluruh fungsi secara optimal dengan sistem tata kelola yang efektif.

Sedangkan yang terkait dengan stabilitas ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi salah satu permasalahan penting pembangunan pada saat ini adalah adanya kecenderungan menurunnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Kebanggaan terhadap jatidiri bangsa semakin terkikis oleh nilai-nilai budaya asing yang dianggap lebih superior. Identitas nasional meluntur akibat cepatnya penyerapan budaya global, sementara nilai-nilai positif budaya bangsa yang lebih relevan bagi pembangunan karakter bangsa justru diabaikan. Berkembangnya budaya materialisme, konsumerisme dan hedonisme menjadi salah satu penyebab menurunnya semangat patriotisme.

Berkembangnya semangat materialisme dan hedonisme juga menyebabkan berkembangnya mentalitas menerabas dan kurangnya penghargaan terhadap kerja keras, inovasi, dan pencapaian prestasi yang pada tahap berikutnya berdampak terhadap meningkatnya tindak kekerasan, premanisme dan kriminalitas. Kesemarakkan kehidupan beragama yang nampak pada saat ini ternyata belum sejalan dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama terbukti dengan banyaknya perilaku asusila, pornografi dan pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, meningkatnya kriminalitas serta praktik-praktik lain yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Disisi lain kecenderungan meningkatnya radikalisme dalam pemahaman agama juga menjadi ancaman tersendiri bagi tegaknya integritas nasional. Sementara itu kecenderungan berkembangnya sektarianisme agama dan fanatisme golongan yang berlebihan menjadi ancaman tersendiri bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Oleh karena itu pengembangan wawasan kebangsaan serta penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme perlu terus ditingkatkan pada saat ini dan yang akan datang. Demikian juga perlu dilakukan upaya pengembangan dan penanaman nilai-nilai moral yang positif baik yang berpijak

pada nilai agama maupun nilai budaya bangsa. Internalisasi nilai-nilai moral yang positif dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal, non formal, informal maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan beragama perlu terus didorong guna meningkatkan pengamalan dan penghayatan nilai-nilai agama bersamaan dengan upaya mewujudkan kerukunan inter dan antar umat beragama.

7. Pemulihan Aktivitas Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19

Terkait dengan adanya pandemik virus corona atau Covid-19 yang terjadi di dunia, secara global membuat sejumlah rencana pembangunan mengalami hambatan dan penundaan. Berbagai negara merespon dampak penularan virus Covid-19 tersebut dengan kebijakan baru seperti salah satunya dalam bentuk pembatasan arus lalu lintas orang yang masuk ke negaranya. Secara makro kebijakan tersebut mempengaruhi arus lalu lintas barang di pasar internasional yang disebabkan ada dugaan wabah ini menyebar melalui orang dan barang-barang yang diperdagangkan.

Begitu pula di Indonesia, pembatasan arus lalu lintas orang memberikan dampak dimulai dari menurunnya sektor pariwisata, kemudian terjadinya ketidakseimbangan makro seperti menurunnya ekspor dan impor dan berakhir pada gangguan yang berakibat pada produktivitas secara nasional. Disamping itu, terjadi pula perubahan keseimbangan pasar pada tingkat harga karena pergeseran permintaan dan penawaran ataupun karena perubahan harga. Pelaku-pelaku ekonomi di pasar akan bereaksi dengan melakukan penyesuaian terhadap berbagai aspek kegiatan ekonomi. Tindakan penyesuaian berhubungan dengan seberapa besar daya tahan ekonomi terhadap gangguan tersebut melalui respon yang diberikan dan kebijakan yang dibuat untuk mengatasi dampak.

Secara global, pandemik Covid-19 menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi dan menurunkan kinerja pasar keuangan global, menekan banyak mata uang dunia, serta memicu pembalikan modal kepada aset keuangan yang dianggap aman. Oleh karena itu Indonesia merevisi APBN dan memberikan alokasi dana yang besar dalam rangka mengatasi wabah Covid-19. Kebijakan umum pemerintah pusat yang diikuti oleh pemerintah daerah bagi masyarakat yaitu dengan memberlakukan kebijakan *social and physical distancing* (menjaga jarak dari kerumunan dan perorangan). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan melalui libur sekolah, penutupan tempat wisata dan hiburan, bekerja di rumah bagi pegawai kantor,

serta pembatasan-pembatasan lain yang ditujukan penuh untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Akibat wabah Covid-19, perekonomian nasional mengalami kontraksi cukup dalam, antara lain dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan ekonomi global akibat terganggunya rantai penawaran global serta menurunnya permintaan dunia maupun domestik. Revisi proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional tahun 2020 dari 5 – 5,4 persen, menjadi 4,2 – 4,6 persen. Sedangkan perkiraan Lembaga keuangan dunia seperti IMF, World bank serta ADB, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 hanya berkisar 2,3 sampai 3 persen. Nilai tukar rupiah pun melemah mendekati Rp. 16.000 per US \$1. Pemerintah menggelontorkan paket stimulus jilid III yang mencakup aspek kesehatan (antara lain meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan), aspek perlindungan sosial (PKH, bansos, BPNT, dll), serta aspek ekonomi (upaya menjaga kinerja pelaku usaha, melalui pengurangan pajak). Khusus paket stimulus terkait upaya menjaga kinerja pelaku usaha antara lain dilakukan melalui :

- Menjaga ketersediaan bahan baku agar industri tetap berjalan (30 persen impor);
- Relaksasi PPh pasal 21 dari pekerja industri pengolahan selama 6 bulan (april-oktober) dimana pekerja mendapat tambahan penghasilan utk meningkatkan daya beli;
- Relaksasi PPh 22 impor untuk 19 sektor tertentu (antara lain industri kimia, alat angkut, makanan, industri kulit, barang dari kulit, alas kaki, furniture, dll);
- Non fiskal : penyederhanaan ekspor, penyederhanaan impor bahan baku, percepatan proses ekspor-impor yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi.

Efek penyebaran wabah virus Covid-19 memberikan tantangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Ada beberapa efek yang dirasakan masyarakat dan sektor-sektor yang terdampak. Begitu pula di Kabupaten Purbalingga, pengaruh kebijakan *social and physical distancing* juga berimbas langsung terhadap penurunan secara drastis pada ekonomi masyarakat khususnya pelaku usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) dan pedagang kaki lima. Hal tersebut dikarenakan setiap warga bahkan murid sekolah yang diliburkan, mengakibatkan pedagang dan perusahaan UMKM terhambat dalam penjualan dan juga produksi. Di samping itu juga terjadi penurunan kunjungan pelanggan pada pasar dan pusat keramaian

sehingga mempengaruhi omset pelaku usaha, dimana rata-rata menurun sekitar 30-50 persen dari hari-hari biasa.

Akibat wabah covid 19, hampir seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Purbalingga tertekan dan mengalami penurunan aktivitas secara signifikan, serta hampir tidak ada arus investasi yang masuk. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga tahun 2020, hampir dipastikan menurun. Target awal yang telah ditetapkan adalah 5-6 persen, namun jika melihat kondisi yang ada sekarang serta memperhatikan dinamika perekonomian nasional dan global, maka proyeksi laju pertumbuhan ekonomi adalah 4 - 4,5 persen. Sedangkan tahun 2021 diperkirakan membaik menjadi 4,5 sampai 5 persen. Menurunnya aktivitas ekonomi juga akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran (tahun 2019 : 4,78 persen), serta terhambatnya upaya pengurangan angka kemiskinan (tahun 2019 : 15,03 persen).

Mencermati aktivitas ekonomi secara sektoral, sektor industri berbasis padat karya mayoritas mengalami penurunan cukup tajam, namun ada pula perusahaan yang masih bertahan untuk melanjutkan sisa ekspor. Sebagian perusahaan berhenti beraktivitas total, sebagian ada yang melakukan pengurangan jam kerja maupun karyawan. Jumlah Pemutusan Hubungan Kerja/PHK sampai tanggal 10 April yang tercatat secara resmi adalah 930 orang, namun angka ini belum termasuk PHK yang belum melapor maupun industri padat karya di desa-desa (plasma).

Sektor industri kecil unggulan, sebagian besar mengalami penurunan aktivitas. Belum ada data pasti terkait jumlah PHK, namun dengan mengambil sampel industri kecil logam/knalpot, tenaga kerja aktif rata-rata tinggal 50 persen, sedangkan omset pemasaran turun tajam hingga 80 persen. Untuk Industri gula kelapa, sampai saat ini relatif dapat bertahan dan ada yang masih bisa melakukan ekspor ke Eropa, namun sebagian lainnya stagnan. Industri pengolahan makanan (misalnya abon koki), pasar ekspor berhenti namun pasar lokal masih lumayan. Sementara secara umum, industri pengolahan makanan mengalami tekanan.

Saat ini Industri kecil (UMKM) yang relatif mampu bertahan dan berkembang adalah industri konveksi, karena mengalihkan produk usahanya ke produk yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu masker. Secara umum, usaha mikro dan kecil mengalami penurunan usaha tajam, kecuali sembako. Saat ini banyak pelaku usaha yang banting stir menjadi reseller untuk sembako, hand sanitizer, masker, jamu.

Disamping sektor industri dan perdagangan, sektor pariwisata juga mengalami penurunan karena hotel, restoran, dan kawasan wisata yang ada banyak yang ditutup untuk meredam risiko penyebaran virus di sektor pariwisata. Hal tersebut menyebabkan penurunan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat pada daerah tujuan wisata. Sektor Pariwisata, merupakan salah satu sektor yang paling terpuak akibat wabah ini, karena aktivitas berhenti total, sementara biaya operasional tetap ada. Tutupnya destinasi wisata, berimplikasi pada menurunnya aktivitas pelaku wisata maupun pendukung wisata (antara lain hotel, restoran, biro perjalanan, pemandu wisata, pedagang di tempat wisata, hingga juru parkir di tempat wisata). Sementara itu untuk sektor Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) adalah sektor yang sejauh ini relatif lebih mampu bertahan, karena berhubungan dengan kebutuhan pokok yang harus tersedia.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam penanganan dampak ekonomi akibat wabah virus Covid-19 dengan skala paling prioritas adalah bagi mereka yang memiliki perekonomian menengah ke bawah, diantaranya:

- Alokasi anggaran dan skema Jaring Pengaman Sosial yang akan diberikan pada warga/komunitas yang terdampak dimana diprioritaskan antara lain bagi keluarga pasien yang menjadi kepala keluarga, keluarga pasien dalam pengawasan (PDP), pondok pesantren serta keluarga yang belum menerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), agar tidak ada tumpang tindih dalam pemberian bantuan. Bantuan berupa logistik baik itu sembako keperluan hidup sehari-hari yang diberikan langsung oleh pemerintah sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat terjamin.
- Kebijakan bantuan sosial untuk menyokong sektor informal dan pekerja harian, serta memberi stimulus bagi usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM). Hal tersebut dilakukan dengan melakukan operasi pasar pada desa hijau dan desa merah yang ada di Kabupaten Purbalingga sebanyak 100 per desa di desa hijau dan 150 per desa di desa merah. Intervensi pasar dilakukan dengan tujuan bahwa Jaring Pengaman Sosial tersebut dapat memberikan perlindungan sosial maupun program insentif ekonomi, sehingga para pekerja informal, buruh harian yang terdampak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari.

- Dinas-dinas yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif juga dihimbau untuk melakukan upaya-upaya untuk dapat memberikan dukungan dan kompensasi kepada para pekerja informal yang terkait langsung dengan destinasi wisata yang ditutup di wilayah kewenangannya berupa bahan makanan pokok. Disamping itu Jaring Pengaman Ekonomi juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga bagi para penjahit dalam membuat APD maupun masker kain M1 dan M2;

Selain dalam hal untuk penanganan dampak ekonomi, beberapa alokasi anggaran juga digunakan untuk penanganan dalam hal kesehatan yaitu berupa operasional Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Purbalingga baik dalam hal penyediaan APD, obat-obatan, ruang isolasi untuk pasien maupun tunjangan resiko bagi nakes. Dilakukan pula pembentukan Gugus Tugas Kabupaten dan Gugus Tugas Kecamatan yang bertujuan agar kepala daerah menjadi ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan dan mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Upaya-upaya penanganan dilakukan dalam upaya agar prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2021 dalam melakukan optimalisasi potensi ekonomi dan SDM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap dapat berjalan akibat wabah pandemi Covid-19. Berhentinya wabah covid-19 tidak otomatis membuat sektor-sektor ekonomi langsung bergerak cepat, namun membutuhkan waktu untuk upaya pemulihan (recovery) dan membangun pondasi kembali. Upaya recovery tersebut dapat ditujukan kepada 3 komponen usaha, yaitu unit usaha, pelaku usaha, serta karyawan. Perlu adanya pemberian stimulus secara tepat (sesuai hasil pemetaan yang dilakukan), agar proses pemulihan dapat berjalan sesuai harapan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Prospek perekonomian daerah tidak dapat dilepaskan dari kondisi perekonomian daerah saat ini serta pengaruh dari kondisi lingkungan ekonomi global, nasional maupun regional. Resiko ketidakpastian Global masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun, sepanjang 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah. Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita negara se-level (*peers*).

Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (*Growth Diagnostics*) menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (*the most binding constraint*) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Jika tidak diatasi saat ini, rendahnya kualitas SDM akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan beralih ke manufaktur berteknologi tinggi. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas.

Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas, tidak berbeda dengan periode 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB

terus menurun dari 41,0 persen pada 2000 menjadi 21,0 persen pada 2018. Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mencapai 3,0 persen PDB, sementara beberapa negara peers sudah mencatatkan surplus. Di tengah kondisi keuangan global yang ketat, peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui distance learning, pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui fin-tech, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Studi dari Mckinsey memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara.

3.1.1.1. Sasaran Makro Pembangunan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4 – 6,0 persen per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD5.550 – 5.930 per kapita pada 2024. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, sebesar $3,0 \pm 1$ persen pada tahun 2020-2022, dan $2,5 \pm 1$ persen pada tahun 2023-2024. Pencapaian sasaran tersebut akan diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

Kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan perbaikan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 6,5 – 7,0 persen dan 4,0 – 4,6 persen pada 2024. Tingkat rasio gini menurun menjadi 0,370 – 0,374 pada 2024. Sementara IPM diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada tahun 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Untuk

dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan, perbaikan transformasi struktural menjadi salah satu kunci utama. Perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan, dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.

Memperkuat Permintaan Domestik Dari sisi permintaan domestik, konsumsi masyarakat (rumah tangga dan LNPR) diharapkan akan tumbuh rata-rata 5,2 – 5,3 persen per tahun. Peningkatan konsumsi masyarakat didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik, stabilitas harga, dan bantuan sosial pemerintah yang lebih tepat sasaran.

Konsumsi pemerintah akan tumbuh rata-rata 4,4 – 5,0 persen per tahun didukung oleh peningkatan belanja pemerintah, baik pusat maupun transfer ke daerah, seiring dengan peningkatan pendapatan negara, terutama penerimaan perpajakan.

Ekspansi perekonomian 2020-2024 terutama akan didorong oleh peningkatan investasi (pembentukan modal tetap bruto) yang tumbuh 5,9 – 7,0 persen per tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasi swasta (asing maupun dalam negeri) akan didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan EoDB Indonesia dari peringkat 73 pada 2018 menjadi peringkat 40 pada 2024. Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan stok infrastruktur menjadi 50,0 persen PDB dan belanja modal pemerintah tumbuh 20,1 – 24,2 persen per tahun sepanjang 2020- modal tetap bruto) yang tumbuh 5,9 – 7,0 persen per tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasi swasta (asing maupun dalam negeri) akan didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan EoDB Indonesia dari peringkat 73 pada 2018 menjadi peringkat 40 pada 2024. Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan stok infrastruktur menjadi 50,0 persen PDB dan belanja modal pemerintah tumbuh 20,1 – 24,2 persen per tahun sepanjang 2020-2024. Peningkatan investasi akan ditujukan pada peningkatan produktivitas, yang akan mendorong peningkatan efisiensi investasi 2024. Peningkatan investasi akan ditujukan pada peningkatan produktivitas, yang akan mendorong peningkatan efisiensi investasi.

Diversifikasi Ekspor dan Stabilitas Eksternal Secara keseluruhan, ekspor barang dan jasa tumbuh rata-rata 4,2 – 5,0 persen per tahun. Peningkatan ekspor barang 2020-2024

akan didukung oleh revitalisasi industri pengolahan yang mendorong diversifikasi produk ekspor non-komoditas, terutama ekspor produk manufaktur berteknologi tinggi dan mengurangi ketergantungan impor. Peningkatan juga akan didorong oleh peningkatan ekspor jasa, utamanya jasa perjalanan, melalui pengembangan sektor pariwisata. Diversifikasi ekspor tidak hanya dilakukan dari sisi produk, namun juga dalam hal negara tujuan ekspor. Perluasan pasar ekspor utamanya akan dilakukan ke kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Sementara impor barang dan jasa tumbuh rata-rata 4,3 – 4,9 persen per tahun didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama investasi.

Kinerja perdagangan internasional yang membaik akan mendorong penguatan stabilitas eksternal, yang ditandai dengan perbaikan defisit transaksi berjalan menjadi 2,2 – 1,6 persen PDB dan peningkatan cadangan devisa menjadi USD132,3 – 168,2 miliar pada 2024.

Menjaga Kesenambungan Fiskal Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN yang sehat dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian. Pendapatan negara ditargetkan meningkat menjadi rata-rata 13,1 – 14,2 persen PDB per tahun, dengan rasio perpajakan mencapai rata-rata 10,8 – 11,7 persen PDB per tahun. Hal ini dicapai melalui perbaikan yang sifatnya berkelanjutan baik dari sisi administrasi maupun kebijakan. Dari sisi administrasi, akan terus dilakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagai upaya perbaikan basis data perpajakan dan peningkatan kepatuhan. Dari sisi kebijakan, pemerintah akan terus melakukan penggalan potensi penerimaan, antara lain potensi yang berasal dari aktivitas jasa digital lintas negara, reformasi kebijakan cukai melalui penyederhanaan struktur tarif cukai Hasil Tembakau (HT), peningkatan tarif cukai HT, dan ekstensifikasi barang kena cukai. Adapun, kebijakan ini juga diimbangi dengan peran kebijakan perpajakan sebagai instrumen pendorong investasi melalui penyediaan insentif fiskal yang mendukung aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi (industri manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital).

Stimulus terhadap perekonomian lainnya juga dilakukan dengan penajaman belanja negara. Total belanja negara akan mencapai rata-rata 14,7 – 15,6 persen PDB per tahun, dengan belanja pemerintah pusat mencapai rata-rata 9,8 – 10,3 persen PDB per tahun dan TKDD sebesar 4,9 – 5,4 persen PDB. Defisit akan dijaga pada rata-rata 1,6 – 1,4 persen PDB selama 2020-2024, berada di bawah batas defisit yang diperbolehkan undang-undang. Keseimbangan primer diarahkan menuju positif, sebesar rata-rata 0,1 – 0,3 persen PDB. Dengan komposisi tersebut, rasio utang akan dijaga di bawah 30 persen PDB

Menjaga Stabilitas Inflasi dan Nilai Tukar Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat sehingga dapat

mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga tren penurunan laju inflasi rendah dan stabil dalam jangka menengah.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk: (i) meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis; (ii) memperkuat tata kelola sistem logistik nasional dan konektivitas antarwilayah; (iii) meningkatkan kerjasama antardaerah; (iv) menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; serta (iv) meningkatkan kualitas data/statistik.

Sepanjang 2020-2024, nilai tukar stabil pada tingkat fundamentalnya untuk menjaga daya saing ekspor. Hal ini dapat dicapai melalui: (i) pengendalian tingkat inflasi; (ii) optimalisasi suku bunga acuan Bank Indonesia; (iii) kecukupan likuiditas; (iv) pendalaman pasar keuangan; (v) penurunan defisit transaksi berjalan; serta (vi) sinergi kebijakan yang diarahkan untuk penerapan reformasi struktural yang mampu meningkatkan daya saing perekonomian domestik.

Mengurangi Ketimpangan Wilayah Pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah diharapkan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan di setiap wilayah diharapkan dapat selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan karakteristik wilayah dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Perekonomian nasional dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan agar tumbuh lebih cepat di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Pergeseran perekonomian ditandai dengan bergesernya porsi (*share*) perekonomian secara nominal sebesar 2,1 persen ke luar Pulau Jawa dan Sumatera. Angka pergeseran ini telah mempertimbangkan kemampuan wilayah yang berpotensi untuk tumbuh lebih cepat dari Pulau Jawa dan Sumatera.

Pulau Sumatera tetap menjaga momentum pertumbuhan dan diperkirakan akan menyamai tingkat pertumbuhan Pulau Jawa. Kebijakan hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan potensi pariwisata dan perkuatan infrastruktur konektivitas dalam mendukung industrialisasi menjadi kunci percepatan pertumbuhan Pulau Sumatera.

Pulau Jawa – Bali tetap menjadi wilayah yang memiliki porsi (*share*) terbesar dalam perekonomian didorong oleh pergeseran struktur ekonomi ke arah sektor jasa dengan tetap mendorong pertumbuhan lebih tinggi di sektor industri pengolahan. Pergeseran struktur ekonomi ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pulau Jawa - Bali yang lebih stabil sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Pulau Nusa Tenggara bertumpu pada hilirisasi sumber daya alam, perdagangan, dan pariwisata. Pulau Nusa Tenggara diarahkan untuk melakukan diversifikasi industri pengolahan yang berbasis pada sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dengan harapan mampu mengurangi ketergantungan perekonomian pulau tersebut pada sektor pertambangan.

Pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan akan meningkat terutama didorong oleh investasi untuk pembangunan Ibu Kota Negara yang dapat menciptakan efek pengganda besar bagi perekonomian, khususnya di Pulau Kalimantan dan kawasan Indonesia timur pada umumnya. Pulau Sulawesi masih menjadi penopang pertumbuhan di kawasan Indonesia timur dengan didorong oleh investasi untuk hilirisasi sumber daya alam dan pusat perdagangan kawasan timur Perekonomian Pulau Maluku diharapkan tumbuh tinggi dengan didorong oleh pengembangan industri perikanan, pariwisata, dan hilirisasi sumber daya alam. Pulau Papua diharapkan tumbuh lebih tinggi untuk meningkatkan skala ekonomi di kawasan Indonesia timur dengan didorong oleh hilirisasi sumber daya alam dan diversifikasi industri pengolahan berbasis perkebunan, pangan, dan perikanan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kedua pulau ini diharapkan mampu mengejar ketertinggalan dari wilayah lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Lingkungan Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung LH saat ini dan di masa yang akan datang.

3.1.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional Akibat Pandemi Covid-19

Akibat wabah covid 19, perekonomian nasional mengalami kontraksi cukup dalam, antara lain dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan ekonomi global akibat terganggunya rantai penawaran global serta menurunnya permintaan dunia maupun domestik. Revisi proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional tahun 2020 dari 5 – 5,4 persen, menjadi 4,2 – 4,6 persen. Sedangkan perkiraan Lembaga keuangan dunia seperti IMF, World bank serta ADB, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 hanya berkisar 2,3 sampai 3 persen. Nilai tukar rupiah melemah, mendekati Rp. 16.000 per US \$1

Untuk menekan dampak tersebut terhadap kesejahteraan rakyat pemerintah menggelontorkan paket stimulus jilid III yang mencakup aspek kesehatan (antara lain meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan), aspek perlindungan sosial (PKH, bansos, BPNT, dll), serta aspek ekonomi (upaya menjaga kinerja pelaku usaha, melalui

pengurangan pajak). Khusus paket stimulus terkait upaya menjaga kinerja pelaku usaha antara lain dilakukan melalui :

1. Menjaga ketersediaan bahan baku agar industri tetap berjalan (30 persen impor),
2. Relaksasi PPh pasal 21 dari pekerja industri pengolahan selama 6 bulan (april-oktober) sehingga pekerja mendapat tambahan penghasilan untuk meningkatkan daya beli
3. Relaksasi PPh 22 impor utk 19 sektor tertentu (antara lain industri kimia, alat angkut, makanan, industri kulit, barang dari kulit, alas kaki, furniture, dll)
4. Non fiskal : penyederhanaan ekspor, penyederhanaan impor bahan baku, percepatan proses ekspor-impor yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi

3.1.2. Arah Makro Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Pembangunan Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada “Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing SDM”, dengan target sasaran yang akan dicapai dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi :

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 persen;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78,00;
- c. Angka Kemiskinan turun menjadi 9,05 – 8,05 persen;
- d. Indeks Gini sebesar 0,33 – 0,35;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,23 persen;
- f. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,8 – 6,3 persen;
- g. Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$ persen;
- h. PDRB per kapita sebesar Rp. 41,15 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,58;
- j. Nilai Tukar Petani 104;
- k. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,52;
- l. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,12;
- m. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,02.

3.1.3. Arah Makro Ekonomi Kabupaten Purbalingga

Akibat Kejadian Luar Biasa covid 19, hampir seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Purbalingga tertekan dan mengalami penurunan aktivitas secara signifikan, serta hampir tidak ada arus investasi yang masuk. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga tahun 2020, hampir dipastikan menurun. Target awal yang telah ditetapkan adalah 5-6 persen, namun jika melihat kondisi yang ada sekarang serta memperhatikan

dinamika perekonomian nasional dan global, maka proyeksi laju pertumbuhan ekonomi adalah 4 - 4,5 persen. Sedangkan tahun 2021 diperkirakan membaik menjadi 4,5 sampai 5 persen. Menurunnya aktivitas ekonomi juga akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran (tahun 2019 : 4,78 persen), serta terhambatnya upaya pengurangan angka kemiskinan (tahun 2019 : 15,03 persen)

Aktivitas ekonomi secara umum terganggu antara lain :

- a. Sektor industri berbasis padat karya mayoritas mengalami penurunan cukup tajam, namun ada pula perusahaan yang masih bertahan untuk melanjutkan sisa ekspor. Sebagian perusahaan berhenti beraktivitas total, sebagian ada yang melakukan pengurangan jam kerja maupun karyawan. Jumlah Pemutusan Hubungan Kerja/PHK sampai tanggal 10 April yang tercatat secara resmi adalah 930 orang, namun angka ini belum termasuk PHK yang belum melapor maupun industri padat karya di desa-desa (plasma).
- b. Sektor industri kecil unggulan, sebagian besar mengalami penurunan aktivitas. Belum ada data pasti terkait jumlah PHK, namun dengan mengambil sampel industri kecil logam/knalpot, tenaga kerja aktif rata-rata tinggal 50 persen, sedangkan omset pemasaran turun tajam hingga 80 persen. Untuk Industri gula kelapa, sampai saat ini relatif dapat bertahan dan ada yang masih bisa melakukan ekspor ke Eropa, namun sebagian lainnya stagnan. Industri pengolahan makanan (misalnya abon koki), pasar ekspor berhenti namun pasar lokal masih lumayan. Sementara secara umum, industri pengolahan makanan mengalami tekanan.
- c. Secara umum, usaha mikro dan kecil mengalami penurunan usaha tajam, kecuali sembako. Saat ini banyak pelaku usaha yang banting stir menjadi reseller untuk sembako, hand sanitizer, masker, jamu. Saat ini Industri kecil (UMKM) yang relatif mampu bertahan dan berkembang adalah industri konveksi, karena mengalihkan produk usahanya ke produk yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu masker.
- d. Sektor Pariwisata, merupakan salah satu sektor yang paling terpuak akibat wabah ini, karena aktivitas berhenti total, sementara biaya operasional tetap ada. Tutupnya destinasi wisata, berimplikasi pada menurunnya aktivitas pelaku wisata maupun pendukung wisata (antara lain hotel, restoran, biro perjalanan, pemandu wisata, pedagang di tempat wisata, hingga juru parkir di tempat wisata).
- e. Sektor Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) adalah sektor yang sejauh ini relatif lebih mampu bertahan, karena berhubungan dengan kebutuhan pokok yang harus tersedia.

Memperhatikan proyeksi ekonomi makro nasional dan makro Provinsi Jawa Tengah di atas serta dampak kejadian luar biasa COVID-19, maka sasaran makro pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 diproyeksikan sebagai berikut :

- a. Ekonomi Kabupaten Purbalingga diharapkan mampu tumbuh antara 4,5 - 5 persen. Kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga difokuskan pada upaya pemerataan antar golongan pendapatan dan wilayah dengan membangun dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru berbasis sumberdaya lokal melalui peningkatan konektivitas dan infrastruktur kewilayahan; perlindungan dan pengembangan usaha mikro kecil; pengembangan destinasi pariwisata potensial; pengembangan dan revitalisasi pasar; dan pengembangan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja terampil.
- b. Kemiskinan diharapkan dapat menurun pada angka dibawah 15,5 persen, yang akan diupayakan melalui: 1) pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin; dan 2) peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan kegiatan perekonomian daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan sinergitas antara program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Prioritas dan fokus penanganannya pada kecamatan dan desa dengan tingkat kemiskinan tinggi atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, berdasarkan Basis Data Terpadu dan data sektoral yang komprehensif.
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan pada kisaran <5,5 persen. Tantangan yang perlu diperhatikan adalah adanya peningkatan kualitas SDM utamanya bagi penduduk usia produktif, serta belum optimalnya serapan tenaga kerja.
- d. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan dapat mencapai lebih dari 69. Upaya pencapaiannya ditempuh melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Proyeksi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga tersebut, disusun dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang berkembang, serta realisasi indikator makro tahun 2017 dan 2018 serta proyeksi tahun 2020 dan 2021 selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.
Realisasi dan Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Purbalingga

No.	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			2018	2019	2021	2022
1	PDRB (HB)	Rp. M	23.190,3	24.190,08	27.563,4	30.055,6
2	PDRB (HK)	Rp. M	16.458,7	17.387,94	18.326,4	19.389,4
3	PDRB perkapita (HB)	Rp.Ribu	25.062	26.680	31.037	33.330
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,42	5,65	4,5 - 5	5-6
5	Tingkat Inflasi	Persen	3,01	2,59	<4	< 5
6	Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,97	0,97	0,96	0,95
7	Penduduk Miskin	Persen	15,62	15,03	<15,5	<15
8	Tkt. Pengangguran	Persen	6,06	4,78	<5,5	<5
9	IPM	Angka	68,41	68,99	>69	> 69,5

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah hal-hal yang terkait dengan pendapatan, belanja, pembiayaan dan tata kelolanya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dijalankan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan pedoman pelaksanaanaanya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dijabarkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk

melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga yang ditempuh untuk meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain:

- a. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui : perbaikan basis data pajak dan retribusi daerah, review terhadap tarif pajak dan retribusi; optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi; pendayagunaan aset daerah, dan optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak melalui pembaharuan data yang valid.
- c. Mengupayakan peningkatan alokasi dana-dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana hibah lainnya.
- d. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan swasta.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu tahun 2018 – 2019, Anggaran tahun 2020 serta proyeksi 2021 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kabupaten Purbalingga
Tahun 2018 s.d tahun 2022 (dalam ribu rupiah)

URAIAN	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun Berjalan (2020)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (2021)	Proyeksi /Target pada Tahun n+1 (2022)
Penerimaan Daerah	2.062.929.218	2.155.581.881	2.104.113.319	1.997.400.419	2.112.818.926
1 Pendapatan Daerah; dan	1.948.442.029	2.030.427.484	2.042.708.319	1.957.400.419	2.051.413.926
1.1 pendapatan asli daerah;	282.679.019	264.939.576	284.009.239	258.293.228	288.014.346
a pajak daerah;	57.568.782	62.234.866	55.995.000	54.547.000	58.484.394
b retribusi daerah;	44.243.732	14.721.765	13.381.574	12.097.725	13.970.444
c hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;	21.406.072	20.642.144	22.279.897	16.779.897	23.206.740
d lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	159.460.431	167.340.800	192.352.768	174.868.606	192.352.768
1.2 pendapatan transfer; dan	1.573.468.174	1.674.751.467	1.669.868.680	1.593.209.141	1.679.088.891
a transfer Pemerintah Pusat; dan	1.450.008.493	1.553.260.298	1.556.875.904	1.480.216.365	1.556.875.904
i dana perimbangan;	1.240.574.231	1.271.720.206	1.274.999.202	1.207.120.393	1.274.999.202
- Dana Transfer Umum; dan	907.008.734	939.010.292	960.355.057	908.783.869	960.355.057
+ DBH;	25.434.251	20.781.607	25.572.950	27.483.376	25.572.950
+ DAU	881.574.483	918.228.685	934.782.107	881.300.493	934.782.107
- Dana Transfer Khusus	333.565.496	332.709.913	314.644.145	298.336.524	314.644.145

URAIAN	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun Berjalan (2020)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (2021)	Proyeksi /Target pada Tahun n+1 (2022)
+ DAK Fisik; dan	120.408.368	122.592.152	96.946.224	94.615.746	96.946.224
+ DAK Non Fisik	213.157.128	210.117.760	217.697.921	203.720.778	217.697.921
ii dana insentif daerah;	-	43.832.487	33.780.730	25.000.000	33.780.730
iii dana otonomi khusus;					
iv dana keistimewaan;					
v dana desa.	209.434.262	237.707.605	248.095.972	248.095.972	248.095.972
<i>b Transfer antar-daerah.</i>	<i>123.459.680</i>	<i>121.491.169</i>	<i>112.992.776</i>	<i>112.992.776</i>	<i>117.693.276</i>
i Pendapatan bagi hasil;	111.398.121	112.012.678	112.992.776	112.992.776	117.693.276
ii Bantuan keuangan	12.061.559	9.478.491			
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	92.294.835	90.736.440	88.830.400	105.898.050	88.830.400
<i>a Hibah;</i>	92.294.835	90.736.440	<i>4.300.000</i>	<i>12.163.750</i>	<i>88.830.400</i>
<i>b Dana darurat; dan/atau</i>					
<i>c Lain-lain pendapatan</i>			<i>84.530.400</i>	<i>93.734.300</i>	
2 Penerimaan Pembiayaan daerah.	114.487.189	125.154.397	61.405.000	40.000.000	61.405.000

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 secara umum diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten berupa Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan, Pendukung Urusan, Penunjang Urusan, Pengawasan, Pemerintahan Umum dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tersebut diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana diarusutamakan dalam SDGs. Sedangkan unsur penunjang, pendukung dan pemerintahan umum diarahkan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Selain itu, Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021, kemajuan yang telah dicapai dalam Tahun 2019 dan perkiraan pencapaian pada Tahun 2020, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2021, maka kebijakan umum belanja Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2021 diprioritaskan pada:

- a) Pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan belanja kegiatan dengan dukungan dana yang sudah ditentukan penggunaannya dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas;
- b) Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Pengembangan Sumberdaya Lokal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi;
- c) Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar secara Berkelanjutan;
- d) Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
- e) Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Recovery Ekonomi;
- f) Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 s.d Tahun 2022

URAIAN	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun Berjalan (2020)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (2021)	Proyeksi /Target pada Tahun n+1 (2022)
Pengeluaran Daerah	1.937.786.683.550	1.948.285.971.888	2.104.113.319.000	1.997.400.419.000	2.112.818.926.000
1 Belanja Daerah; dan	1.924.908.432.550	1.939.199.971.888	2.095.813.319.000	1.985.782.993.000	2.104.518.926.000
1.1 Belanja Urusan Sesuai Kewenangan	1.596.285.671.113	1.577.578.480.058	1.709.207.312.000	1.596.132.537.000	1.715.926.830.194
a Belanja Operasi	1.325.758.041.707	1.336.997.729.848	1.467.866.753.000	1.596.132.537.000	1.466.634.849.000
a) belanja pegawai;	747.245.718.375	765.871.029.697	794.513.894.000	816.949.842.261	818.207.662.258
b) belanja barang dan jasa;	527.666.705.461	517.223.228.862	573.284.901.000	538.065.442.916	586.253.086.936
c) belanja bunga;	-	-	-	-	-
d) belanja subsidi;	500.000.000	986.499.846	500.000.000	-	500.000.000
f) belanja hibah; dan	26.442.317.871	26.241.821.443	78.808.958.000	43.035.131.000	35.479.405.000
g) belanja bantuan sosial	23.903.300.000	26.675.150.000	20.759.000.000	34.828.338.000	21.524.000.000
b Belanja Modal	270.527.629.406	240.580.750.210	241.340.559.000	163.253.782.823	253.962.676.000
1.2 Belanja tidak terduga	225.455.187	206.810.430	1.000.000.000	5.500.000.000	2.000.000.000
1.3 Belanja transfer	328.397.306.250	361.414.681.400	385.606.007.000	384.150.456.000	386.592.095.806
a belanja bagi hasil; dan	6.645.949.000	6.645.949.000	6.937.738.000	6.937.738.000	7.695.664.000
b belanja bantuan keuangan	321.751.357.250	354.768.732.400	378.568.269.000	377.212.718.000	379.346.612.006
2 Pengeluaran Pembiayaan daerah.	12.878.251.000	9.086.000.000	8.300.000.000	11.617.426.000	8.300.000.000

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2021 diarahkan dalam rangka menutup defisit anggaran yang direncanakan. Sumber utama pada penerimaan pembiayaan Kabupaten Purbalingga adalah SiLPA. SiLPA tersebut dengan kontribusi utama adalah sisa belanja, baik karena efisiensi ataupun penyebab lain. Pada proyeksi tahun 2021 dan 2022 kedepan SiLPA diproyeksikan sama. Namun demikian, diharapkan dalam realisasinya SiLPA dapat turun dengan asumsi dari acres gaji yang tidak dipakai dan sisa belanja yang turun dari tahun ke tahun.

Dalam hal keuangan daerah diperkirakan surplus diutamakan untuk penyertaan modal dan investasi daerah lainnya yang mendukung pelayanan publik dan penerimaan pendapatan. Sebaliknya, apabila APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Kebijakan Pembiayaan harus terkait pula dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Pemanfaatan potensi-potensi daerah melalui pos pembiayaan diantaranya adalah melalui Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pembiayaan ini dimaksudkan dalam rangka memanfaatkan potensi BUMD sebagai *profit center* yang dimiliki pemerintah daerah. Alokasi pembiayaan untuk penyertaan modal diberikan sesuai dengan rencana pengembangan usaha masing-masing BUMD yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 s.d Tahun 2022

URAIAN		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun Berjalan (2020)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (2021)	Proyeksi /Target pada Tahun n+1 (2022)
1	Penerimaan Pembiayaan daerah.	114.487.189.758	125.154.397.291	61.405.000.000	40.000.000.000	61.405.000.000
	- Silpa Tahun Lalu	114.487.189.758	125.154.397.291	61.405.000.000	40.000.000.000	61.405.000.000
2	Pengeluaran Pembiayaan daerah.	12.878.251.000	9.086.000.000	8.300.000.000	11.617.426.000	8.300.000.000
	- Penyertaan Modal	12.878.251.000	9.086.000.000	8.300.000.000	11.617.426.000	8.300.000.000

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dilakukan dengan mendasarkan pada: a) hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2019 disandingkan dengan target kinerja Tahun 2019 yang direncanakan dalam RPJMD; b) identifikasi permasalahan pembangunan daerah; c) rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka keuangan daerah tahun 2021, termasuk juga memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang; serta d) mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian sasaran pembangunan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 ditetapkan berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021. Adapun Visi Kabupaten Purbalingga adalah **“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**.

Makna yang termuat dalam Visi Kabupaten Purbalingga tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai

- kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.
- b. Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.
 - c. Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.
 - d. Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah ditetapkan Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 yang ingin dicapai adalah:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
- b. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur,

- perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- f. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai;
 - g. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ketujuh Misi Kabupaten Purbalingga beserta Tujuan dan Sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan sebagaimana dalam RPJMD 2016-2021 diuraikan sebagai berikut:

- a. **Misi 1:** Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.

Untuk mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif, dibutuhkan dukungan aparatur pemerintahan dengan jumlah yang cukup dan dengan kompetensi yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas, dan sikap dan perilaku aparatur yang baik, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran politik rakyat sejalan dengan adanya proses demokratisasi, mengakibatkan semakin menguatnya tuntutan masyarakat untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu, adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

- b. **Misi 2:** Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.

Salah satu prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah terwujudnya lingkungan sosial yang tertib, aman, damai dan tenteram. Kondisi ini harus diciptakan agar berbagai upaya pembangunan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dapat dijalankan. Adanya keragaman agama dan budaya, perbedaan kondisi sosial-ekonomi, masalah kemiskinan dan pengangguran, dan berbagai permasalahan sosial lain seperti merebaknya miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, dan premanisme, serta meningkatnya kejadian kriminalitas, merupakan faktor-faktor potensial untuk timbulnya gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Selain itu, meningkatnya kesadaran politik masyarakat harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengembangkan etika politik sehingga dapat diwujudkan kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat. Pembangunan karakter dan paham kebangsaan mutlak diperlukan guna terwujudnya rasa nasionalisme yang tinggi.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 adalah: Terwujudnya ketentraman, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat, dengan Sasaran :

1. Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan.
2. Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati.
3. Menurunnya resiko bencana.
4. Terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat

c. Misi 3: Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak

Salah satu indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah tercukupinya kebutuhan pokok manusia khususnya pangan dan papan bagi seluruh masyarakat. Tercukupinya pangan dan papan secara layak juga merupakan landasan yang harus di bangun secara kokoh agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih cepat, lebih adil dan lebih merata. Pemerintah daerah memiliki kewajiban yang besar dalam upaya menurunkan kasus kerawanan pangan dan gizi buruk serta pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan sehat, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Status Ketahanan Pangan, dengan sasaran meningkatnya Status Pangan Masyarakat.
- 2) Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni, dengan sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

d. Misi 4: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

Kualitas manusia dan kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan. Kualitas manusia dapat diukur dari aspek-aspek yang bersifat lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Kualitas manusia yang dicita-citakan di samping diukur dari beberapa hal tersebut, juga diukur dari kepribadian/jatidiri dan kecintaan terhadap kebudayaan dan tanah air serta tertanamnya semangat nasionalisme. Sedangkan kualitas kehidupan manusia diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar serta tersedianya secara memadai berbagai prasarana dan sarana guna terwujudnya kehidupan yang berkualitas.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-4 adalah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- 3) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
- 4) Meningkatnya kesejahteraan keluarga.
- 5) Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS dan kelompok masyarakat rentan lainnya.
- 6) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 7) Meningkatnya budaya gemar membaca.
- 8) Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) serta Prestasi Seni.
- 9) Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga.

e. Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

Pembangunan ekonomi menduduki posisi yang sangat strategis karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Meningkatnya pendapatan per-kapita masyarakat sebagai hasil dari pembangunan ekonomi akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan semakin meningkatkan aktifitasnya dalam bidang ekonomi.

Upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata.

Tujuan jangka menengah dari Misi ke - 5 adalah Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan Sasaran: meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, berkurangnya angka pengangguran, serta terkendalinya angka inflasi.

- f. Misi ke-6 :** Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai. Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana yang meliputi prasarana jalan, jembatan, irigasi dan pengairan, perumahan dan permukiman, prasarana persampahan, pemerintahan, perhubungan, serta berbagai prasarana wilayah lainnya.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 6 adalah :

- 1) Mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum yang handal dan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, produktif dan berkelanjutan, dengan sasaran :
 - a) Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah;
 - b) Ketersediaannya air permukaan untuk pertanian pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
 - c) Meningkatkan akses air limbah domestik / RT;
 - d) Meningkatkan akses pelayanan persampahan;
 - e) Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - f) Meningkatkan akses air bersih;
 - g) Meningkatkan kepastian status dan pemanfaatan tanah;
 - h) Meningkatkan kapasitas dan kualitas angkutan serta fasilitas perlengkapan jalan;
 - i) Meningkatkan implementasi *e-government* dan keterbukaan informasi publik.

- 2) Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman, dengan Sasaran Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman.
- 3) Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kualitas pelayanan desa, dengan sasaran meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa.

g. Misi ke-7 : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Eksplorasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktifitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti pencemaran air dan udara, timbulnya berbagai penyakit, merosotnya hasil tangkapan ikan sungai, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna khas/langka, munculnya lahan rusak termasuk deforestasi, terjadinya banjir dan tanah longsor, sulitnya mendapatkan air pada musim kemarau, berpindahnya aliran sungai, dan sebagainya.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai salah satu sumberdaya yang potensial juga belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun mendatang. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Untuk mengantisipasi berbagai hal tersebut di atas dibutuhkan kebijakan besar yang bersifat kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-7 adalah terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, dengan sasaran terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Adapun indikator kinerja dan target sasaran rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 secara lengkap terdapat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA SASARAN 2021
				2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
	Misi 1: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.					
	Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat					
1.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	79,49	81,39	>80
		Opini Audit Keuangan BPK	Opini	WTP	NA	WTP
		Kategori Akuntabilitas Kinerja	Poin	58,79	61,50	70
		Hasil Penilaian LPPD	Poin	2,6286	NA	3,5
	Misi 2: Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan					
	Tujuan: Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Dan Rasa Aman Dalam Masyarakat					
1.	Terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat .	Angka Kriminalitas	Angka	1,73	2,70	1,7
2.	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Perda dan Perbup	Persentase Pelanggaran Perda Ditangani	Persen	100	NA	100
3.	Menurunnya Indeks Resiko Bencana	Cakupan Korban Bencana Terlayani	Persen	100	100	100
4.	Meningkatnya Paham dan Wawasan Kebangsaan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	Persen	68,80 *)	78,21	NA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA SASARAN 2021
				2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
	Misi 3: Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak					
	Tujuan: Meningkatkan Ketahanan Pangan					
1.	Meningkatnya Status Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	85,60	86,2	91
	Tujuan: Meningkatkan Ketersediaan Dan Kepemilikan Rumah Layak Huni					
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	Cakupan Rumah Layak Huni	Persen	93,29	95,77	93,8
		Cakupan Kepemilikan Rumah	Persen	81,98	85,79	89,12
	Misi 4: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat					
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Manusia					
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Harapan lama sekolah	Angka	11,95	11,98	12,9
		Rata2 lama sekolah	Tahun	7,00	7,14	7,92
		Angka Kelulusan SD	Persen	100	99,9	100
		Angka Kelulusan SMP	Persen	100	100	100
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,98	73,02	73,4
3.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata angka kelahiran total/ TFR	Angka	1,99	2,25	2
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	78,02	80,30	81
5.	Meningkatnya Pelayanan PMKS dan Kelompok Rentan Lain	Persentase PMKS yang terlayani	Persen	85,58	75,96	80
6.	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,32	92,68	> 66

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA SASARAN 2021
				2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
	Dan Perlindungan Anak	Cakupan Kekerasan Anak Tertangani	Persen	100	100	100
7.	Meningkatnya Budaya Gemar Membaca	Rasio Perpustakaan per jumlah penduduk	Rasio	0,0092	0,01	0,001276
8.	Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian benda cagar budaya serta prestasi seni	Jumlah gedung/ tempat gelar seni	Unit	17	10	12
		Intensitas pementasan seni budaya daerah	Kali	77	35	76
9.	Meningkatnya Prestasi Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat capaian cabang olahraga prestasi Nasional	Buah	23	8	35
	Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja					
	Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat					
1.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, berkurangnya angka pengangguran, serta terkendalinya angka inflasi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,06	4,78	< 5,5
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,42	5,65	4,5 - 5
		Laju Inflasi	Persen	3,01	2,59	< 4
		Angka Kemiskinan	Persen	15,62	15,03	<15,5
	Misi ke-6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrasruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai					
	Tujuan: Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman Produktif dan Berkelanjutan					

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA SASARAN 2021
				2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akses dan Konektivitas Wilayah	Panjang jalan kondisi mantap	Persen	85,66	83,00	95,32
2.	Ketersediaannya air permukaan untuk pertanian pada jaringan irigasi primer dan sekunder	Cakupan air irigasi	Persen	89,60	89,60	91
3.	Meningkatnya Akses Aman Air Minum yang Berkelanjutan	Cakupan RT Mengakses Air Bersih	Persen	90,43	90,43	100
4.	Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik / RT	Cakupan RT Terlayani Sistem Air Limbah	Persen	87,48	89,45	100
5.	Meningkatnya Akses Pelayanan Persampahan	Cakupan Timbulan Sampah Terlayani	Persen	66,75	66,75	61
6.	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yg Efektif	Pemanfaatan Ruang sesuai peruntukan	Persen	82	80,32	88
7.	Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas Angkutan Serta Fasilitas Perlengkapan Jalan	Angka kecelakaan lalu lintas	per 10.000 penduduk	5,76 (430 kejadian)	6,26 (579 kejadian)	5
8.	Meningkatnya Implementasi <i>e-gov</i> dan Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat keterbukaan informasi publik	Poin	70,2	82,56	75
9	Meningkatnya kepastian status dan pemanfaatan tanah	Persentase tanah pemerintah daerah bersertifikat	Persen	63,81	64,00	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA SASARAN 2021
				2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman					
1.	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman	Luasan kawasan kumuh perkotaan	Persen	0	0	0
	Tujuan: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Desa					
1.	Meningkatnya kualitas desa	Indek Desa Membangun (IDM)	Poin	0,65422	0,667642	0,7
	Misi ke-7 : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup					
	Tujuan: Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati					
1.	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	54,15	66,78	67

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Purbalingga juga disusun dengan memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, terutama yang tertuang dalam prioritas pembangunan nasional tahun 2021 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, sebagai bentuk keselarasan antara kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam rancangan awal RPJMN Tahun 2020 – 2024 dengan mengambil tema : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong “ sebagai berikut :

- a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
- b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
- c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sedangkan arahan Presiden Republik Indonesia yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 13402/SJ tentang fokus kerja presiden 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber daya manusia (SDM) dengan priortas utama : membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; mengundang kerjasama dengan talenta-talenta global; mengoptimalkan kerjasama dengan industri; penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri
2. Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama : menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi; mempermudah akses ke kawasan wisata; Mendongkrak lapangan kerja baru; Mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan regulasi dengan prioritas utama : menerbitkan undang-undang cipta lapangan kerja dan undang-undang pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; merevisi undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama: pemangkasan prosedur dan birokrasi; penyederhanaan eselonisasi dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi; dan serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan;
5. Transformasi ekonomi dengan prioritas utama transformasi dan ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Mendasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan isu strategis pembangunan, maka pembangunan Jawa Tengah Tahun 2021 diarahkan pada Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM, dengan prioritas:

1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup

Kebijakan pemulihan dan penguatan perekonomian daerah ini menjadi prioritas pembangunan di tahun 2021 terutama untuk memulihkan perekonomian daerah yang melambat akibat pandemi Covid-19. Kebijakan ini diarahkan pada strategi mendorong peningkatan produksi sektor-sektor yang menjadi unggulan Jawa Tengah seperti pertanian (yang cukup tahan dari dampak pandemi), industri pengolahan, perdagangan, pariwisata. Selain itu juga diarahkan pada pemulihan iklim investasi untuk mendorong masuknya kembali investasi di Jawa Tengah. Upaya mendorong ekspor juga mulai dilakukan kembali, dan mendorong juga upaya substitusi bahan baku impor guna menekan impor di Jawa Tengah. Inflasi juga terus dikendalikan untuk tetap menjaga harga barang di pasar sehingga konsumsi masyarakat tetap terjaga. Pemberdayaan UKM juga dilakukan dengan berbagai strategi antara lain pelatihan, fasilitasi modal dan pasar, dan lainnya. Roda perekonomian daerah akan bergerak kembali dengan didukung oleh infrastruktur sebagai instrumen distribusi barang dan jasa, seperti jalan, transportasi, air bersih, listrik, dan lainnya.

Kebijakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam upaya pemulihan perekonomian daerah tetap juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup. Dampak positif yang bisa dirasakan dalam masa pandemi Covid-19 antara lain adalah membaiknya kondisi lingkungan karena kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dan *work from home*. Untuk itu kebijakan penguatan keberlanjutan lingkungan hidup di tahun 2021 tetap diarahkan pada perbaikan kerusakan sumberdaya alam, pengurangan pencemaran lingkungan hidup, serta penurunan emisi GRK sejalan dengan masa pemulihan perekonomian daerah.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

Kebijakan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pemenuhan *basic life access* untuk mengurangi beban pengeluaran, dan sustainable livelihood untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sasaran kebijakan ini terutama adalah untuk penduduk miskin dan rentan miskin, serta penduduk terdampak Covid-19 secara sosial dan ekonomi. Sedangkan kebijakan penurunan pengangguran diarahkan pada perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

3. Pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia menuju SDM berdaya saing

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan terutama adaptasi terhadap perubahan akibat pandemi Covid-19 dengan penyediaan atau pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual, dengan tetap melakukan pemerataan layanan pendidikan yang baik; penguatan *health security*, peningkatan pelayanan kesehatan, serta pemerataan layanan kesehatan.

4. Penguatan ketahanan bencana

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana alam dan non alam melalui penguatan mitigasi, adaptasi, kedaruratan, dan pemulihan dampak bencana. Ketahanan bencana dibangun dari dukungan berbagai sektor seperti kesehatan, pangan, transportasi, perdagangan, pariwisata, dan lain-lainnya.

5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Kebijakan tata kelola pemerintahan diarahkan pada penguatan kapasitas, pola kerja birokrasi, dan reformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap segala dinamika yang terjadi seperti saat terjadinya pandemi Covid-19. Kebijakan kondusivitas wilayah diarahkan pada penguatan kebersamaan, dan gotong royong

dalam masa pemulihan Covid-19 untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat. Sedangkan kebijakan peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah dengan pemanfaatan aset agar lebih produktif, ditengah melambatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pajak.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga

Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2021 dilaksanakan dengan tema **“Optimalisasi Potensi Ekonomi dan SDM untuk Membangun Purbalingga yang Sejahtera”**, dengan menitikberatkan pada beberapa prioritas sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumberdaya Lokal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dengan fokus pada:

- a. Pemulihan Industri Kecil dan UMKM, melalui pemberian stimulus secara tepat sasaran, berupa :
 - Fasilitasi proses produksi/bantuan peralatan;
 - Fasilitasi permodalan usaha (Kredit Mawar, Subsidi Bunga);
 - Fasilitasi pemasaran (Tuka-Tuku, Festival UMKM, Pameran, Cenderamata Icip-Icip);
 - Pelatihan Kewirausahaan (*Young Entrepreneurship*);
 - Pengembangan PKL Center dalam rangka pemberian fasilitas yang layak bagi PKL sekaligus penataan perkotaan.
- b. Menciptakan perluasan lapangan kerja, antara lain melalui perluasan pelatihan ketrampilan baik yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) maupun di Desa;
- c. Mendorong pemulihan aktivitas wisata dan ekonomi kreatif, antara lain melalui :
 - Fasilitasi Event Wisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Pengembangan *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE);
 - Mendorong Dinas, Sekolah, Badan Usaha, dan berbagai komponen lain untuk melakukan aktivitas di tempat wisata local maupun Desa Wisata
- d. Mengembangkan komoditas sektor primer yang memiliki nilai tambah tinggi dari sisi *on* dan *off farm* sesuai potensi wilayah, antara lain meliputi pengembangan gula kelapa, tanaman kopi, nanas, pertanian organik serta hewan Ruminansia;

- e. Peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dan pasar desa;
- f. Mendorong Investasi untuk Kembali tumbuh, antara lain melalui :
 - Kemudahan berinvestasi dan penyederhanaan prosedur, mengurangi hambatan dan pembangunan Mall Pelayanan Publik dan Pelayanan Online;
 - Pemberian Insentif bagi calon Investor.

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar secara Berkelanjutan dengan fokus pada:

- a. Memperkuat ketahanan pangan masyarakat utamanya melalui penyediaan Jaring Pengaman Sosial bagi DTKS, ketersediaan, keamanan, diversifikasi dan pengendalian harga pangan;
- b. Pemenuhan kebutuhan air minum untuk masyarakat melalui pembangunan, perluasan, rehabilitasi sistem penyediaan air minum, diutamakan untuk wilayah rawan kekeringan;
- c. Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh utamanya melalui pengurangan RTLH, pembangunan prasarana air limbah dan sanitasi;
- d. Pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat, utamanya penyediaan rumah untuk korban bencana, penyediaan PSU di perumahan, sertifikasi pengembang perumahan kecil, dll.

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dengan fokus pada:

- a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan: utamanya jaminan kesehatan masyarakat rentan, layanan kesehatan ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah, serta upaya promotive dan preventive melalui Gerakan PHBS guna pencegahan berkembang kembalinya Covid-19, penurunan stunting, kematian bayi, dan penanganan HIV AIDS;
- b. Peningkatan layanan penyandang masalah kesejahteraan sosial: utamanya melalui *updating* DTKS yang valid, Layanan PMKS di luar panti (Bantuan, Pembinaan, Fasilitasi), Jaminan pangan Lansia terlantar, Fasilitasi program nasional (PKH, BNPT, dll), serta Jaring Pengaman Sosial;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan : utamanya perbaikan ruang sekolah rusak, Layanan AUSTS keluarga miskin, Layanan PAUD, Sekolah Inklusi, dan Peningkatan Manajemen Sekolah (Sekolah binaan per wilayah), Pemberian beasiswa Pendidikan dan bantuan biaya operasional pendidikan;
- d. Peningkatan cakupan pelayanan KB dan optimalisasi KKBPK (Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga);

- e. Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terwujudnya KLA dan APE (Anugrah Parahita Ekapraya), dan Penyelenggaraan KB dan KS secara komprehensif;
- f. Fasilitasi pemuda bertalenta tinggi dan berprestasi, Mendorong berkembangnya olah raga prestasi serta pelestarian dan pengembangan seni budaya dan cagar budaya daerah.

4. Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Recovery Ekonomi dengan fokus pada:

- a. Melanjutkan kembali Infrastruktur Prioritas di Tahun 2020;
- b. Memelihara infrastruktur Jalan dan Perhubungan untuk mempertahankan pelayanan dasar kepada masyarakat;
- c. Memelihara infrastruktur pertanian untuk mempertahankan produksi pangan;
- d. Peningkatan pelayanan persampahan melalui pembangunan TPS, 3R dan TPA, serta Pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
- e. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan fokus pada Pengembangan RTH dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan serta Pengendalian Pencemaran Tanah, Air & Udara;
- f. Melaksanakan kegiatan dengan mekanisme padat karya untuk memberikan stimulus kepada masyarakat terdampak covid 19.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan fokus pada:

- a. Memperkuat reformasi birokrasi menyongsong format baru bagi pembangunan global melalui: Pembangunan Sistem Manajemen Kinerja, Memperkuat APIP dan SPI, serta Memperluas penerapan E-Government;
- b. Memperkuat stabilitas ketentraman dan ketertiban umum, melalui: Penguatan aparat Trantibum, Mendorong ketentraman dan ketertiban berbasis masyarakat, dan Peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan / tanggap bencana;
- c. Peningkatan jumlah Desa Mandiri, melalui: Peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa, serta Advokasi penyelenggara pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- d. Meningkatkan Sarpras Pelayanan Publik;
- e. Peningkatan ketahanan Ideologi Pancasila, Semangat Nasionalisme dan Patriotisme, Pencegahan Intoleransi umat beragama, Radikalisme, Terorisme, *Hate Speech* dan *Hoax News*, serta Optimalisasi Penanganan Narkoba, Konflik sosial dan horizontal;

4.3. Sinkronisasi Prioritas Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Purbalingga juga disusun dengan memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, terutama yang tertuang dalam prioritas pembangunan nasional tahun 2021 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, sebagai bentuk keselarasan antara kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Secara lengkap sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

Prioritas Kabupaten Purbalingga	Selaras Dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Selaras Dengan Prioritas Nasional
Prioritas 1. Pengembangan Sumberdaya Lokal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi;	Prioritas 1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup	Prioritas 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
Prioritas 2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar secara Berkelanjutan;	Prioritas 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Prioritas 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Prioritas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;	Prioritas 3. Pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia menuju SDM berdaya saing	Prioritas 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Prioritas 4 . Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah;	Prioritas 4 . Penguatan Ketahanan Bencana	Prioritas 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Prioritas 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021, maupun perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana diformulasikan dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk tahun 2021 disusun rencana kerja dan pendanaan daerah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021. Rencana kerja dan pendanaan daerah yang tercakup dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini pada dasarnya merupakan *baseline* sebagai arah bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran.

Program Prioritas dan Indikator Kinerja dari 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 6 (enam) Urusan Pemerintahan Pilihan, 2 (dua) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, 4 (empat) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, 1 (satu) Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan, 1 (satu) Unsur Kewilayahan, serta 1 (satu) Unsur Pemerintahan Umum tersaji sebagaimana dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Tabel 5.1
Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.01	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DINDIKBUD	- 100% - 82	- persen - poin			
x.xx.01.2.01					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	DINDIKBUD	- 100 - 100	- persen - persen			
x.xx.01.2.01.01					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	DINDIKBUD	1	dokumen	9.290.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.01.05					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	DINDIKBUD	2	dokumen	187.643.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	DINDIKBUD	12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	DINDIKBUD	3.217	ASN	436.808.392.362		DINDIKBUD
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	DINDIKBUD	- 100 - 18	- OK - Korwilcam	680.928.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	DINDIKBUD	12	bulan	6.000.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	DINDIKBUD	12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	DINDIKBUD	12	bulan	3.600.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi	DINDIKBUD	12	bulan	169.260.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DINDIKBUD	12	bulan	19.000.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	DINDIKBUD	- 8 - 30	- R4 - R2	18.750.000		DINDIKBUD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	DINDIKBUD	75	OB	737.750.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	DINDIKBUD	2	OB	4.116.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	DINDIKBUD	5	jenis	31.250.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DINDIKBUD	30	jenis	21.086.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	DINDIKBUD	121.800	lembar	24.285.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	DINDIKBUD	5	jenis	7.850.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DINDIKBUD	6	jenis	32.500.000		DINDIKBUD
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					975.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	DINDIKBUD	35	eksemplar	4.140.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	DINDIKBUD	12	bulan	241.580.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	DINDIKBUD	4.016	OK	33.105.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	DINDIKBUD	100	OK	118.480.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)	DINDIKBUD	2	jenis	-		DINDIKBUD
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)	DINDIKBUD	1	unit	17.725.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	DINDIKBUD	- 8 - 30	- R4 - R2	55.750.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)	DINDIKBUD	3	unit	2.200.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin	DINDIKBUD	- 0	- persen	-		
						- Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 10	- persen			
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	DINDIKBUD	10	OK	10.000.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.04.11					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya peserta sosialisasi	DINDIKBUD	94	OK	-		DINDIKBUD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu		
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan					
1.01.02.			Program Pengelolaan Pendidikan		-APK PAUD -Cakupan Guru PAUD memenuhi kualifikasi -APK SD/Sederajat -APM SD/Sederajat -APK SMP/Sederajat -APM SMP/Sederajat -Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi -Persentase pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi -Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip manajemen berbasis Sekolah -Persentase akreditasi PAUD -Persentase akreditasi SD/Sederajat -Persentase akreditasi SMP/ sederajat -Cakupan capaian SPM :SD/ sederajat -Cakupan capain SPM: SMP/ sederajat -Persentase angka kelulusan : SD/ sederajat -Persentase angka kelulusan SMP/ sederajat -% angka melanjutkan: SD/ sederajat		-100 -43 -110 -93.5 -100.3 -72.5 -100 -100 -100 -45 -45 -85 -98.04 -90.52 -100 -100 -86.07	-persen -persen -persen -persen -persen -persen -persen -persen -persen -persen -persen -persen -persen -persen -persen	-		
1.01.02.2.01.				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase pelaksanaan pengelolaan pendidikan sekolah dasar				-		
1.01.02.2.01.02				Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	Purbalingga	4	rkb	-		DINDIKBUD
1.01.02.2.01.08				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang di rehab		50	ruang kelas	1.500.000.000	APBD	DINDIKBUD
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang di rehab		181	ruang kelas	18.860.900.000	DAK	DINDIKBUD
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang di rehab		31	ruang kelas	3.220.000.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.01.14				Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah mebeleur yang diadakan		400	set	193.500.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.01.21				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah biaya personil peserta didik sekolah dasar		515	sekolah	61.752.900.000	BOS	DINDIKBUD
1.01.02.2.01.21				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah biaya personil peserta didik sekolah dasar				965.198.000		DINDIKBUD
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah AUSTS yang teridentifikasi		856	siswa	1.500.000.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.01.23				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa yang mengikuti ujian sekolah		15.712	siswa	239.157.000		DINDIKBUD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.01.02.2.01.24					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Bimbingan Teknis untuk penyusunan kurikulum sekolah model		466	sekolah	301.191.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.01.25					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba minat, bakat dan kreativitas siswa yang dilaksanakan		9	kali	21.534.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.01.26					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan non pns		2557	GTT/PTT	19.088.913.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.01.27					Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah tenaga				50.564.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.01.28					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah kelembagaan manajemen yang dibina		18	sekolah	115.112.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.02.					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pelaksanaan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama			persen	-		
1.01.02.2.02.02					Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah		5	rkb	-	DAK	DINDIKBUD
1.01.02.2.02.02					Penambahan Ruang Kelas Baru			1	sekolah	2.375.000.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.02.02					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					-	DAK	DINDIKBUD
1.01.02.2.02.04					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang terbangun		3	unit	270.000.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.02.05					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang terbangun		2	unit	300.000.000	DAK	DINDIKBUD
1.01.02.2.02.06					Pembangunan Laboratorium	Jumlah laboratorium yang terbangun		2	unit	500.000.000	DAK	DINDIKBUD
1.01.02.2.02.11					Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah kantin sekolah yang terbangun		1	unit	-		DINDIKBUD
1.01.02.2.02.12					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang terbangun		12	jenis/unit	225.000.000	DAK /DAU	DINDIKBUD
1.01.02.2.02.14					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah rehab sedang/berat ruang kelas sekolah		90	ruang kelas	-	DAU	DINDIKBUD
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah rehab sedang/berat ruang kelas sekolah		29	ruang kelas	4.000.000.000	DAK	DINDIKBUD
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah rehab sedang/berat ruang kelas sekolah		13	ruang kelas	1.400.000.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.02.15					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah rehab sedang/berat ruang guru sekolah		5	ruang guru	800.000.000	DAK	DINDIKBUD
1.01.02.2.02.16					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah rehab sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah		5	unit	-		DINDIKBUD
1.01.02.2.02.17					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah rehab sedang/berat perpustakaan sekolah		4	unit	500.000.000	DAK	DINDIKBUD
1.01.02.2.02.18					Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah rehab sedang/berat laboratorium		5	unit	500.000.000	DAK	DINDIKBUD
1.01.02.2.02.22					Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah rehab sedang/berat fasilitas parkir		4	unit	-		DINDIKBUD
1.01.02.2.02.24					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah rehab sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah		12	unit	387.848.000	DAK	DINDIKBUD
1.01.02.2.02.25					Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah pengadaan mebeleur sekolah		100	set	-		DINDIKBUD
1.01.02.2.02.35					Pengadaan alat praktik dan peraga siswa					-	DAK	DINDIKBUD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.01.02.2.02.36				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa yang mengikuti ujian sekolah			siswa	431.509.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.02.37				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Bimbingan Teknis untuk penyusunan kurikulum sekolah model		76	sekolah	261.240.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.02.38				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba minat, bakat dan kreativitas siswa yang dilaksanakan			kali	31.445.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.02.39				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan non pns		1854	ggt/ptt	4.030.263.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.02.40				Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Diklat kepala sekolah				140.136.000		DINDIKBUD
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah menengah Pertama					261.876.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.02.41				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah kelembagaan dan manajemen sekolah yang di bina		60	sekolah	229.950.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.03.				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			persen	-		
1.01.02.2.03.03				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah rehab sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD		36	ruang kelas	1.590.000.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.03.04				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah rehab sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas PAUD		7	unit	252.746.000	DAK	DINDIKBUD
1.01.02.2.03.04				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					80.000.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.03.09				Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah pengadaan perlengkapan PAUD		4	jenis	30.000.000	DAK	DINDIKBUD
1.01.02.2.03.10				Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah sekolah yang mendapatkan pengadaan perlengkapan siswa PAUD		4	PAUD	30.000.000	DAK	DINDIKBUD
1.01.02.2.03.12				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah sekolah yang mendapatkan pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD		4	PAUD	72.456.000	DAK	DINDIKBUD
1.01.02.2.03.13				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah PAUD yang menyelenggarakan proses belajar		1	PAUD	28.715.000	DAU	DINDIKBUD
1.01.02.2.03.13				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah PAUD yang menyelenggarakan proses belajar		643	PAUD	10.596.000.000	DAK Non Fisik	DINDIKBUD
1.01.02.2.03.15				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan non pns		1630	GTT	10.880.824.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.03.16				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah peserta pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan		120	orang	174.276.000		DINDIKBUD
1.01.02.2.03.17				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah kelembagaan dan manajemen PAUD yang di bina		5	PAUD	337.303.500		DINDIKBUD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.01.02.2.04.					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			persen	-		
1.01.02.2.04.12					Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga yang mengikuti proses belajar nonformal/kesetaraan		2756	orang	311.337.000	DAU	DINDIKBUD
					Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga yang mengikuti proses belajar nonformal/kesetaraan				50.000.000		DINDIKBUD
					Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga yang mengikuti proses belajar nonformal/kesetaraan				3.660.300.000	DAK Non Fisik	DINDIKBUD
1.01.02.2.04.16					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga belajar yang sekolahnya dibina		2756	orang	103.159.500		DINDIKBUD
1.01.04.					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-Jumlah pendidik/tenaga kependidikan berprestasi tingkat provinsi dan nasional -Persentase tingkat kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan -Persentase sertifikasi pendidik -Persentase pendidik lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)		-8 -100 -100 -100	-orang -persen -persen -persen	-		
1.01.04.2.01.					Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Cakupan pelaksanaan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan		100	persen	-		
1.01.04.2.01.01					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1472	orang	-	DAU	DINDIKBUD
1.01.04.2.01.01					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				-	DID	DINDIKBUD
1.01.04.2.01.02					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan pelaksanaan Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas serta Diklat Calon Kepala sekolah dan Calon Pengawas		3	kegiatan	739.564.000		DINDIKBUD
1.01.04.2.01.02					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan pelaksanaan Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas serta Diklat Calon Kepala sekolah dan Calon Pengawas		1	kegiatan	75.000.000		DINDIKBUD
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		27	ASN	2.253.181.000		SMPN 1 BOBOTSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	2.880.000		SMPN 1 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	639.000		SMPN 1 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12	bulan	10.000.000		SMPN 1 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	13.107.000		SMPN 1 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.278.000		SMPN 1 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	550.000		SMPN 1 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	31.284.000		SMPN 1 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1.918.000		SMPN 1 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	4.478.000		SMPN 1 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	3.866.000		SMPN 1 BOBOTSARI
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		799	siswa	881.100.000	BOS	SMPN 1 BOBOTSARI
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		28	ASN	2.449.853.000		SMPN 1 BOJONGSARI
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	3.000.000		SMPN 1 BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	906.000		SMPN 1 BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12	bulan	14.000.000		SMPN 1 BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	18.591.000		SMPN 1 BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.813.000		SMPN 1 BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	966.000		SMPN 1 BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	9.211.500		SMPN 1 BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.720.000		SMPN 1 BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	6.348.000		SMPN 1 BOJONGSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	1.138.500		SMPN 1 BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	11.306.000		SMPN 1 BOJONGSARI
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		874	siswa	969.100.000	BOS	SMPN 1 BOJONGSARI
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		30	ASN	2.356.072.500		SMPN 1 BUKATEJA
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	3.000.000		SMPN 1 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	740.000		SMPN 1 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	12.000.000		SMPN 1 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	15.170.000		SMPN 1 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.480.000		SMPN 1 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	210.000		SMPN 1 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	21.360.000		SMPN 1 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.220.000		SMPN 1 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	5.180.000		SMPN 1 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	2.640.000		SMPN 1 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	6.000.000		SMPN 1 BUKATEJA
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		796	siswa	878.900.000	BOS	SMPN 1 BUKATEJA
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		30	ASN	2.349.590.000		SMPN 1 KALIGONDANG
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	5.000.000		SMPN 1 KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	820.000		SMPN 1 KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	13.000.000		SMPN 1 KALIGONDANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	16.810.000		SMPN 1 KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.640.000		SMPN 1 KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	530.000		SMPN 1 KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	21.360.000		SMPN 1 KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.460.000		SMPN 1 KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	5.740.000		SMPN 1 KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	2.640.000		SMPN 1 KALIGONDANG
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		844	siswa	929.500.000	BOS	SMPN 1 KALIGONDANG
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		33	ASN	3.037.791.000		SMPN 1 KALIMANAH
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	2.500.000		SMPN 1 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	1.170.000		SMPN 1 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	19.000.000		SMPN 1 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	23.985.000		SMPN 1 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	2.340.000		SMPN 1 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	305.000		SMPN 1 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	6.000.000		SMPN 1 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	3.510.000		SMPN 1 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	8.190.000		SMPN 1 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	3.000.000		SMPN 1 KALIMANAH
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		848	siswa	939.400.000	BOS	SMPN 1 KALIMANAH
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		24	ASN	1.991.971.000		SMPN 1 KARANGANYAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	5.000.000		SMPN 1 KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	1.080.000		SMPN 1 KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12	bulan	17.000.000		SMPN 1 KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	22.140.000		SMPN 1 KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	2.160.000		SMPN 1 KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	820.000		SMPN 1 KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	9.790.000		SMPN 1 KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	3.240.000		SMPN 1 KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	7.560.000		SMPN 1 KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	1.210.000		SMPN 1 KARANGANYAR
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		785	siswa	869.000.000	BOS	SMPN 1 KARANGANYAR
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		8	ASN	746.782.500		SMPN 1 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	4.000.000		SMPN 1 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	900.000		SMPN 1 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12	bulan	14.000.000		SMPN 1 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	18.450.000		SMPN 1 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.800.000		SMPN 1 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	850.000		SMPN 1 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	10.680.000		SMPN 1 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.700.000		SMPN 1 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	6.300.000		SMPN 1 KARANGJAMBU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	1.320.000		SMPN 1 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	9.000.000		SMPN 1 KARANGJAMBU
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		375	siswa	421.300.000	BOS	SMPN 1 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		24	ASN	2.086.559.000		SMPN 1 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	8.080.000		SMPN 1 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	758.000		SMPN 1 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	12.000.000		SMPN 1 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	15.547.000		SMPN 1 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.516.000		SMPN 1 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	513.000		SMPN 1 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	21.360.000		SMPN 1 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.275.000		SMPN 1 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	5.311.000		SMPN 1 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	2.640.000		SMPN 1 KARANGMONCOL
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		737	siswa	814.000.000	BOS	SMPN 1 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		16	ASN	1.635.618.000		SMPN 1 KARANGREJA
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	4.250.000		SMPN 1 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	882.000		SMPN 1 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	14.000.000		SMPN 1 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	18.098.000		SMPN 1 KARANGREJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.765.000		SMPN 1 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	567.000		SMPN 1 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	19.230.230		SMPN 1 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.648.000		SMPN 1 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	6.183.000		SMPN 1 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	2.376.770		SMPN 1 KARANGREJA
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		580	siswa	646.800.000	BOS	SMPN 1 KARANGREJA
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		20	ASN	2.047.879.500		SMPN 1 KEJOBONG
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	6.000.000		SMPN 1 KEJOBONG
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	1.156.000		SMPN 1 KEJOBONG
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	18.000.000		SMPN 1 KEJOBONG
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	23.698.000		SMPN 1 KEJOBONG
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	2.312.000		SMPN 1 KEJOBONG
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	1.074.000		SMPN 1 KEJOBONG
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	3.468.000		SMPN 1 KEJOBONG
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	8.092.000		SMPN 1 KEJOBONG
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	6.200.000		SMPN 1 KEJOBONG
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		704	siswa	785.400.000	BOS	SMPN 1 KEJOBONG
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		30	ASN	2.965.542.800		SMPN 1 KEMANGKON
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	5.000.000		SMPN 1 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	790.000		SMPN 1 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	12.000.000		SMPN 1 KEMANGKON

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	16.195.000		SMPN 1 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.580.000		SMPN 1 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	1.035.000		SMPN 1 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	22.695.000		SMPN 1 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.370.000		SMPN 1 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	5.530.000		SMPN 1 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	2.805.000		SMPN 1 KEMANGKON
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		761	siswa	839.300.000	BOS	SMPN 1 KEMANGKON
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		18	ASN	1.495.401.000		SMPN 1 KERTANEGARA
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	4.500.000		SMPN 1 KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	650.000		SMPN 1 KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	10.000.000		SMPN 1 KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	13.325.000		SMPN 1 KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.300.000		SMPN 1 KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	725.000		SMPN 1 KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	2.225.000		SMPN 1 KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1.950.000		SMPN 1 KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	4.550.000		SMPN 1 KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	275.000		SMPN 1 KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	30.500.000		SMPN 1 KERTANEGARA
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		499	siswa	554.400.000	BOS	SMPN 1 KERTANEGARA
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	2.477.390.500		SMPN 1 KUTASARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	4.500.000		SMPN 1 KUTASARI
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	1.082.000		SMPN 1 KUTASARI
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12	bulan	17.000.000		SMPN 1 KUTASARI
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	22.187.000		SMPN 1 KUTASARI
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	2.164.000		SMPN 1 KUTASARI
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	857.000		SMPN 1 KUTASARI
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	3.246.000		SMPN 1 KUTASARI
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	7.579.000		SMPN 1 KUTASARI
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	11.385.000		SMPN 1 KUTASARI
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		748	siswa	834.900.000	BOS	SMPN 1 KUTASARI
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		26	ASN	2.319.670.000		SMPN 1 MREBET
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	2.000.000		SMPN 1 MREBET
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	239.150		SMPN 1 MREBET
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12	bulan	3.000.000		SMPN 1 MREBET
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	4.902.575		SMPN 1 MREBET
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	478.300		SMPN 1 MREBET
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	945.975		SMPN 1 MREBET
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	37.246.500		SMPN 1 MREBET
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	717.450		SMPN 1 MREBET
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	1.674.050		SMPN 1 MREBET
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	4.603.500		SMPN 1 MREBET

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pegecatan,dll)		unit	14.192.500		SMPN 1 MREBET
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel	747	siswa	827.200.000	BOS	SMPN 1 MREBET
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	29	ASN	2.693.078.500		SMPN 1 PADAMARA
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)		orang kali (OK)	4.800.000		SMPN 1 PADAMARA
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	12	bulan	544.000		SMPN 1 PADAMARA
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	12	bulan	8.000.000		SMPN 1 PADAMARA
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer		orang/bulan	11.152.000		SMPN 1 PADAMARA
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		jenis	1.088.000		SMPN 1 PADAMARA
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan		lembar	976.000		SMPN 1 PADAMARA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		jenis unit/buah	6.160.000		SMPN 1 PADAMARA
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah		eksemplar/bulan	1.632.000		SMPN 1 PADAMARA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat		orang kali (OK)	3.808.000		SMPN 1 PADAMARA
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)		jenis unit/buah	31.840.000		SMPN 1 PADAMARA
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel	742	siswa	820.600.000	BOS	SMPN 1 PADAMARA
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	19	ASN	1.752.797.000		SMPN 1 PENGADegan
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)		orang kali (OK)	6.000.000		SMPN 1 PENGADegan
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	12	bulan	740.000		SMPN 1 PENGADegan
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	12	bulan	12.000.000		SMPN 1 PENGADegan
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer		orang/bulan	15.170.000		SMPN 1 PENGADegan
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		jenis	1.480.000		SMPN 1 PENGADegan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	210.000		SMPN 1 PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	19.580.000		SMPN 1 PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.220.000		SMPN 1 PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	5.180.000		SMPN 1 PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	2.420.000		SMPN 1 PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pencatatan, dll)			unit	5.000.000		SMPN 1 PENGADEGAN
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		658	siswa	723.800.000	BOS	SMPN 1 PENGADEGAN
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		32	ASN	3.241.393.500		SMPN 1 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	500.000		SMPN 1 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	8.400.000		SMPN 1 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	10.291.000		SMPN 1 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.000.000		SMPN 1 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	600.000		SMPN 1 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	39.369.000		SMPN 1 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1.440.000		SMPN 1 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	3.600.000		SMPN 1 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	4.800.000		SMPN 1 PURBALINGGA
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		837	siswa	919.600.000	BOS	SMPN 1 PURBALINGGA
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		19	ASN	1.952.301.500		SMPN 1 REMBANG
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	7.000.000		SMPN 1 REMBANG
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	983.000		SMPN 1 REMBANG
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	16.000.000		SMPN 1 REMBANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	20.165.000		SMPN 1 REMBANG
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.967.000		SMPN 1 REMBANG
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	234.000		SMPN 1 REMBANG
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.951.000		SMPN 1 REMBANG
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	6.886.000		SMPN 1 REMBANG
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pegecatan, dll)			unit	13.814.000		SMPN 1 REMBANG
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		767	siswa	849.200.000	BOS	SMPN 1 REMBANG
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		23	ASN	2.109.140.500		SMPN 2 BOBOTSARI
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	3.600.000		SMPN 2 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	808.000		SMPN 2 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	13.000.000		SMPN 2 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	16.584.000		SMPN 2 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.617.000		SMPN 2 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	348.000		SMPN 2 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	23.096.390		SMPN 2 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.426.000		SMPN 2 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	5.666.000		SMPN 2 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	2.854.610		SMPN 2 BOBOTSARI
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		659	siswa	726.000.000	BOS	SMPN 2 BOBOTSARI
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		17	ASN	1.410.045.000		SMPN 2 BOJONGSARI
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	4.200.000		SMPN 2 BOJONGSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	996.000		SMPN 2 BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	16.000.000		SMPN 2 BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	20.418.000		SMPN 2 BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.992.000		SMPN 2 BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	434.000		SMPN 2 BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	14.240.000		SMPN 2 BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.988.000		SMPN 2 BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	6.972.000		SMPN 2 BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	1.760.000		SMPN 2 BOJONGSARI
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		595	siswa	658.900.000	BOS	SMPN 2 BOJONGSARI
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		30	ASN	2.886.348.000		SMPN 2 BUKATEJA
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	2.500.000		SMPN 2 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	1.010.000		SMPN 2 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	16.000.000		SMPN 2 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	20.705.000		SMPN 2 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	2.020.000		SMPN 2 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	665.000		SMPN 2 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	14.685.000		SMPN 2 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	3.030.000		SMPN 2 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	7.070.000		SMPN 2 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	1.815.000		SMPN 2 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pencetakan, dll)			unit	500.000		SMPN 2 BUKATEJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.01.02.2.02.32				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		703	siswa	770.000.000	BOS	SMPN 2 BUKATEJA
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		19	ASN	1.611.179.000		SMPN 2 KALIGONDANG
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	4.000.000		SMPN 2 KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	708.000		SMPN 2 KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	11.000.000		SMPN 2 KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	14.514.000		SMPN 2 KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.416.000		SMPN 2 KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	682.000		SMPN 2 KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	21.360.000		SMPN 2 KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.124.000		SMPN 2 KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	4.956.000		SMPN 2 KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.25				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	2.640.000		SMPN 2 KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.28				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	6.600.000		SMPN 2 KALIGONDANG
1.01.02.2.02.32				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		464	siswa	510.400.000	BOS	SMPN 2 KALIGONDANG
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		33	ASN	2.899.638.500		SMPN 2 KALIMANAH
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	3.900.000		SMPN 2 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	638.000		SMPN 2 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	10.000.000		SMPN 2 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	13.079.000		SMPN 2 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.276.000		SMPN 2 KALIMANAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	527.000		SMPN 2 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	30.438.000		SMPN 2 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1.914.000		SMPN 2 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	4.466.000		SMPN 2 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	3.762.000		SMPN 2 KALIMANAH
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		744	siswa	831.600.000	BOS	SMPN 2 KALIMANAH
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		5	ASN	382.162.000		SMPN 2 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	7.650.000		SMPN 2 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	556.000		SMPN 2 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	9.000.000		SMPN 2 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	14.920.720		SMPN 2 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.112.000		SMPN 2 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	174.000		SMPN 2 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	9.256.000		SMPN 2 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1.668.000		SMPN 2 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	3.892.000		SMPN 2 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	1.144.000		SMPN 2 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	15.558.000		SMPN 2 KARANGJAMBU
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		120	siswa	130.900.000	BOS	SMPN 2 KARANGJAMBU
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		10	ASN	1.119.584.500		SMPN 2 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	7.700.000		SMPN 2 KARANGMONCOL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	813.000		SMPN 2 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	13.000.000		SMPN 2 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	16.675.000		SMPN 2 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.629.000		SMPN 2 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	421.000		SMPN 2 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	16.134.810		SMPN 2 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.440.000		SMPN 2 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	5.693.000		SMPN 2 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.25				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	1.994.190		SMPN 2 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.28				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	3.500.000		SMPN 2 KARANGMONCOL
1.01.02.2.02.32				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		220	siswa	246.400.000	BOS	SMPN 2 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		12	ASN	948.085.500		SMPN 2 KARANGREJA
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	7.200.000		SMPN 2 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	818.000		SMPN 2 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	13.000.000		SMPN 2 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	16.769.000		SMPN 2 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.636.000		SMPN 2 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	497.000		SMPN 2 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	12.638.000		SMPN 2 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.454.000		SMPN 2 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	5.726.000		SMPN 2 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.25				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	1.562.000		SMPN 2 KARANGREJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan,dll)		unit	7.700.000		SMPN 2 KARANGREJA
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel	474	siswa	522.500.000	BOS	SMPN 2 KARANGREJA
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	12	ASN	1.234.799.000		SMPN 2 KEJOBONG
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)		orang kali (OK)	6.000.000		SMPN 2 KEJOBONG
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	12	bulan	1.080.000		SMPN 2 KEJOBONG
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	12	bulan	17.000.000		SMPN 2 KEJOBONG
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer		orang/bulan	22.140.000		SMPN 2 KEJOBONG
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		jenis	2.160.000		SMPN 2 KEJOBONG
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan		lembar	820.000		SMPN 2 KEJOBONG
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah		eksemplar/bulan	3.240.000		SMPN 2 KEJOBONG
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat		orang kali (OK)	7.560.000		SMPN 2 KEJOBONG
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan,dll)		unit	10.000.000		SMPN 2 KEJOBONG
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel	293	siswa	320.100.000	BOS	SMPN 2 KEJOBONG
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	17	ASN	1.644.252.500		SMPN 2 KEMANGKON
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)		orang kali (OK)	5.000.000		SMPN 2 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	12	bulan	576.000		SMPN 2 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	12	bulan	9.000.000		SMPN 2 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer		orang/bulan	11.808.000		SMPN 2 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		jenis	1.152.000		SMPN 2 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan		lembar	504.000		SMPN 2 KEMANGKON

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	32.218.000		SMPN 2 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1.728.000		SMPN 2 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	4.032.000		SMPN 2 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	3.982.000		SMPN 2 KEMANGKON
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		280	siswa	309.100.000	BOS	SMPN 2 KEMANGKON
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		8	ASN	803.283.500		SMPN 2 KERTANEGARA
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	7.440.000		SMPN 2 KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	658.000		SMPN 2 KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	10.000.000		SMPN 2 KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	13.493.000		SMPN 2 KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.316.000		SMPN 2 KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	862.000		SMPN 2 KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	25.588.000		SMPN 2 KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1.974.000		SMPN 2 KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	4.607.000		SMPN 2 KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	3.162.000		SMPN 2 KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	900.000		SMPN 2 KERTANEGARA
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		403	siswa	452.100.000	BOS	SMPN 2 KERTANEGARA
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		32	ASN	3.070.130.500		SMPN 2 KUTASARI
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	3.250.000		SMPN 2 KUTASARI
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	265.000		SMPN 2 KUTASARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12	bulan	4.000.000		SMPN 2 KUTASARI
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	5.444.000		SMPN 2 KUTASARI
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	531.000		SMPN 2 KUTASARI
x.xx.01.2.03.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	385.000		SMPN 2 KUTASARI
x.xx.01.2.03.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	16.999.000		SMPN 2 KUTASARI
x.xx.01.2.03.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	796.000		SMPN 2 KUTASARI
x.xx.01.2.03.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	1.859.000		SMPN 2 KUTASARI
x.xx.01.2.03.25				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	2.101.000		SMPN 2 KUTASARI
x.xx.01.2.03.28				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	34.370.000		SMPN 2 KUTASARI
1.01.02.2.02.32				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		611	siswa	674.300.000	BOS	SMPN 2 KUTASARI
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		11	ASN	1.288.992.000		SMPN 2 MREBET
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	6.500.000		SMPN 2 MREBET
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	509.000		SMPN 2 MREBET
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12	bulan	8.000.000		SMPN 2 MREBET
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	10.434.500		SMPN 2 MREBET
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.018.000		SMPN 2 MREBET
x.xx.01.2.03.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	398.500		SMPN 2 MREBET
x.xx.01.2.03.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	31.728.500		SMPN 2 MREBET
x.xx.01.2.03.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1.527.000		SMPN 2 MREBET
x.xx.01.2.03.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	3.563.000		SMPN 2 MREBET
x.xx.01.2.03.25				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	3.921.500		SMPN 2 MREBET
x.xx.01.2.03.28				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	2.400.000		SMPN 2 MREBET

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.01.02.2.02.32				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		548	siswa	613.800.000	BOS	SMPN 2 MREBET
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		21	ASN	2.020.305.000		SMPN 2 PADAMARA
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	5.200.000		SMPN 2 PADAMARA
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	1.040.000		SMPN 2 PADAMARA
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	17.000.000		SMPN 2 PADAMARA
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	21.332.000		SMPN 2 PADAMARA
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	2.081.000		SMPN 2 PADAMARA
x.xx.01.2.03.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	169.000		SMPN 2 PADAMARA
x.xx.01.2.03.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	7.600.000		SMPN 2 PADAMARA
x.xx.01.2.03.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	3.124.000		SMPN 2 PADAMARA
x.xx.01.2.03.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	7.284.000		SMPN 2 PADAMARA
x.xx.01.2.03.25				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	2.400.000		SMPN 2 PADAMARA
x.xx.01.2.03.28				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	2.770.000		SMPN 2 PADAMARA
1.01.02.2.02.32				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		528	siswa	585.200.000	BOS	SMPN 2 PADAMARA
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		8	ASN	830.947.000		SMPN 2 PENGADegan
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	6.000.000		SMPN 2 PENGADegan
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	850.000		SMPN 2 PENGADegan
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	13.000.000		SMPN 2 PENGADegan
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	17.425.000		SMPN 2 PENGADegan
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.700.000		SMPN 2 PENGADegan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	1.025.000		SMPN 2 PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	17.800.000		SMPN 2 PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.550.000		SMPN 2 PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	5.950.000		SMPN 2 PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	2.200.000		SMPN 2 PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pencatatan, dll)			unit	1.500.000		SMPN 2 PENGADEGAN
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		363	siswa	398.200.000	BOS	SMPN 2 PENGADEGAN
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		34	ASN	3.006.634.500		SMPN 2 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	556.000		SMPN 2 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	9.000.000		SMPN 2 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	11.398.000		SMPN 2 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.112.000		SMPN 2 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	174.000		SMPN 2 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	37.558.000		SMPN 2 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1.668.000		SMPN 2 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	3.892.000		SMPN 2 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	4.642.000		SMPN 2 PURBALINGGA
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		757	siswa	833.800.000	BOS	SMPN 2 PURBALINGGA
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		16	ASN	1.450.865.000		SMPN 2 REMBANG
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	5.760.000		SMPN 2 REMBANG
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	906.000		SMPN 2 REMBANG
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	14.000.000		SMPN 2 REMBANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	18.589.000		SMPN 2 REMBANG
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.813.000		SMPN 2 REMBANG
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	965.000		SMPN 2 REMBANG
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	16.821.000		SMPN 2 REMBANG
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.720.000		SMPN 2 REMBANG
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	6.347.000		SMPN 2 REMBANG
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	2.079.000		SMPN 2 REMBANG
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		598	siswa	662.200.000	BOS	SMPN 2 REMBANG
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		11	ASN	1.259.303.500		SMPN 3 BOBOTSARI
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	7.000.000		SMPN 3 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	755.000		SMPN 3 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	12.000.000		SMPN 3 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	15.486.000		SMPN 3 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.510.000		SMPN 3 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	467.000		SMPN 3 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	15.486.000		SMPN 3 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.266.000		SMPN 3 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	5.288.000		SMPN 3 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	1.914.000		SMPN 3 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	7.828.000		SMPN 3 BOBOTSARI
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		455	siswa	504.900.000	BOS	SMPN 3 BOBOTSARI
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		21	ASN	2.117.684.000		SMPN 3 BUKATEJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	7.500.000		SMPN 3 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	680.000		SMPN 3 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12	bulan	11.000.000		SMPN 3 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	13.940.000		SMPN 3 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.360.000		SMPN 3 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	220.000		SMPN 3 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	25.365.000		SMPN 3 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.040.000		SMPN 3 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	4.760.000		SMPN 3 BUKATEJA
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	3.135.000		SMPN 3 BUKATEJA
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		625	siswa	694.100.000	BOS	SMPN 3 BUKATEJA
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		21	ASN	2.000.101.000		SMPN 3 KALIMANAH
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	2.475.000		SMPN 3 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	1.350.000		SMPN 3 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12	bulan	22.000.000		SMPN 3 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	27.685.000		SMPN 3 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	2.701.000		SMPN 3 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	284.000		SMPN 3 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	4.052.000		SMPN 3 KALIMANAH
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	9.453.000		SMPN 3 KALIMANAH
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		361	siswa	394.900.000	BOS	SMPN 3 KALIMANAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		7	ASN	623.432.000		SMPN 3 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	6.000.000		SMPN 3 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	890.000		SMPN 3 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	14.000.000		SMPN 3 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	18.245.000		SMPN 3 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.780.000		SMPN 3 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	685.000		SMPN 3 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	8.010.000		SMPN 3 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.670.000		SMPN 3 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	6.230.000		SMPN 3 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	990.000		SMPN 3 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	10.500.000		SMPN 3 KARANGMONCOL
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		142	siswa	155.100.000	BOS	SMPN 3 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		10	ASN	821.854.500		SMPN 3 KARANGREJA
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	8.500.000		SMPN 3 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	649.000		SMPN 3 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	10.000.000		SMPN 3 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	13.311.000		SMPN 3 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.298.000		SMPN 3 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	716.000		SMPN 3 KARANGREJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	25.840.000		SMPN 3 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1.947.000		SMPN 3 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	4.545.000		SMPN 3 KARANGREJA
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	3.194.000		SMPN 3 KARANGREJA
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		408	siswa	455.400.000	BOS	SMPN 3 KARANGREJA
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		12	ASN	1.282.362.000		SMPN 3 KEMANGKON
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	5.750.000		SMPN 3 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	875.000		SMPN 3 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	14.000.000		SMPN 3 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	17.937.000		SMPN 3 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.750.000		SMPN 3 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	438.000		SMPN 3 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	18.245.000		SMPN 3 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.625.000		SMPN 3 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	6.125.000		SMPN 3 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	2.255.000		SMPN 3 KEMANGKON
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		248	siswa	275.000.000	BOS	SMPN 3 KEMANGKON
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		10	ASN	985.910.000		SMPN 3 KUTASARI
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	3.000.000		SMPN 3 KUTASARI
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	957.200		SMPN 3 KUTASARI
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	15.000.000		SMPN 3 KUTASARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	19.622.600		SMPN 3 KUTASARI
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.914.400		SMPN 3 KUTASARI
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	793.800		SMPN 3 KUTASARI
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	13.172.000		SMPN 3 KUTASARI
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.871.600		SMPN 3 KUTASARI
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	6.700.400		SMPN 3 KUTASARI
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	1.628.000		SMPN 3 KUTASARI
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pencatatan, dll)			unit	4.340.000		SMPN 3 KUTASARI
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		308	siswa	343.200.000	BOS	SMPN 3 KUTASARI
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		15	ASN	1.458.066.000		SMPN 3 MREBET
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	4.000.000		SMPN 3 MREBET
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	742.000		SMPN 3 MREBET
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	12.000.000		SMPN 3 MREBET
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	15.211.000		SMPN 3 MREBET
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.484.000		SMPN 3 MREBET
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	243.000		SMPN 3 MREBET
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	25.721.000		SMPN 3 MREBET
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.226.000		SMPN 3 MREBET
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	5.194.000		SMPN 3 MREBET
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	3.179.000		SMPN 3 MREBET
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		343	siswa	371.800.000	BOS	SMPN 3 MREBET
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		7	ASN	691.455.500		SMPN 3 PENGADegan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	6.600.000		SMPN 3 PENGADegan
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	813.000		SMPN 3 PENGADegan
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	13.000.000		SMPN 3 PENGADegan
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	16.667.000		SMPN 3 PENGADegan
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.626.000		SMPN 3 PENGADegan
x.xx.01.2.03.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	414.000		SMPN 3 PENGADegan
x.xx.01.2.03.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	17.132.000		SMPN 3 PENGADegan
x.xx.01.2.03.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.439.000		SMPN 3 PENGADegan
x.xx.01.2.03.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	5.691.000		SMPN 3 PENGADegan
x.xx.01.2.03.25				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	2.118.000		SMPN 3 PENGADegan
x.xx.01.2.03.28				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	3.500.000		SMPN 3 PENGADegan
1.01.02.2.02.32				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		254	siswa	280.500.000	BOS	SMPN 3 PENGADegan
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		29	ASN	2.862.467.000		SMPN 3 PURBALINGGA
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	850.000		SMPN 3 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	1.113.000		SMPN 3 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	18.000.000		SMPN 3 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	22.816.500		SMPN 3 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	2.226.000		SMPN 3 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	364.500		SMPN 3 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	10.000.000		SMPN 3 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	3.339.000		SMPN 3 PURBALINGGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	7.791.000		SMPN 3 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.25				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	3.500.000		SMPN 3 PURBALINGGA
1.01.02.2.02.32				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		765	siswa	842.600.000	BOS	SMPN 3 PURBALINGGA
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		8	ASN	857.958.500		SMPN 4 BOBOTSARI
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	3.000.000		SMPN 4 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	736.000		SMPN 4 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	12.000.000		SMPN 4 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	15.104.000		SMPN 4 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.473.000		SMPN 4 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	157.000		SMPN 4 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	19.170.600		SMPN 4 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.210.000		SMPN 4 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	5.160.000		SMPN 4 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.25				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	2.369.400		SMPN 4 BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.28				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	8.620.000		SMPN 4 BOBOTSARI
1.01.02.2.02.32				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		275	siswa	303.600.000	BOS	SMPN 4 BOBOTSARI
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		1	ASN	364.918.000		SMPN 4 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	12.400.000		SMPN 4 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	782.000		SMPN 4 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	12.000.000		SMPN 4 KARANGMONCOL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	16.024.000		SMPN 4 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.563.000		SMPN 4 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	898.000		SMPN 4 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	14.885.000		SMPN 4 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.345.000		SMPN 4 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	5.473.000		SMPN 4 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	1.840.000		SMPN 4 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	1.790.000		SMPN 4 KARANGMONCOL
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		250	siswa	280.500.000	BOS	SMPN 4 KARANGMONCOL
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		7	ASN	670.936.500		SMPN 4 KEMANGKON
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	3.360.000		SMPN 4 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	627.000		SMPN 4 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	10.000.000		SMPN 4 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	12.787.000		SMPN 4 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.247.000		SMPN 4 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	292.000		SMPN 4 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	31.550.500		SMPN 4 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1.871.000		SMPN 4 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	4.366.000		SMPN 4 KEMANGKON
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	3.899.500		SMPN 4 KEMANGKON
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		264	siswa	291.500.000	BOS	SMPN 4 KEMANGKON
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		14	ASN	1.076.725.000		SMPN 4 KUTASARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	1.141.000		SMPN 4 KUTASARI
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	18.000.000		SMPN 4 KUTASARI
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	23.390.000		SMPN 4 KUTASARI
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	2.282.000		SMPN 4 KUTASARI
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	827.000		SMPN 4 KUTASARI
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	11.465.000		SMPN 4 KUTASARI
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	3.423.000		SMPN 4 KUTASARI
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	7.987.000		SMPN 4 KUTASARI
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	1.485.000		SMPN 4 KUTASARI
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		505	siswa	556.600.000	BOS	SMPN 4 KUTASARI
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		8	ASN	721.335.000		SMPN 4 MREBET
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	8.400.000		SMPN 4 MREBET
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	792.000		SMPN 4 MREBET
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	12.000.000		SMPN 4 MREBET
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	16.236.000		SMPN 4 MREBET
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.584.000		SMPN 4 MREBET
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	1.068.000		SMPN 4 MREBET
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	18.245.000		SMPN 4 MREBET
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.376.000		SMPN 4 MREBET
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	5.544.000		SMPN 4 MREBET
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	2.255.000		SMPN 4 MREBET
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	1.500.000		SMPN 4 MREBET

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		315	siswa	352.000.000	BOS	SMPN 4 MREBET
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		30	ASN	3.129.701.500		SMPN 4 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	400.000		SMPN 4 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12	bulan	6.000.000		SMPN 4 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	8.216.000		SMPN 4 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	802.000		SMPN 4 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	614.000		SMPN 4 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	31.613.000		SMPN 4 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1.203.000		SMPN 4 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	2.805.000		SMPN 4 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	3.907.000		SMPN 4 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	14.440.000		SMPN 4 PURBALINGGA
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		629	siswa	700.700.000	BOS	SMPN 4 PURBALINGGA
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		2	ASN	255.218.000		SMPN 4 REMBANG
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (> 8 jam)			orang kali (OK)	6.000.000		SMPN 4 REMBANG
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	1.007.000		SMPN 4 REMBANG
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12	bulan	16.000.000		SMPN 4 REMBANG
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	20.644.000		SMPN 4 REMBANG
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	2.014.000		SMPN 4 REMBANG
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	617.000		SMPN 4 REMBANG
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	3.000.000		SMPN 4 REMBANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	3.021.000		SMPN 4 REMBANG
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	7.052.000		SMPN 4 REMBANG
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	10.645.000		SMPN 4 REMBANG
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		185	siswa	207.900.000	BOS	SMPN 4 REMBANG
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		11	ASN	807.305.000		SMPN 5 MREBET
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	3.500.000		SMPN 5 MREBET
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	1.106.000		SMPN 5 MREBET
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	18.000.000		SMPN 5 MREBET
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	22.673.000		SMPN 5 MREBET
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	2.212.000		SMPN 5 MREBET
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	249.000		SMPN 5 MREBET
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	9.968.000		SMPN 5 MREBET
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	3.318.000		SMPN 5 MREBET
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	7.742.000		SMPN 5 MREBET
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	1.232.000		SMPN 5 MREBET
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		379	siswa	425.700.000	BOS	SMPN 5 MREBET
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		27	ASN	2.725.793.500		SMPN 5 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	600.000		SMPN 5 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	9.000.000		SMPN 5 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	12.300.000		SMPN 5 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.200.000		SMPN 5 PURBALINGGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	900.000		SMPN 5 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	35.600.000		SMPN 5 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1.800.000		SMPN 5 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	4.200.000		SMPN 5 PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	4.400.000		SMPN 5 PURBALINGGA
1.01.02.2.02.32					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Personel		719	siswa	796.400.000	BOS	SMPN 5 PURBALINGGA
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	4.800.000		TK NEGERI PEMBINA BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12	bulan	5.700.000		TK NEGERI PEMBINA BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	10.800.000		TK NEGERI PEMBINA BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	9.405.000		TK NEGERI PEMBINA BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	32.500.000		TK NEGERI PEMBINA BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	6.795.000		TK NEGERI PEMBINA BOBOTSARI
1.01.02.2.03.13					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah siswa yang mengikuti proses belajar PAUD			siswa	54.000.000	DAK Non Fisik	TK NEGERI PEMBINA BOBOTSARI
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	4.500.000		TK NEGERI PEMBINA BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	420.000		TK NEGERI PEMBINA BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12	bulan	6.600.000		TK NEGERI PEMBINA BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	10.800.000		TK NEGERI PEMBINA BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.904.000		TK NEGERI PEMBINA BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	3.375.000		TK NEGERI PEMBINA BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	816.000		TK NEGERI PEMBINA BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	19.750.000		TK NEGERI PEMBINA BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	1.980.000		TK NEGERI PEMBINA BOJONGSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	13.600.000		TK NEGERI PEMBINA BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	6.255.000		TK NEGERI PEMBINA BOJONGSARI
1.01.02.2.03.13					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah siswa yang mengikuti proses belajar PAUD			siswa	56.400.000	DAK Non Fisik	TK NEGERI PEMBINA BOJONGSARI
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	4.200.000		TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	420.000		TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12	bulan	5.040.000		TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	9.900.000		TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	2.234.000		TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	501.000		TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	630.000		TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	7.992.000		TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	1.620.000		TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	18.800.000		TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	18.663.000		TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA
1.01.02.2.03.13					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah siswa yang mengikuti proses belajar PAUD			siswa	51.000.000	DAK Non Fisik	TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	450.000		TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12	bulan	9.600.000		TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	9.900.000		TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.974.000		TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	651.000		TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	945.000		TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	20.800.000		TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	10.500.000		TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	7.150.000		TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	5.480.000		TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA
x.xx.01.2.04.02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas (PDH, PDU, PDL, olahraga, dll)			stel	2.550.000		TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA
1.01.02.2.03.13					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah siswa yang mengikuti proses belajar PAUD			siswa	85.200.000	DAK Non Fisik	TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA
1.02					1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					-		
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ~~- Persentase Kegiatan SKP~~	DINKES	- 100 - -	- persen - Poin - Poin	- - -		
x.xx.01.2.01					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	DINKES	- -	- persen - persen	- -		
x.xx.01.2.01.01					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	DINKES	2	Dokumen	5.000.000		DINKES
x.xx.01.2.01.05					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKJP, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	DINKES	6	Dokumen	5.000.000		DINKES
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	DINKES	12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	DINKES	100	Orang	9.899.473.000		DINKES
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah yang terfasilitasi	DINKES	540	Orang/hari	46.350.000		DINKES
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	DINKES	12	dokumen	5.000.000		DINKES
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	DINKES	12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangkai, materai, dan jasa pos/pengiriman	DINKES	200	dokumen	2.500.000		DINKES
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi	DINKES	12	bulan	181.560.000		DINKES
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DINKES	12	bulan	13.944.000		DINKES
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	DINKES	42	unit	27.250.000		DINKES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	DINKES	12	bulan	198.180.000		DINKES
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	DINKES	24	Orang/bulan	29.040.000		DINKES
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	DINKES	9	unit	11.350.000		DINKES
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DINKES	63	Jenis	29.348.000		DINKES
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	DINKES	1	paket	22.000.000		DINKES
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	DINKES	1	paket	1.675.000		DINKES
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DINKES	3	unit	10.000.000		DINKES
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DINKES	3	Jenis	-		DINKES
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	DINKES	2	Jenis	1.920.000		DINKES
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	DINKES	5	Jenis	215.600.000		DINKES
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	DINKES	12	bulan	45.340.000		DINKES
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	DINKES	1	paket	172.800.000		DINKES
x.xx.01.2.03.22					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (garasi, kamar mandi, partisi, tempat parkir, dll)	DINKES	2	jenis	41.000.000		DINKES
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)	DINKES	2	unit	31.582.000		DINKES
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	DINKES	42	unit	39.750.000		DINKES
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin	DINKES	-	- persen	-		
						- Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		-	- persen			
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	DINKES	6	kegiatan	-		DINKES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu		
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan					
1.02.02.			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		-Angka Kematian Ibu -Kasus kematian bayi -Angka Kematian Balita -Prevalensi balita gizi kurang -Cakupan bayi dengan BBLR -Cakupan kecamatan bebas rawan gizi -Cakupan desa/kelurahan dengan konsumsi beryodium baik -Cakupan pelayanan dasar kesehatan dasar masyarakat miskin -Cakupan pelayanan dasar kesehatan rujukan masyarakat miskin -Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan -Cakupan Universal Child Immunization (UCI) -Prevalensi Malaria -Case Notification Rate (CNR) TBC -Prevalensi HIV/AIDS -Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani -Angka penemuan kasus baru kusta -Accute Flacid Paralysis (AFP)		-64 -6.5 -7.6 -0.0085 -5 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -0 -143 -<0.5 -47 -<1/10000 -2 -20 -1 -100	-0/00.000 -0/.000 -0/.000 -persen -persen -persen -persen -persen -persen -persen -persen -0/0.000 -0/00.000 -persen -persen -<1/10.000 -0/00.000 0/00.000 -persen -persen	-		
1.02.02.2.01.				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untukUKM dan U	-Jumlah Puskesmas Perawatan - Jumlah Puskesmas Mampu Bersalin - Jumlah Puskesmas Poned - Jumlah RS Poned - Jumlah Puskesmas Terakreditasi		100 persen	-			
1.02.02.2.01.02				Pembangunan Puskesmas	Jumlah unit bangunan puskesmas yang dibangun		1 Unit	-	DAU	DINKES	
1.02.02.2.01.02				Pembangunan Puskesmas	Jumlah unit bangunan puskesmas yang dibangun		1 Unit	4.864.610.000	DAK Fisik Pelayanan Kesehatan Dasar	DINKES	
1.02.02.2.01.06				Pengembangan Puskesmas	Jumlah unit bangunan puskesmas yang dibangun		1 Unit	-	DAU	DINKES	
1.02.02.2.01.12				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah dan Spesifikasi sarana pelayanan kesehatan		22 set	-	DAK Penugasan PP	DINKES	
1.02.02.2.01.13				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah dan Spesifikasi prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dibeli (Posbindu Kit)		3 unit ambulance	825.000.000		DINKES	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.02.02.2.01.14					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah dan Spesifikasi Alkes yang dibeli		6	unit	240.555.000	DBH-CHT	DINKES
1.02.02.2.01.14					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis Alkes yang dibeli		109	unit	879.999.000	DAK Penugasan Stunting	DINKES
1.02.02.2.01.16					Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat,vaksin yang dibeli		1	paket	1.000.000.000	DAK Fisik Reguler Pelayanan Kesehatan Farmasi	DINKES
1.02.02.2.01.16					Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat,vaksin yang dibeli		1	paket	907.647.793	DAU	DINKES
1.02.02.2.01.16					Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat,vaksin yang dibeli		1	paket	1.443.286.500	DID	DINKES
1.02.02.2.01.16					Pengadaan Obat, Vaksin					474.570.000	DBH-CHT	DINKES
1.02.02.2.01.17					Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis barang habis pakai yang dibeli		1	paket	372.723.000	DAK Fisik Reguler Pelayanan Kesehatan Farmasi	DINKES
1.02.02.2.01.17					Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis barang habis pakai yang dibeli		5	Jenis	2.503.422.000	DAK Penugasan STBM	DINKES
1.02.02.2.01.17					Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis barang habis pakai yang dibeli		1	paket	831.850.000	DID	DINKES
1.02.02.2.02.					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Cakupan ibu hamil		100	persen	-		
1.02.02.2.02.01					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar		16214	orang	120.000.000	DAU	DINKES
1.02.02.2.02.02					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar		14604	orang	70.388.000	DAK Non Fisik BOK Dukungan Manajemen	DINKES
1.02.02.2.02.02					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar		14604	orang	2.490.584.000	DAK Non Fisik Jampersal	DINKES
1.02.02.2.02.03					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar		14589	bayi	165.722.000	DAK Non Fisik	DINKES
1.02.02.2.02.04					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar		58681	balita	164.611.000	DAK Non Fisik	DINKES
1.02.02.2.02.05					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang dilayani kesehatan		141976	anak	234.114.000	DAK Non Fisik	DINKES
1.02.02.2.02.05					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang dilayani kesehatan		141976	anak	157.140.000	DID	DINKES
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang dilayani kesehatan		604136	orang	258.000.000	DAK Non Fisik	DINKES
1.02.02.2.02.06					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang dilayani kesehatan		604136	orang	37.617.500	DID	DINKES
1.02.02.2.02.07					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang dilayani kesehatan		114718	orang	17.600.000	DAK Non Fisik	DINKES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.02.02.2.02.08					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan PenderitaHipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan		268926	orang	27.200.000	DAU	DINKES
1.02.02.2.02.08					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan PenderitaHipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan		268926	orang	17.600.000	DAK Non Fisik	DINKES
1.02.02.2.02.09					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan PenderitaDiabetes	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan		12560	orang	17.600.000	DAK Non Fisik	DINKES
1.02.02.2.02.10					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Jumlah penderita ODGJB yang mendapatkan pelayanan kesehatan		2471	orang	35.200.000	DAK Non Fisik	DINKES
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan		10206	orang	360.044.000	DAK Non Fisik	DINKES
1.02.02.2.02.11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan		10206	orang	240.035.200	DID	DINKES
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan		17207	orang	-	DAK Non Fisik	DINKES
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan		17207	orang	254.794.000	DID	DINKES
1.02.02.2.02.12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah penderita AIDS yang ditangani kesehatannya		17207	orang	200.000.000	DAU	DINKES
1.02.02.2.02.13					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah kejadian/kondisi kegawatdaruratan/KLB yang ditangani		100	kegiatan	271.837.000	DAU	DINKES
1.02.02.2.02.15					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita gizi kurang, Prevalensi bayi dengan BBLR		70000	bayi/balita	600.480.800	DID	DINKES
1.02.02.2.02.15					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase kecamatan bebas rawan gizi		18	kecamatan	43.254.000	DAU	DINKES
1.02.02.2.02.15					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat yang terselenggara/ prevalensi stunting		22 / 239	puskesmas / desa	750.000.000	DAK Non Fisik	DINKES
1.02.02.2.02.16					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase pelayanan kesehatan kerja		14	UKK	74.667.000	DAU	DINKES
1.02.02.2.02.17					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah keluarga memiliki jamban sehat		1690	Keluarga	480.000.000	DAU	DINKES
1.02.02.2.02.17					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan kepemilikan Jamban Keluarga ODF		1690	Keluarga	814.970.000	DID	DINKES
1.02.02.2.02.19					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	Jumlah yankestrad bermutu dan berkesinambungan		22	Puskesmas	6.768.000	DID	DINKES
1.02.02.2.02.20					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan surveilans kesehatan yang terselenggara		750 jamaah haji, 239 desa, 22 puskesmas		182.778.250	DAU	DINKES
1.02.02.2.02.21					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah	Jumlah pelayanan kesehatan ODMK di fasyankes dan sekolah		22	Puskesmas	29.602.750	DAU	DINKES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.02.02.2.02.23					Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah pelayanan kesehatan indera di fasyankes sesuai standar	22	Puskesmas	68.000.000	DAU	DINKES
1.02.02.2.02.23					Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Pasien thalasemia yang memperoleh pelayanan kesehatan			162.000.000	DAU	DINKES
1.02.02.2.02.25					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Pelayanan	22	puskesmas	67.040.000	DAK Non Fisik	DINKES
1.02.02.2.02.25					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Pelayanan	22	puskesmas	80.058.000	DID	DINKES
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk yang tercover jaminan kesehatan	89955 Jiwa KPS 49000 Jiwa JKN 2145 Jiwa SKTM	Jiwa	14.892.000.000	Pajak Rokok	DINKES
1.02.02.2.02.32					Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan secara terintegrasi	6	RS	10.000.000	DAU	DINKES
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan sesuai standar	22	Puskesmas	60.776.000	DAK Non Fisik	DINKES
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan sesuai standar	22	Puskesmas	19.040.000	DAU	DINKES
1.02.02.2.02.34					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Klinik dan Labkes yang melaksanakan pelayanan sesuai standar	12	Pelayanan	10.000.000		DINKES
1.02.02.2.02.34					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Klinik dan Labkes yang melaksanakan pelayanan sesuai standar	12	Pelayanan	250.000.000		DINKES
1.02.02.2.02.35					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang ter akreditasi	11	Puskesmas	1.221.440.000	DAK Non Fisik	DINKES
1.02.02.2.03.					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi			-		
1.02.02.2.03.01					Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah data dan informasi kesehatan yang tersedia	1	paket	41.000.000		DINKES
1.02.02.2.03.02					Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Sistem informasi kesehatan dapat diakses dan dimanfaatkan dengan baik	2	SIM	84.000.000		DINKES
1.02.02.2.03.03					Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang dibeli	1	paket	-		DINKES
1.02.02.2.04.					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-		
1.02.02.2.04.01					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah RS kelas C dan D yang diawasi dan dikendalikan	6	RS	5.155.000		DINKES
1.02.02.2.04.02					Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasyankes dengan peningkatan tata kelola yang baik	30	Fasyankes	5.665.000		DINKES
1.02.02.2.04.03					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasyankes dengan pelayanan kesehatan yang bermutu	30	Fasyankes	6.040.000		DINKES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu		
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target				Satuan	
1.02.03.			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	-Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi -Cakupan pelatihan tenaga kesehatan -Rasio dokter umum per jumlah penduduk -Rasio dokter spesialis per jumlah penduduk -Rasio tenaga paramedis per jumlah penduduk -Rasio bidan per jumlah penduduk		-100 -100 -40 -6 -118 -77	-persen -persen -persen -persen -persen -persen	-		
1.02.03.2.01.			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin praktek tenaga kesehatan			rekomendasi	-		
1.02.03.2.01.01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan izin praktik		96	Nakes	5.000.000		DINKES
1.02.03.2.02.			Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan tenaga kesehatan yang dibina		100	persen	-		
1.02.03.2.02.01			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan terbina		200	Nakes	21.450.000	DBH-CHT	DINKES
1.02.03.2.02.02			Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Terlatih,Jumlah Tenaga Kesehatan teruji kompetensinya		50	Nakes	20.000.000		DINKES
1.02.03.2.02.03			Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan terlatih		100	Nakes	150.490.000	DBH-CHT	DINKES
1.02.03.2.04.			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki sertifikasi tenaga kesehatan		100	persen	-		
1.02.03.2.04.01			Peningkatan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan yang meningkat		15	Nakes	-	DBH-CHT	DINKES
1.02.03.2.04.02			Sertifikasi Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan tersertifikasi		96	Nakes	4.000.000		DINKES
1.02.03.2.05.			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah	Persentase SDM kesehatan yang terbina dan terawasi		100	persen	-		
1.02.03.2.05.02			Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen/profil SDMk dan renbut SDMk tingkat Kab yang disusun dan dibukukan		2	dokumen	31.185.000	DBH-CHT	DINKES
1.02.04.			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	-Persentase sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar -Persentase ketersediaan obat generik dan esensial sesuai standar dan kebutuhan -Cakupan pengawasan peredaran obat -Cakupan pemeriksaan makanan dan minuman yang diperdagangkan		-100 -95 -100 -100	-persen -persen -persen -persen	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.02.04.2.01.				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah rekomendasi Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan				rekomendasi	-		
1.02.04.2.01.01				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotik, toko obat, toko alkes dan UMOT yang berizin serta menjaga mutu pelayanan.			28	Lokasi	37.115.000	DAK Non Fisik	DINKES
1.02.04.2.01.02				Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah data Apotik, Toko Obat, Toko Alkes dan UMOT yang berizin			28	Lokasi	27.000.000	DAK Non Fisik	DINKES
1.02.04.2.01.03				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah data Apotik, Toko Obat, Toko Alkes dan UMOT yang berizin			28	Lokasi	27.000.000	DAK Non Fisik	DINKES
1.02.04.2.03.				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin	Persentase sertifikat PIRT yang dikeluarkan			100	persen	-		
1.02.04.2.03.01				Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT ber SPP-IRT yang menjaga mutu dan standar kesehatan			128	sertifikat	42.000.000	DAK Non Fisik	DINKES
1.02.04.2.04.				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang dikeluarkan			100	persen	-		
1.02.04.2.04.01				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah PIRT ber sertifikat laik higiene sanitasi yang menjaga mutu dan standar kesehatan			-50 -60	-TPM -Depot air minum	67.000.000	DAK Non Fisik	DINKES
1.02.04.2.05.				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Cakupan stiker yang diterbitkan			100	persen	-		
1.02.04.2.05.01				Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Stiker Pembinaan yang dicetak			128	stiker	500.000	DAK Non Fisik	DINKES
1.02.04.2.06.				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan pemeriksaan post market pada produk makanan dan minuman yang sudah bersertifikat			100	persen	-		
1.02.04.2.06.01				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah pemeriksaan post market yang dilakukan untuk produk makanan dan minuman			128	PIRT	47.000.000	DAK Non Fisik	DINKES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu		
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan					
1.02.05.			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		-Cakupan Desa Siaga Aktif -Cakupan kepemilikan jamban keluarga -Cakupan akses jamban keluarga -Cakupan desa memenuhi syarat kesehatan lingkungan -Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan -Cakupan desa Open Defecation Free (ODF) -Cakupan per rumah tangga ber PHBS -Cakupan Posyandu Mandiri -Cakupan kepesertaan KB aktif -Cakupan rumah sehat -Cakupan desa/kelurahan melakukan STBM -Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal -Proporsi Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM)		-100 -90 -100 -100 -100 -100 -93 -100 -95 -87 -100 -100 -85	-persen -persen -persen -persen -persen -persen -persen -persen -persen -persen -persen -persen -persen	-		
1.02.05.2.01.				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase masyarakat dan organisasi masyarakat yang mendapatkan penyuluhan melalui media promosi		100	persen	-		
1.02.05.2.01.01				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyuluhan melalui media elektronik, media cetak dan luar ruangan; Jumlah Penyuluhan terhadap kelompok/ormas,		152	penyuluhan	120.000.000	DID	DINKES
1.02.05.2.02.				Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat	Cakupan RT yang ber PHBS		80	persen	-		
1.02.05.2.02.01				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah RT ber PHBS		45.668	rumah tangga	166.159.000	DID	DINKES
1.02.05.2.03.				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Cakupan desa sehat mandiri		25	persen	-		
1.02.05.2.03.01				Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Desa Sehat mandiri		45	desa	164.800.000	DID	DINKES
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	Goeteng	421	Orang	26.297.217.000	DAU	RSUD GOETHENG T
1.02.02.2.01.14				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis Alkes yang dibeli		26	Jenis	10.954.982.000	DAK	RSUD GOETHENG T
1.02.02.2.02.26				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)				2.500.000.000	Pajak Rokok	RSUD GOETHENG T
1.02.02.2.02.32				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Pelayanan Rujukan sesuai standar				83.000.000.000	BLUD	RSUD GOETHENG T
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	PN	27	Orang	3.060.489.000	DAU	RS PANTI NUGROHO
1.02.02.2.01.14				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis Alkes yang dibeli			Jenis	8.645.292.000	DAK	RS PANTI NUGROHO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)				500.000.000	DBH-CHT	RS PANTI NUGROHO
1.02.02.2.02.32					Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Pelayanan Rujukan sesuai standar				25.031.040.000	BLUD	RS PANTI NUGROHO
1.02.02.2.02.34					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Klinik dan Labkes yang melaksanakan pelayanan sesuai standar		12	Pelayanan	756.000.000	BLUD	UPTD LABKES
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		40	Orang	2.376.602.000		UPTD PUSKESMAS BOBOTSARI
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		5208	Jiwa	24.790.000	DAU	UPTD PUSKESMAS BOBOTSARI
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	3.730.000.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS BOBOTSARI
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS BOBOTSARI
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	761.458.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS BOBOTSARI
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		25	Orang	1.507.532.000		UPTD PUSKESMAS BOJONG
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		404	Jiwa	9.760.000	DAU	UPTD PUSKESMAS BOJONG
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	400.000.000	DAU	UPTD PUSKESMAS BOJONG
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	879.100.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS BOJONG
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS BOJONG
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	506.844.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS BOJONG
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		35	Orang	2.066.300.000		UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		2305	Jiwa	22.242.000	DAU	UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	3.180.000.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	775.600.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		31	Orang	1.888.521.000		UPTD PUSKESMAS BUKATEJA
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		3902	Jiwa	11.114.000	DAU	UPTD PUSKESMAS BUKATEJA
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	2.814.600.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS BUKATEJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS BUKATEJA
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	597.240.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS BUKATEJA
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		33	Orang	1.986.002.000		UPTD PUSKESMAS KALIGONDANG
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		10839	Jiwa	17.196.000	DAU	UPTD PUSKESMAS KALIGONDANG
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	150.000.000	DAU	UPTD PUSKESMAS KALIGONDANG
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	2.192.765.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS KALIGONDANG
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS KALIGONDANG
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	613.549.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS KALIGONDANG
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		25	Orang	1.598.598.000		UPTD PUSKESMAS KALIKAJAR
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		1520	Jiwa	10.800.000	DAU	UPTD PUSKESMAS KALIKAJAR
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	400.000.000	DAU	UPTD PUSKESMAS KALIKAJAR
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	1.152.000.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS KALIKAJAR
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS KALIKAJAR
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	510.160.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS KALIKAJAR
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		36	Orang	2.055.824.000		UPTD PUSKESMAS KALIMANAH
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		6906	Jiwa	39.324.000	DAU	UPTD PUSKESMAS KALIMANAH
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	300.000.000	DAU	UPTD PUSKESMAS KALIMANAH
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	2.371.184.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS KALIMANAH
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS KALIMANAH
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	738.570.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS KALIMANAH
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		32	Orang	1.848.136.000		UPTD PUSKESMAS KARANGANYAR
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		3936	Jiwa	29.496.000	DAU	UPTD PUSKESMAS KARANGANYAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	50.000.000	DAU	UPTD PUSKESMAS KARANGANYAR
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	3.128.796.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS KARANGANYAR
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS KARANGANYAR
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	704.057.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS KARANGANYAR
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		19	Orang	1.114.145.000		UPTD PUSKESMAS KARANGJAMBU
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		1199	Jiwa	38.596.000	DAU	UPTD PUSKESMAS KARANGJAMBU
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	270.000.000	DAU	UPTD PUSKESMAS KARANGJAMBU
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	1.551.700.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS KARANGJAMBU
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS KARANGJAMBU
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	527.550.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS KARANGJAMBU
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		38	Orang	2.305.630.000		UPTD PUSKESMAS KARANGMONCOL
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		8008	Jiwa	24.790.000	DAU	UPTD PUSKESMAS KARANGMONCOL
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	3.480.000.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS KARANGMONCOL
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS KARANGMONCOL
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		13	Pelayanan	715.160.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS KARANGMONCOL
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		26	Orang	1.548.180.000		UPTD PUSKESMAS KARANGREJA
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		2711	Jiwa	27.260.000	DAU	UPTD PUSKESMAS KARANGREJA
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	3.900.400.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS KARANGREJA
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS KARANGREJA
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	622.350.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS KARANGREJA
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		37	Orang	2.148.200.000		UPTD PUSKESMAS KARANGTENGAH
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		1635	Jiwa	15.378.000	DAU	UPTD PUSKESMAS KARANGTENGAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	70.000.000	DAU	UPTD PUSKESMAS KARANGTENGAH
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	2.045.928.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS KARANGTENGAH
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS KARANGTENGAH
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	615.311.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS KARANGTENGAH
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		42	Orang	2.528.488.000		UPTD PUSKESMAS KEJOBONG
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		3393	Jiwa	23.696.000	DAU	UPTD PUSKESMAS KEJOBONG
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	3.353.435.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS KEJOBONG
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS KEJOBONG
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah penduduk yang tercover jaminan kesehatan		12	Pelayanan	721.414.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS KEJOBONG
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		41	Orang	2.537.962.000		UPTD PUSKESMAS KEMANGKON
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		5187	Jiwa	22.396.000	DAU	UPTD PUSKESMAS KEMANGKON
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	3.566.020.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS KEMANGKON
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS KEMANGKON
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	853.200.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS KEMANGKON
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		31	Orang	1.725.542.000		UPTD PUSKESMAS KUTASARI
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		1536	Jiwa	14.882.000	DAU	UPTD PUSKESMAS KUTASARI
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	3.679.540.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS KUTASARI
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS KUTASARI
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	806.220.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS KUTASARI
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		28	Orang	1.719.680.000		UPTD PUSKESMAS KUTAWIS
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		1647	Jiwa	20.810.000	DAU	UPTD PUSKESMAS KUTAWIS
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	100.000.000	DAU	UPTD PUSKESMAS KUTAWIS

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	1.872.225.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS KUTAWIS
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS KUTAWIS
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	492.150.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS KUTAWIS
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		28	Orang	1.743.917.000		UPTD PUSKESMAS MREBET
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		1764	Jiwa	11.346.000	DAU	UPTD PUSKESMAS MREBET
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	100.000.000	DAU	UPTD PUSKESMAS MREBET
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	2.306.550.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS MREBET
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS MREBET
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	642.917.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS MREBET
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		47	Orang	2.861.963.000		UPTD PUSKESMAS PADAMARA
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		2103	Jiwa	39.246.000	DAU	UPTD PUSKESMAS PADAMARA
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	200.000.000	DAU	UPTD PUSKESMAS PADAMARA
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	2.610.000.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS PADAMARA
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS PADAMARA
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		13	Pelayanan	724.197.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS PADAMARA
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		32	Orang	1.853.761.000		UPTD PUSKESMAS PENGADDEGAN
1.02.02.2.02.26					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		3021	Jiwa	33.628.000	DAU	UPTD PUSKESMAS PENGADDEGAN
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	100.000.000	DAU	UPTD PUSKESMAS PENGADDEGAN
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	2.484.000.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS PENGADDEGAN
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS PENGADDEGAN
1.02.02.2.02.33					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		13	Pelayanan	630.297.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS PENGADDEGAN
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		34	Orang	2.235.188.000		UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.02.02.2.02.26				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		2332	Jiwa	24.892.000	DAU	UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	200.000.000	DAU	UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	1.596.150.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	619.256.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		41	Orang	2.507.624.000		UPTD PUSKESMAS REMBANG
1.02.02.2.02.26				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		12412	Jiwa	98.592.000	DAU	UPTD PUSKESMAS REMBANG
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	3.049.673.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS REMBANG
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS REMBANG
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	794.500.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS REMBANG
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		33	Orang	1.893.425.000		UPTD PUSKESMAS SERAYULARANGAN
1.02.02.2.02.26				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan (KPS/SKTM)		4987	Jiwa	39.766.000	DAU	UPTD PUSKESMAS SERAYULARANGAN
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	200.000.000	DAU	UPTD PUSKESMAS SERAYULARANGAN
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	2.319.500.000	BLUD	UPTD PUSKESMAS SERAYULARANGAN
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN BLUD	UPTD PUSKESMAS SERAYULARANGAN
1.02.02.2.02.33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar		12	Pelayanan	679.759.000	DAK Non Fisik	UPTD PUSKESMAS SERAYULARANGAN
1.03				1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPUPR	- 100%	- persen			
							-	- poin			
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	DPUPR	- 100	- persen			
							- 100	- persen			
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	DPUPR	2	dokumen	13.765.000		DPUPR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.01.05					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKjP, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	DPUPR	20	dokumen	7.410.000		DPUPR
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	DPUPR	12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	DPUPR	85 ASN	ASN	8.890.107.333		DPUPR
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	DPUPR	396	Orang Kali (ok)	29.000.000		DPUPR
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	DPUPR	12	bulan	7.450.000		DPUPR
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	DPUPR	12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	DPUPR	12	bulan	2.055.000		DPUPR
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	DPUPR	12	bulan	136.200.000		DPUPR
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DPUPR	12	bulan	1.500.000		DPUPR
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	DPUPR	816	kendaraan/bulan	199.400.000		DPUPR
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	DPUPR	758	orang/bulan	390.000.000		DPUPR
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	DPUPR	36	orang/bulan	72.000.000		DPUPR
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	DPUPR	9	jenis	14.400.000		DPUPR
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPUPR	40	jenis	18.445.000		DPUPR
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	DPUPR	50.000	lembar	16.920.000		DPUPR
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	DPUPR	6	jenis unit/buah	4.602.000		DPUPR
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	DPUPR	36	eksemplar/bulan	2.340.000		DPUPR
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	DPUPR	12	bulan	281.074.000		DPUPR
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	DPUPR	950	orang kali (OK)	13.040.000		DPUPR
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	DPUPR	208	orang kali (OK)	79.250.000		DPUPR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.28				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (garasi, kamar mandi, partisi, tempat parkir, dll)	DPUPR		17	jenis unit/buah	26.822.000		DPUPR
x.xx.01.2.03.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	DPUPR		68	unit	127.285.000		DPUPR
x.xx.01.2.04				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	DPUPR		- 100 - 100	- persen - persen	-		
x.xx.01.2.04.09				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	DPUPR		4	orang kali	15.000.000		DPUPR
1.03.02.				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	-Persentase bangunan pengairan dalam kondisi baik -Cakupan air baku irigasi			-48.2 -91	-persen -persen	-		
1.03.02.2.01.				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase peningkatan penyediaan air baku irigasi			0,01	persen	-		
1.03.02.2.01.06				Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang dibangun			1	unit	-		DPUPR
1.03.02.2.02.				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-Jumlah jaringan irigasi yang dikembangkan -Jumlah bendung yang meningkat kualitasnya			- -1	- unit	-		
1.03.02.2.02.14				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhab			1350	meter	1.032.002.500	DAU	DPUPR
1.03.02.2.02.14				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhab			5875	meter	5.579.683.000	DAK	DPUPR
1.03.02.2.02.15				Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	bendung karang malang		1	unit	500.000.000		DPUPR
1.03.02.2.02.21				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara			4000	meter	2.050.000.000		DPUPR
1.03.02.2.02.27				Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang dikelola			255	unit	-		DPUPR
1.03.02.2.02.28				Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Perbup tentang Pola Tanam			1	dokumen	129.330.500		DPUPR
1.03.08.				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik			60	persen	-		
1.03.08.2.01.				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase peningkatan bangunan pemerintah dalam kondisi baik				persen	-		
1.03.08.2.01.01				Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Jumlah rekomendasi IMB yang diterbitkan			500	rekomendasi	133.747.500		DPUPR
1.03.08.2.01.02				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan/gedung pemerintah yang dibangun	Gedung DPRD, mess pemda, islamic		4	unit	13.400.000.000		DPUPR
1.03.08.2.01.03				Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi yang diundangkan			1	dokumen	90.000.000		DPUPR
1.03.09.				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase bangunan pemerintah dan lingkungannya dalam kondisi baik				persen	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.03.09.2.01.				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata			100	Persen	-		
1.03.09.2.01.03				Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata			3	unit	-		DPUPR
1.03.10.				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kondisi mantap			82,15	persen	-		
1.03.10.2.01.				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-Penambahan jumlah jalan dalam kondisi baik -Penambahan jalan dengan lebar 5.5 -Penambahan jumlah jembatan dalam kondisi baik			-82,15 -94,75 -25,5	-persen -persen -persen	-		
1.03.10.2.01.05				Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun			2000	meter	6.491.460.714	DAU	DPUPR
1.03.10.2.01.05				Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun				meter	-		DPUPR
1.03.10.2.01.06				Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang ditingkatkan				meter	5.969.415.000	DAU	DPUPR
1.03.10.2.01.06				Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang ditingkatkan				meter	16.889.545.000	DAK	DPUPR
1.03.10.2.01.06				Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang ditingkatkan				meter	-		DPUPR
1.03.10.2.01.08				Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi				meter	7.000.000.000		DPUPR
1.03.10.2.01.09				Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi			7500	meter	-	DAU	DPUPR
1.03.10.2.01.10				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara				meter	8.770.747.000	DAU	DPUPR
1.03.10.2.01.10				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara				meter	-		DPUPR
1.03.10.2.01.11				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara			100000	meter	10.691.003.000	DAU	DPUPR
1.03.10.2.01.12				Pembangunan Jembatan	Jumlah unit jembatan yang dibangun				unit	1.000.000.000	DAU	DPUPR
1.03.10.2.01.16				Penggantian Jembatan	Jumlah unit jembatan yang diganti				unit	-	DAU	DPUPR
1.03.10.2.01.19				Pemeliharaan Rutin Jembatan	jumlah Unit jembatan yang dipelihara				unit	841.494.000	DAU	DPUPR
1.03.11.				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase jasa konstruksi yang dibina			50	persen	-		
1.03.11.2.01.				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi			30	persen	-		
1.03.11.2.01.04				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga yang dilatih			360	orang	100.000.000	DAU	DPUPR
1.03.11.2.01.06				Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga yang mendapat sertifikat			360	orang	-	DAU	DPUPR
1.03.11.2.02.				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah updating Sistem Informasi Jasa Konstruksi			2	kali	-		
1.03.11.2.02.06				Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah data dan informasi badan usaha yang tersusun			2	dokumen	23.097.000		DPUPR
1.03.11.2.02.07				Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan yang tersusun			2	dokumen	20.522.000		DPUPR
1.03.11.2.03.				Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase rekomendasi teknis IUJK yang diterbitkan			50	persen	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.03.11.2.03.02				Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah rekomendasi teknis IUJK yang diterbitkan			180	rekomendasi	70.640.000		DPUPR
1.03.11.2.04.				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase jakon yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan			50	persen	-		
1.03.11.2.04.01				Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pedoman yang disusun			1	dokumen	-		DPUPR
1.03.11.2.04.02				Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta Bintek Peraturan/Kebijakan Pemerintah			180	orang	-		DPUPR
1.03.11.2.04.03				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Jakon yang diawasi			360	unit	-		DPUPR
1.03.12.				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tingkat kesesuaian tata ruang yang diterbitkan			100	persen	-		
1.03.12.2.01.				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang daerah			2	dokumen	-		
1.03.12.2.01.02				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang ditetapkan			2	dokumen	354.200.000		DPUPR
1.03.12.2.01.04				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah sosialisasi kebijakan dan peraturan penataan ruang			3	kali	130.640.000		DPUPR
1.03.12.2.03.				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan			100	persen	-		
1.03.12.2.03.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan			100	rekomendasi	120.000.000		DPUPR
1.03.03.				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan pelayanan air bersih (rumah tangga yang mengakses air bersih)			100	Persen	-		
1.03.03.2.01.				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga penerima manfaat			868	Rumah Tangga	-		
1.03.03.2.01.04				Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM di Kawasan Perdesaan yang dibangun			7	Lokasi	31.900.000	DAU	DINRUMKIM
1.03.03.2.01.04				Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM di Kawasan Perdesaan yang dibangun			8	Lokasi	2.500.000.000	DAU	DINRUMKIM
1.03.03.2.01.04				Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM di Kawasan Perdesaan yang dibangun			-27 -868	-Lokasi -SR	6.205.740.000	DAK	DINRUMKIM
1.03.05.				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan pelayanan sanitasi			100	Persen	-		
1.03.05.2.01.				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga penerima manfaat			160	Rumah Tangga	-		
1.03.05.2.01.03				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SPAL yang terbangun			-3 -110	-Lokasi -Unit	650.000.000	DAK	DINRUMKIM
1.03.05.2.01.03				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik						15.000.000	DAU	DINRUMKIM
1.03.04.				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Peningkatan sistem pengelolaan sampah			sanitary landfill	level	-		
1.03.04.2.01.				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan sistem pengelolaan sampah					-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.03.04.2.01.03					Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-Jumlah TPS yang dibangun -Jumlah TPA yang dibangun				6.000.000.000		DLH
1.03.04.2.01.06					Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan		-2 -2	-dump truck -amroll	-		DLH
1.04	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									-		
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinrumkim	- 100 - -	- persen - Poin	- -	Urusan Rumkim	
x.xx.01.2.01					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	Dinrumkim	- 100 - 100	- persen - persen	- -	Gaji dan Tamsil	
x.xx.01.2.01.01					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	Dinrumkim	2	-dokumen	11.638.000		DINRUMKIM
x.xx.01.2.01.05					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	Dinrumkim	6	-dokumen	3.727.000		DINRUMKIM
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	Dinrumkim	12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	Dinrumkim	26	ASN	2.996.792.850		DINRUMKIM
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	Dinrumkim	300	Orang Kali (ok)	9.600.000		DINRUMKIM
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	Dinrumkim	12	bulan	3.725.000		DINRUMKIM
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Dinrumkim	12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	Dinrumkim	12	bulan	1.125.000		DINRUMKIM
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi	Dinrumkim	12	bulan	25.923.000		DINRUMKIM
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinrumkim	12	bulan	1.300.000		DINRUMKIM
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	Dinrumkim	24	kendaraan/bulan	23.700.000		DINRUMKIM
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	Dinrumkim	408	orang/bulan	158.995.000		DINRUMKIM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	Dinrumkim	24	orang/bulan	28.800.000		DINRUMKIM
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	Dinrumkim	9	jenis	6.525.000		DINRUMKIM
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinrumkim	37	jenis	5.398.000		DINRUMKIM
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	Dinrumkim	9560	lembar	3.003.000		DINRUMKIM
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	Dinrumkim	5	jenis unit/buah	2.050.000		DINRUMKIM
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinrumkim	3	jenis unit/buah	-		DINRUMKIM
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	Dinrumkim	365	eksemplar/bulan	2.400.000		DINRUMKIM
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Dinrumkim	12	bulan	102.458.000		DINRUMKIM
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	Dinrumkim	1745	orang kali (OK)	16.500.000		DINRUMKIM
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	Dinrumkim	218	orang kali (OK)	65.000.000		DINRUMKIM
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)	Dinrumkim	1	unit	-		DINRUMKIM
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	Dinrumkim	24	unit	33.160.000		DINRUMKIM
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuan	Dinrumkim	- 0% - 3,84%	ASN ASN	-		
x.xx.01.2.04.03					Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	Dinrumkim	42	Stel	-		DINRUMKIM
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik	Dinrumkim	10	Pcs	-		DINRUMKIM
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	Dinrumkim	8	Orang kali	15.000.000		DINRUMKIM
1.04.02.					Program Pengembangan Perumahan	Cakupan kepemilikan rumah		80	persen	-		
1.04.02.2.01.					Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rekomendasi tingkat kerusakan rumah akibat bencana yang ditindaklanjuti		100	persen	-		
1.04.02.2.01.04					Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya data kerusakan rumah akibat bencana		1	Dokumen	7.200.000		DINRUMKIM
1.04.02.2.05.					Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau	Tingkat hunian		100	persen	-		
1.04.02.2.05.01					Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah rusun dan penghuni rusun yang difasilitasi		1, 50	Rusun, Rumah Tangga	53.375.000		DINRUMKIM
1.04.02.2.06.					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan	Jumlah izin yang diterbitkan		50	Izin	-		
1.04.02.2.06.03					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi teknis yang dikeluarkan dan dokumen update SK kawasan kumuh perkotaan		50	Rekomendasi	89.425.000		DINRUMKIM
1.04.03.					Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	- Cakupan Rumah Layak Huni - Cakupan kawasan permukiman kumuh perkotaan		-82.7 -0	-persen -persen	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.04.03.2.03.					Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penurunan jumlah rumah tidak layak huni		3,49	persen	-		
1.04.03.2.03.02					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah RTLH yang direhabilitasi		812	rumah	11.910.195.000	DAU	DINRUMKIM
1.04.03.2.03.02					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah RTLH yang direhabilitasi		131	rumah	2.279.375.000	DAK	DINRUMKIM
1.04.03.2.03.02					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh					330.687.000	DAU	DINRUMKIM
1.04.03.2.03.03					Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah kerjasama perbaikan RTLH		50	kerjasama	388.882.000	DAU	DINRUMKIM
1.04.04.					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU perumahan dalam kondisi baik		18	persen	-		
1.04.04.2.01.					Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang dipelihara		50	PSU	-		
1.04.04.2.01.01					Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan					9.125.000		DINRUMKIM
1.04.04.2.01.02					Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU yang dibangun		9	PSU	200.000.000		DINRUMKIM
1.04.04.2.01.03					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah aset yang diserahkan		15	Aset	16.000.000		DINRUMKIM
1.05					1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	SATPOL PP	- 100 -	- persen - Poin			
x.xx.01.2.01					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	SATPOL PP	- 100 - 100	- persen - persen			
x.xx.01.2.01.01					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	SATPOL PP	2	dokumen	6.873.000		SATPOL PP
x.xx.01.2.01.05					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKJP, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	SATPOL PP	2	dokumen	2.747.000		SATPOL PP
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	SATPOL PP	12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	SATPOL PP	52	ASN	5.666.715.000		SATPOL PP
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	SATPOL PP	327	Orang Kali (ok)	16.880.000		SATPOL PP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	SATPOL PP	12	bulan	2.985.000		SATPOL PP
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	SATPOL PP	12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materi, dan jasa pos/pengiriman	SATPOL PP	12	bulan	1.450.000		SATPOL PP
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi	SATPOL PP	12	bulan	51.120.000		SATPOL PP
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SATPOL PP	12	bulan	3.750.000		SATPOL PP
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	SATPOL PP	27 R2, 12 R4	kendaraan/bulan	33.250.000		SATPOL PP
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	SATPOL PP	22	orang/bulan	58.900.000		SATPOL PP
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	SATPOL PP	5	jenis	5.500.000		SATPOL PP
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	SATPOL PP	39	jenis	17.390.000		SATPOL PP
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	SATPOL PP	71440	lembar	8.020.000		SATPOL PP
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	SATPOL PP	11	jenis unit/buah	2.150.000		SATPOL PP
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	SATPOL PP		jenis unit/buah	-		SATPOL PP
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	SATPOL PP	-1 rak arsip -1 jaringan telepon dan internet pos damkar rembang -2 PC -1 dispenser	jenis unit/buah	1.750.000		SATPOL PP
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	SATPOL PP	12	eksemplar/bulan	2.040.000		SATPOL PP
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	SATPOL PP	12	bulan	195.621.000		SATPOL PP
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	SATPOL PP	16110	orang kali (OK)	340.800.000		SATPOL PP
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	SATPOL PP	289	orang kali (OK)	63.730.000		SATPOL PP
x.xx.01.2.03.20					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional baru	SATPOL PP	1 R4	unit	-		SATPOL PP
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)	SATPOL PP	2 set meja kursi tamu	jenis unit/buah	-		SATPOL PP
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)	SATPOL PP	1	unit	22.500.000		SATPOL PP
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	SATPOL PP	27 R2, 12 R4	unit	35.740.000		SATPOL PP
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)	SATPOL PP	-12 meja -12 kursi	unit	3.600.000		SATPOL PP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.04				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	SATPOL PP	- 0	- persen	-			
x.xx.01.2.04.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas (PDH, PDU, PDL, olahraga, dll)	SATPOL PP	110	stel	-			SATPOL PP
x.xx.01.2.04.03				Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	SATPOL PP	110	stel	-			SATPOL PP
x.xx.01.2.04.09				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	SATPOL PP	10	orang kali	9.555.000			SATPOL PP
x.xx.01.2.04.10				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya peserta sosialisasi	SATPOL PP	300	orang kali	-			SATPOL PP
1.05.02.				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-Cakupan pelanggaran perda yang ditangani -Persentase penanganan pelanggaran K3 -Intensitas sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba		-100 -100 -100	-persen -persen -persen	-			
1.05.02.2.01.				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan					-			
1.05.02.2.01.01				Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-Jumlah patroli pencegahan gangguan trantibum -Jumlah kasus tipiring yang dapat disidangkan		-9 -	-kali -kasus	578.790.000			SATPOL PP
1.05.02.2.01.02				Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	-Jumlah peserta sosialisasi barang kena cukai ilegal -Jumlah operasi barang kena cukai ilegal -Jumlah warga yang melaksanakan tes narkoba -Jumlah pembinaan dan		-150 -90 -200 -90	-orang -kali -orang -kali	52.991.000			SATPOL PP
1.05.02.2.01.02				Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	-Jumlah peserta sosialisasi barang kena cukai ilegal -Jumlah operasi barang kena cukai ilegal -Jumlah warga yang melaksanakan tes narkoba -Jumlah pembinaan dan		-150 -90 -200 -90	-orang -kali -orang -kali	-	DBH-CHT		SATPOL PP
1.05.02.2.01.05				Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	-Jumlah pelatihan anggota Satpol -Jumlah anggota Satlinmas yang mengikuti pembinaan -Jumlah anggota Bimasena -Jumlah kegiatan Korps Musik Pemda		-110 -300 - -54	-orang -orang -orang -kali	141.340.000			SATPOL PP
1.05.02.2.01.07				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-Jumlah pelaksanaan sidang tipiring -Jumlah pelaksanaan PAM terpadu		-110 -6	-kali -institusi anggota pam dan Gakum	-			SATPOL PP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.05.02.2.01.07				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam upaya pencegahan dan penanganan gangguan trantibum			3	buah	184.252.000		SATPOL PP
1.05.02.2.02.				Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Perda/Perkada yang mengandung sanksi ditegakkan			100	persen	-		
1.05.02.2.02.01				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi			250	orang	4.325.000		SATPOL PP
1.05.02.2.02.02				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Perda/Perkada yang mengandung sanksi			4	perda/perkada	9.320.000		SATPOL PP
1.05.02.2.02.03				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada			-12 -360	-yustisi -non yustisi	5.160.000		SATPOL PP
1.05.02.2.03.				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang telah mengikuti pengembangan kapasitas PPNS			12	orang	-		
1.05.02.2.03.01				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS			12	orang	9.090.000		SATPOL PP
1.05.04.				Program Kebakaran	-Cakupan pelayanan bencana kebakaran -Tingkat waktu tanggap -Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi -Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 - 5000 liter pada WMK -Persentase desa/kawasan permukiman siaga kebakaran/tanggap darurat kebakaran			-80 -75 -85 -90 -	-persen -persen -persen -persen persen	-		
1.05.04.2.01.				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-Cakupan pelayanan penyelamatan evakuasi kebakaran -Cakupan layanan penyelamatan evakuasi non kebakaran			-100 -100	-persen -persen	-		
1.05.04.2.01.02				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-Jumlah kendaraan pemadam kebakaran laik pakai -Jumlah peralatan kebakaran -Jumlah layanan penyelamatan evakuasi kebakaran -Jumlah layanan penyelamatan evakuasi non kebakaran			-6 -12 -80 -50	-unit -unit -kali -kali	591.030.000		SATPOL PP
1.05.04.2.04.				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran			40	kali	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.05.04.2.04.01				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	-Jumlah masyarakat relawan kebakaran yang dibentuk -Jumlah publikasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran		-50 -40	-orang -kali	36.850.000		SATPOL PP
1.05				1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					-		
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BPBD	- 100 -	- persen - Poin	- -		
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	BPBD	-100 -100	- persen - persen	- -		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	BPBD		dokumen	8.000.000		BPBD
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	BPBD		dokumen	6.000.000		BPBD
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	BPBD	12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	BPBD		ASN	1.407.779.500		BPBD
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	BPBD		Orang Kali (ok)	16.275.000		BPBD
x.xx.01.2.02.04				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	BPBD	12	bulan	7.140.000		BPBD
x.xx.01.2.03				Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	BPBD	12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangkat, materai, dan jasa pos/pengiriman	BPBD	12	bulan	1.500.000		BPBD
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi	BPBD	12	bulan	42.000.000		BPBD
x.xx.01.2.03.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	BPBD	12	bulan	8.400.000		BPBD
x.xx.01.2.03.06				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	BPBD		kendaraan/bulan	44.390.000		BPBD
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	BPBD		orang/bulan	70.760.000		BPBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	BPBD		jenis	11.630.000		BPBD
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BPBD		jenis	2.500.000		BPBD
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	BPBD		lembar	2.100.852		BPBD
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	BPBD		jenis unit/buah	2.910.000		BPBD
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	BPBD		jenis unit/buah	512.500		BPBD
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	BPBD		jenis unit/buah	794.500		BPBD
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	BPBD		eksemplar/bulan	2.160.000		BPBD
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	BPBD		bulan	78.498.000		BPBD
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	BPBD		orang kali (OK)	6.656.000		BPBD
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	BPBD		orang kali (OK)	64.150.000		BPBD
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	BPBD		unit	33.199.000		BPBD
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	BPBD	-0 -100	- persen - persen	- -		
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	BPBD		orang kali	10.000.000		BPBD
1.05.03.					Program Penanggulangan Bencana	-Cakupan pelayanan korban bencana -Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana		-100 -100	-persen -persen	- -		
1.05.03.2.01.					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase pelayanan informasi rawan bencana		100	persen	-		
1.05.03.2.01.01					Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kajian Risiko Bencana Kab. Purbalingga		1	dokumen	-		BPBD
1.05.03.2.01.02					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana		1	Kabupaten	25.000.000		BPBD
1.05.03.2.02.					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100	persen	-		
1.05.03.2.02.02					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		2	desa rawan bencana	75.000.000		BPBD
1.05.03.2.02.03					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian operasi kesiapsiagaan terhadap bencana		12	bulan	450.000.000		BPBD
1.05.03.2.02.04					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana		3	jenis	14.500.000		BPBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.05.03.2.02.06				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbentuknya desa tangguh bencana		1	desa	-		BPBD
1.05.03.2.02.07				Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen DALA (<i>Damage and Loss Assessment</i>)		100	dokumen	25.000.000		BPBD
1.05.03.2.03.				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100	persen	-		
1.05.03.2.03.02				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian bencana yang ditindaklanjuti		100	kejadian	34.807.500		BPBD
1.05.03.2.03.03				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang ditangani		100	orang	50.000.000		BPBD
1.05.03.2.03.04				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya logistik		3 (bronjong 700 m3, semen 2000 sak, air bersih 6700m3)	jenis	512.225.000	DID	BPBD
1.06				1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					-		
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100% - 80 Poin	% poin	-		
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	DINSOSDALDUKBP3A	-100 -100	-persen -persen	-		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	DINSOSDALDUKBP3A	2	dokumen	10.972.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	DINSOSDALDUKBP3A	6	dokumen	8.135.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	DINSOSDALDUKBP3A	12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	DINSOSDALDUKBP3A	35	ASN	4.595.120.500		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	DINSOSDALDUKBP3A	14	Orang Kali (ok)	19.600.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.02.04				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	DINSOSDALDUKBP3A	12	bulan	2.650.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.03				Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	DINSOSDALDUKBP3A	12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	DINSOSDALDUKBP3A	12	bulan	1.000.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi	DINSOSDALDUKBP3A	12	bulan	129.700.000		DINSOSDALDUKBP3A

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DINSOSDALDUKBP3A	12	bulan	4.000.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.03.06				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	DINSOSDALDUKBP3A	12	kendaraan/bulan	47.520.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	DINSOSDALDUKBP3A	37	orang/bulan	300.200.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.03.08				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Peniaga Malam	DINSOSDALDUKBP3A	2	orang/bulan	28.800.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.03.09				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	DINSOSDALDUKBP3A	12	jenis	3.115.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DINSOSDALDUKBP3A	47	jenis	6.200.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.03.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	DINSOSDALDUKBP3A	27130	lembar	4.300.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.03.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	DINSOSDALDUKBP3A	9	jenis unit/buah	2.100.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.03.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DINSOSDALDUKBP3A	5	jenis unit/buah	4.300.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.03.14				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DINSOSDALDUKBP3A	19	jenis unit/buah	1.665.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.03.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	DINSOSDALDUKBP3A	30	eksemplar/bulan	1.500.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.03.16				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	DINSOSDALDUKBP3A	12	bulan	215.428.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.03.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	DINSOSDALDUKBP3A	275	orang kali (OK)	13.800.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.03.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	DINSOSDALDUKBP3A	236	orang kali (OK)	84.500.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.03.25				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)	DINSOSDALDUKBP3A	1	jenis unit/buah	-		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.03.28				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)	DINSOSDALDUKBP3A	1	unit	5.400.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.03.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	DINSOSDALDUKBP3A	12 R4, 70R2	unit	22.000.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.03.35				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)	DINSOSDALDUKBP3A	1	unit	1.500.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.04				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin	DINSOSDALDUKBP3A	0	-persen	-		
					- Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		-100	-persen	-		
x.xx.01.2.04.09				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	DINSOSDALDUKBP3A	15	orang kali	7.400.000		DINSOSDALDUKBP3A
x.xx.01.2.04.10				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya peserta sosialisasi	DINSOSDALDUKBP3A	45	orang kali	-		DINSOSDALDUKBP3A
1.06.02.				Program Pemberdayaan Sosial	-Cakupan LKS yang dibina -Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial		-100 -100	-persen -persen	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.06.02.2.03.					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah					-		
1.06.02.2.03.02					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dibina		1195	OK	18.550.000		DINSOSDALDUKBP3A
1.06.02.2.03.03					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TSKS yang dibina		18	orang	508.320.000	DID	DINSOSDALDUKBP3A
1.06.02.2.03.04					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga PSKS yang mendapatkan fasilitasi		- 31 - 1 - 779	- Panti Wreda/Panti Asuhan - PPDI - Karang taruna	1.338.100.000	DID Bansos	DINSOSDALDUKBP3A
1.06.02.2.03.05					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terfasilitasinya Kelembagaan LK3		12	bulan	12.000.000		DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.					Program Rehabilitasi Sosial	-Cakupan PMKS yang terlayani -Cakupan penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial -Cakupan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap -Cakupan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		-100 -100 -100 -100	-persen -persen -persen -persen	-		
1.06.04.2.01.					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,					-		
1.06.04.2.01.01					Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan permakanan		300	orang	-		DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.2.01.02					Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan sandang		50	orang	6.000.000		DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.2.01.03					Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu		100	orang	125.060.000		DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.2.01.05					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang dibina		50	orang	25.000.000		DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.2.01.06					Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan		- - 349 - 500	-PMKS - orang -Yatim piatu	2.646.500.000	DAU	DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.2.01.08					Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS yang mendapatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar		10	orang	2.500.000		DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.2.01.10					Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan kedaruratan		10	orang	2.500.000		DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.2.01.13					Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan rujukan		10	orang	2.500.000		DINSOSDALDUKBP3A

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.06.04.2.02.					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan					-		
1.06.04.2.02.01					Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan pengaduan		10	orang	10.000.000	DID	DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.2.02.02					Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS di rumah singgah yang mendapatkan layanan kedaruratan		10	orang	10.000.000	DID	DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.2.02.03					Penyediaan Permakanan	Jumlah Permakanan SOSH berupa bahan makanan untuk PMKS di dalam rumah singgah		10	orang	40.250.000	DID	DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.2.02.04					Penyediaan Sandang	Jumlah kebutuhan dasar berupa sandang untuk kegiatan di rumah singgah		10	orang	35.000.000	DID	DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.2.02.05					Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu untuk penyandang disabilitas dalam melaksanakan fungsi sosialnya		10	orang	26.000.000	DID	DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.2.02.05					Penyediaan Alat Bantu (DAK)	Jumlah alat bantu untuk penyandang disabilitas dalam melaksanakan fungsi sosialnya		10	orang	8.950.000	DAK	DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.2.02.06					Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Jumlah pemeriksaan kesehatan bagi PMKS di luar panti		2	orang	1.000.000	DID	DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.2.02.07					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial di rumah singgah		10	orang	15.000.000	DID	DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.2.02.08					Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif		6	orang	61.200.000	DID	DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.2.02.09					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PMKS yang mendapatkan fasilitas pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		10	orang	5.000.000	DID	DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.2.02.10					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS yang mendapatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar		2	orang	5.000.000	DID	DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.2.02.11					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PMKS di rumah singgah yang mendapatkan fasilitas penelusuran keluarga		5	orang	10.000.000	DID	DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.2.02.12					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS di rumah singgah yang dipulangkan ke keluarganya		5	orang	10.000.000	DID	DINSOSDALDUKBP3A
1.06.04.2.02.13					Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS di rumah singgah yang mendapatkan fasilitas layanan rujukan		5	orang	10.000.000	DID	DINSOSDALDUKBP3A

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.06.04.2.02.14				Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam penanganan PMKS di rumah singgah			1	lembaga	3.000.000	DAU	DINSOSDALDUKKB3A
1.06.05.				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	-Persentase DTKS tervalidasi -Cakupan DTKS penerima program bansos				persen	-		
1.06.05.2.02.				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-Prosentase DTKS tervalidasi -Prosentase DTKS yang mendapatkan program bansos			-100 -100	- persen - persen	-		
1.06.05.2.02.01				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk miskin yang didata			283.531	RT	6.599.070.000	DID	DINSOSDALDUKKB3A
1.06.05.2.02.02				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan fasilitas program PKH, KUBE, BPNT, KJS dan RTLH			55.577	orang	654.639.642	DAU	DINSOSDALDUKKB3A
1.06.05.2.02.02				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah jenis perangkat pendukung pengolahan data sosial			10	jenis	98.626.000	DAK	DINSOSDALDUKKB3A
1.06.06.				Program Penanganan Bencana	-Cakupan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarpras tanggap darurat lengkap -Cakupan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			-100 -100	-persen -persen	-		
1.06.06.2.01.				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan						-		
1.06.06.2.01.01				Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan makanan			18	kecamatan	27.950.000		DINSOSDALDUKKB3A
1.06.06.2.01.02				Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sandang			18	kecamatan	-		DINSOSDALDUKKB3A
1.06.06.2.01.03				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah korban bencana yang ditampung di tempat penampungan			18	kecamatan	-		DINSOSDALDUKKB3A
1.06.06.2.01.04				Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus			18	kecamatan	-		DINSOSDALDUKKB3A
1.06.06.2.01.05				Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan dukungan psikososial			18	kecamatan	-		DINSOSDALDUKKB3A
1.06.06.2.02.				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap						-		
1.06.06.2.02.01				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung siaga yang terbentuk			1	kampung	-		DINSOSDALDUKKB3A
1.06.06.2.02.02				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah taruna siaga bencana			40	orang	36.585.000		DINSOSDALDUKKB3A
1.06.07.				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan TMP yang terpelihara			100	persen	-		
1.06.07.2.01.				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah kunjungan peziarah					-		
1.06.07.2.01.02				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan dan Leluhur yang dirawat			6	TMP	25.000.000		DINSOSDALDUKKB3A

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
1.06.07.2.01.03				Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tersedianya pengamanan dan kebersihan Taman Makam Pahlawan			12	bulan	14.400.000		DINSOSDALDUKBP3A
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.07				2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DINAKEK		- 100 -83	- persen -			
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	DINAKEK		- 100 100	- persen persen			
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	DINAKEK			dokumen	5.000.000		DINNAKEK
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	DINAKEK			dokumen	5.000.000		DINNAKEK
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	DINAKEK		12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	DINAKEK			ASN	3.457.838.500		DINNAKEK
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	DINAKEK			Orang Kali (ok)	14.995.000		DINNAKEK
x.xx.01.2.02.04				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	DINAKEK		12	bulan	2.500.000		DINNAKEK
x.xx.01.2.03				Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	DINAKEK		12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	DINAKEK		12	bulan	2.220.000		DINNAKEK
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi	DINAKEK		12	bulan	207.192.000		DINNAKEK
x.xx.01.2.03.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DINAKEK		12	bulan	3.000.000		DINNAKEK
x.xx.01.2.03.06				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	DINAKEK			kendaraan/bulan	12.169.000		DINNAKEK
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	DINAKEK			orang/bulan	140.900.000		DINNAKEK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	DINAKEK		orang/bulan	163.200.000		DINNAKER
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	DINAKEK		jenis	22.540.000		DINNAKER
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DINAKEK		jenis	24.657.500		DINNAKER
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	DINAKEK		lembar	26.583.000		DINNAKER
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	DINAKEK		jenis unit/buah	8.669.000		DINNAKER
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DINAKEK		jenis unit/buah	900.000		DINNAKER
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DINAKEK		jenis unit/buah	3.315.000		DINNAKER
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	DINAKEK		eksemplar/bulan	4.344.000		DINNAKER
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	DINAKEK	12	bulan	87.239.000		DINNAKER
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	DINAKEK		orang kali (OK)	15.000.000		DINNAKER
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	DINAKEK		orang kali (OK)	33.614.000		DINNAKER
x.xx.01.2.03.22					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (garasi, kamar mandi, partisi, tempat parkir, dll)	DINAKEK		jenis unit/buah	-		DINNAKER
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)	DINAKEK		jenis unit/buah	-		DINNAKER
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)	DINAKEK		unit	32.200.000		DINNAKER
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	DINAKEK		unit	26.560.000		DINNAKER
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	DINAKEK	- 0 100	- persen persen	- -		
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	DINAKEK		orang kali	-		DINNAKER
2.07.03.					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja		20	persen	-		
2.07.03.2.01.					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan UnitKompetensi	Tingkat kelulusan peserta pelatihan		100	persen	-		
2.07.03.2.01.01					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-Pelatihan berbasis kompetensi -Seleksi magang		-20 -20	-paket -orang	710.557.000 -	DBH CHT	DINNAKER
2.07.03.2.01.01					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-Pelatihan berbasis kompetensi -Seleksi magang		-20 -20	-paket -orang	- -		DINNAKER
2.07.03.2.02.					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Cakupan LPKS yang terakreditasi		90	persen	-		
2.07.03.2.02.01					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Fasilitasi dan pembinaan LPKS		15	unit	10.000.000		DINNAKER

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	
2.07.04.			Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yg difasilitasi penempatan		49	persen	-
2.07.04.2.01.			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan BKK yang terfasilitasi		100	persen	-
2.07.04.2.01.02			Pelayanan antar Kerja	-Sosialisasi BKK -Job canyasing		-45 -200	-SMK -orang	59.223.000
2.07.05.			Program Hubungan Industrial	-Rasio penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial -Cakupan tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial -Presentase tenaga kerja mendapat upah sesuai UMK		-95 -90 -90	-persen -persen -persen	-
2.07.05.2.02.			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	Persentase kasus perselisihan yang diselesaikan		95	persen	-
2.07.05.2.02.01			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina		60	unit	78.340.000
2.07.05.2.02.02			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey KHL dan pemantauan UMK		60	unit	33.805.000
2.08			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					-
2.08.02.			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	- Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah -Tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta - Tingkat partisipasi perempuan di lembaga politik		- 4.600 - 44.592 - 15	-orang -orang -orang	-
2.08.02.2.01.			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	- Persentase kelembagaan PUG yang aktif di OPD - Cakupan anggaran berbasis gender		- 100 -100	- persen - persen	-
2.08.02.2.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah pelaksanaan Rakor Pokja PUG dan Tim Driver PUG		4	kali	-
2.08.02.2.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota					25.369.000
2.08.02.2.01.03			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Bintek PPRG yang dilaksanakan		1	kali	-
2.08.02.2.02.			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	Cakupan organisasi wanita yang difasilitasi		100	persen	-
2.08.02.2.02.02			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Pembinaan Keluarga melalui organisasi wanita		12	bulan	346.460.000
2.08.02.2.02.02			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Pembinaan Keluarga melalui organisasi wanita		12	bulan	-
2.08.02.2.03.			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan					-
2.08.02.2.03.01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang di dampingi		5	orang	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
2.08.02.2.03.02				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kader yang mengikuti pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan			60	orang	15.615.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.08.02.2.03.03				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah promosi KIE pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan			-24 -20 -100	-siaran -banner -pamlet	-		DINSOSDALDUKBP3A
2.08.03.				Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani			4	kasus	-		
2.08.03.2.01.				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan						-		
2.08.03.2.01.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rakor yang dilaksanakan			80	OK	-		DINSOSDALDUKBP3A
2.08.03.2.01.02				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya UPT Pusat Pelayanan terpadu di tingkat kecamatan			- 18	- kecamatan	17.765.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.08.03.2.02.				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti			100	persen	-		
2.08.03.2.02.01				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan korban kekerasan perempuan			50	aduan	5.490.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.08.03.2.02.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan			15	perempuan	-		DINSOSDALDUKBP3A
2.08.05.				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rekomendasi Kebijakan gender dan anak yang ditindaklanjuti			2	kebijakan	-		
2.08.05.2.01.				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan gender dan anak			2	rekomendasi	-		
2.08.05.2.01.01				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Profil Gender dan Profil Anak			2	dokumen	39.720.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.08.06.				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan desa/kelurahan layak anak			50	persen	-		
2.08.06.2.01.				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan	Pelembagaan PHA yang difasilitasi			20	lembaga	-		
2.08.06.2.01.01				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya event hari anak nasional			1	event	20.000.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.08.06.2.01.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rakor yang dilaksanakan dan desa/kelurahan layak anak yang dibentuk			- 6 -5	- kali rakor -desa/kelurahan	28.716.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.08.06.2.02.				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak yang berkembang			...	lembaga	-		
2.08.06.2.02.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan forum anak tingkat kabupaten yang dilaksanakan			5	kali	14.412.000		DINSOSDALDUKBP3A

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
2.08.06.2.02.03				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah stiker dan pamflet			-300 -300	-stiker -pamflet	9.750.000		DINSOSDALDUKKB3A
2.08.06.2.02.04				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan KHA bagi kepala sekolah SD/MI, Forum Anak, Forum Lintas Perempuan dan Ormas			80	peserta	14.845.000		DINSOSDALDUKKB3A
2.08.07.				Program Perlindungan Khusus Anak	-Cakupan anak yang mendapatkan perlindungan -Jumlah pekerja di bawah umur			-100 -	-persen -orang	-		
2.08.07.2.01.				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah	Tingkat penurunan kekerasan terhadap anak			...	persen	-		
2.08.07.2.01.01				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis sekolah			-5 -1200	-sekolah -siswa	21.660.000		DINSOSDALDUKKB3A
2.08.07.2.02.				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus			...	persen	-		
2.08.07.2.02.01				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pengaduan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti			50	kasus	51.610.000		DINSOSDALDUKKB3A
2.09				2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						-		
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Rata-rata Cakupan SKN	DKPP		- 100 -	- persen - ...Poin - Poin	-	Urusan Pangan	
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	DKPP		- 100 - 100	- persen - persen	-	Urusan Kelautan dan Perikanan	
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	DKPP		2	dokumen	15.000.000	Gaji dan Tamsil	DKPP
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	DKPP			dokumen	7.500.000		DKPP
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	DKPP		12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	DKPP			ASN	4.531.511.000		DKPP
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (> 8 jam)	DKPP			Orang Kali (ok)	50.560.000		DKPP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	DKPP	12	bulan	15.000.000	DID	DKPP
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	DKPP	12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materi, dan jasa pos/pengiriman	DKPP	12	bulan	1.200.000	DBHCHT	DKPP
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi	DKPP	12	bulan	155.000.000		DKPP
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DKPP	12	bulan	12.500.000	DAK	DKPP
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	DKPP		kendaraan/bulan	27.600.000		DKPP
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	DKPP		orang/bulan	204.600.000	Non Earmark	DKPP
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	DKPP		orang/bulan	90.000.000	Gaji tamsil	DKPP
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	DKPP		jenis	5.000.000		DKPP
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DKPP		jenis	10.000.000		DKPP
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	DKPP		lembar	10.539.600		DKPP
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	DKPP		jenis unit/buah	2.500.000		DKPP
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DKPP		jenis unit/buah	1.000.000		DKPP
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DKPP		jenis unit/buah	4.994.000		DKPP
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	DKPP		eksemplar/bulan	2.494.000		DKPP
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	DKPP	12	bulan	126.031.400		DKPP
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	DKPP		orang kali (OK)	22.000.000		DKPP
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	DKPP		orang kali (OK)	49.420.000		DKPP
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					8.750.000		DKPP
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	DKPP		unit	32.606.000		DKPP
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)	DKPP		unit	10.000.000		DKPP
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	DKPP	- 0 - 100	- persen - persen	-		
x.xx.01.2.04.01					Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi	DKPP		unit	-		DKPP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.04.03				Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	DKPP		stel	-		DKPP
x.xx.01.2.04.09				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	DKPP		orang kali	20.800.000		DKPP
x.xx.01.2.04.11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya peserta sosialisasi	DKPP		orang kali	-		DKPP
02.09.02				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan					-		
2.09.02.2.01.				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung					-		
2.09.02.2.01.01				Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan					300.000.000	DAK	DKPP
2.09.02.2.01.02				Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur					220.000.000	DAK	DKPP
2.09.03.				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	- Angka konsumsi energi - Angka konsumsi protein - Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		-2200 -69.04 -96.98	-kg/cap/tahun -gr/kapita/hari -angka	-		
2.09.03.2.01.				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Koefisien varian harga pangan pokok		<5	persen	-		
2.09.03.2.01.01				Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	-Tersusunnya Panel Harga pangan Kabupaten dan tersedianya analisis kestabilan harga pangan pokok/beras -Tersusunnya buku NBM dan analisisnya -Tersusunnya Data Statistik Ketahanan Pangan		- 1 - 1 - 1	- dokumen -dokumen -dokumen	-		DKPP
2.09.03.2.01.03				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	-Jumlah rapat-rapat kordinasi & sinkronisasi distribusi pangan -Jumlah koordinasi & konsultasi permasalahan distribusi pangan		-3 -3	-kali -kali	12.000.000		DKPP
2.09.03.2.01.04				Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya monitoring dan pelaporan harga dan pasokan bahan pangan		12	bulan	10.000.000		DKPP
2.09.03.2.01.05				Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	-Penggunaan aplikasi SisLogDa di Kab. Purbalingga -Jumlah LUPM yang terfasilitasi dalam penjualan produk		-12 -10	-bulan -LUPM	-		DKPP
2.09.03.2.01.06				Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	-LUPM yang dibina -Jumlah Toko Tani Indonesia yang terfasilitasi		-20 -18	-LUPM -TTI	15.000.000		DKPP
2.09.03.2.02.				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rasio cadangan pangan masyarakat			persen	-		
2.09.03.2.02.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-Jumlah pengurus LPM yang terfasilitasi BinteK SDM -Terfasilitasinya keg rakor, monev/ pembinaan dan koordinasi/konsultasi LPM		-30 -5	-LPM -kali	-		DKPP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu		
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan					
2.09.03.2.02.03				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-Jumlah gabah cadangan PemKab Purbalingga (harga Rp. 6.000,- /kg) '-Jumlah bantuan gabah cadangan pangan masyarakat untuk LPM		-24 -12	-ton -ton	90.000.000		DKPP
2.09.03.2.04.				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi	Angka kecukupan gizi				-		
2.09.03.2.04.01				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah rapat Dewan Ketahanan Pangan dalam menyusun target konsumsi pangan perkapita pertahun		2	kali	-		DKPP
2.09.03.2.04.02				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terselenggaranya: 1) Replikasi B2SA; 2) Pelatihan Olahan Pangan Lokal;7) Pemeliharaan OPAL		-1800 - 40 -1 -1 -1 -497	-siswa (selama 6 hari) -peserta -kali -kali -kali -orang -paket	4.697.288.000	DID	DKPP
2.09.03.2.04.02				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					140.000.000	DAU	DKPP
2.09.03.2.04.03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita		12	kali	-		DKPP
2.09.04.				Program Penanganan Kerawanan Pangan	-Cakupan lumbung pangan masyarakat desa -Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah -Cakupan desa mandiri pangan		-29,29 -20	-persen -ton sb (setara beras) -desa	-		
2.09.04.2.01.				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah desa rawan pangan dan desa rentan pangan		1 dan 10	desa rawan pangan da	-		
2.09.04.2.01.01				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Data Peta FSVA dan Analisisnya tahun 2020		1	dokumen	-		DKPP
2.09.04.2.02.				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa rentan pangan yang tertangani/terfasilitasi		10	desa	-		
2.09.04.2.02.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Desa Mandiri Pangan		2	desa	1.713.874.000	DID	DKPP
2.09.04.2.02.02				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan beras dan lele (RasLebangga) untuk masyarakat rawan pangan kronis/KK Miskin		20000	paket	-		DKPP
2.09.05.				Program Pengawasan Keamanan Pangan	-Persentase pangan aman yang beredar di masyarakat -Jumlah komoditas pangan segar bersertifikat prima 3		- 97 -7	-persen -komoditas	-		
2.09.05.2.01.				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan yang ditindaklanjuti		5	rekomendasi	-		
2.09.05.2.01.01				Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya lembaga/tim terpadu Jaringan Keamanan Pangan		1	kelompok	-		DKPP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan		
2.09.05.2.01.02				Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang tersertifikasi	5	komoditas	20.000.000	DKPP
2.09.05.2.01.03				Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang terfasilitasi	5	pelaku	-	DKPP
2.09.05.2.01.04				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel survey keamanan pangan	100	sampel	-	DKPP
2.09.05.2.01.05				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah reagent analisis kewanamanan pangan	40	buah	-	DKPP
2.10				2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				-	
2.10.05.				Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Cakupan penyelesaian proses pengadaan tanah pemerintah daerah	100	persen	-	
2.10.05.2.01.				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh	Jumlah bidang tanah yang tersedia untuk pembangunan	6	bidang tanah	-	
2.10.05.2.01.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah yang dibebaskan	6	bidang tanah	1.782.000.000	DINRUMKIM
2.10.06.				Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Cakupan penandaan tanah-tanah milik pemerintah daerah	100	persen	-	
2.10.06.2.01.				Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Terselesaikannya permasalahan tanah pemda	127	paket	-	
2.10.06.2.01.01				Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah permasalahan tanah yang tertangani	127	paket	16.450.000	DINRUMKIM
2.10.10.				Program Penatagunaan Tanah	Rasio tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat	100	persen	-	
2.10.10.2.01.				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisir dan terdatanya pemanfaatan tanah pemda	25	bidang tanah	-	
2.10.10.2.01.03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah pemda yang diinventarisir	25	bidang tanah	247.760.000	DINRUMKIM
2.11				2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				-	
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Rata-rata Cakupan SKP	DLH - 100 -	- 100% - Poin - Poin	-	
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	DLH - 100 - 100	- persen - persen	-	
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	DLH	dokumen	12.287.500	DLH
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	DLH	dokumen	5.925.000	DLH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	DLH	12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	DLH		ASN	9.840.174.933		DLH
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	DLH		Orang Kali (ok)	10.560.000		DLH
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	DLH	12	bulan	5.864.500		DLH
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	DLH	12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	DLH	12	bulan	852.000		DLH
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi	DLH	12	bulan	120.000.000		DLH
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DLH	12	bulan	3.900.000		DLH
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	DLH		kendaraan/bulan	46.400.000		DLH
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	DLH		orang/bulan	104.800.000		DLH
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	DLH		orang/bulan	28.800.000		DLH
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	DLH		jenis	15.385.000		DLH
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DLH		jenis	6.062.100		DLH
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	DLH		lembar	7.412.500		DLH
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	DLH		jenis unit/buah	1.055.000		DLH
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DLH		jenis unit/buah	1.200.000		DLH
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DLH		jenis unit/buah	300.000		DLH
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	DLH		eksemplar/bulan	2.640.000		DLH
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	DLH		bulan	112.278.000		DLH
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	DLH		orang kali (OK)	12.040.000		DLH
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	DLH		orang kali (OK)	72.146.000		DLH
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)	DLH		unit	15.405.000		DLH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	DLH		unit	234.902.900		DLH
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)	DLH		unit	840.000		DLH
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	DLH	- 0 - 100	- persen - persen	- -		
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	DLH		orang kali	10.000.000		DLH
2.11.02.					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase dokumen perencanaan lingkungan yang diterbitkan		100	persen	-		
2.11.02.2.01.					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen lingkungan hidup		2	dokumen	-		
2.11.02.2.01.01					Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Raperda RPPLH		1	dokumen	207.116.581		DLH
2.11.03.					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				-		
2.11.03.2.01.					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-Indek Kualitas Udara (minimal 84) -Indek Kualitas Air (minimal 55) -Indek Tutupan Lahan (minimal 62) -Cakupan perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran udara sesuai persyaratan teknis -Cakupan perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran udara sesuai persyaratan khusus -Jumlah perusahaan yang memiliki IPAL		-85 -55 -62 -32 -16 -14	-poin -poin -poin -perusahaan -perusahaan -perusahaan	- - - - - -		
2.11.03.2.01.01					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen pemantauan kualitas lingkungan hidup (kualitas air, udara dan tutupan lahan)		3	dokumen	95.397.000		DLH
2.11.03.2.01.02					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan aktif dan berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		80	orang	25.000.000		DLH
2.11.04.					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	-Jumlah taman kota -Luas taman -Jumlah mata air yang dilindungi -Jumlah wilayah/desa yang telah memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim		-12 -5.37 -13 -8	-buah -ha -lokasi -desa	- - - -		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
2.11.04.2.01.				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten/Kota	Persentase RTH Publik		19.11	persen	-		
2.11.04.2.01.04				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Jumlah RTH		11	taman	945.113.000	DAU	DLH
2.11.04.2.01.06				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah pohon konservasi tertanam		6500	batang	25.320.000		DLH
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati						71.010.000		DLH
2.11.05.				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)		-Cakupan industri yang memiliki TPS B3 -Cakupan pengelolaan air limbah rumah tangga		-73.05 -90.2	-persen -persen	-		
2.11.05.2.01.				Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah perusahaan yang memenuhi syarat komitmen izin limbah B3		80	perusahaan	-		
2.11.05.2.01.01				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah perusahaan wajib punya TPS B3 yang diuji komitmen izinnya		80	perusahaan	16.622.000		DLH
2.11.06.				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		-Cakupan perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) -Cakupan aduan kasus lingkungan yang tertangani -Cakupan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap		-781 -100 -100	-perusahaan -persen -persen	-		
2.11.06.2.01.				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah		Cakupan perusahaan yang menerapkan sesuai izin lingkungan		100	persen	-		
2.11.06.2.01.01				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah perusahaan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan		500	perusahaan	13.087.000		DLH
2.11.06.2.01.04				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Persentase penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketaatan izin lingkungan		100	persen	60.050.000		DLH
2.11.08.				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Persentase kelompok masyarakat yang berperan aktif dan berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		100	persen	-		
2.11.08.2.01.				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok masyarakat yang berperan aktif dan berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		21	kelompok	-		
2.11.08.2.01.01				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah pengelola bank sampah dan lembaga masyarakat lainnya		90	orang/kali	33.199.000		DLH
2.11.09.				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Jumlah sekolah adiwiyata		18	sekolah	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan		
2.11.09.2.01.				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang menerapkan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PPLHS) dan Lingkungan Bersih Sehat (LBS)	9	sekolah	-	
2.11.09.2.01.01				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang dinilai standar Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PPLHS) dan Lingkungan Bersih Sehat (LBS)	18	sekolah	27.812.000	DLH
2.11.10.				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				-	
2.11.10.2.01.				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang				-	
2.11.10.2.01.01.				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota				29.675.000	DLH
2.11.11.				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	100	persen	-	
2.11.11.2.01.				Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah tertangani	38500	m3	-	
2.11.11.2.01.03				Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah terangkut	35000	m3	5.623.210.500	DLH
2.11.11.2.01.04				Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok masyarakat terbina	15	KSM	-	DLH
2.12				2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				-	
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Data rata-rata Capaian SKP	DINDUKCAPIL - 100 -	- persen - Poin	- -	Urusan Dukcapil
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	DINDUKCAPIL - 100 - 100	- persen - persen	- -	Gaji dan Tamsil
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	DINDUKCAPIL 2	dokumen	8.608.000	DINDUKCAPIL
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	DINDUKCAPIL 8	dokumen	1.736.000	DINDUKCAPIL
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	DINDUKCAPIL 12	bulan	-	
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	DINDUKCAPIL 74	ASN	2.851.881.500	DINDUKCAPIL
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	DINDUKCAPIL 27	Orang Kali (ok)	2.325.000	DINDUKCAPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	DINDUKAPIL	12	bulan	868.000		DINDUKAPIL
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	DINDUKAPIL	12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	DINDUKAPIL	12	bulan	640.000		DINDUKAPIL
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	DINDUKAPIL	12	bulan	120.000.000		DINDUKAPIL
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DINDUKAPIL	12	bulan	-		DINDUKAPIL
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	DINDUKAPIL	18 R2, 17 R4	kendaraan/bulan	8.100.000		DINDUKAPIL
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	DINDUKAPIL	-22 -1	kendaraan/bulan	59.175.000		DINDUKAPIL
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	DINDUKAPIL	3	orang/bulan	36.000.000		DINDUKAPIL
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	DINDUKAPIL	-6 mesin ketik -1 mesin absen -1 mesin antrian -1 mesin genset	jenis unit/buah	5.700.000		DINDUKAPIL
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DINDUKAPIL	75	jenis	3.500.000		DINDUKAPIL
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	DINDUKAPIL	14850	lembar	1.454.914		DINDUKAPIL
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	DINDUKAPIL	-3 lampu -6 stopkontak -10 fitting plafon -30 meter kabel -4 roll lampu selang	jenis unit/buah	1.080.000		DINDUKAPIL
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DINDUKAPIL	-2 bendera -10 umbul-umbil -4 karangan bunga -2 PC -1 laptop -1 printer KIA	jenis unit/buah	1.050.000		DINDUKAPIL
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DINDUKAPIL	1	jenis unit/buah	-		DINDUKAPIL
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	DINDUKAPIL	36	eksemplar/bulan	1.200.000		DINDUKAPIL
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	DINDUKAPIL	12	bulan	68.095.000		DINDUKAPIL
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	DINDUKAPIL	320	orang kali (OK)	6.430.000		DINDUKAPIL
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	DINDUKAPIL	80	orang kali (OK)	20.640.000		DINDUKAPIL
x.xx.01.2.03.22					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (garasi, kamar mandi, partisi, tempat parkir, dll)	DINDUKAPIL	1 paket garasi	jenis unit/buah	-		DINDUKAPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.25				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)	DINDUKCAPIL	-1 kursi tamu -30 kursi rapat -4 meja rapat -3 kinas angin	jenis unit/buah	-			DINDUKCAPIL
x.xx.01.2.03.28				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)	DINDUKCAPIL	18	unit	6.600.000			DINDUKCAPIL
x.xx.01.2.03.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	DINDUKCAPIL	18 R2, 7 R4	unit	31.760.000			DINDUKCAPIL
x.xx.01.2.03.35				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)	DINDUKCAPIL	5	unit	1.600.000			DINDUKCAPIL
x.xx.01.2.04				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuan	DINDUKCAPIL	- 0 - 100	- persen - persen	- -			
x.xx.01.2.04.05				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik	DINDUKCAPIL	4	pcs	-			DINDUKCAPIL
x.xx.01.2.04.09				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	DINDUKCAPIL	4	orang kali	5.000.000			DINDUKCAPIL
2.12.02.				Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki: '-KK, -KTP el, -KIA		-99 -99 -25.5	-persen -persen -persen	- -			
2.12.02.2.01.				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah : '-KK, -KTP el, -KIA yang diterbitkan		'-115.000 -80.000 -65.000	persen	- -			
2.12.02.2.01.02				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan : '-KK, -KTP el, -KIA		'-115.000 -80.000 -65.000	-buah -buah -buah	497.500.000			DINDUKCAPIL
2.12.03.				Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki: -Akta Kelahiran, -Akta Kematian, -Akta Perkawinan, -Akta Perceraian, -Akta Pengangkatan Anak, -Akta Pengesahan Anak		-50 - - - - -	'-persen -persen -persen -persen -persen -persen	- -			
2.12.03.2.01.				Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan : -Akta Kelahiran, -Akta Kematian, -Akta Perkawinan, -Akta Perceraian, -Akta Pengangkatan Anak, -Akta Pengesahan Anak		-25000 -4000 -30 -3 -10 -	'-persen -persen -persen -persen -persen -persen	- -			
2.12.03.2.01.01				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah penerbitan : -Akta Perkawinan, -Akta Perceraian, -Akta Pengangkatan Anak, -Akta Pengesahan Anak		-30 -3 -10 -5	-buah -buah -buah -buah	33.050.000			DINDUKCAPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
2.12.03.2.01.02				Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan : -Akte Kelahiran, -Akte Kematian			-25000 -4000	-buah -buah	318.650.000		DINDUKAPIL
2.12.04.				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang ditindaklanjuti			100	persen	-		
2.12.04.2.01.				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-Cakupan desa yang menerima pelayanan tuntas adminduk -Cakupan database kependudukan yang dimanfaatkan			-100 -100	-persen -persen	-		
2.12.04.2.01.04				Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah desa yang menerima pelayanan tuntas adminduk			45	desa	163.995.000		DINDUKAPIL
2.12.04.2.03.				Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan	-Cakupan desa yang menerima pelayanan tuntas adminduk -Cakupan database kependudukan yang dimanfaatkan			-100 -100	-persen -persen	-		
2.12.04.2.03.06				Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah desa yang menerima pelayanan tuntas adminduk			45	desa	3.096.868.000	DAK Non Fisik	DINDUKAPIL
2.12.04.2.03.07				Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-Jumlah database kependudukan -Jumlah pemeliharaan Jaringan Internet SIAK			-1 -18, 1	-dokumen -kecamatan, dinas	10.473.000		DINDUKAPIL
2.12.05.				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase lembaga/instansi yang memanfaatkan data kependudukan			100	persen	-		
2.12.05.2.01.				Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah lembaga/instansi yang membutuhkan profil data kependudukan			50	lembaga	-		
2.12.05.2.01.02				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Kependudukan dan Buku Agregat Kependudukan			-50 -50	-dokumen -dokumen	4.500.000		DINDUKAPIL
2.13				2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						-		
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Data rata-rata Capaian SKPD	DINPERMASDES		- 100 - 85,38	persen - Poin Poin	-		
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	DINPERMASDES		- 100 - 100	- persen - persen	-		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	DINPERMASDES		2	dokumen	12.640.000		DINPERMASDES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.01.05					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKJP, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	DINPERMASDES	6	dokumen	6.045.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	DINPERMASDES	12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	DINPERMASDES	24	ASN	2.856.647.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	DINPERMASDES	280	Orang Kali (ok)	8.448.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	DINPERMASDES	12	bulan	11.246.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	DINPERMASDES	12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	DINPERMASDES	12	bulan	1.345.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi	DINPERMASDES	12	bulan	30.000.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DINPERMASDES	12	bulan	18.460.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	DINPERMASDES	17	kendaraan/bulan	8.500.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	DINPERMASDES	25	orang/bulan	54.800.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	DINPERMASDES	12	orang/bulan	19.280.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	DINPERMASDES	12	jenis	10.350.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DINPERMASDES	12	jenis	9.455.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	DINPERMASDES	12	lembar	10.331.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	DINPERMASDES	12	jenis unit/buah	5.171.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DINPERMASDES	1	jenis unit/buah	12.760.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DINPERMASDES	12	jenis unit/buah	3.945.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	DINPERMASDES	12	eksemplar/bulan	2.750.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	DINPERMASDES	12	bulan	70.320.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	DINPERMASDES	12	orang kali (OK)	20.085.000		DINPERMASDES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan							Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu		
					Indikator Kinerja	Lokasi	Target				Satuan	
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	DINPERMASDES	40	orang kali (OK)	59.020.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)	DINPERMASDES	4	jenis unit/buah	18.000.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan,dll)	DINPERMASDES	2	unit	13.285.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	DINPERMASDES	17	unit	25.457.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)	DINPERMASDES	5	unit	675.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman displin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	DINPERMASDES	30	- persen	-		
x.xx.01.2.04.01					Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi	DINPERMASDES	1	unit	7.500.000		DINPERMASDES
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	DINPERMASDES	8	orang kali	7.500.000		DINPERMASDES
2.13.03.					Program Peningkatan Kerjasama Desa					-		
2.13.03.2.01.					Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Cakupan desa yang difasilitasi kerjasama antar desa			persen	-		
2.13.03.2.01.01					Fasilitasi Kerjasama Antar Desa					10.000.000		DINPERMASDES
2.13.03.2.01.02					Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa		3	desa	62.500.000		DINPERMASDES
2.13.04.					Program Administrasi Pemerintahan Desa	-Cakupan desa yang melaksanakan musrenbangdes tepat waktu -Cakupan desa/kelurahan yang menyusun profil desa secara tepat waktu -Cakupan desa yang memiliki BUMDes yang sehat -Cakupan desa yang menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu		-100 -100 -0,268 -100	-persen -persen -persen -persen	-		
2.13.04.2.01.					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang menyelenggarakan tertib administrasi		100	persen	-		
2.13.04.2.01.02					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah produk hukum desa yang difasilitasi penyusunannya		3	buah	13.000.000		DINPERMASDES
2.13.04.2.01.03					Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah pendampingan tahap penyusunan perencanaan dan penganggaran kades		2	kali	35.000.000		DINPERMASDES
2.13.04.2.01.04					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan dan aset desa, siskeudes, BKK, dan Bangub		2	kali	144.012.000		DINPERMASDES
2.13.04.2.01.05					Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Jumlah bintek pemerintahan desa kepada kades, perangkat, dan anggota BPD		1	kali	159.270.000		DINPERMASDES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
2.13.04.2.01.07					Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah peraturan desa yang dievaluasi		25	Perdes	16.345.000		DINPERMASDES
2.13.04.2.01.08					Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	-Jumlah sosialisasi produk hukum tentang Bumdes -Jumlah fasilitasi Bumdes dengan pihak ketiga		-2 -2	-kali -kali	31.898.000		DINPERMASDES
2.13.04.2.01.11					Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	-Jumlah pendampingan inputing data profil -Jumlah pelaksanaan lomba desa tingkat kabupaten -Jumlah desa lokasi kunjungan Bupati/Tilik Desa		239 -1 -6	-desa -kali -desa	111.970.000		DINPERMASDES
2.13.05.					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	-Prosentase pasar desa yang dibina -Rasio lembaga rukun tetangga (RT) yang aktif -Cakupan posyandu aktif -Cakupan lumbung desa sehat -Rasio PKK desa/kelurahan aktif -Cakupan BP-SPAM aktif -Cakupan KPP sanitasi lingkungan aktif		-0,075 -5081 -1194 -239 -239 -10 -60	-persen -RT -unit -unit -desa/kel -kelompok -kelompok	-		
2.13.05.2.01.					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina			lembaga	-		
2.13.05.2.01.02					Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah desa yang melaksanakan Gebrag Gotong Royong dan BBGRM		10	desa	29.694.000		DINPERMASDES
2.13.05.2.01.03					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah kelembagaan masyarakat desa yang dibina (PKK, RT, RW, IPAL, Posyandu, KPMD)		30,484	unit	534.825.000		DINPERMASDES
2.13.05.2.01.05					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah pasar yang dibina		54	desa	15.144.000		DINPERMASDES
2.13.05.2.01.06					Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah TTG yang dibina		4	kali	18.580.000		DINPERMASDES
2.14					2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					-		
2.14.02.					Program Pengendalian Penduduk	Tingkat penurunan laju pertumbuhan penduduk		<1	persen	-		
2.14.02.2.01.					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kebijakan yang mendukung pengendalian kuantitas penduduk		100	persen	-		
2.14.02.2.01.02					Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Grand Design Kependudukan yang tersusun		1	dokumen	-		DINSOSDALDUKBP3A
2.14.02.2.01.09					Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah kegiatan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dengan Sekolah Menengah Pertama		1	kali	-		DINSOSDALDUKBP3A
2.14.02.2.01.10					Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Launching Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tingkat (Sekolah Menengah Pertama)		1	sekolah	-		DINSOSDALDUKBP3A

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
2.14.02.2.01.14					Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dilaksanakan		1	kali	7.700.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.14.02.2.01.15					Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP	Jumlah Kegiatan Evaluasi program Bangsa Kencana yang dilaksanakan		4	kali	18.000.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.14.02.2.02.					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan wilayah yang terpetakan dalam profil kependudukan dan KB		100	persen	-		
2.14.02.2.02.03					Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	-Tersusunnya Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana -Cetak Buku Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana		-1 -30	-dokumen -buku	10.350.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.14.02.2.02.04					Pemetaan Kependudukan	Terselenggaranya monitoring evaluasi Sistem dan Informasi Keluarga		18	kecamatan	5.000.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.14.02.2.02.09					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terselenggaranya monitoring evaluasi Sistem dan Informasi Keluarga		18	kecamatan	6.200.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.14.02.2.02.13					Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Kb					42.000.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.14.03.					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	-Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB) - Drop out KB - Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat -Jumlah penanganan kasus terkait layanan KB -Jumlah peserta KB aktif pria -Persentase kelompok PIK remaja yang dibina -Rasio petugas lapangan keluarga berencana atau penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) dibanding jumlah desa/kelurahan -Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) dibanding jumlah desa/kelurahan -Rasio sub PPKBD dibanding jumlah desa/kelurahan		-9 -15 -100 -10 -5250 -100 -1:1 -1:1 -1:1	-persen -persen -persen -kasus -orang -persen -rasio -rasio -rasio	-		
2.14.03.2.01.					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB		12	bulan	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
2.14.03.2.01.01					Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah stakeholders dan mitra kerja yang mengikuti sosialisasi program KKBPK		-18 - 239	- kecamatan - desa/kelurahan	6.300.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.14.03.2.01.02					Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah KIE yang dilaksanakan di wilayah		10	lokasi	193.620.000	DAK Non Fisik	DINSOSDALDUKBP3A
2.14.03.2.01.03					Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah media KIE yang dibuat dan di distribusikan		4	jenis	4.000.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.14.03.2.01.04					Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah media promosi KIE yang digunakan		3	media	6.000.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.14.03.2.01.05					Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	Terselenggaranya Kegiatan Harganas		1	event	20.000.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.14.03.2.01.08					Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah balai penyuluh yang difasilitasi pengelolaan dan pemeliharaannya		18	balai penyuluh	1.861.776.000	DAK Non Fisik	DINSOSDALDUKBP3A
2.14.03.2.02.					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga penyuluh KB yang diperdagakan		100	persen	-		
2.14.03.2.02.04					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP yang difasilitasi kegiatan KIE Bangga Kencana		- 239 - 1.569	- PPKBD - Sub PPKBD	1.434.000.000	DAK Non Fisik	DINSOSDALDUKBP3A
2.14.03.2.03.					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke wilayah		100	persen	-		
2.14.03.2.03.01					Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes, akseptor MOW dan akseptor MOP yang difasilitasi alat dan obat kontrasepsi		- 42 - 50 - 30	- Faskes - Akseptor MOW - Akseptor MOP	98.952.000	DAK Non Fisik	DINSOSDALDUKBP3A
2.14.03.2.03.04					Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah peserta KB yang mengalami komplikasi dan kegagalan MKJP yang difasilitasi		10	orang	10.000.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.14.03.2.03.06					Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB		5/14	kecamatan/PKB	1.331.753.000	DAK Fisik Reguler	DINSOSDALDUKBP3A
2.14.03.2.03.08					Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah penduduk usia subur yang mengikuti pembinaan KB dan KR		1.512	orang	18.900.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.14.03.2.03.13					Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah pria ber KB		30	pria	-		DINSOSDALDUKBP3A
2.14.03.2.04.					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase mitra kerja yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB			persen	-		
2.14.03.2.04.01					Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah mitra kerja yang berperan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB		5	mitra	35.873.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.14.03.2.04.03					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang dikelola melalui program KKBPK		36	Kampung KB	1.701.992.000	DAK Non Fisik	DINSOSDALDUKBP3A

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
2.14.04.				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	- Jumlah NKKBS - Cakupan keluarga mengikuti UPPKS - Cakupan anggota UPPKS yang mengikuti KB - Cakupan kelompok bina keluarga sejahtera - Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa atau kelurahan		- 4 - 13,61 - 77,2 - 86,95 - 100	- kelompok - persen - persen - persen - persen	-		
2.14.04.2.01.				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Tingkat keluarga sejahtera			persen	-		
2.14.04.2.01.03				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang mengikuti pelatihan		30	desa	40.375.000	DAK Penugasan	DINSOSDALDUKBP3A
2.14.04.2.01.04				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang mengikuti pelatihan		180/18	kader/kec	25.567.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.14.04.2.01.08				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Orang tua yang mengikuti Sosialisasi Program Orang Tua Hebat dan Siswa yang mengikuti sosialisasi Genre		- 18 - 540	- kecamatan - orang tua dan anak	21.200.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.14.04.2.02.				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga			persen	-		
2.14.04.2.02.04				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Mitra yang mengikuti sosialisasi Program Genre		50	remaja purbalingga	4.091.000		DINSOSDALDUKBP3A
2.15				2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					-		
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Data smpk, Gerson, SKP	DINHUB	- 100 -	- persen - Poin - Poin	-		
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	DINHUB	- 100 - 100	- persen - persen	-		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	DINHUB	2	dokumen	13.765.000		DINHUB
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	DINHUB	20	dokumen	7.410.000		DINHUB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	DINHUB	12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	DINHUB		ASN	4.339.132.200		DINHUB
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	DINHUB		Orang Kali (ok)	15.000.000		DINHUB
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	DINHUB	12	bulan	7.450.000		DINHUB
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	DINHUB	12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	DINHUB	12	bulan	1.000.000		DINHUB
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	DINHUB	12	bulan	122.400.000		DINHUB
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DINHUB	12	bulan	3.000.000		DINHUB
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	DINHUB		kendaraan/bulan	17.650.000		DINHUB
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	DINHUB		orang/bulan	363.881.000	thl (SK Ka dinas)	DINHUB
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Peniaga Malam	DINHUB		orang/bulan	54.000.000	thl (SK Bupati)	DINHUB
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	DINHUB		jenis	10.000.000		DINHUB
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DINHUB		jenis	8.450.000		DINHUB
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	DINHUB		lembar	18.500.000		DINHUB
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	DINHUB		jenis unit/buah	2.500.000		DINHUB
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	DINHUB		eksemplar/bulan	2.520.000		DINHUB
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	DINHUB		bulan	98.760.000		DINHUB
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	DINHUB		orang kali (OK)	16.000.000		DINHUB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	DINHUB		orang kali (OK)	47.387.000		DINHUB
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)	DINHUB		unit	12.600.000		DINHUB
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	DINHUB		unit	52.271.000		DINHUB
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin	DINHUB	- 0	- persen	-		
						- Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 100	- persen			
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	DINHUB	...orang kali		15.000.000		DINHUB
2.15.02.					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	-Cakupan ruas jalan kolektor primer bermarka		-1170	-m2	-		
						-Cakupan kendaraan angkutan umum yang layak operasi (lulus uji KIR)		-100	-persen			
						-Persentase kendaraan angkutan umum masuk terminal		-100	-persen			
						-Jumlah penumpang terlayani angkutan		-100	-persen			
2.15.02.2.02.					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten		100	persen	-		
2.15.02.2.02.01					Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah LPJU yang terpasang		44	unit	3.128.412.591		DINHUB
2.15.02.2.02.02					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarpras Lalu-lintas yang terpasang		318	unit	1.227.547.100	DTU	DINHUB
2.15.02.2.02.02					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah APILL yang terpasang		2	unit	-		DINHUB
2.15.02.2.02.03					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah LPJU yang terpelihara		9000	titik	1.466.615.000		DINHUB
2.15.02.2.02.04					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Sarpras Lalu lintas yang terpelihara		1	unit	190.000.000		DINHUB
2.15.02.2.03.					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan pengelolaan terminal penumpang type C		100	persen	-		
2.15.02.2.03.03					Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah kebutuhan sarpras terminal yang terpenuhi			unit	2.072.800.000		DINHUB
2.15.02.2.03.04					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah fasilitas pendukung terminal yang terbangun		2	unit	-		DINHUB
2.15.02.2.04.					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan penerbitan izin penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas parkir		100	persen	-		
2.15.02.2.04.02					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas parkir			izin	93.725.000		DINHUB
2.15.02.2.05.					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan sarpras pengujian kendaraan bermotor		100	persen	-		
2.15.02.2.05.01					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarpras pengujian kendaraan bermotor			unit	461.451.000		DINHUB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
2.15.02.2.06.				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten		100	persen	-		
2.15.02.2.06.04				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten	Jumlah kegiatan manajemen lalu lintas		3	kegiatan	42.320.000		DINHUB
2.15.02.2.07.				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan persetujuan hasil Andalalin		100	kegiatan	-		
2.15.02.2.07.03				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah penilaian hasil analisis dampak lalu lintas		5	kegiatan	15.520.000		DINHUB
2.15.02.2.08.				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ		100	persen	-		
2.15.02.2.08.02				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan operasi teknis laik jalan dan pemilihan abdi Yaksa Teladan		2	kegiatan	26.140.000		DINHUB
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota					12.730.000		DINHUB
2.15.02.2.10.				Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan				-		
2.15.02.2.10.02				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelenggaraan angkutan pada hari besar nasional		5	kegiatan	353.860.000		DINHUB
2.15.02.2.11.				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan				-		
2.15.02.2.11.03				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan awak angkutan dan operasional bus sekolah		4	kegiatan	392.650.000		DINHUB
2.16				2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					-		
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Persentase Cakupan E-KP	DINKOMINFO	- 100 - -	- persen - Poin - Poin	- - -		
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	DINKOMINFO	- 100 - 100	- persen - persen	- -		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	DINKOMINFO	2	dokumen	10.800.000		DINKOMINFO
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	DINKOMINFO	20	dokumen	5.670.000		DINKOMINFO
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	DINKOMINFO			-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	DINKOMINFO		ASN	2.969.167.500		DINKOMINFO
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	DINKOMINFO		Orang Kali (ok)	10.100.000		DINKOMINFO
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	DINKOMINFO	12	bulan	3.000.000		DINKOMINFO
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	DINKOMINFO	12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	DINKOMINFO	12	bulan	972.000		DINKOMINFO
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi	DINKOMINFO	12	bulan	41.400.000		DINKOMINFO
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DINKOMINFO	12	bulan	2.900.000		DINKOMINFO
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	DINKOMINFO		kendaraan/bulan	6.400.000		DINKOMINFO
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	DINKOMINFO		orang/bulan	50.100.000		DINKOMINFO
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	DINKOMINFO		orang/bulan	29.040.000		DINKOMINFO
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	DINKOMINFO		jenis	2.900.000		DINKOMINFO
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DINKOMINFO		jenis	7.611.840		DINKOMINFO
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	DINKOMINFO		lembar	10.309.500		DINKOMINFO
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	DINKOMINFO		jenis unit/buah	2.644.920		DINKOMINFO
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DINKOMINFO		jenis unit/buah	2.062.800		DINKOMINFO
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DINKOMINFO		jenis unit/buah	5.187.918		DINKOMINFO
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	DINKOMINFO		bulan	56.123.500		DINKOMINFO
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	DINKOMINFO		orang kali (OK)	16.821.000		DINKOMINFO
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	DINKOMINFO		orang kali (OK)	51.907.500		DINKOMINFO
x.xx.01.2.03.20					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional baru	DINKOMINFO	2R2	unit	-		DINKOMINFO
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)	DINKOMINFO	4	jenis unit/buah	-		DINKOMINFO
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pencatatan, dll)	DINKOMINFO		unit	2.500.000		DINKOMINFO
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	DINKOMINFO		unit	15.435.000		DINKOMINFO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	DINKOMINFO	- 0 - 100	- persen	-		
x.xx.01.2.04.03					Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	DINKOMINFO	10	stel	3.000.000		DINKOMINFO
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik	DINKOMINFO	4	pcs	-		DINKOMINFO
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	DINKOMINFO		orang kali	16.200.000		DINKOMINFO
2.16.02.					Program Informasi dan Komunikasi Publik	-Cakupan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terpublikasi -Cakupan wilayah yang terjangkau oleh siaran radio Pemerintah Daerah -Cakupan kelompok informasi masyarakat (KIM) ditingkat kecamatan -Cakupan kegiatan penyebaran informasi dan dialog melalui TV dan Radio -Cakupan kegiatan komunikasi kehumasan antar SKPD dan instansi vertikal -Cakupan komunikasi dan kerjasama dengan media massa (cetak dan online) -Cakupan kegiatan diseminasi informasi ke masyarakat melalui media massa -Cakupan penyusunan naskah kebijakan Pemda		-100 -65 -18 -12 -2 -30 -20 -250	-kali -Sterming -KIM -Kali -Kali -Kali -Media -Naskah	-		
2.16.02.2.01.					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemda		100	persen	-		
2.16.02.2.01.05					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemkab		276	kali	377.451.500		DINKOMINFO
2.16.02.2.01.06					Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dialog interaktif di radio dan televisi		14	kali	312.540.000		DINKOMINFO
2.16.02.2.01.10					Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah informasi publik Pemkab yang disusun dan daftar informasi yang dikecualikan		29	PPID Pembantu	35.656.000		DINKOMINFO
2.16.02.2.01.12					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kemitraan yang terbentuk		18, 1, 2	Forum KIM, FK Mitra, P	27.300.000		DINKOMINFO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
2.16.03.				Program Aplikasi Informatika	-Persentase SKPD yang memiliki website -Intensitas updating informasi pada website pemerintah daerah -Cakupan sistem informasi manajemen (SIM) milik pemerintahan daerah yang berfungsi dan aktif -Jumlah pelayanan publik secara online		-43 -setiap hari -43 -15	-SKPD -Hari -SKPD -Web	-		
2.16.03.2.01.				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah	Cakupan pengelolaan nama subdomain pemda		100	persen	-		
2.16.03.2.01.02				Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah website dan subdomain website pemda yang terpelihara		-1 -31 -5 -18 -15	-website purbalingga.go.id -sub domain -sub domain kecamatan -sub domain puskesmas -subdomain kelurahan -website desa.id	70.200.000		DINKOMINFO
2.16.03.2.01.03				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan internet untuk kepentingan pemda		5	sistem	1.042.000.000		DINKOMINFO
2.16.03.2.02.				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan aplikasi yang terpeliharanya dan aktivasi		100	persen	-		
2.16.03.2.02.07				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang terpeliharanya dan aktivasi		7	aplikasi	163.040.000	DID	DINKOMINFO
2.17				2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					-		
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ~~- Persentase Cakupan SKPD~~		- 100 - 82	- % -Poin	-	Urusan Koperasi UKM	
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	DINKOPUKM	- 100 100	- % %	-	Gaji dan Tamsil	
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	DINKOPUKM	2	dokumen	9.368.500		DINKOPUKM
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	DINKOPUKM	4	dokumen	5.000.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	DINKOPUKM	12	bulan	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	DINKOPUKM	35	ASN	2.395.618.500	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	DINKOPUKM	74	Orang kali (ok)	20.000.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	DINKOPUKM	12	bulan	6.616.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	DINKOPUKM	12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	DINKOPUKM	12	bulan	875.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	DINKOPUKM	12	bulan	43.200.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DINKOPUKM	12	bulan	-	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	DINKOPUKM	4 R4, 16 R2	kendaraan/bulan	22.025.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	DINKOPUKM	18	orang/bulan	95.750.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	DINKOPUKM	2	orang/bulan	57.600.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	DINKOPUKM	9	jenis	10.800.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DINKOPUKM	32	jenis	11.302.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	DINKOPUKM	8200	lembar	10.475.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	DINKOPUKM	12	jenis unit/buah	1.837.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DINKOPUKM	-4 komputer -4 laptop -4 printer -2 AC -1 kulkas -2 rak arsip -2 filling cabinet -5 layur -14 bendera -10 pigura -5 bantal & sarung kursi -1 vacum cleaner -1 banner	jenis unit/buah	21.350.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DINKOPUKM	2 water toren 500 L	jenis unit/buah	5.000.000	DAU	DINKOPUKM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	DINKOPUKM	60	eksemplar/bulan	4.800.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	DINKOPUKM	6 bahan pembersih, 20 kendaraan BBM, 6 tabung gas, 1 paket tanaman, 12 karangan bunga, 5 plakat	Jenis	68.710.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	DINKOPUKM	800	orang kali (OK)	11.550.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	DINKOPUKM	83	orang kali (OK)	85.390.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)	DINKOPUKM	-3 kursi tamu -30 kursi pelatihan	jenis unit/buah	-	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)	DINKOPUKM	2	unit	49.785.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	DINKOPUKM	4 R4, 16 R2	unit	53.095.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)	DINKOPUKM	20	unit	10.000.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.03.40					Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya rehabilitasi kendaraan dinas/operasional	DINKOPUKM	2	unit	3.000.000	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	DINKOPUKM	- 100 - 100	- % - %	-		
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik	DINKOPUKM	35	pcs	-	DAU	DINKOPUKM
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	DINKOPUKM	10	orang kali	-	DAU	DINKOPUKM
2.17.03.					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif		80	persen	-		
2.17.03.2.01.					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Pertambahan jumlah koperasi aktif		12	unit	-		
2.17.03.2.01.01					Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi/LKM yang diawasi dan diperiksa	Kab. Purbalingga	120	unit	89.606.000	DAU	DINKOPUKM
2.17.04.					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat		60	persen	-		
2.17.04.2.01.					Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu)	Pertambahan jumlah koperasi sehat		10	unit	-		
2.17.04.2.01.01					Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai	Kab. Purbalingga	120	unit	34.926.000	DAU	DINKOPUKM
2.17.04.2.01.02					Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan koperasi predikat terbaik	Kab. Purbalingga	6	unit	55.358.000	DAU	DINKOPUKM
2.17.05.					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan kualitas koperasi		20	persen	-		
2.17.05.2.01.					Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam	Persentase koperasi yang difasilitasi pelatihan		50	persen	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu		
					Indikator Kinerja	Lokasi				Target	Satuan
2.17.05.2.01.01				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	-Jumlah peserta pelatihan manajemen koperasi -Jumlah peserta pelatihan akuntansi -Jumlah peserta studi komparasi	Kab. Purbalingga	-120 -120 -120	-orang -orang -orang	92.250.000	DAU	DINKOPUKM
2.17.06.			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			Persentase koperasi yang diberdayakan	100	persen	-		
2.17.06.2.01.			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang			Jumlah koperasi yang dibina	224	unit	-		
2.17.06.2.01.01				Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	-Jumlah Pasar Murah -Peringatan harkop	Kab. Purbalingga	-1 -1	-kali -kali	212.147.000	DAU	DINKOPUKM
2.17.06.2.01.01				Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Hibah dekopinda	Kab. Purbalingga	1	paket	-	DAU	DINKOPUKM
2.17.07.			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)			-Persentase UMKM yang bersertifikat/berizin -Cakupan UMKM yang difasilitasi promosi pemasaran -Cakupan UMKM yang difasilitasi melalui internet	-15 -300 -250	-persen -unit -unit	-		
2.17.07.2.01.			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan			Jumlah UMKM yang difasilitasi perizinan dan permodalan	2000	unit	-		
2.17.07.2.01.01				Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Updating data UMKM	Kab. Purbalingga	239	desa/kel	-	DAU	DINKOPUKM
2.17.07.2.01.02				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM mendapat subsidi bunga	Kab. Purbalingga	1000	UMKM	-	DAU	DINKOPUKM
2.17.07.2.01.02				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kerjasama LIPI serta fasilitasi BUMD dan swasta	Kab. Purbalingga	1	paket	-	DAU	DINKOPUKM
2.17.07.2.01.03				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang terfasilitasi perizinannya (hak merk)	Kab. Purbalingga	60	unit	98.000.000	DAU	DINKOPUKM
2.17.07.2.01.04				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	-Fasilitasi pendamping UMKM -Pelatihan, hibah dan studi pesantren	Kab. Purbalingga	-1 -75	-paket -unit	1.027.184.000	DAU	DINKOPUKM
2.17.07.2.01.04				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	-Fasilitasi pendamping UMKM -Pelatihan, hibah dan studi pesantren	Kab. Purbalingga	-1 -75	-paket -unit	-	DAU	DINKOPUKM
2.17.08.			Program Pengembangan UMKM			-Jumlah UMKM naik kelas -Pertumbuhan jumlah UMKM -Pertumbuhan UMKM berorientasi ekspor	-22 - -45	-unit -unit -unit	-		
2.17.08.2.01.				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi dan pemasaran		2000	unit	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan		
2.17.08.2.01.01				Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	-Terseleenggaranya pameran dan festival UMKM, -Pengadaan cendera mata -Bantuan sarpras UMKM	Lokal, regional,	-20 -1000 -10	-kali -paket -paket	1.031.134.000 DAU / DBH CHT DINKOPUKM
2.18				2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				-	
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPMPTSP	- 100% - 83	- persen - Poin	Urusan Penanaman Modal
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang diindaklanjuti	DPMPTSP	-100 -100	- persen - persen	Gaji dan Tamsil
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	DPMPTSP	1	dokumen	6.572.000 DPMPTSP
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	DPMPTSP	6	dokumen	3.550.000 DPMPTSP
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	DPMPTSP	12	bulan	-
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	DPMPTSP	22	ASN	2.679.975.333 DPMPTSP
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	DPMPTSP	262	Orang Kali (ok)	13.500.000 DPMPTSP
x.xx.01.2.02.04				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	DPMPTSP	12	bulan	3.050.000 DPMPTSP
x.xx.01.2.03				Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	DPMPTSP	12	bulan	-
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	DPMPTSP	12	bulan	550.000 DPMPTSP
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi	DPMPTSP	12	bulan	69.000.000 DPMPTSP
x.xx.01.2.03.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DPMPTSP	12	bulan	4.500.000 DPMPTSP
x.xx.01.2.03.06				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	DPMPTSP	5 R4, 12 R2	kendaraan/bulan	22.500.000 DPMPTSP
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	DPMPTSP	13	orang/bulan	64.200.000 DPMPTSP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	DPMPTSP	6	jenis	10.525.000		DPMPTSP
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPMPTSP	32	jenis	25.362.615		DPMPTSP
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	49.200	lembar	43.825.000		DPMPTSP
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	DPMPTSP	9	jenis unit/buah	1.814.000		DPMPTSP
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DPMPTSP	-6 komputer -4 laptop -5 printer -4 AC -1 kulkas -3 rak arsip - 1 meja resepsionis -5 layur -14 bendera -1 vacum cleaner -1 banner	jenis unit/buah	2.400.000		DPMPTSP
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DPMPTSP	- 24 piring - 24 sendok - 1 kompor - 1 dispenser - 24 cangkir - 36 gelas - 1 ketel -1 panci	jenis unit/buah	500.000		DPMPTSP
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran, peraturan perundangan)	DPMPTSP	988	jenis unit/buah	1.140.000		DPMPTSP
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	DPMPTSP	12	bulan	60.247.500		DPMPTSP
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	DPMPTSP	1214	Orang Kali (ok)	24.840.000		DPMPTSP
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	DPMPTSP	290	Orang Kali (ok)	50.390.000		DPMPTSP
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)	DPMPTSP	2	set	14.500.000		DPMPTSP
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)	DPMPTSP	1	unit	44.500.000		DPMPTSP
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	DPMPTSP	5 R4, 12 R2	unit	22.106.000		DPMPTSP
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		1	unit	2.500.000		DPMPTSP
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	DPMPTSP	-0 - 100	- persen - persen	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	DPMPTSP	10	orang kali	-		DPMPTSP
2.18.02.					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					-		
2.18.02.2.01.					Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Terbitnya Perda Penanaman Modal		1	dokumen	-		
2.18.02.2.01.01					Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kajian dan Raperda terkait insentif dan kemudahan penanaman modal		1	dokumen	20.600.000		DPMPTSP
2.18.02.2.02.					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunya profil investasi		60	buku	-		
2.18.02.2.02.02					Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil investasi dan buku induk penanaman modal		60	buku	28.750.000		DPMPTSP
2.18.03.					Program Promosi Penanaman Modal	-Pertumbuhan jumlah perusahaan PMDN (baru) -Pertumbuhan jumlah perusahaan PMA (baru) -Pertumbuhan nilai investasi PMDN (baru/Rp.000) -Pertumbuhan nilai investasi PMA (baru/Rp.000) -Realisasi investasi total (baru/Rp.000)		-800 -2 -750,000,000 -20,000,000 -770,000,000	-unit -unit -rupiah -rupiah -rupiah	-		
2.18.03.2.01.					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal		3	kegiatan	-		
2.18.03.2.01.02					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran dan business gathering		3	kegiatan	58.085.000		DPMPTSP
2.18.04.					Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perijinan		82,25	poin	-		
2.18.04.2.01.					Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan perizinan		750	perizinan	-		
2.18.04.2.01.01					Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sosialisasi Perizinan		4	kegiatan	95.450.000		DPMPTSP
2.18.04.2.01.02					Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah subyek retribusi perizinan yang dipantai dan diawasi		750	perizinan	67.800.000		DPMPTSP
2.18.04.2.01.03					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan					28.150.000		DPMPTSP
2.18.04.2.01.04					Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah					7.590.000		DPMPTSP
2.18.05.					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rata-rata jangka waktu proses perijinan		4,2	kali	-		
2.18.05.2.01.					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan dan movev terhadap perusahaan - perusahaan		576	kali	-		
2.18.05.2.01.01					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dipantau dan jumlah buku laporan movev		-576 -4	-perusahaan -buku	48.600.000		DPMPTSP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal						11.390.000		DPMPTSP
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal						-		DPMPTSP
2.18.06.				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah ijin yang dilayani di PTSP (jenis)			24	jenis	-		
2.18.06.2.01.				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat	Terintegrasinya Data dan Informasi Perizinan			2400	berkas	-		
2.18.06.2.01.01				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah berkas yang diintegrasikan			2400	berkas	21.000.000		DPMPTSP
2.19				2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA						-		
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DINPORAPAR		- 100	- 100%	-		
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	DINPORAPAR		-100	- persen	-		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	DINPORAPAR		1	dokumen	7.536.000		DINPORAPAR
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	DINPORAPAR		4	dokumen	4.011.000		DINPORAPAR
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	DINPORAPAR		12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	DINPORAPAR		32	SN	3.284.900.000		DINPORAPAR
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	DINPORAPAR		344	Orang Kali (ok)	320.000		DINPORAPAR
x.xx.01.2.02.04				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	DINPORAPAR		12	bulan	3.761.000		DINPORAPAR
x.xx.01.2.03				Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	DINPORAPAR		12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	DINPORAPAR		12	bulan	486.000		DINPORAPAR
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi	DINPORAPAR		12	bulan	46.620.000		DINPORAPAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	DINPORAPAR	17 R2, 5 R4	bulan	55.025.000		DINPORAPAR
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	DINPORAPAR	20	kendaraan/bulan	116.950.000		DINPORAPAR
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	DINPORAPAR	3	orang/bulan	93.600.000		DINPORAPAR
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	DINPORAPAR	4	orang/bulan	4.100.000		DINPORAPAR
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DINPORAPAR	41	jenis	6.557.000		DINPORAPAR
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	DINPORAPAR	44000	lembar	7.978.000		DINPORAPAR
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	DINPORAPAR	11	jenis unit/buah	1.025.000		DINPORAPAR
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DINPORAPAR	6	jenis unit/buah	6.100.000		DINPORAPAR
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	DINPORAPAR	4	eksemplar/bulan	1.500.000		DINPORAPAR
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	DINPORAPAR	12	bulan	75.430.000		DINPORAPAR
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	DINPORAPAR	512	orang kali (OK)	5.225.000		DINPORAPAR
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	DINPORAPAR	366	orang kali (OK)	19.940.000		DINPORAPAR
x.xx.01.2.03.22					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (garasi, kamar mandi, partisi, tempat parkir, dll)	DINPORAPAR	1	jenis unit/buah	-		DINPORAPAR
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)	DINPORAPAR	1	jenis unit/buah	-		DINPORAPAR
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)	DINPORAPAR	1	unit	11.920.000		DINPORAPAR
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur					1.000.000		DINPORAPAR
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	DINPORAPAR	-0 - 100	- persen - persen	-		
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	DINPORAPAR	6	orang kali	-		DINPORAPAR
2.19.02.					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	-Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi -Cakupan kegiatan kepemudaan yang difasilitasi		-69 -132	-organisasi -kelompok	-		
2.19.02.2.01.					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda	Jumlah pemuda yang meningkat kapasitasnya		252	orang	-		
2.19.02.2.01.01					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang mengikuti peningkatan kapasitas		40	orang	79.958.000	DID	DINPORAPAR
2.19.02.2.01.02					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah wirausaha pemula yang mengikuti peningkatan kapasitas		85	orang	-		DINPORAPAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
2.19.02.2.01.03				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda kader yang mengikuti peningkatan kapasitas			92	orang	522.316.000	DID	DINPORAPAR
2.19.02.2.01.07				Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah pemuda dan orang pemuda berprestasi			35, 5	orang, organisasi	-		DINPORAPAR
2.19.02.2.02.				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan dan pengembangan organisasi kebudayaan			26	organisasi	-		
2.19.02.2.02.01				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah kemitraan yang terbangun			20	kemitraan	-		DINPORAPAR
2.19.02.2.02.02				Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang difasilitasi			60	orang	402.700.000	DID	DINPORAPAR
2.19.02.2.02.02				Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi			26	organisasi	145.000.000		DINPORAPAR
2.19.03.				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	-Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional -Cakupan kelompok/organisasi olahraga yang difasilitasi			-135 -6	-piagam -organisasi	-		
2.19.03.2.01.				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Terbangunnya sarpras olahraga			2	unit	-		
2.19.03.2.01.03				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga			2	unit	311.709.000	DID	DINPORAPAR
2.19.03.2.01.03				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota						10.000.000.000		DINPORAPAR
2.19.03.2.02.				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan olahraga yang difasilitasi			195	kegiatan	-		
2.19.03.2.02.01				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan yang diselenggarakan			9	cabor	135.568.000		DINPORAPAR
2.19.03.2.02.02				Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah kejuaraan yang diselenggarakan (Popda)			14	cabor	510.751.000	DID	DINPORAPAR
2.19.03.2.02.03				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah kejuaraan yang diikuti			4	kegiatan	462.741.000	DID	DINPORAPAR
2.19.03.2.03.				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional/provinsi			450	piagam	-		
2.19.03.2.03.02				Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah peserta Pelatda			650	orang	-		DINPORAPAR
2.19.03.2.03.03				Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah atlet berprestasi yang dibina			120	orang	5.690.000	DID	DINPORAPAR
2.19.03.2.03.04				Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi			135	orang	-		DINPORAPAR
2.19.03.2.04.				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan organisasi keolahragaan yang dibina			100	persen	-		
2.19.03.2.04.02				Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi keolahragaan yang difasilitasi			2	organisasi	2.600.000.000		DINPORAPAR
2.19.04.				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan organisasi kepramukaan yang dibina				persen	-		
2.19.04.2.01.				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina				organisasi	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
2.19.04.2.01.05					Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan Kwardcab yang difasilitasi			kali	350.000.000		DINPORAPAR
2.20					2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					-		
2.20.02.					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data dasar pembangunan		100	persen	-		
2.20.02.2.01.					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dasar pembangunan yang difasilitasi		3	unit	-		
2.20.02.2.01.03					Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah buku PDA dan KDA yang dicetak		-100 -180	-dokumen -dokumen	106.620.400		DINKOMINFO
2.20.02.2.01.06					Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral		51	data	15.626.000		DINKOMINFO
2.21					2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					-		
2.21.02.					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan informasi pemerintah daerah melalui SANTEL yang tersampaikan kepada pihak terkait		100	persen	-		
2.21.02.2.02.					Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi pemerintah yang difasilitasi		2	unit	-		
2.21.02.2.02.01					Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BTS dan Radio yang diawasi		-164 -18	-BTS -radio	86.541.240		DINKOMINFO
2.22					2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					-		
2.22.02.					Program Pengembangan Kebudayaan	-Cakupan gelar seni -Cakupan misi kesenian -Cakupan sumber daya manusia kesenian -Cakupan tempat gelar seni -Cakupan organisasi kesenian yang aktif		-100 -100 -100 -100 -307	-persen -persen -persen -persen -persen	-		
2.22.02.2.01.					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event kebudayaan yang dilaksanakan		14	kegiatan	-		
2.22.02.2.01.01					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	-Jumlah Festival Permainan Rakyat -Jumlah Festival olahraga tradisional -Jumlah inventarisasi warisan budaya tak benda -Festival jendral soedirman -Jumlah Pawai Budaya -Jumlah Pawai Pembangunan -Jumlah Purbalingga Fashion Carnival		-5 -5 -2 -1 -1 -1 -1	- kegiatan - kegiatan -jenis -kegiatan -kegiatan -kegiatan -kegiatan	281.587.000		DINDIKBUD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
2.22.02.2.01.02					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-Jumlah fasilitasi Dewan Kesenian dan PEPADI -Jumlah pengadaan alat musik gamelan -Jumlah pengelolaan panggung mahesa jenar -Jumlah honor tenaga kesenian		-2 -3 -1, 2 , 3 -5	-kelompok -set -panggung, orang tenaga operator, orang tenaga kebersihan -5orang/ bulan	151.094.000		DINDIKBUD
2.22.02.2.02.					Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event tradisi budaya yang dilaksanakan			kegiatan	-		
2.22.02.2.02.01					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	-Jumlah Revitalisasi kesenian tradisional -Jumlah Inventarisasi data base kesenian -Jumlah pengiriman tim kesenian dalam provinsi -Jumlah pengiriman luar provinsi -Jumlah pengiriman tim kesenian nasional -Jumlah Fasilitasi Pentas Non Wayang -Jumlah Gelar Seni dan Budaya (Wayang Kulit Lokal, Wayang Kulit Non Lokal, Pagelaran Seni Budaya) -Jumlah festival karawitan -Jumlah Festival Film Purbalingga -Jumlah Festival Kentongan		-4 -1 -1 -1 K -1 -1 -250 -10 & 2 -2 -1	-Kesenian -Kegiatan -Tim Parade HUT JATENG -Kegiatan Di Pekan Kesenian Bali -kegiatan -kelompok -Wayang kulit lokal & 2 Wayang Kulit Non Lokal, Pagelaran Seni, Kirab Pusaka, Pahargyan -kegiatan -kegiatan -kegiatan	230.750.000		DINDIKBUD
2.22.02.2.02.02					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-Jumlah apresiasi seni -Jumlah pentas seni masal -Jumlah Pekan Seni pelajar -Jumlah pentas seni Pelajar -Jumlah pentas seni masyarakat -Jumlah Pameran Seni		-22 Kegiatan -2 kegiatan -1 kegiatan -8 kegiatan 2 & 2 -1 kegiatan	-kegiatan - kegiatan - kegiatan - kegiatan - Pentas Dangdut & Pentas Artis Ibukota -1 kegiatan	200.000.000		DINDIKBUD
2.22.02.2.03.					Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina			kelompok	-		
2.22.02.2.03.01					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah pendataan organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME		8	kelompok	20.000.000		DINDIKBUD
2.22.02.2.03.02					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	jumlah temu Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME		1	kegiatan	-		DINDIKBUD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
2.22.02.2.03.03					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah fasilitasi organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME		8	kegiatan	-		DINDIKBUD
2.22.03.					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	-Cakupan kajian seni -Cakupan fasilitasi seni		-8 -143	-persen -persen	-		
2.22.03.2.01.					Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event kesenian yang dilaksanakan			kegiatan	-		
2.22.03.2.01.01					Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	-Jumlah workshop seni -Jumlah bengkel seni yang terfasilitasi		-2 -4	-kegiatan -kegiatan	-		DINDIKBUD
2.22.03.2.01.03					Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah temu pelaku budaya yang terselenggara			-kegiatan -kegiatan	-		DINDIKBUD
2.22.04.					Program Pembinaan Sejarah	Cakupan organisasi kesejarahan yang dibina		100	persen	-		
2.22.04.2.01.					Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kesejarahan dan pembinaan saka widya budaya bhakti yang terfasilitasi		-2 organisasi -2 kegiatan	-organisasi -kegiatan	-		
2.22.04.2.01.01					Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah event yang diselenggarakan oleh organisasi kesejarahan		5	kegiatan	58.532.000		DINDIKBUD
2.22.05.					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	-Cakupan jumlah juru pelihara cagar budaya -Cakupan cagar budaya yang dikonservasi		-70 -100	-persen -persen	-		
2.22.05.2.01.					Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan		360	buah	-		
2.22.05.2.01.01					Register Cagar Budaya	Jumlah objek penetapan cagar budaya		-2 -5	-objek tingkat Nasional -objek tingkat Provinsi	83.545.500		DINDIKBUD
2.22.05.2.01.02					Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikonservasi		3	objek	165.428.000		DINDIKBUD
2.22.05.2.01.04					Pendayagunaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang digunakan sebagai media pembelajaran		1	cagar budaya	91.232.000		DINDIKBUD
2.22.06.					Program Pengelolaan Permuseuman	Rasio pengunjung museum			persen	-		
2.22.06.2.01.					Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan museum dan monumen		300.000	orang	-		
2.22.06.2.01.01					Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah koleksi yang dikonservasi		1182	koleksi	98.375.000	DAK Non Fisik	DINDIKBUD
2.22.06.2.01.03					Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah kegiatan di museum dan rilis media		6	kegiatan	82.276.000	DAU	DINDIKBUD
2.22.06.2.01.03					Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah kegiatan di museum dan rilis media				396.167.000	DAK Non Fisik	DINDIKBUD
2.22.06.2.01.04					Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah museum dalam kondisi baik dan terpelihara		1	museum	-	DAU	DINDIKBUD
2.22.06.2.01.04					Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah museum dalam kondisi baik dan terpelihara				120.458.000	DAK Non Fisik	DINDIKBUD
2.23					2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja		Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		DINARPUS	- 100%	- 100%	-		
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti		DINARPUS	- 75	- persen	-		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja		DINARPUS	2	dokumen	5.025.000		DINARPUS
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKJP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun		DINARPUS	6	dokumen	1.160.000		DINARPUS
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		DINARPUS	12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		DINARPUS	23	ASN	2.710.538.000		DINARPUS
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)		DINARPUS	170	OK	1.536.000		DINARPUS
x.xx.01.2.02.04				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM		DINARPUS	12	bulan	1.000.000		DINARPUS
x.xx.01.2.03				Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		DINARPUS	12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		DINARPUS	12	bulan	540.000		DINARPUS
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		DINARPUS	12	bulan	113.350.000		DINARPUS
x.xx.01.2.03.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		DINARPUS	12	bulan	-		DINARPUS
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		DINARPUS	12 bulan	bulan	-		DINARPUS
x.xx.01.2.03.06				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas		DINARPUS	- 8 R4 - 12 R2	kendaraan/bulan	32.400.000		DINARPUS
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer		DINARPUS	10	orang/bulan	382.700.000		DINARPUS
x.xx.01.2.03.08				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam		DINARPUS	2	orang	32.400.000		DINARPUS
x.xx.01.2.03.09				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja		DINARPUS	5	jenis	1.500.000		DINARPUS

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DINARPUS	10	jenis	6.477.000		DINARPUS
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	DINARPUS	30.500	lembar	7.500.000		DINARPUS
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	DINARPUS	20	jenis	-		DINARPUS
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DINARPUS	2	jenis	6.519.000		DINARPUS
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DINARPUS	12	bulan	-		DINARPUS
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	DINARPUS	60	eksemplar/bulan	2.040.000		DINARPUS
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	DINARPUS	12	bulan	84.259.000		DINARPUS
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	DINARPUS	700	OK	7.680.000		DINARPUS
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	DINARPUS	50	OK	61.910.000		DINARPUS
x.xx.01.2.03.20					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional baru	DINARPUS	4	unit	-		DINARPUS
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (garasi, kamar mandi, partisi, tempat parkir, dll)	DINARPUS	2	unit	13.000.000		DINARPUS
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	DINARPUS	- 8 R4 - 12 R2	kendaraan/bulan	14.040.000		DINARPUS
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	DINARPUS	- 0 - 40	- persen - persen	-		
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	DINARPUS	10	OK	1.560.000		DINARPUS

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
2.23.02.				Program Pembinaan Perpustakaan	- Jumlah perpustakaan -Jumlah perpustakaan yang dibina -Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar -Rasio perpustakaan per jumlah penduduk - Rasio pengunjung perpustakaan per jumlah penduduk - Jumlah koleksi buku perpustakaan -Jumlah judul buku perpustakaan -Jumlah anggota perpustakaan berkartu -Jumlah layanan perupustakaan keliling -Jumlah SDM perpustakaan yang telah mengikuti bintek perpustakaan -Jumlah perpustakaan		- 1132 -1132 -753 -0,001415 - 0,125 -98283 - 4.857 -40000 -520 -900 -7	- buah -buah -buah -persen - persen - buah -buah -orang -buah -orang -orang	-		
2.23.02.2.01.				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan tingkat daerah yang terpelihara		100	persen	-		
2.23.02.2.01.01				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah pengunjung pada perpustakaan elektronik		3.500	orang	-		DINARPUS
2.23.02.2.01.02				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung pada perpustakaan kabupaten, perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, perpustakaan ponpes, perpustakaan rumah ibadah dan perpustakaan khusus		300.000	orang	45.980.000		DINARPUS
2.23.02.2.01.02				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					500.000.000	DAK	DINARPUS
2.23.02.2.01.05				Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina		86	perpustakaan	23.835.000		DINARPUS
2.23.02.2.01.06				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan yang mengikuti diklat		55	orang	-		DINARPUS
2.23.02.2.01.08				Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah tambahan koleksi buka perpustakaan		2.500	buku	60.000.000		DINARPUS
2.23.02.2.01.08				Pengembangan Bahan Pustaka					56.225.000	DAK	DINARPUS
2.23.02.2.01.09				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dipelihara		5	jenis	19.500.000		DINARPUS
2.23.02.2.01.10				Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan yang disusun		1	dokumen	-		DINARPUS
2.23.02.2.02.				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
2.23.02.2.02.01					Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Kegiatan Budaya Baca dan Literasi		6	kegiatan	20.912.000		DINARPUS
2.23.02.2.02.03					Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Kegiatan lomba bidang perpus dan jumlah expo yg diikuti		- 10 - 3	- lomba - expo	24.695.000		DINARPUS
2.23.03.					Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno					-		
2.23.03.2.01.					Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota					-		
2.23.03.2.01.02					Pengembangan, Pengolahan dan Pengalih mediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didavagunakan	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan		3	naskah kuno	-		DINARPUS
2.24					2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					-		
2.24.02.					Program Pengelolaan Arsip	-Cakupan SKPD/ormas/BUMD/lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku -Alih media Sistem Informasi Dokumen Masyarakat (SIDOMAS)		-622 -59659	-unit -kartu keluarga	- -		
2.24.02.2.01.					Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang terkelola		100	persen	-		
2.24.02.2.01.01					Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang dikelola		20.000	berkas	29.840.000		DINARPUS
2.24.02.2.01.02					Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah penyusutan arsip dinamis		17.000	berkas	-		DINARPUS
2.24.02.2.02.					Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang terkelola		100	persen	-		
2.24.02.2.02.01					Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah salinan otentik naskah asli arsip terjaga		1.500	berkas	-		DINARPUS
2.24.02.2.02.02					Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang ter akuisisi dan diolah		1.500	berkas	-		DINARPUS
2.24.02.2.03.					Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase informasi, akses dan layan kearsipan tingkat daerah yang dapat diakses masyarakat		100	persen	-		
2.24.02.2.03.01					Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Jumlah informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah yang dimasukkan dalam JIKN		3.000	berkas	1.360.000		DINARPUS
2.24.02.2.03.02					Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Unit kearsipan yang menerapkan pengelolaan secara baku		60	unit kearsipan	9.000.000		DINARPUS
2.24.03.					Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip daerah yang telah didokumentasikan dalam bentuk elektronik (berkas)		50000	berkas	-		
2.24.03.2.01.					Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di	Tersedianya daftar berkas arsip yang dimusnahkan		1	dokumen	-		
2.24.03.2.01.01					Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan yang memiliki retensi di bawah 10 tahun		15.000	berkas	-		DINARPUS
2.24.03.2.02.					Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Tersedianya daftar arsip yang teridentifikasi dan diselamatkan		1	dokumen	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
2.24.03.2.02.01					Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip yang teridentifikasi		1.500	berkas	-		DINARPUS
2.24.03.2.02.02					Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip yang diselamatkan		1.500	berkas	-		DINARPUS
2.24.03.2.03.					Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Tersedianya daftar arsip perangkat daerah Kabupaten yang digabung/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan		1	dokumen	-		
2.24.03.2.03.01					Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip penggabungan perangkat daerah		4.000	berkas	-		DINARPUS
2.24.03.2.03.02					Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip pembubaran perangkat daerah		4.000	berkas	-		DINARPUS
2.24.03.2.03.03					Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Arsip Pemekaran daerah kecamatan		8.000	berkas	-		DINARPUS
2.24.03.2.03.04					Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip Pemekaran daerah kelurahan		4.500	berkas	-		DINARPUS
2.24.03.2.04.					Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Tersedianya autentikasi arsip statis dan hasil alih media yang sesuai persyaratan keabsahan		1	dokumen	-		
2.24.03.2.04.01					Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip autentik statis yang sesuai persyaratan penjaminan keabsahan		3.500	berkas	-		DINARPUS
2.24.03.2.04.02					Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip hasil alih media yang sesuai persyaratan penjaminan keabsahan		3.500	berkas	-		DINARPUS
2.24.03.2.05.					Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Tersedianya dokumen pencarian arsip (DPA yang dinyatakan hilang		200	dokumen	-		
2.24.03.2.05.01					Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah autentik arsip statis yang dinyatakan hilang		200	berkas	-		DINARPUS
2.24.03.2.05.02					Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah arsip hasil alih media yang dinyatakan hilang		200	berkas	-		DINARPUS
2.24.03.2.05.03					Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah DPA yang ditetapkan dan diumumkan		200	dokumen	-		DINARPUS
2.24.04.					Program Perijinan Penggunaan Arsip					-		
2.24.04.2.01.					Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang dikeluarkan		100	persen	-		
2.24.04.2.01.01					Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah buku pedoman SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup		25	buku	-		DINARPUS
2.24.04.2.01.02					Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup		125	izin	-		DINARPUS
3.					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.25					3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					-		
3.25.02.					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi ikan sungai		230	ton	-		
3.25.02.2.01.					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat	Cakupan nelayan yang terfasilitasi alat tangkap		20	%	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
3.25.02.2.01.01					Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah nelayan kecil yang didata		300	nelayan	5.000.000		DKPP
3.25.02.2.01.03					Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan yang menerima sarana usaha perikanan tangkap		20	nelayan	-		DKPP
3.25.02.2.02.					Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan nelayan yang terfasilitasi pelatihan		10	%	-		
3.25.02.2.02.01					Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang ditingkatkan kapasitasnya		150	nelayan	10.000.000	DID	DKPP
3.25.02.2.02.02					Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelembagaan nelayan yang difasilitasi		5	pokwamas	-		DKPP
3.25.03.					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	-Produksi ikan konsumsi -Produksi benih -Produksi ikan hias		-5.293 -137 -980	-ton -ekor -ekor	-		
3.25.03.2.02.					Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan pokdakan yang terfasilitasi		5	%	-		
3.25.03.2.02.01					Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan dilatih		50	pembudidaya	-		DKPP
3.25.03.2.02.02					Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelembagaan pokdakan yang terfasilitasi		10	kelompok	-		DKPP
3.25.03.2.02.04					Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pokdakan yang difasilitasi demplot		5	kelompok	150.000.000		DKPP
3.25.03.2.03.					Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Cakupan pembudidaya ikan yang terdaftar		20	%	-		
3.25.03.2.03.01					Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pokdakan mengikuti sosialisasi TDPIK		10	pokdakan	7.000.000		DKPP
3.25.03.2.03.02					Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDPIK yang diterbitkan		500	TDPIK	-		DKPP
3.25.03.2.04.					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					-		
3.25.03.2.04.01					Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku statistik perikanan budidaya		5	buku	10.000.000		DKPP
3.25.03.2.04.03					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarpras UPT BIAT		1	paket	-	DAU	DKPP
3.25.03.2.04.03					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pokdakan yang mendapatkan bantuan sarana budidaya		10	kelompok	1.061.144.000	DAK	DKPP
3.25.03.2.04.03					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					60.000.000	DID	DKPP
3.25.03.2.04.04					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya ikan yang terfasilitasi pendampingan kesehatan ikan		150	pembudidaya	-		DKPP
3.25.03.2.04.05					Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah unit budidaya yang dibina dan dipantau		100	unit	-		DKPP
3.25.04.					Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan					-		
3.25.04.2.01.					Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,					-		
3.25.04.2.01.01					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah unit penangkapan ikan yang dilakukan pengawasan		200	unit	91.900.000	DBH-CHT	DKPP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
3.25.04.2.01.02					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Danat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	jumlah unit budidaya ikan yang diawasi		100	unit usaha	-		DKPP
3.25.05.					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-Tingkat konsumsi ikan -Produksi olahan hasil perikanan	tingkat konsumsi ikan	-12 -3200	-kg/kap/th -ton	-		
3.25.05.2.01.					Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan					-		
3.25.05.2.01.01					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengolah dan pemasar yang didata		100	unit usaha	6.000.000		DKPP
3.25.05.2.02.					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha			3200	ton	-		
3.25.05.2.02.01					Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	jumlah unit pengolah dan pemasar yang dibina		150	unit usaha	80.000.000	DBH-CHT	DKPP
3.25.05.2.03.					Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri					-		
3.25.05.2.03.01					Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerima manfaat ketersediaan konsumsi ikan		1200	penerima manfaat	15.000.000		DKPP
3.25.05.2.03.02					Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi dan		50	pelaku usaha	-		DKPP
3.26					3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					-		
3.26.02.					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Angka kunjungan wisata		3500000	orang	-		
3.26.02.2.01.					Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan		28	paket	-		
3.26.02.2.01.01					Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tersusunnya penetapan desa wisata	Kab. Purbalingga	1	dokumen	45.090.000		DINPORAPAR
3.26.02.2.01.03					Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Hibah pengembangan desa wisata	Kab. Purbalingga	20	paket	154.990.000		DINPORAPAR
3.26.02.2.01.04					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah desa wisata dan pokdarwis yang dibina	Kab. Purbalingga	28	desa	40.888.000		DINPORAPAR
3.26.02.2.03.					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dibina	Kab. Purbalingga	35	unit	-		
3.26.02.2.03.02					Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersusunnya masterplan destinasi wisata Karangjengkol	Kab. Purbalingga	1	dokumen	-		DINPORAPAR
3.26.02.2.03.03					Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan destinasi wisata	Kec. Kutasari	1	paket	-	DAK	DINPORAPAR
3.26.02.2.03.04					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah obyek wisata yang dipelihara	Kab. Purbalingga	1	obyek	192.970.000		DINPORAPAR
3.26.02.2.03.06					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengiriman peserta jambore, pokdarwis, studi desa wisata dan peningkatan kapasitas	Kab. Purbalingga	60	orang	162.940.000		DINPORAPAR
3.26.02.2.03.06					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah obyek dampingan	Kab. Purbalingga	20	obyek/desa	150.000.000		DINPORAPAR
3.26.02.2.04.					Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata yang terdaftar	Kab. Purbalingga	30	unit	-		
3.26.02.2.04.02					Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan TDUP yang difasilitasi	Kab. Purbalingga	25	dokumen	47.700.000		DINPORAPAR
3.26.02.2.04.03					Pengelolaan Investasi Pariwisata	Sertifikasi usaha hotel dan pelatihan manajemen hotel	Kab. Purbalingga	10	paket	157.190.000		DINPORAPAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
3.26.03.				Program Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisata		3,5	juta	-		
3.26.03.2.01.				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah even wisata yang diikuti		5	even	-		
3.26.03.2.01.01				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Promosi daya tarik (festival wisata), apresiasi duta wisata (kakang mbekayu)	Kab. Purbalingga	1	paket	193.490.000		DINPORAPAR
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan festival wisata dan famtrip	Kab. Purbalingga	3	paket	343.660.000		DINPORAPAR
3.26.05.				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Pokdarwis dan pelaku ekonomi kreatif yang dibina		15	persen	-		
3.26.05.2.01.				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku dan pendukung wisata yang dilatih		200	orang	-		
3.26.05.2.01.02				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Pelatihan dan Penguatan Saka Pariwisata	Kab. Purbalingga	100	orang	57.450.000		DINPORAPAR
3.26.05.2.01.03				Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Pelatihan homestay dan ekowisata	Kab. Purbalingga	60	OK	-		DINPORAPAR
3.26.05.2.01.04				Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Sertifikasi pemandu wisata overland	Kab. Purbalingga	40	orang	-		DINPORAPAR
3.26.05.2.01.06				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Identifikasi dan pelatihan pelaku ekonomi kreatif	Kab. Purbalingga	1	dokumen	59.707.000		DINPORAPAR
3.27				3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					-		
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Data smp, Gajian SKD	DINPERTAN	- 100 - 86 84	- persen - Poin Poin	-	Urusan Pertanian	
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	DINPERTAN	- 100 - 100	- persen - persen	-	Gaji dan Tamsil	
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	DINPERTAN	5	dokumen	15.000.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	DINPERTAN	5	dokumen	7.500.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	DINPERTAN	12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangan terbayar tepat waktu	DINPERTAN		ASN	15.943.623.050		DINPERTAN
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (> 8 jam)	DINPERTAN	400	Orang Kali (ok)	4.992.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.02.04				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	DINPERTAN	12	bulan	12.035.000		DINPERTAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	DINPERTAN	12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	DINPERTAN	12	bulan	1.590.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	DINPERTAN	12	bulan	105.600.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DINPERTAN	12	bulan	15.300.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	DINPERTAN		orang/bulan	28.600.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	DINPERTAN		orang/bulan	391.429.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	DINPERTAN		jenis	30.000.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	DINPERTAN		jenis	10.850.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DINPERTAN		lembar	11.442.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	DINPERTAN	30000	jenis unit/buah	8.250.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	DINPERTAN		jenis unit/buah	5.430.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DINPERTAN		jenis unit/buah	10.300.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DINPERTAN		bulan	540.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	DINPERTAN		eksemplar/bulan	2.040.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	DINPERTAN	12	bulan	127.200.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	DINPERTAN		orang kali (OK)	32.760.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	DINPERTAN		orang kali (OK)	72.000.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					10.300.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	DINPERTAN	65	unit	52.200.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)	DINPERTAN	20	unit	36.750.000		DINPERTAN
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	DINPERTAN		- persen	-		
x.xx.01.2.04.01					Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi	DINPERTAN	6	unit	-		DINPERTAN
x.xx.01.2.04.04					Pengadaan Pakaian Korpri	Tersedianya pakaian korpri	DINPERTAN	205	pcs	-		DINPERTAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	DINPERTAN	20	orang kali	15.000.000		DINPERTAN
3.27.02.					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan fasilitasi penanganan pasca panen produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan - Power thresher - Pemipil jagung - Rice mill unit		1.040 114 451	unit unit unit	-		
3.27.02.2.01.					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-Cakupan kelompok yang difasilitasi alsintan -Persentase luas lahan yang difasilitasi UPSUS		-1,67 -25	-persen -persen	-		
3.27.02.2.01.01					Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-Jumlah bantuan Alsintan -Terbentuknya Brigade Alsintan -Jumlah monitoring dan pengawasan penggunaan Alsintan yang dilaksanakan -Jumlah pengawasan Pupuk Bersubsidi		- -1 -12 -12	-unit -kelompok -bulan -bulan	283.060.000		DINPERTAN
3.27.02.2.01.02					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Upland Project		1	paket	6.963.750.000	Upland	DINPERTAN
3.27.02.2.01.02					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-Jumlah kelompok yang mendapatkan Pendampingan UPSUS Pajale -Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan pengembangan irigasi partisipatif -Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan operator alsintan		-600 -12 -15	-kelompok -kelompok -orang	248.619.500		DINPERTAN
3.27.02.2.02.					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan jumlah penangkar benih yang difasilitasi		66	persen	-		
3.27.02.2.02.01					Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	-Jumlah kelompok yang melaksanakan demplot penangkar benih -Jumlah benih hasil produksi kelompok		-7 -	-kelompok -ton	17.930.000		DINPERTAN
3.27.02.2.02.02					Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-Jumlah pengadaan benih/bibit duku -Jumlah pengembangan bibit unggul peternakan -Jumlah pengembangan komoditas peternakan		-2500 -500 -300	-batang -ekor -ekor	262.721.000	DBH-CHT	DINPERTAN
3.27.02.2.02.03					Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Tersedianya bibit tanaman		3500	batang	83.400.000	DBH-CHT	DINPERTAN
3.27.02.2.05.					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran					-		
3.27.02.2.05.03					Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Tersedianya perbenihan tanaman pangan dan perkebunan		52	ha	423.110.000	DID	DINPERTAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
3.27.03.				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produksi pangan - Padi - Jagung - Kedelai - Ubi Kayu - Kentang - Kobis - Wortel - Stroberi - Cabai besar - Cabai rawit - Duku - Durian - Pisang - Nanas - Pepaya - Manggis - Kapulaga - Kopi - Lada - Kelapa dalam - Kelapa deres - Cengkeh - Glagah Arjuna - Nilam - Tebu		265,053 41,759 235 78,721 4,092 3,421 2,113 486 764 607 8,033 4,003 14,912 433 5,071 760 12.91 614 186 13,432 56,399 59 741 754 986	Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton	-		
3.27.03.2.01.				Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersusunnya dokumen data pertanian		5	dokumen	-		
3.27.03.2.01.03				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Penyusunan Data Statistik Pertanian		1	dokumen	43.000.000		DINPERTAN
3.27.03.2.02.				Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan BPP yang memenuhi syarat standar BPP		77	persen	-		
3.27.03.2.02.01				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi tersier yang terbangun/terpelihara		10	unit	750.000.000		DINPERTAN
3.27.03.2.02.03				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang terbangun/terpelihara		10	unit	565.000.000		DINPERTAN
3.27.03.2.02.04				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit yang terbangun/terpelihara		5	unit	649.662.000	DAK	DINPERTAN
3.27.03.2.02.08				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	- Jumlah BPP Kecamatan yang dibangun -Jumlah BPP Kecamatan yang dipelihara -Jumlah sarana penunjang BPP		-2 -5 -18	-BPP -BPP -BPP	1.500.000.000	DAK	DINPERTAN
3.27.04.				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-Pravalensi penyakit -Penyakit Zoonosis		-17,89 -4,54	-persen -persen	-		
3.27.04.2.01.				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan	Cakupan hewan yang terobati		15	persen	-		
3.27.04.2.01.01				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	-Terlaksananya pengadaan obat hewan -Jumlah hewan ternak yang terobati		-1 -3000	-paket -ekor	125.000.000		DINPERTAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
3.27.04.2.03.					Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik	Cakupan hewan yang terobati		15	persen	-		
3.27.04.2.03.02					Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-Jumlah hewan besar yang terobati -Jumlah hewan kecil yang terobati -Jumlah sampling dan uji darah sapi -Jumlah sampling dan uji darah kambing -Jumlah sampling dan uji darah babi -Jumlah sampling dan uji darah ayam -Jumlah sampel feses ruminansia		-1.000 -2.000 -100 -30 -38 -1.000 -200	-ekor -ekor -sampel -sampel -sampel -sampel -sampel	46.000.000	DID	DINPERTAN
3.27.04.2.04.					Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis	Cakupan PAH yang tidak ASUH			persen	-		
3.27.04.2.04.02					Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-Jumlah pemantauan rutin PAH -Jumlah pemantauan PAH menjelang Hari Raya Idul fitri		100	sampel	34.880.000		DINPERTAN
3.27.04.2.05.					Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis	Terkelolanya RPH		12	bulan	-		
3.27.04.2.05.01					Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Terkelolanya RPH		12	bulan	80.177.000		DINPERTAN
3.27.05.					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Produksi pangan - Padi - Jagung - Kedelai		265,053 41,759 235	Ton Ton Ton	-		
3.27.05.2.01.					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan penanggulangan kekeringan		11	persen	-		
3.27.05.2.01.01					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-Luas OPT Tanaman -Jumlah Demplot TBS yang dilaksanakan untuk pengendalian hama tikus dan padi -Jumlah pelaksanaan Gerakan Pengendalian Hama Tanaman Pangan		-75 -1 -5	-Ha -unit -kali	209.000.000	DBH-CHT	DINPERTAN
3.27.05.2.01.02					Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas bencana alam pertanian, kekeringan yang tertanggulangi		75	ha	273.640.000	DID	DINPERTAN
3.27.07.					Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan gapoktan yang terfasilitasi penyuluhan		100	persen	-		
3.27.07.2.01.					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan gapoktan yang terfasilitasi penyuluhan		100	persen	-		
3.27.07.2.01.01					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah desa pelaksanaan program penyuluhan		239	desa	197.702.000		DINPERTAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
3.27.07.2.01.02					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	-Jumlah Bintek Gapoktan -Jumlah Pelatihan Manager LKMA-PUAP -Jumlah kegiatan penyusunan database Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan Pendampingan Tekhnis LKMA-		-4 -2 -5 -12	-kali -kali -kali -bulan	107.016.000		DINPERTAN
3.27.07.2.01.03					Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah tenda sarnavil		3	unit	332.649.000	DID	DINPERTAN
3.27.07.2.01.04					Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang terbentuk		1	unit	-		DINPERTAN
3.30					3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					-		
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DINPERINDAG	- 100 -	-persen - Poin	-	Urusan Perdagangan	
x.xx.01.2.01					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	DINPERINDAG	- 100 - 100	- persen - persen	-	Urusan Perindustrian	
x.xx.01.2.01.01					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	DINPERINDAG		dokumen	10.600.000	Gaji dan Tamsil	DINPERINDAG
x.xx.01.2.01.05					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKJP, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	DINPERINDAG		dokumen	4.400.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	DINPERINDAG	12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	DINPERINDAG		ASN	6.932.936.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	DINPERINDAG		Orang Kali (ok)	8.000.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	DINPERINDAG	12	bulan	3.500.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	DINPERINDAG	12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangk, materai, dan jasa pos/pengiriman	DINPERINDAG	12	bulan	3.500.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi	DINPERINDAG	12	bulan	77.400.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DINPERINDAG	12	bulan	-		DINPERINDAG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	DINPERINDAG		orang/bulan	36.800.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	DINPERINDAG		orang/bulan	286.810.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	DINPERINDAG		jenis	98.400.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	DINPERINDAG		jenis	19.450.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DINPERINDAG		lembar	27.326.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	DINPERINDAG		jenis unit/buah	21.190.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	DINPERINDAG		jenis unit/buah	5.309.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DINPERINDAG		jenis unit/buah	29.000.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DINPERINDAG	12	bulan	2.000.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	DINPERINDAG		eksemplar/bulan	1.920.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	DINPERINDAG	12	bulan	132.587.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	DINPERINDAG		orang kali (OK)	19.250.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	DINPERINDAG		orang kali (OK)	94.000.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.03.20					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional baru	DINPERINDAG		unit	-		DINPERINDAG
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur					53.000.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)	DINPERINDAG		unit	200.000.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	DINPERINDAG		unit	78.864.000		DINPERINDAG
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	DINPERINDAG	- 0 - 100	- persen - persen	- -		
x.xx.01.2.04.02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas (PDH, PDU, PDL, olahraga, dll)	DINPERINDAG	99	stel	-		DINPERINDAG
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	DINPERINDAG	10	orang kali	-		DINPERINDAG
3.30.02.					Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Cakupan rekomendasi perijinan dan pendaftaran perusahaan yang dikeluarkan	Kab. Purbalingga	100	persen	-		
3.30.02.2.01.					Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah penerbitan ijin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan	Kab. Purbalingga	12	unit	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
3.30.02.2.01.01					Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya pemenuhan komitmen secara tepat waktu	Kab. Purbalingga	12	bulan	40.000.000		DINPERINDAG
3.30.02.2.02.					Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah penerbitan tanda daftar gudang	Kab. Purbalingga	10	unit	-		
3.30.02.2.02.01					Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terfasilitasinya penerbitan TDG; terdatanya jumlah gudang	Kab. Purbalingga	12	bulan	30.000.000		DINPERINDAG
3.30.02.2.03.					Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Jumlah penerbitan STPW	Kab. Purbalingga	20	dokumen	-		
3.30.02.2.03.01					Facilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya ijin Penerbitan STPW	Kab. Purbalingga	12	bulan	-		DINPERINDAG
3.30.03.					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-Jumlah pasar yang memenuhi standar nasional -Cakupan pedagang kaki lima yang ditata dan diherdayakan		-3 -16	-unit -unit	-		
3.30.03.2.01.					Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarpras perdagangan yang terbangun	Kab. Purbalingga	2	unit	-		
3.30.03.2.01.01					Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunnya sarpras distribusi perdagangan	Kab. Purbalingga	2	unit	3.194.000.000		DINPERINDAG
3.30.03.2.01.02					Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat terfasilitasi (UPTD Pasar)	Kab. Purbalingga	21	unit	2.790.000.000		DINPERINDAG
3.30.03.2.02.					Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Cakupan pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina		25	persen	-		
3.30.03.2.02.01					Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terwujudnya e-retribusi pasar	Psr Bukateja, Psr Tobong	2	paket	150.000.000		DINPERINDAG
3.30.03.2.02.02					Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pengelolaan PFC dan CKC	Kab. Purbalingga	2	unit	-		DINPERINDAG
3.30.04.					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-Tingkat ketersediaan bahan pokok dan barang penting (gas LPG) di Kab. Purbalingga -Cakupan pemantauan terhadap distribusi barang penting dan strategis	Kab. Purbalingga	-100 -3	persen -lokasi	-		
3.30.04.2.01.					Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan penyelenggaraan operasi pasar	Kab. Purbalingga	100	persen	-		
3.30.04.2.01.01					Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Facilitasi dan koordinasi keterediann Bahan pokok dan Gas Elpiji	Kab. Purbalingga	12	bulan	46.500.000		DINPERINDAG
3.30.04.2.01.03					Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pasar Murah	Kab. Purbalingga	9	lokasi	500.000.000		DINPERINDAG
3.30.04.2.02.					Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan perkembangan harga secara berkala	Kab. Purbalingga	1	dokumen	-		
3.30.04.2.02.01					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok	Kab. Purbalingga	52	kali	65.000.000		DINPERINDAG
3.30.04.2.03.					Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelesaian permasalahan peredaran pupuk dan pestisida bersubsidi	Kab. Purbalingga	100	persen	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
3.30.04.2.03.01					Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah pemeriksaan legalitas ijin pupuk bersubsidi	Kab. Purbalingga	12	kali	-		DINPERINDAG
3.30.04.2.03.02					Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi sesuai RDKK	Kab. Purbalingga	12	kali	47.250.000		DINPERINDAG
3.30.05.					Program Pengembangan Ekspor	-Nilai perdagangan ekspor -Jumlah eksportir -Jumlah/jenis barang yang diekspor		-500 -29 -80	-Rp. Miliar -perusahaan -produk	-		
3.30.05.2.01.					Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah	Jumlah pameran dan misi dagang yang dilaksanakan		6	kali	-		
3.30.05.2.01.01					Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pembinaan dan pelatihan ekspor	Kab. Purbalingga	40	OK	46.000.000		DINPERINDAG
3.30.05.2.01.02					Pameran Dagang Nasional	Keikutsertaan pada pameran nasional	Jakarta	1	kali	100.000.000		DINPERINDAG
3.30.05.2.01.03					Pameran Dagang Lokal	Keikutsertaan pada pameran lokal	Kab. Purbalingga	4	kali	-		DINPERINDAG
3.30.05.2.01.04					Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Terlaksananya misi dagang luar negeri	luar negeri	1	kali	-		DINPERINDAG
3.30.06.					Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	-Cakupan pengawasan terhadap komoditas barang yang peredarannya diawasi -Cakupan pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus -Persentase sengketa konsumen yang diselesaikan oleh BPSK -Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang -Jumlah pasar tertib ukur		2	-komoditi -merk -persen -UTTP	-		
3.30.06.2.01.					Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang		24000	unit	-		
3.30.06.2.01.01					Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terselenggaranya tera dan teraulang UTTP	Kab. Purbalingga	12	bulan	272.035.500		DINPERINDAG
3.30.06.2.01.02					Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Terselenggaranya pengawasan kemetrolgian	Kab. Purbalingga	12	bulan	-		DINPERINDAG
3.31					3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					-		
3.31.02.					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri					-		
3.31.02.2.01.					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri					-		
3.31.02.2.01.01					Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Tersusunnya Raperda RPIK	Kab. Purbalingga	1	dokumen	50.000.000		DINPERINDAG
3.31.02.2.01.04					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Operasional UPTD Logam	Kab. Purbalingga	12	bulan	600.000.000		DINPERINDAG
3.31.02.2.01.04					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (DAK)	Pembangunan sarpras kawasan industri batok (DAK)	Kab. Purbalingga	1	paket	2.634.936.000	DAK	DINPERINDAG
3.31.02.2.01.04					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (DAK)	Pembangunan sarpras UPTD Pilog (IPAL dan jalan lingkungan)	Kab. Purbalingga	1	paket	-	DAK	DINPERINDAG
3.31.02.2.01.03					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Rehabilitasi dan Bantuan sarpras industri kecil	Kab. Purbalingga	20	paket	-	DAU	DINPERINDAG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
3.31.02.2.01.05					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	FGD IKM	Kab. Purbalingga	4	kali	450.000.000	DBH-CHT	DINPERINDAG
3.31.03.					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	-Cakupan industri yang telah memiliki ijin usaha -Persentase fasilitasi HKI -Persentase penerapan standarisasi produk Industri -Persentase fasilitasi sertifikasi		-100 -100 -100 -100	-persen -persen -persen -persen	-		
3.31.03.2.01.					Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	Jumlah IUI Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan				-		
3.31.03.2.01.01					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pendampingan pemenuhan komitmen perolehan IUI	Kab. Purbalingga	12	kali	-		DINPERINDAG
3.31.03.2.01.02					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan	Terlaksananya pengawasan IUI	Kab. Purbalingga	12	kali	40.000.000		DINPERINDAG
3.31.03.2.01.03					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Koordinasi dengan lintas sektor terkait	Kab. Purbalingga	12	kali	-		DINPERINDAG
3.31.04.					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					-		
3.31.04.2.01.					Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri					-		
3.31.04.2.01.01					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Pelatihan SDM	Kab. Purbalingga			77.000.000		DINPERINDAG
3.31.04.2.01.02					Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya database industri	Kab. Purbalingga	1	dokumen	-		DINPERINDAG
3.32					3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					-		
3.32.03.					Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Cakupan calon transmigran yang difasilitasi		100	persen	-		
3.32.03.2.01.					Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah KK yang menetap di lokasi		3	KK	-		
3.32.03.2.01.04					Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah transmigran yang ditempatkan		3	KK	-		DINNAKER
3.32.03.2.01.05					Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah penyuluhan		2	kali	-		DINNAKER
4.					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4.01					4.01 SEKRETARIAT DAERAH					-		
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Rata-rata Capaian SKP	SETDA	- 100 - 81 - 87	- persen - Poin - Poin	-		
x.xx.01.2.01					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	SETDA	- 100 - 100	- persen - persen	-		
x.xx.01.2.01.01					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	SETDA	2	dokumen	15.000.000		SETDA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.01.05					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	SETDA	4	dokumen	7.500.000		SETDA
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	SETDA	12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	SETDA	159	ASN	18.867.603.500		SETDA
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	SETDA	800	Orang Kali (ok)	62.500.000		SETDA
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	SETDA	12	bulan	10.000.000		SETDA
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	SETDA	12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	SETDA	12	bulan	11.700.000		SETDA
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi	SETDA	12	bulan	11.874.600.000		SETDA
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SETDA	12	bulan	497.950.000		SETDA
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	SETDA	137	kendaraan/bulan	129.500.000		SETDA
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	SETDA	250	orang/bulan	550.075.000		SETDA
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	SETDA	5	orang/bulan	173.400.000		SETDA
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	SETDA	5	jenis	191.900.000		SETDA
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	SETDA	40	jenis	30.000.000		SETDA
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	SETDA	167000	lembar	66.638.000		SETDA
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	SETDA	31	jenis unit/buah	70.904.000		SETDA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	SETDA	15	jenis unit/buah	10.000.000		SETDA
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	SETDA	10	jenis	10.000.000		SETDA
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	SETDA		eksemplar/bulan	19.968.000		SETDA
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	SETDA	12	bulan	1.007.053.000		SETDA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	SETDA		.orang kali (OK)	1.550.000.000		SETDA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	SETDA	240	.orang kali (OK)	466.950.000		SETDA
x.xx.01.2.03.19					Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya mobil jabatan baru	SETDA		unit	1.300.000.000		SETDA
x.xx.01.2.03.19					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan ops		2	unit	800.000.000		SETDA
x.xx.01.2.03.23					Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya kelengkapan rumah jabatan	SETDA	5	jenis unit/buah	820.750.000		SETDA
x.xx.01.2.03.26					Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan	SETDA	5	unit	394.000.000		SETDA
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)	SETDA	1	unit	405.000.000		SETDA
x.xx.01.2.03.29					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	SETDA	6	unit	209.300.000		SETDA
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	SETDA	137	unit	220.000.000		SETDA
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)	SETDA	50	unit	30.000.000		SETDA
x.xx.01.2.03.40					Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya rehabilitasi kendaraan dinas/operasional		2	unit	-		SETDA
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin	SETDA	- 0	-persen	-		
						- Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 100	-persen	-		
x.xx.01.2.04.02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas (PDH, PDU, PDL, olahraga, dll)	SETDA	20	stel	-		SETDA
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik	SETDA	28	pcs	-		SETDA
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	SETDA	40	orang kali	42.500.000		SETDA
4.01.02.					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra		100	persen	-		
4.01.02.2.01.					Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase kecamatan yang menerapkan standar PATEN		100	persen	-		
4.01.02.2.01.01					Penataan Administrasi Pemerintahan	-Jumlah bahan koordinasi bidang dukcapil, kesbangpol, trantibum dan linmas		-12	-dokumen	106.267.000		SETDA
						-Jumlah rumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan		-15	-dokumen			
4.01.02.2.01.01					Penataan Administrasi Pemerintahan	-Jumlah bahan koordinasi bidang dukcapil, kesbangpol, trantibum dan linmas		-12	-dokumen	400.000.000		SETDA
						-Jumlah rumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan		-15	-dokumen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
4.01.02.2.01.02					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-Jumlah rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kewilayahan -Jumlah laporan hasil implementasi kebijakan pengelolaan administrasi kewilayahan -Jumlah bahan koordinasi penegasan batas daerah		-2 -2 -15	-dokumen -dokumen -perbup	110.694.000		SETDA
4.01.02.2.01.03					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-Jumlah dokumen LKPJ yang disusun -Jumlah dokumen LPPD dan ILPPD yang disusun -Jumlah media cetak yang memuat dokumen ILPPD yang dipublikasikan -Jumlah laporan penerapan dan capaian SPM bidang pelayanan dasar -Jumlah fasilitasi dan koordinasi layanan administrasi pimpinan daerah		-1 -2 -2 -2 -10	-dokumen -dokumen -media cetak -dokumen -kegiatan	373.378.000		SETDA
4.01.02.2.02.					Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat fasilitasi kegiatan bina mental spiritual		100	persen	-		
4.01.02.2.02.01					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	- Jumlah rekomendasi/rumusan kebijakan bidang keagamaan '- kesejahteraan guru madin, p3n, pengasuh dan guru ponpes, ta'mir masjid agung darusalam, tphd, '- pengajian akbar		- 8 kebijakan '- 512 guru ponpes dan 1620 guru madin, 162 penyuluh agama, 385 P3N, 90 pengasuh ponpes, 37 takmir, 683 calhaj, 8 tphd - 8 pengajian akbar, 18 masjid bk bersama/tarling, 18 istighazah, 1 kafilah lomba	guru	11.353.117.000		SETDA
4.01.02.2.02.01					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah fasilitasi bantuan bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan		386	kegiatan	5.311.000.000		SETDA
4.01.02.2.02.02					Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan Pemda di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB		8	rekomendasi	8.913.000		SETDA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
4.01.02.2.02.03					Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah rekomendasi kebijakan Pemda di bidang kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata		8	rekomendasi	59.360.000		SETDA
4.01.02.2.03.					Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	-Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi -Persentase produk hukum daerah/peraturan perundang-undangan yang terpublikasi -Persentase kasus-kasus hukum yang diselesaikan		-100 -100 -98	-persen -persen -persen	-		
4.01.02.2.03.01					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah rekomendasi, evaluasi dan pengawasan Perda/Perkada		119 dan 410	Perda/Perbup dan Kebup	89.552.599		SETDA
4.01.02.2.03.02					Fasilitasi Bantuan Hukum	-Jumlah permohonan bantuan hukum yang tertangani -Jumlah rekomendasi penegakan dan perlindungan HAM		-25 -4	-kasus -rekomendasi	435.424.000		SETDA
4.01.02.2.03.03					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	-Jumlah produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terdokumentasikan -Jumlah Perda/Perkada yang terinformasikan melalui website JDIH -Jumlah masyarakat dan OPD yang mengikuti sosialisasi dan diseminasi produk hukum daerah		-435 -119 -1125	-buku -Perda/Perbup -orang	115.417.000		SETDA
4.01.02.2.04.					Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan naskah kerjasama daerah yang difasilitasi		100	persen	-		
4.01.02.2.04.01					Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-Jumlah naskah kerjasama yang difasilitasi -Jumlah dokumen pelaksanaan kerjasama daerah dalam negeri yang dilaporkan		-15 -1	-dokumen -dokumen	20.000.000		SETDA
4.01.03.					Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa		100	persen	-		
4.01.03.2.01.					Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-Tingkat capaian target laba perusda -Tingkat capaian target deviden perusda -Jumlah LKM berbadan hukum		-100 -100 -224	-persen -persen -unit	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
4.01.03.2.01.01					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-Jumlah rekomendasi kebijakan teknis pengelolaan BUMD -Jumlah analisa perkembangan dan pencapaian kinerja BUMD -Jumlah rekomendasi hasil Monev kinerja BUMD		-10 -4 -4	-rekomendasi -dokumen -rekomendasi	151.218.000		SETDA
4.01.03.2.01.02					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian dan distribusi perekonomian		8	rekomendasi	30.357.000		SETDA
4.01.03.2.01.02					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian dan distribusi perekonomian		8	rekomendasi	96.530.000	DBH-CHT	SETDA
4.01.03.2.01.03					Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-Jumlah rumusan kebijakan pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan -Laporan hasil implementasi kebijakan pengembangan ekonomi mikro kecil		-6 -6	-dokumen -laporan	242.310.000		SETDA
4.01.03.2.02.					Administrasi Pembangunan	Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan		100	persen	-		
4.01.03.2.02.01					Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	-Jumlah rekomendasi terkait penyusunan program pembangunan -Jumlah dokumen SSH yang disusun		-24 -1	-rekomendasi -dokumen	33.750.000		SETDA
4.01.03.2.02.02					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian pembangunan yang sesuai dengan program pembangunan daerah		40	rekomendasi	57.518.000		SETDA
4.01.03.2.02.03					Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-Jumlah monev dan pelaporan pelaksanaan pembangunan -Jumlah rekomendasi hasil temuan monev program pembangunan daerah		-12 -12	-laporan -rekomendasi	233.434.000		SETDA
4.01.03.2.03.					Pengadaan Barang dan Jasa	-Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP -Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan -Tingkat efisiensi pelaksanaan e-pengadaan		-100 -100 -75	-persen -persen -persen	-		
4.01.03.2.03.01					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa di BPBJ -Jumlah OPD yang dilakukan monev pengadaan barang dan jasa		-125 -52	-paket -OPD	491.317.000		SETDA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
4.01.03.2.03.02					Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah permohonan pelayanan LPSE yang ditindaklanjuti		50	buah	26.202.000		SETDA
4.01.03.2.03.03					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pengadaan barang/jasa -Jumlah peserta bintek dan ujian sertifikasi dasar pengadaan barang/jasa -Jumlah peserta yang mengikuti bintek kemampuan teknis		-200	-orang	18.000.000		SETDA
								-50	-orang			
								-50	-orang			
4.01.03.2.04.					Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam					-		
4.01.03.2.04.01					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan					2.699.000		SETDA
4.01.03.2.04.02					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup					2.660.000		SETDA
4.01.03.2.04.03					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					2.641.000		SETDA
4.01.04.					Program Administrasi Umum	Persentase penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan		100	persen	-		
4.01.04.2.01.					Pelaksanaan Administrasi Umum	Cakupan fasilitasi urusan KDH dan WKDH				-		
4.01.04.2.01.01					Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian					790.992.000		SETDA
4.01.04.2.01.03					Pengelolaan Rumah Tangga	Jumlah urusan KDH dan WKDH				4.174.574.000		SETDA
4.01.04.2.02.					Penataan Organisasi	-Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK -Nilai kematangan organisasi perangkat daerah -Nilai AKIP komponen pelaporan kinerja -Persentase unit layanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan		-30 -11 -60 -100	-OPD -poin -persen -persen	-		
4.01.04.2.02.01					Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-Jumlah dokumen bahan penyusunan SOTK		-1	-dokumen	602.425.000		SETDA
						-Jumlah dokumen Anjab dan ABK		-1	-dokumen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
4.01.04.2.02.02					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-Jumlah Inovasi Desa/pemerintahan/Sekolah Laporan hasil monev implementasi inovasi -Jumlah dokumen survei kepuasan masyarakat -Jumlah unit pelayanan publik yang di monev		-29 -1 -49	-inovasi -dokumen -UPP (unit pelayanan publik)	160.219.000		SETDA
4.01.04.2.02.03					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-Jumlah dokumen roadmap RB yang tersusun -Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja tingkat Kabupaten yang disusun tepat waktu -Jumlah OPD yang menyusun laporan kinerja dan perjanjian kinerja tingkat Kabupaten dengan tepat waktu		-1 -2 -47	-dokumen -dokumen -OPD	71.300.000		SETDA
4.01.04.2.03.					Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan keprotokolan pemda yang difasilitasi		100	persen	-		
4.01.04.2.03.01					Fasilitasi Keprotokolan	-Bahan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan -Fasilitasi tata keprotokolan pada penyambutan tamu Pemda		-100 -12	-kegiatan -kali	70.393.000		SETDA
4.01.04.2.03.02					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-Jumlah Press Release yang disampaikan -Jumlah Naskah sambutan KDH dan WKDH		-600 -600	-kali -buah	34.838.000		SETDA
4.01.04.2.03.03					Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-Jumlah notulen rapat KDH dan WKDH -Jumlah fasilitasi peliputan media terhadap KDH dan WKDH		-288 -288	-kali -kali	123.200.000		SETDA
4.02					4.02 SEKRETARIAT DPRD					-		
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	SETWAN	- 100 - 82	- persen - Poin	- -		
x.xx.01.2.01					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	SETWAN	- 100 - 100	-persen - persen	- -		
x.xx.01.2.01.01					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	SETWAN	2	dokumen	3.227.500		SETWAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.01.05					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKJP, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	SETWAN	1	dokumen	2.562.500		SETWAN
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	SETWAN	12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	SETWAN	25	ASN	2.826.128.000		SETWAN
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	SETWAN	300	Orang Kali (ok)	4.176.000		SETWAN
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	SETWAN	12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangk, materai, dan jasa pos/pengiriman	SETWAN	12	bulan	7.700.000		SETWAN
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi	SETWAN	12	bulan	192.600.000		SETWAN
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SETWAN	12	bulan	40.500.000		SETWAN
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	SETWAN	9 R4, 13 R2	kendaraan/bulan	127.000.000		SETWAN
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	SETWAN	20	orang/bulan	462.600.000		SETWAN
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	SETWAN	12	orang/bulan	360.000.000		SETWAN
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	SETWAN	10	jenis	100.000.000		SETWAN
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	SETWAN	46	jenis	66.527.500		SETWAN
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	SETWAN	134850	lembar	98.312.500		SETWAN
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	SETWAN	11	jenis unit/buah	23.387.500		SETWAN
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	SETWAN	7	jenis unit/buah	155.000.000		SETWAN
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	SETWAN	6	jenis unit/buah	7.410.000		SETWAN
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	SETWAN	21	eksemplar/bulan	31.440.000		SETWAN
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	SETWAN	12	bulan	346.693.000		SETWAN
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	SETWAN	19217	orang kali (OK)	389.750.000		SETWAN
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	SETWAN		orang kali (OK)	1.801.415.000		SETWAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan,dll)	SETWAN	1	unit	586.800.000		SETWAN
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	SETWAN	9 R4, 13 R2	unit	368.040.000		SETWAN
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)	SETWAN	90	unit	33.000.000		SETWAN
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	SETWAN	- 0 100	-persen persen	-		
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	SETWAN	4	orang kali	-		SETWAN
x.xx.01.2.04.11					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan					60.000.000		SETWAN
4.02.02.					Program Layanan dan Administrasi Keuangan					-		
4.02.02.2.01.					Layanan Administrasi DPRD					-		
4.02.02.2.01.01					Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD	Terselenggaranya Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD		12	bulan	-		SETWAN
4.02.02.2.01.02					Fasilitasi Rapat DPRD	-Jumlah Rapat Alat Kelengkapan DPRD, yang dilaksanakan - Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan non penyusunan perda dan non anggaran		- -	kali	124.904.000		SETWAN
4.02.02.2.01.03					Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah fraksi DPRD yang difasilitasi		7	fraksi	24.850.000		SETWAN
4.02.02.2.01.04					Pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD					600.000.000		SETWAN
4.02.02.2.01.05					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	Jumlah sarpras kantor DPRD yang dibeli dan dipelihara		1	unit	-		SETWAN
4.02.02.2.01.06					Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					-		SETWAN
4.02.02.2.02.					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang terlayani kesejahteraan dan keuangannya		45	orang	-		
4.02.02.2.02.01					Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		45	orang	21.927.950.000		SETWAN
4.02.02.2.02.02					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya		225	stel	315.000.000		SETWAN
4.02.02.2.02.03					Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti medical check-up		45	orang	31.500.000		SETWAN
4.02.03.					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang disetujui		100	Persen	-		
4.02.03.2.01.					Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda dan Peraturan DPRD yang disusun		-25 -2	Perda Peraturan	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
4.02.03.2.01.01					Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		1	dokumen	186.200.000		SETWAN
4.02.03.2.01.02					Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Raperda yang dibahas		25	Raperda	2.073.400.000		SETWAN
4.02.03.2.01.03					Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah perundang-undangan yang dikaji		2	kajian	750.000.000		SETWAN
4.02.03.2.01.04					Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Naskah yang disusun		4	NA	200.000.000		SETWAN
4.02.03.2.01.05					Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun		1	dokumen	640.050.000		SETWAN
4.02.03.2.02.					Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen anggaran yang disetujui		7	dokumen	-		
4.02.03.2.02.01					Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah KUA PPAS yang disepakati		1	dokumen	456.600.000		SETWAN
4.02.03.2.02.02					Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah KUA PPAS perubahan yang disepakati		1	dokumen	496.350.000		SETWAN
4.02.03.2.02.03					Pembahasan APBD	Jumlah APBD yang disetujui		1	dokumen	308.050.000		SETWAN
4.02.03.2.02.04					Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah APBD Perubahan yang disetujui		1	dokumen	308.050.000		SETWAN
4.02.03.2.02.05					Pembahasan laporan semester	Jumlah laoran semester yang disetujui		2	dokumen	-		SETWAN
4.02.03.2.02.06					Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen pertanggungjawaban APBD yang dibahas		1	dokumen	307.050.000		SETWAN
4.02.03.2.03.					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		53	rekomendasi	-		
4.02.03.2.03.01					Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah pengawasan urusan pemerintahan dan hukum		12 12	-rapat -kunjungan lapangan	392.380.500		SETWAN
4.02.03.2.03.02					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah pengawasan urusan Infrastruktur		12 12	-rapat -kunjungan lapangan	276.512.500		SETWAN
4.02.03.2.03.03					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah pengawasan urusan Kesejahteraan Rakyat		12 12	-rapat -kunjungan lapangan	243.312.500		SETWAN
4.02.03.2.03.04					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah pengawasan urusan Perekonomian		12 12	-rapat -kunjungan lapangan	247.822.500		SETWAN
4.02.03.2.03.06					Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah pengawasan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang ditindaklanjuti		1	-rapat	171.342.500		SETWAN
4.02.03.2.03.07					Pengawasan penggunaan anggaran	Jumlah pengawasan penggunaan anggaran		4 4	-rapat -kunjungan lapangan	470.995.000		SETWAN
4.02.03.2.04.					Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang meningkat kapasitasnya		45	orang	-		
4.02.03.2.04.02					Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis bagi anggota DPRD yang dilaksanakan		6	Bintek	1.731.100.000		SETWAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
4.02.03.2.04.04				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah tim ahli yang disediakan		20	OK	113.750.000		SETWAN
4.02.03.2.04.05				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi		7	Orang/bulan	147.000.000		SETWAN
4.02.03.2.04.06				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					658.880.000		SETWAN
4.02.03.2.04.07				Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen renja DPRD yang disusun		1	dokumen	1.291.147.500		SETWAN
4.02.03.2.05.				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	jumlah aspirasi masyarakat yang dihimpun		1350	usulan kegiatan	-		
4.02.03.2.05.01				Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan		12	kegiatan	21.600.000		SETWAN
4.02.03.2.05.02				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah sidang pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD		2	kali	6.975.000		SETWAN
4.02.03.2.05.03				Pelaksanaan Reses	Jumlah laporan hasil reses		135	laporan	3.287.725.000		SETWAN
4.02.03.2.06.				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase kasus pelanggaran kode etik DPRD yang ditangani		100	Persen	-		
4.02.03.2.06.01				Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik DPR		1	dokumen	393.487.500		SETWAN
4.02.03.2.06.02				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah kasus pelanggaran kode etik DPRD yang ditangani		5	kasus	108.570.000		SETWAN
4.02.03.2.07.				Pembahasan Kerja Sama Daerah					-		
4.02.03.2.07.01				Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi persetujuan kerja sama daerah					43.301.000		SETWAN
4.02.03.2.07.02				Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah jenis media publikasi		6	jenis	371.568.000		SETWAN
4.02.03.2.08.				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Prosentase kegiatan pimpinan DPRD yang difasilitasi		100	persen	-		
4.02.03.2.08.01				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan DPRD		24	kali	510.860.000		SETWAN
4.02.03.2.08.02				Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Jumlah laporan kinerja pimpinan DPRD yang disusun		12	dokumen	2.028.500		SETWAN
4.02.03.2.08.03				Pelaksanaan Undangan DPRD	Jumlah undangan DPRD yang dihadiri		24	kali	43.320.000		SETWAN
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.01	5.01 PERENCANAAN								-		
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Persentase Kegiatan SMD	BAPPELITBANGDA	- 100 - - 100	- persen - Poin - Poin	-		
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	BAPPELITBANGDA	- 100 - 100	- persen - persen	-		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	BAPPELITBANGDA	2	dokumen	12.763.500		BAPPELITBANGDA
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	BAPPELITBANGDA	6	dokumen	9.736.500		BAPPELITBANGDA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	BAPPELITBANGDA	12	bulan	-			
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	BAPPELITBANGDA	31	ASN	3.947.938.000		BAPPELITBANGDA	
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	BAPPELITBANGDA	195	Orang Kali (ok)	5.160.000		BAPPELITBANGDA	
x.xx.01.2.02.04				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	BAPPELITBANGDA	12	bulan	10.275.000		BAPPELITBANGDA	
x.xx.01.2.03				Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	BAPPELITBANGDA	12	bulan	-			
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	BAPPELITBANGDA	12	bulan	1.625.000		BAPPELITBANGDA	
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi	BAPPELITBANGDA	12	bulan	75.600.000		BAPPELITBANGDA	
x.xx.01.2.03.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	BAPPELITBANGDA	12	bulan	6.400.000		BAPPELITBANGDA	
x.xx.01.2.03.06				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	BAPPELITBANGDA	7R4, 29 R2	kendaraan/bulan	28.000.000		BAPPELITBANGDA	
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	BAPPELITBANGDA		orang/bulan	166.415.000		BAPPELITBANGDA	
x.xx.01.2.03.08				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	BAPPELITBANGDA	3	orang/bulan	50.400.000		BAPPELITBANGDA	
x.xx.01.2.03.09				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	BAPPELITBANGDA		jenis	11.000.000		BAPPELITBANGDA	
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BAPPELITBANGDA		jenis	20.666.500		BAPPELITBANGDA	
x.xx.01.2.03.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	BAPPELITBANGDA	44896	lembar	14.158.500		BAPPELITBANGDA	
x.xx.01.2.03.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	BAPPELITBANGDA		jenis unit/buah	2.865.000		BAPPELITBANGDA	
x.xx.01.2.03.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	BAPPELITBANGDA		jenis unit/buah	26.356.000		BAPPELITBANGDA	
x.xx.01.2.03.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	BAPPELITBANGDA		eksemplar/bulan	2.340.000		BAPPELITBANGDA	
x.xx.01.2.03.16				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	BAPPELITBANGDA	12	bulan	102.912.000		BAPPELITBANGDA	
x.xx.01.2.03.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	BAPPELITBANGDA	1300	orang kali (OK)	22.372.500		BAPPELITBANGDA	
x.xx.01.2.03.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	BAPPELITBANGDA	418	orang kali (OK)	129.500.000		BAPPELITBANGDA	
x.xx.01.2.03.28				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)	BAPPELITBANGDA	1	unit	12.254.000		BAPPELITBANGDA	
x.xx.01.2.03.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	BAPPELITBANGDA	7R4, 26 R2	unit	54.602.000		BAPPELITBANGDA	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.04				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	BAPPELITBANGDA	- 0 - 50	- persen - persen	- -	- -		
x.xx.01.2.04.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas (PDH, PDU, PDL, olahraga, dll)	BAPPELITBANGDA	45	stel	-	-		BAPPELITBANGDA
x.xx.01.2.04.05				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik	BAPPELITBANGDA	45	pcs	-	-		BAPPELITBANGDA
x.xx.01.2.04.09				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	BAPPELITBANGDA	25	orang kali	25.000.000	-		BAPPELITBANGDA
x.xx.01.2.04.10				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya peserta sosialisasi	BAPPELITBANGDA	50	orang kali	-	-		BAPPELITBANGDA
x.xx.01.2.04.11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya peserta bimbingan teknis	BAPPELITBANGDA	60	orang kali	-	-		BAPPELITBANGDA
5.01.02.				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan -Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD -Dokumen perencanaan disusun tepat waktu -Dokumen perencanaan disusun tepat prosedur -Tingkat rekomendasi pengendalian dan evaluasi perencanaan yang		-78 -100 -100 -100 -100	-persen -persen -persen -persen -persen	- - - - -	- - - - -		
5.01.02.1.01.				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kualitas dokumen perencanaan kabupaten		100	persen	-	-		
5.01.02.1.01.01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun		3	dokumen	548.160.000	-		BAPPELITBANGDA
5.01.02.1.01.03				Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan dan diikuti		5	kegiatan	350.910.000	-		BAPPELITBANGDA
5.01.02.1.01.05				Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Jumlah Desa, Kecamatan, Forum OPD yang mengusulkan kegiatan dalam RKPD		-239 -16 -27	-desa/kel -kecamatan -OPD	148.320.000	-		BAPPELITBANGDA
5.01.02.1.01.06				Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Daerah		3	rekomendasi	-	-		BAPPELITBANGDA
5.01.02.1.01.09				Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen terkait dengan informasi pembangunan		3	dokumen	100.000.000	-		BAPPELITBANGDA
5.01.02.1.02.				Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Rekomendasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah				-	-		
5.01.02.1.02.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Jumlah dokumen usulan dan pelaporan kinerja TP, DAK, dan Bangub		5	dokumen	80.000.000	-		BAPPELITBANGDA
5.01.02.1.03.				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Cakupan program RPJMD yang tercapai kinerja sasaran		100	persen	-	-		
5.01.02.1.03.03				Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan kinerja pembangunan tahunan		4	dokumen	79.328.000	-		BAPPELITBANGDA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan		
5.01.03.			Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100	persen	-	
5.01.03.1.01.			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Cakupan kesesuaian lapangan atas laporan pengendalian/evaluasi renja bidang pemerintahan		100	persen	-	
5.01.03.1.01.01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan					61.644.000	BAPPELITBANGDA
5.01.03.1.01.03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah monev kegiatan renja bidang pemerintahan		89	kali	-	BAPPELITBANGDA
5.01.03.1.02.			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Cakupan kesesuaian lapangan atas laporan pengendalian/evaluasi renja bidang pembangunan manusia		100	persen	-	
5.01.03.1.02.01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan manusia					31.704.000	BAPPELITBANGDA
5.01.03.1.02.03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah monev kegiatan renja bidang pembangunan manusia		12	kali	-	BAPPELITBANGDA
5.01.03.1.03.			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Cakupan kesesuaian lapangan atas laporan pengendalian/evaluasi renja bidang kesejahteraan manusia		100	persen	-	
5.01.03.1.03.01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat					34.730.000	BAPPELITBANGDA
5.01.03.1.03.03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah monev kegiatan renja bidang kesejahteraan manusia		8	kali	-	BAPPELITBANGDA
5.01.04.			Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		100	persen	-	
5.01.04.1.01.			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Cakupan kesesuaian lapangan atas laporan pengendalian/evaluasi renja bidang perekonomian		100	persen	-	
5.01.04.1.01.01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian					81.926.000	BAPPELITBANGDA
5.01.04.1.01.03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah monev kegiatan renja bidang perekonomian		16	kali	-	BAPPELITBANGDA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
5.01.04.1.02.					Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Cakupan kesesuaian lapangan atas laporan pengendalian/evaluasi renja bidang ekonomi kreatif		100	persen	-		
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif					58.076.000		BAPPELITBANGDA
5.01.04.1.02.03					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah monev kegiatan renja bidang ekonomi kreatif		4	kali	-		BAPPELITBANGDA
5.01.04.1.03.					Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Cakupan kesesuaian lapangan atas laporan pengendalian/evaluasi renja bidang sumber daya alam		100	persen	-		
5.01.04.1.03.01					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam					58.016.000		BAPPELITBANGDA
5.01.04.1.03.03					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah monev kegiatan renja bidang sumber daya alam		8	kali	-		BAPPELITBANGDA
5.01.05.					Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100	persen	-		
5.01.05.1.01.					Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Cakupan kesesuaian lapangan atas laporan pengendalian/evaluasi renja bidang sumber daya air dan lingkungan hidup		100	persen	-		
5.01.05.1.01.01					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan					70.000.000		BAPPELITBANGDA
5.01.05.1.01.03					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah monev kegiatan renja bidang sumber daya air dan lingkungan hidup		4	kali	-		BAPPELITBANGDA
5.01.05.1.02.					Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Cakupan kesesuaian lapangan atas laporan pengendalian/evaluasi renja bidang kebinamargaan dan perhubungan		100	persen	-		
5.01.05.1.02.01					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan					37.280.000		BAPPELITBANGDA
5.01.05.1.02.03					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Jumlah monev kegiatan renja bidang kebinamargaan dan perhubungan		12	kali	-		BAPPELITBANGDA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
5.01.05.1.03.				Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	Cakupan kesesuaian lapangan atas laporan pengendalian/evaluasi renja bidang keciptakarya dan kewilayahan			100	persen	-		
5.01.05.1.03.01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan dan dokumen SSK MPS					213.542.000		BAPPELITBANGDA
5.01.05.1.03.03				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakarya dan Kewilayahan	Jumlah monev kegiatan renja bidang keciptakarya dan kewilayahan			8	kali	-		BAPPELITBANGDA
5.02				5.02 KEUANGAN						-		
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Rata-rata Capaian SKP	BAKEUDA		- 100 - 81.5 - 95	- persen - Poin - Persen	- -		
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	BAKEUDA		- 100 - 100	- persen - persen	- -		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	BAKEUDA		2	dokumen	1.000.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKJP, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	BAKEUDA		4	dokumen	1.000.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	BAKEUDA		12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	BAKEUDA		83	ASN	14.959.196.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	BAKEUDA		148	Orang Kali (ok)	3.456.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.02.04				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	BAKEUDA		12	bulan	1.100.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.03				Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	BAKEUDA		12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	BAKEUDA		12	bulan	4.300.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi	BAKEUDA		12	bulan	278.400.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	BAKEUDA		12	bulan	198.000.000		BAKEUDA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas		8R4, 45R2	kendaraan/bulan	29.000.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	BAKEUDA	83	orang/bulan	180.350.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	BAKEUDA	3	orang/bulan	1.500.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	BAKEUDA	15	jenis	-		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BAKEUDA		jenis	26.584.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	BAKEUDA		lembar	206.480.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	BAKEUDA		jenis unit/buah	3.166.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	BAKEUDA	5	jenis unit/buah	5.050.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	BAKEUDA	20	jenis unit/buah	2.995.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	BAKEUDA	20	eksemplar/bulan	2.100.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	BAKEUDA	12	bulan	93.115.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	BAKEUDA		orang kali (OK)	26.295.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	BAKEUDA	141	orang kali (OK)	40.140.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)	BAKEUDA	1	jenis unit/buah	-		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.27					Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	BAKEUDA	4	unit	16.440.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pencatatan, dll)	BAKEUDA	2	unit	47.370.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.29					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	BAKEUDA	8R4 45R2	unit	-		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					61.015.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.32					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor					26.000.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.33					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					37.275.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)	BAKEUDA	15	unit	7.350.000		BAKEUDA
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	BAKEUDA	- 0 100	-persen persen	-		
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik	BAKEUDA	83	pcs	-		BAKEUDA
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	BAKEUDA	10	orang kali	-		BAKEUDA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.04.10					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya peserta sosialisasi	BAKEUDA	83	orang kali	-		BAKEUDA	
5.02.02.					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD -Persentase SKPD yang melaksanakan penatausahaan aset sesuai ketentuan -Ketetapan waktu pengiriman Laporan Keuangan sesuai ketentuan -Ketetapan waktu pengiriman Laporan Aset sesuai ketentuan		-100 -100 -98 -100	-persen -persen -persen -persen	-			
5.02.02.2.01.					Koordinasi dan Penyusunan Rencana AnggaranDaerah	Penetapan KUA dan PPAS tepat waktu		100	persen	-			
5.02.02.2.01.01					Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun		2	dokumen	146.261.000		BAKEUDA	
5.02.02.2.01.02					Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Peubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun		2	dokumen	142.817.000		BAKEUDA	
5.02.02.2.01.05					Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah perda dan perkara APBD yang tersusun		2	perda/perkada	177.815.000		BAKEUDA	
5.02.02.2.01.06					Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah perda dan perkara APBD Perubahan yang tersusun		2	perda/perkada	171.359.000		BAKEUDA	
5.02.02.2.02.					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah SKPD yang melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan		151	SKPD	-			
5.02.02.2.02.01					Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dana APBD yang dikelola		1.762.959.505.000	Rupiah	22.570.000		BAKEUDA	
5.02.02.2.02.04					Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Jumlah SP2D yang diterbitkan		17708	berkas	57.722.000		BAKEUDA	
5.02.02.2.02.05					Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Jumlah dokumen SPP, SPM dan SKPP yang diteliti dan diterbitkan		35778	dokumen	44.361.000		BAKEUDA	
5.02.02.2.02.09					Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPI)	Jumlah Perbup Sisdur dan Tata Usaha Keuangan		1	Perbup	27.525.000		BAKEUDA	
5.02.02.2.03.					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	Penyusunan LKPD Unaudited		1	Dokumen	-			
5.02.02.2.03.04					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1	perda	91.027.000		BAKEUDA	
5.02.02.2.03.12					Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah pembinaan/sosialisasi yang dilaksanakan		4	kali	32.795.000		BAKEUDA	
5.02.02.2.04.					Kegiatan Penunjang Urusan	Tersalurkannya BKK secara tepat dan Akurat		130	desa	-			
5.02.02.2.04.03					Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Jumlah penerima BKK yang di alokasikan		130	desa	18.132.000		BAKEUDA	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
5.02.03.				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Prosentase Ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah dan daftar barang milik daerah		100	Persen	-		
5.02.03.2.01.				Pengelolaan Barang Milik Daerah		Presentase BMD yang terdata dengan baik		100	Persen	-		
5.02.03.2.01.05				Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah BMD yang terdata dengan baik			unit	163.832.000		BAKEUDA
5.02.03.2.01.09				Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Prosentase Aset Daerah yang dimanfaatkan		98	Persen	1.996.455.000		BAKEUDA
5.02.04.				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		-Persentase PBB yang terbanyak oleh wajib pajak -Capaian PAD		-100 -100	-persen -persen	-		
5.02.04.2.02.				Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi		Presentase Target PAD		100	Persen	-		
5.02.04.2.02.02				Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang kebijakan perpajakan daerah dan retribusi daerah yang tersusun		-2 -2	-perbup -SK	-		BAKEUDA
5.02.04.2.02.04				Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah WP yang terlayani		616212	WP	60.493.000		BAKEUDA
5.02.04.2.02.08				Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah informasi pajak dan retribusi daerah yang terinput dalam aplikasi SIMPATDA		616212	WP	-		BAKEUDA
5.02.04.2.02.09				Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah data objek dan subjek pajak		608414	WP	151.834.000		BAKEUDA
5.02.04.2.02.10				Pemeriksaan Pajak Daerah		Jumlah Pemeriksaan Pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak Daerah		616212	WP	-		BAKEUDA
5.02.04.2.02.11				Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemungutan dan Penagihan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan		-4 -12	-kali -laporan	53.300.000		BAKEUDA
5.03				5.03 KEPEGAWAIAN						-	8.142.077.797	
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Persentase Gaji Pegawai	BKPPD	- 100 - 70 - 85	- persen - poin - poin	-		
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	BKPPD	-100 - 100	- persen - persen	-		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	BKPPD	2	dokumen	12.717.600		BKPPD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.01.05					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	BKPPD	9	dokumen	6.687.100		BKPPD
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	BKPPD	12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	BKPPD	...	ASN	4.903.128.500		BKPPD
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)	BKPPD	240	Orang Kali (ok)	2.208.000		BKPPD
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	BKPPD	12	bulan	3.500.000		BKPPD
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	BKPPD	12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	BKPPD	12	bulan	490.000		BKPPD
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi	BKPPD	12	bulan	95.400.000		BKPPD
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	BKPPD	12	bulan	17.400.000		BKPPD
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	BKPPD	-23 -12	-unir -bulan	20.800.000		BKPPD
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	BKPPD	280	orang bulan	59.800.000		BKPPD
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Peniaga Malam	BKPPD	24	orang bulan	37.020.000		BKPPD
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Peniaga Malam	BKPPD	10	jenis	5.370.000		BKPPD
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Peniaga Malam	BKPPD	40	jenis	21.690.000		BKPPD
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BKPPD	73176	lembar	18.400.000		BKPPD
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	BKPPD	-8 -252	-jenis -buah	3.599.000		BKPPD
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	BKPPD	-2 -3	-jenis -unit	11.910.000		BKPPD
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	BKPPD	-39 -432	-jenis -buah	1.970.000		BKPPD
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	BKPPD	48	eksemplar/bulan	2.280.000		BKPPD
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	BKPPD	12	bulan	74.291.000		BKPPD
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	BKPPD	600	orang kali (OK)	15.435.000		BKPPD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	BKPPD	28	orang kali (OK)	48.100.000		BKPPD
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)	BKPPD	1	unit	25.342.000		BKPPD
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	BKPPD	23	unit	20.141.000		BKPPD
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)	BKPPD	1	unit	100.000		BKPPD
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					-		
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal					20.000.000		BKPPD
5.03.02.					Program Kepegawaian Daerah	-Persentase ASN yang mengikuti Diklat sesuai standar -Persentase penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi -Persentase pelayanan administrasi kepegawaian -Persentase administrasi file kepegawaian yang terupdate		-100 -100 -100 -100	-persen -persen -persen -persen	-		
5.03.02.2.01.					Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Persentase data dan informasi ASN yang terupdate		100	persen	-		
5.03.02.2.01.01					Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Jumlah layanan SIM ASN yang dikembangkan		2	modul	40.650.000		BKPPD
5.03.02.2.01.02					Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional	-Jumlah arsip file kepegawaian ASN yang terupdate -Jumlah Buku Profil Kepegawaian yang tercetak -Jumlah pengajuan SK Pengangkatan, Kenaikan dan pembebasan Jabatan Fungsional yang difasilitasi		- -180 -400	- -buah -ASN	11.293.000		BKPPD
5.03.02.2.02.					Administrasi Kepegawaian	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian		100	persen	-		
5.03.02.2.02.01					Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	-Jumlah dokumen analisis kebutuhan dan formasi ASN -Jumlah pengadaan ASN		-1 -500	-dokumen -orang	1.134.649.600		BKPPD
5.03.02.2.02.02					Penataan dan Mutasi Jabatan	-Jumlah peserta seleksi JPT yang terfasilitasi -Jumlah peserta penataan Jabatan Administrator dan Pengawas yang terfasilitasi -Jumlah pengangkatan CPNS menjadi PNS		- - -	-orang -orang -orang	194.593.500		BKPPD
5.03.02.2.02.04					Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Jumlah usulan pemberhentian dan pemberian usulan pensiun ASN yang tepat waktu		400	ASN	30.618.000		BKPPD
5.03.02.2.02.10					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat dan SK Kenaikan Pangkat Pilihan		860	ASN	70.488.200		BKPPD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
5.03.02.2.03.					Peningkatan Kapasitas ASN	-Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal -Persentase pegawai yang sudah dinilai kinerjanya		-100 -100	-persen -persen	-		
5.03.02.2.03.01					Peningkatan Kapasitas ASN	-Jumlah workshop, sosialisasi, studi banding, rakor yang diselenggarakan -Jumlah ASN yang mengikuti workshop, sosialisasi, studi banding, rakor		-5 -	-kali -ASN	-		BKPPD
5.03.02.2.03.02					Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya			ASN	20.402.000		BKPPD
5.03.02.2.03.07					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ijin belajar, tugas belajar dan bantuan pendidikan bagi ASN			ASN	47.018.000		BKPPD
5.03.02.2.03.08					Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pra Jabatan/Latsar, PKA serta Diklat Teknis		346	ASN	606.822.000		BKPPD
5.03.02.2.04.					Pengembangan Karir ASN	Persentase ASN yang kompeten		100	persen	-		
5.03.02.2.04.01					Pengembangan Karir dan Promosi ASN	-Jumlah ASN yang mengikuti Assessment (Seleksi JPT dan Seleksi Mutasi) - Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional -Jumlah dokumen pemetaan ASN		- - -	- - -	305.122.000		BKPPD
5.03.02.2.05.					Pembinaan ASN	Persentase ASN yang dibina		100	persen	-		
5.03.02.2.05.01					Pembinaan Disiplin ASN	-Jumlah OPD yang dipantau tingkat kedisiplinannya -Jumlah ASN yang difasilitasi mediasi dan konseling perceraian -Jumlah ASN yang menerima penghargaan ASN berintegrasi		-50 - -	-OPD - -	24.912.000		BKPPD
5.03.02.2.05.03					Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah ASN yang menerima Satyalencana			ASN	29.611.000		BKPPD
5.04					5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					-		
5.04.02.					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Aparatur		100	persen	-		
5.04.02.2.01.					Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah ASN yang lulus diklat teknis		100	persen	-		
5.04.02.2.01.03					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta diklat teknis		60	ASN	-		BKPPD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
5.04.02.2.02.				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase jumlah ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		100	persen	-		
5.04.02.2.02.07				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah peserta Latsar mandiri, PKP mandiri dan Diklat Teknis Mandiri		80	ASN	-		BKPPD
5.05				5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						-		
5.05.02.				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		-Persentase OPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah -Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan daerah -Jumlah kerjasama kelitbangan -Frekuensi diseminasi hasil litbang		-100 -100 -6 -4	-persen -persen -kerjasama -diseminasi	-		
5.05.02.2.02.				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Cakupan rekomendasi penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan		100	persen	-		
5.05.02.2.02.10				Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Jumlah perguruan tinggi dan mahasiswa yang terfasilitasi dalam kegiatan KKN		-6 -1750	-perguruan tinggi -mahasiswa	50.000.000		BAPPELITBANGDA
5.05.02.2.04.				Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah rekomendasi penerapan litbang		1	rekomendasi	-		
5.05.02.2.04.01				Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah pelaksanaan lomba krenova		1	kegiatan	50.000.000		BAPPELITBANGDA
5.05.02.2.04.04				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan		1,1	workshop, pameran	99.500.000		BAPPELITBANGDA
6.				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01				6.01 INSPEKTORAT DAERAH						-		
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	INSPEKTORAT	- 100 - 80	- persen - Poin	-		
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	INSPEKTORAT	- 100 - 100	-persen -persen	-		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	INSPEKTORAT	2	dokumen	7.790.000		INSPEKTORAT
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	INSPEKTORAT	7	dokumen	4.645.000		INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan		
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	INSPEKTORAT	12	bulan	-
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	INSPEKTORAT	44	ASN	6.131.265.000
x.xx.01.2.02.04				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM	INSPEKTORAT	12	bulan	2.570.000
x.xx.01.2.03				Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	INSPEKTORAT	12	bulan	-
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	INSPEKTORAT	12	bulan	1.500.000
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi	INSPEKTORAT	12	bulan	72.000.000
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	INSPEKTORAT	15	orang/bulan	38.000.000
x.xx.01.2.03.08				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	INSPEKTORAT	2	orang/bulan	9.000.000
x.xx.01.2.03.09				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	INSPEKTORAT	20	jenis	8.000.000
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	INSPEKTORAT		jenis	20.000.000
x.xx.01.2.03.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	INSPEKTORAT		lembar	4.000.000
x.xx.01.2.03.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	INSPEKTORAT		jenis unit/buah	1.500.000
x.xx.01.2.03.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	INSPEKTORAT	4	jenis unit/buah	2.000.000
x.xx.01.2.03.14				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	INSPEKTORAT	2	jenis unit/buah	1.500.000
x.xx.01.2.03.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	INSPEKTORAT	24	eksemplar/bulan	1.500.000
x.xx.01.2.03.16				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	INSPEKTORAT	12	bulan	102.928.000
x.xx.01.2.03.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	INSPEKTORAT		orang kali (OK)	25.000.000
x.xx.01.2.03.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	INSPEKTORAT		orang kali (OK)	75.000.000
x.xx.01.2.03.28				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)	INSPEKTORAT	1	unit	4.000.000
x.xx.01.2.03.30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	INSPEKTORAT	19	unit	25.000.000
x.xx.01.2.04				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	INSPEKTORAT	- 0 - 30	-persen -persen	-
x.xx.01.2.04.09				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat	INSPEKTORAT	10	orang kali	60.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan		
6.01.02.				Program Penyelenggaraan Pengawasan		- Persentase obyek pemeriksaan yang diperiksa - Persentase penanganan kasus/khusus - Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan - Persentase terpenuhinya elemen kapabilitas APIP	- obyek - persen - persen - persen	-	
6.01.02.2.01.				Penyelenggaraan Pengawasan Internal		- Terlaksananya Pengawasan Reguler - Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan - Terfasilitasinya kegiatan Tim Saber Pungli Kabupaten - Terlaksananya bintek/PKS peningkatan kapasitas APIP	-obyek -obyek -persen -kegiatan	-	
6.01.02.2.01.01				Audit Kinerja dan Keuangan		- Jumlah LHP Audit Kinerja - Jumlah LHP Audit Keuangan/Reguler - Jumlah Laporan Tes Uji Laboratorium	- dokumen - dokumen - dokumen	131.620.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.02				Review Kinerja dan Keuangan		Jumlah dokumen review kinerja dan keuangan yang di susun (LKJip, LKPD, RKA, RKPD, Evaluasi SAKIP, LPPD, DAK, PBJ)	dokumen	100.640.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.03				Pemantauan Kinerja dan Keuangan		Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun (TLHP, TLHP Inspektorat prov Jateng, TLHP BPKP, BPK, Ikhtisar hasil pemeriksaan, fasilitasi kegiatan tim saber pungli)	dokumen	373.530.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.04				Evaluasi Kinerja dan Keuangan		Jumlah evaluasi kinerja dan keuangan yang dilaksanakan	jenis kegiatan	23.880.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02.				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu	obyek	-	
6.01.02.2.02.01				Audit Kinerja dan Keuangan		Jumlah audit kinerja dan keuangan dengan tujuan tertentu(LHP Probity Audit, LHP Audit Pengadaan Barang/Jasa, LHP Audit Kasus/Khusus)	dokumen	60.370.000	INSPEKTORAT
6.01.03.				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		- Tersusunya kebijakan teknis bidang pengawasan - Persentase penanganan pengaduan masyarakat - Terlaksananya asistensi dan pendampingan	-dokumen -persen -kegiatan	-	
6.01.03.2.01.				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang di keluarkan	dokumen	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
6.01.03.2.01.01					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis Pengawasan (1.Kebijakan Pengawasan Tahunan, 2.Daftar Obyek Pemeriksaan (DOP), 3. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko, 4. Dokumen Hasil Singkronisasi Program Pengawasan (Rasingram))		4	dokumen	37.045.000		INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.					Asistensi dan Pendampingan	- Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti - Terlaksananya asistensi dan pendampingan terhadap OPD		-100 -4	-persen -kegiatan	-		
6.01.03.2.02.01					Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat		2	laporan semesteran	219.040.000		INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.02					Asistensi dan Pendampingan	-Jumlah Laporan Consulting/Monev -Jumlah Laporan Lembar Evaluasi Reformasi Birokrasi -Jumlah unit kerja yang diusulkan mendapat WBK/WBBM -Jumlah RTP OPD -Jumlah Laporan Monitoring RTP OPD -Laporan LHKASN		-30 -1 -2 -47 -1	-3LHM -laporan -OPD -OPD -laporan	269.340.000		INSPEKTORAT
7.	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	7.01 KECAMATAN											
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Rata-rata Capaian SKB		- 100 -	- persen - poin			KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.01					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti		- 100 - 100	- persen - persen			
x.xx.01.2.01.01					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja			dokumen	4210000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.01.05					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun			dokumen	1760000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu				1487238500		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)				3250000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Tersusunnya LRA/LK/SPM		12	bulan	0		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	570000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya perangkat, materi, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	23040000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12	bulan	1400000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	bulan	17000000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	40500000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	19200000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	3150000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	4720000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	6600000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	700000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	1100000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	1940000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	960000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	45550000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	23850000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	4002000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03.22					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (garasi, kamar mandi, partisi, tempat parkir, dll)			jenis unit/buah	0		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	7930000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					26460000		KEC. KEMANGKON

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)			unit	2500000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03.38					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor			unit	0		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.03.40					Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya rehabilitasi kendaraan dinas/operasional			unit	0		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuan		- 0 100	- persen persen	0		
x.xx.01.2.04.03					Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan			stel	0		KEC. KEMANGKON
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik			pcs	0		KEC. KEMANGKON
7.01.02.					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani			persen	0		
7.01.02.2.01.					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani			kasus	0		
7.01.02.2.01.02					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			kegiatan	27600000		KEC. KEMANGKON
7.01.02.2.04.					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		100	persen	0		
7.01.02.2.04.01					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat perizinan	2		jenis	0		KEC. KEMANGKON
7.01.02.2.04.02					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat non perizinan	5		jenis	3420000		KEC. KEMANGKON
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan desa maju dan mandiri		50	persen	0		
7.01.03.2.01.					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi			lembaga	0		
7.01.03.2.01.01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu			desa/kelurahan	33168000		KEC. KEMANGKON
7.01.03.2.01.03					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi			kegiatan	35670000		KEC. KEMANGKON
7.01.04.					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.04.2.01.					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah kasus kriminalitas		2	kasus	0		
7.01.04.2.01.01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	12		kali	33430000		KEC. KEMANGKON
7.01.04.2.01.02					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat		12	kali	17320000		KEC. KEMANGKON

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
7.01.05.				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.05.2.01.				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai		Jumlah kasus konflik horizontal			kasus	0		
7.01.05.2.01.03				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa			kegiatan	59000000		KEC. KEMANGKON
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	0		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti		- 100 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja			dokumen	4245000		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun			dokumen	2660000		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan		Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu				1284973100		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)				56400000		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.02.04				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		Tersusunnya LRA/LK/SPM		12	bulan	1200000		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.03				Administrasi Umum		Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya perangk, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	24600000		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	0		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.06				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	31450000		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	44100000		KEC. KERTANEGARA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Peniaga Malam			jenis	14400000		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	7200000		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	15850000		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	9472000		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	14240000		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	2000000		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2160000		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	33928000		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	10945000		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	5770000		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.20					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional baru			unit	0		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.22					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (garasi, kamar mandi, partisi, tempat parkir, dll)			jenis unit/buah	3200000		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaurnya baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	0		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya rehabilitasi kendaraan dinas/operasional			unit	20460000		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.04.03					Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan			stel	0		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik			pcs	0		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat			orang kali	0		KEC. KERTANEGARA
7.01.02.					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani			persen	0		
7.01.02.2.01.					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani			kasus	0		
7.01.02.2.01.02					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah tasiitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			kegiatan	12485000		KEC. KERTANEGARA
7.01.02.2.04.					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		100	persen	0		
7.01.02.2.04.01					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat perizinan		2	jenis	0		KEC. KERTANEGARA
7.01.02.2.04.02					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat non perizinan		5	jenis	0		KEC. KERTANEGARA
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan desa maju dan mandiri		50	persen	0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
7.01.03.2.01.				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi			lembaga	0		
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu			desa/kelurahan	9965000		KEC. KERTANEGARA
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi			kegiatan	33050000		KEC. KERTANEGARA
7.01.04.				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.04.2.01.				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah kasus kriminalitas		2	kasus	0		
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan		12	kali	35820000		KEC. KERTANEGARA
7.01.04.2.01.02				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat		12	kali	9000000		KEC. KERTANEGARA
7.01.05.				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.05.2.01.				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah kasus konflik horizontal			kasus	0		
7.01.05.2.01.03				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa			kegiatan	45400000		KEC. KERTANEGARA
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	0		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti		- 100 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja			dokumen	8400000		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun			dokumen	200000		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu				1431919500		KEC. KARANGANYAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)				31400000		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM		12	bulan	1000000		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	400000		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	24300000		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	8650000		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	22100000		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	30420000		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	28800000		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	2100000		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	13929000		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	7897000		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	2000000		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	0		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			jenis unit/buah	0		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2220000		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	39483000		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	9157000		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	5000000		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.23					Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Inventaris rumah jabatan/dinas			jenis unit/buah	1455000		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.27					Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas			unit	0		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan,dll)			unit	3910000		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya rehabilitasi kendaraan dinas/operasional			unit	9830000		KEC. KARANGANYAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.04				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.04.05				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik			pcs	0		KEC. KARANGANYAR
x.xx.01.2.04.09				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat			orang kali	0		KEC. KARANGANYAR
7.01.02.				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani			persen	0		
7.01.02.2.01.				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani			kasus	0		
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			kegiatan	29440000		KEC. KARANGANYAR
7.01.02.2.04.				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		100	persen	0		
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat perizinan		2	jenis	3010000		KEC. KARANGANYAR
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat non perizinan		5	jenis	6940000		KEC. KARANGANYAR
7.01.03.				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan desa maju dan mandiri		50	persen	0		
7.01.03.2.01.				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi			lembaga	0		
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu			desa/kelurahan	40360000		KEC. KARANGANYAR
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi			kegiatan	48524000		KEC. KARANGANYAR
7.01.04.				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.04.2.01.				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah kasus kriminalitas		2	kasus	0		
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan		12	kali	34520000		KEC. KARANGANYAR
7.01.04.2.01.02				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat		12	kali	2940000		KEC. KARANGANYAR
7.01.05.				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.05.2.01.				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah kasus konflik horizontal			kasus	0		
7.01.05.2.01.03				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa			kegiatan	31615000		KEC. KARANGANYAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	0		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti		- 100 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja			dokumen	9081000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun			dokumen	1385000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu				1490474700		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)				2640000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.02.02				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					1000000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03				Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangkai, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	1200000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	22236000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	1680000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03.06				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	17190000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	57600000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03.08				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	12000000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03.09				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	3450000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	4891000		KEC. KUTASARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	1702000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	1370000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	1100000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			jenis unit/buah	2635000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	840000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	38553000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	7780000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	5780000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03.20					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional baru			unit	0		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	0		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03.27					Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	480000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi kendaraan dinas/operasional			unit	11667000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	16330000		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)			unit	0		KEC. KUTASARI
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 100	- persen persen	0		
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik			pcs	0		KEC. KUTASARI
7.01.02.					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani			persen	0		
7.01.02.2.01.					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani			kasus	0		
7.01.02.2.01.02					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			kegiatan	59129000		KEC. KUTASARI
7.01.02.2.04.					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		100	persen	0		
7.01.02.2.04.01					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat perizinan		2	jenis	0		KEC. KUTASARI
7.01.02.2.04.02					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat non perizinan		5	jenis	4964000		KEC. KUTASARI
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan desa maju dan mandiri		50	persen	0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
7.01.03.2.01.				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi			lembaga	0		
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu			desa/kelurahan	50684000		KEC. KUTASARI
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi			kegiatan	36849000		KEC. KUTASARI
7.01.04.				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.04.2.01.				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah kasus kriminalitas		2	kasus	0		
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan		12	kali	30280000		KEC. KUTASARI
7.01.04.2.01.02				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat		12	kali	9200000		KEC. KUTASARI
7.01.05.				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.05.2.01.				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah kasus konflik horizontal			kasus	0		
7.01.05.2.01.03				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa			kegiatan	36304000		KEC. KUTASARI
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	0		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti		- 100 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja			dokumen	10758000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun			dokumen	1418000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	1675532500		KEC. PADAMARA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	19300000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM		12	bulan	1520000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	330000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	19200000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	360000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	2200000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	46000000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	19200000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	4700000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	8810000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	6875000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	735000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	3350000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			jenis unit/buah	1100000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	960000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	32778000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	8180000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	4850000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03.21					Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya kelengkapan rumah jabatan			unit/buah	100000000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03.22					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (garasi, kamar mandi, partisi, tempat parkir, dll)			unit/buah	0		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03.23					Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Inventaris rumah jabatan/dinas			unit/buah	0		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	0		KEC. PADAMARA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					10000000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	16420000		KEC. PADAMARA
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik			pcs	0		KEC. PADAMARA
7.01.02.					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani			persen	0		
7.01.02.2.01.					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani			kasus	0		
7.01.02.2.01.02					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			kegiatan	29775000		KEC. PADAMARA
7.01.02.2.04.					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		100	persen	0		
7.01.02.2.04.01					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat perizinan		2	jenis	0		KEC. PADAMARA
7.01.02.2.04.02					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat non perizinan		5	jenis	720000		KEC. PADAMARA
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan desa maju dan mandiri		50	persen	0		
7.01.03.2.01.					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi			lembaga	0		
7.01.03.2.01.01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu			desa/kelurahan	72148000		KEC. PADAMARA
7.01.03.2.01.03					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi			kegiatan	49177000		KEC. PADAMARA
7.01.04.					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.04.2.01.					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah kasus kriminalitas		2	kasus	0		
7.01.04.2.01.01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Perangkat Daerah di tingkat kecamatan		12	kali	21480000		KEC. PADAMARA
7.01.04.2.01.02					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat		12	kali	11600000		KEC. PADAMARA
7.01.05.					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.05.2.01.					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah kasus konflik horizontal			kasus	0		
7.01.05.2.01.03					Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa			kegiatan	46056000		KEC. PADAMARA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	0		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti		- 100 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja			dokumen	9140000		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun			dokumen	717500		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	1468674500		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	12100000		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.02.04				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM		12	bulan	4009800		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03				Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	200000		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	16800000		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	4250000		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.06				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	3850000		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	77850000		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.08				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	14400000		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.09				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	9200000		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	4912700		KEC. BOJONGSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	8875000		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	2457500		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	5055000		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			jenis unit/buah	0		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1320000		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	39330000		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	3500000		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	11970000		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.23					Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya kelengkapan rumah jabatan			unit/buah	0		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			unit/buah	0		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor			unit	0		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	16515000		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)			unit	1000000		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.03.38					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor			unit	0		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik			pcs	0		KEC. BOJONGSARI
7.01.02.					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani			persen	0		
7.01.02.2.01.					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani			kasus	0		
7.01.02.2.01.02					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			kegiatan	29952000		KEC. BOJONGSARI
7.01.02.2.04.					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		100	persen	0		
7.01.02.2.04.01					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat perizinan		2	jenis	0		KEC. BOJONGSARI
7.01.02.2.04.02					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat non perizinan		5	jenis	818000		KEC. BOJONGSARI
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan desa maju dan mandiri		50	persen	0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
7.01.03.2.01.				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi			lembaga	0		
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu			desa/kelurahan	44632000		KEC. BOJONGSARI
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi			kegiatan	42030500		KEC. BOJONGSARI
7.01.04.				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.04.2.01.				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah kasus kriminalitas		2	kasus	0		
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan		12	kali	21000000		KEC. BOJONGSARI
7.01.04.2.01.02				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat		12	kali	12590000		KEC. BOJONGSARI
7.01.05.				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.05.2.01.				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah kasus konflik horizontal			kasus	0		
7.01.05.2.01.03				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa			kegiatan	51525000		KEC. BOJONGSARI
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	0		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti		- 100 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja			dokumen	7700000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun			dokumen	1500000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	1340839500		KEC. BOBOTSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	18000000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM		12	bulan	1500000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	600000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	18186000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	4200000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	14990000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	27000000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	31200000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	4400000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	12000000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	6000000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	1000000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	2300000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			jenis unit/buah	0		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	960000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	35484000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	8500000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	6800000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor			unit	0		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	2000000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.03.37					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas					15000000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik			pcs	0		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat			orang kali (OK)	0		KEC. BOBOTSARI
7.01.02.					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani			persen	0		
7.01.02.2.01.					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani			kasus	0		
7.01.02.2.01.02					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			kegiatan	21900000		KEC. BOBOTSARI
7.01.02.2.04.					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		100	persen	0		
7.01.02.2.04.01					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat perizinan		2	jenis	0		KEC. BOBOTSARI
7.01.02.2.04.02					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat non perizinan		5	jenis	28800000		KEC. BOBOTSARI
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan desa maju dan mandiri		50	persen	0		
7.01.03.2.01.					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi			lembaga	0		
7.01.03.2.01.01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu			desa/kelurahan	39480000		KEC. BOBOTSARI
7.01.03.2.01.03					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi			kegiatan	31900000		KEC. BOBOTSARI
7.01.04.					Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.04.2.01.					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah kasus kriminalitas		2	kasus	0		
7.01.04.2.01.01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan		12	kali	40020000		KEC. BOBOTSARI
7.01.04.2.01.02					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat		12	kali	23380000		KEC. BOBOTSARI
7.01.05.					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.05.2.01.					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah kasus konflik horizontal			kasus	0		
7.01.05.2.01.03					Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa			kegiatan	24400000		KEC. BOBOTSARI
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Rata-rata Gajian SKPD		- 100 -	- persen - poin - poin	0		KEC KARANGMONCOL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.01					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang diindaklanjuti		- 100 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.01.01					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja			dokumen	3778000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.01.05					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun			dokumen	1581000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	1439850500		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	28200000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM		12	bulan	4338000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangkat, materi, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	400000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	19800000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	0		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	3510000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	60600000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					3149000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	4933000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	4075000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	3375000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	1015000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	12500000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			jenis unit/buah	0		KEC KARANGMONCOL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2040000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	39375000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	25560000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	12500000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.20					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional baru			unit	20000000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.23					Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Inventaris rumah jabatan/dinas			unit/buah	3000000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.27					Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas			unit	1210000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor			unit	4230000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	21275000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur					500000		KEC KARANGMONCOL
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik			pcs	0		KEC KARANGMONCOL
7.01.02.					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani			persen	0		
7.01.02.2.01.					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani			kasus	0		
7.01.02.2.01.02					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			kegiatan	31870500		KEC KARANGMONCOL
7.01.02.2.04.					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		100	persen	0		
7.01.02.2.04.01					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat perizinan		2	jenis	5770000		KEC KARANGMONCOL
7.01.02.2.04.02					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat non perizinan		5	jenis	4445500		KEC KARANGMONCOL
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan desa maju dan mandiri		50	persen	0		
7.01.03.2.01.					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi			lembaga	0		
7.01.03.2.01.01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu			desa/kelurahan	35223500		KEC KARANGMONCOL
7.01.03.2.01.03					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi			kegiatan	20048000		KEC KARANGMONCOL
7.01.04.					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
7.01.04.2.01.				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah kasus kriminalitas		2	kasus	0		
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan		12	kali	26468000		KEC. KARANGMONCOL
7.01.04.2.01.02				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat		12	kali	23858500		KEC. KARANGMONCOL
7.01.05.				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.05.2.01.				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah kasus konflik horizontal			kasus	0		
7.01.05.2.01.03				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa			kegiatan	21372000		KEC. KARANGMONCOL
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	0		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti		- 100 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja			dokumen	8615000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun			dokumen	1385000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	1515435000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	8280000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.02.04				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM		12	bulan	1000000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.03				Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangkat, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	1200000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	21960000		KEC. REMBANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	1680000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	3230000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	63300000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	28800000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	3450000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	5819000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	3050000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	3000000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	44750000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			jenis unit/buah	2635000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2280000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	39724000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	17136000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	11700000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.03.20					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional baru			unit	0		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.03.27					Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas			unit	1008000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor			unit	4547000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	16330000		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.04.01					Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi			unit	0		KEC. REMBANG
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik			pcs	0		KEC. REMBANG
7.01.02.					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani			persen	0		
7.01.02.2.01.					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani			kasus	0		
7.01.02.2.01.02					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			kegiatan	59129000		KEC. REMBANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
7.01.02.2.04.				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		100	persen	0		
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat perizinan		2	jenis	0		KEC. REMBANG
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat non perizinan		5	jenis	4964000		KEC. REMBANG
7.01.03.				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan desa maju dan mandiri		50	persen	0		
7.01.03.2.01.				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi			lembaga	0		
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu		...	desa/kelurahan	47844000		KEC. REMBANG
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi		...	kegiatan	22474000		KEC. REMBANG
7.01.04.				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.04.2.01.				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah kasus kriminalitas		2	kasus	0		
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan		12	kali	24280000		KEC. REMBANG
7.01.04.2.01.02				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat		12	kali	9200000		KEC. REMBANG
7.01.05.				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan		...	per 10.000 penduduk	0		
7.01.05.2.01.				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah kasus konflik horizontal		...	kasus	0		
7.01.05.2.01.03				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa		...	kegiatan	26954000		KEC. REMBANG
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rata-rata Cengiran SKN		- 100 -	- persen - poin - poin	0	Urusan Kewilayahan	KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti		- 100 - 100	- persen - persen	0	Gaji dan Tamsil	
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja			dokumen	11379500		KEC. KALIGONDANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.01.05					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun			dokumen	729000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	1579759000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	10940000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					1000000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	540000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	30000000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	1800000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	3750000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	47400000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	18000000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	3400000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	3655500		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	2600000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	930000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	2987000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			jenis unit/buah	450000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1200000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	31643000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	22616000		KEC. KALIGONDANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	6160000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.20					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional baru			unit	0		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.22					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (garasi, kamar mandi, partisi, tempat parkir, dll)			unit/buah	1300000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			unit/buah	0		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor			unit	6552000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	19865000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)			unit	0		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.39					Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Terlaksananya rehabilitasi mobil jabatan			unit	0		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.03.40					Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya rehabilitasi kendaraan dinas/operasional			unit	0		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.04.02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas (PDH, PDU, PDL, olahraga, dll)			stel	0		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.04.03					Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan			stel	0		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.04.04					Pengadaan Pakaian Korpri	Tersedianya pakaian korpri			pcs	0		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik			pcs	0		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat			orang kali	0		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.04.10					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya peserta sosialisasi			orang kali	0		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01.2.04.11					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya peserta bimbingan teknis			orang kali	0		KEC. KALIGONDANG
7.01.02.					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani			persen	0		
7.01.02.2.01.					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani			kasus	0		
7.01.02.2.01.02					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			kegiatan	32156500		KEC. KALIGONDANG
7.01.02.2.04.					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		100	persen	0		
7.01.02.2.04.01					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat perizinan		2	jenis	0		KEC. KALIGONDANG
7.01.02.2.04.02					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat non perizinan		5	jenis	4809000		KEC. KALIGONDANG
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan desa maju dan mandiri		50	persen	0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
7.01.03.2.01.				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi			lembaga	0		
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu			desa/kelurahan	66136500		KEC. KALIGONDANG
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi			kegiatan	32224000		KEC. KALIGONDANG
7.01.04.				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.04.2.01.				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah kasus kriminalitas		2	kasus	0		
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan		12	kali	31312500		KEC. KALIGONDANG
7.01.04.2.01.02				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat		12	kali	7840000		KEC. KALIGONDANG
7.01.05.				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.05.2.01.				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah kasus konflik horizontal			kasus	0		
7.01.05.2.01.03				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa			kegiatan	33719000		KEC. KALIGONDANG
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	0	Urusan Kewilayahan	KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti		- 100 - 100	- persen - persen	0	Gaji dan Tamsil	
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja			dokumen	9664000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun			dokumen	1940000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	1808836500		KEC. BUKATEJA

Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	3450000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM		12	bulan	1000000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	1200000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	31800000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	2520000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	2889000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	43200000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	37200000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	4050000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	8672000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	5900000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	2240000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	6600000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			jenis unit/buah	1962000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	840000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	3015000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	16868000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	6180000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03.20					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional baru			unit	0		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03.27					Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas			unit	14490000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor			unit	11525000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	14920000		KEC. BUKATEJA
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)			unit	0		KEC. BUKATEJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.04				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.04.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian batik			unit	0		KEC. BUKATEJA
7.01.02.				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani			persen	0		
7.01.02.2.01.				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani			kasus	0		
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			kegiatan	31714000		KEC. BUKATEJA
7.01.02.2.04.				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		100	persen	0		
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat perizinan		2	jenis	0		KEC. BUKATEJA
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat non perizinan		5	jenis	4964000		KEC. BUKATEJA
7.01.03.				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan desa maju dan mandiri		50	persen	0		
7.01.03.2.01.				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi			lembaga	0		
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu			desa/kelurahan	48284000		KEC. BUKATEJA
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi			kegiatan	48959000		KEC. BUKATEJA
7.01.04.				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		KEC. BUKATEJA
7.01.04.2.01.				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah kasus kriminalitas		2	kasus	0		
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan		12	kali	30280000		KEC. BUKATEJA
7.01.04.2.01.02				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat		12	kali	10910000		KEC. BUKATEJA
7.01.05.				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.05.2.01.				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah kasus konflik horizontal			kasus	0		KEC. BUKATEJA
7.01.05.2.01.03				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa			kegiatan	42224000		KEC. BUKATEJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	0		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti		- 100 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja			dokumen	4435000		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun			dokumen	393500		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	1437578500		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	8000000		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.02.04				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM		12	bulan	6082000		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03				Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	300000		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	18000000		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	0		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.06				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	3500000		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	82500000		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.08				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	14400000		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.09				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	3550000		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	5159000		KEC. KARANGJAMBU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	4493000		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	1600000		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	2300000		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			jenis unit/buah	1064000		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	0		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	32949000		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	11135000		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	5640000		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.20					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional baru			unit	0		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.23					Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Inventaris rumah jabatan/dinas			unit/buah	0		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			unit/buah	0		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					6944000		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	15060000		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik			pcs	0		KEC. KARANGJAMBU
7.01.02.					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani			persen	0		
7.01.02.2.01.					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani			kasus	0		
7.01.02.2.01.02					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			kegiatan	10684000		KEC. KARANGJAMBU
7.01.02.2.04.					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		100	persen	0		
7.01.02.2.04.01					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat perizinan		2	jenis	0		KEC. KARANGJAMBU
7.01.02.2.04.02					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat non perizinan		5	jenis	2093000		KEC. KARANGJAMBU
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan desa maju dan mandiri		50	persen	0		
7.01.03.2.01.					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi			lembaga	0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
7.01.03.2.01.01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu			desa/kelurahan	45659000		KEC. KARANGJAMBU
7.01.03.2.01.03					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi			kegiatan	27414000		KEC. KARANGJAMBU
7.01.04.					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.04.2.01.					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah kasus kriminalitas		2	kasus	0		
7.01.04.2.01.01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan		12	kali	44150000		KEC. KARANGJAMBU
7.01.04.2.01.02					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat		12	kali	31392500		KEC. KARANGJAMBU
7.01.05.					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.05.2.01.					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah kasus konflik horizontal			kasus	0		
7.01.05.2.01.03					Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa			kegiatan	61964000		KEC. KARANGJAMBU
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	0		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.01					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti		- 100 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.01.01					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja			dokumen	4346000		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.01.05					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun			dokumen	1162000		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangan nya terbayar tepat waktu			ASN	1307304000		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	6000000		KEC. KARANGREJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM		12	bulan	19162500		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	600000		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12	bulan	17400000		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	0		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	2960000		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	66300000		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	13200000		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	4650000		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	8484000		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	4292000		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	2400000		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	5835000		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			jenis unit/buah	2137000		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1200000		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	39184000		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	7035000		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	5640000		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03.22					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (garasi, kamar mandi, partisi, tempat parkir, dll)			unit/buah	0		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03.23					Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Inventaris rumah jabatan/dinas			unit/buah	0		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			unit/buah	0		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	19345000		KEC. KARANGREJA
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	16655000		KEC. KARANGREJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.04				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuan		- 0 100	- persen persen	0		
x.xx.01.2.04.05				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik			pcs	0		KEC. KARANGREJA
7.01.02.				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani			persen	0		
7.01.02.2.01.				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani			kasus	0		
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			kegiatan	10589000		KEC. KARANGREJA
7.01.02.2.04.				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		100	persen	0		
7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat perizinan		2	jenis	0		KEC. KARANGREJA
7.01.02.2.04.02				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat non perizinan		5	jenis	2063000		KEC. KARANGREJA
7.01.03.				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan desa maju dan mandiri		50	persen	0		
7.01.03.2.01.				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi			lembaga	0		
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu			desa/kelurahan	35827000		KEC. KARANGREJA
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi			kegiatan	44899000		KEC. KARANGREJA
7.01.04.				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.04.2.01.				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah kasus kriminalitas		2	kasus	0		
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Perangkat Daerah di tingkat kecamatan		12	kali	46655000		KEC. KARANGREJA
7.01.04.2.01.02				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat		12	kali	13710000		KEC. KARANGREJA
7.01.05.				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.05.2.01.				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah kasus konflik horizontal			kasus	0		KEC. KARANGREJA
7.01.05.2.01.03				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa			kegiatan	48259000		KEC. KARANGREJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	0	Urusan Kewilayahan	KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti		- 100 - 100	- persen - persen	0	Gaji dan Tamsil	
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja			dokumen	14634000		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun			dokumen	3326900		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	1834846500		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	4400000		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.02.04				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM		12	bulan	1000000		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.03				Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	1950000		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	8640000		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.03.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	4000000		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.03.06				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	18400000		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	0		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.03.08				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	15600000		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.03.09				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	1650000		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	6475000		KEC. KEJOBONG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	2200000		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	4565000		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	1100000		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1200000		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	54955000		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	10416000		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	7775000		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.03.20					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (garasi, kamar mandi, partisi, tempat parkir, dll)			unit/buah	0		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			unit/buah	0		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	5990000		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	10420000		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur					900000		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 100	- persen persen	0		
x.xx.01.2.04.03					Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan			stel	0		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.04.04					Pengadaan Pakaian Korpri	Tersedianya pakaian korpri			pcs	0		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik			pcs	0		KEC. KEJOBONG
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat			orang kali	10000000		KEC. KEJOBONG
7.01.02.					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani			persen	0		
7.01.02.2.01.					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani			kasus	0		
7.01.02.2.01.02					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			kegiatan	61448000		KEC. KEJOBONG
7.01.02.2.04.					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		100	persen	0		
7.01.02.2.04.01					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat perizinan		2	jenis	0		KEC. KEJOBONG
7.01.02.2.04.02					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat non perizinan		5	jenis	4075000		KEC. KEJOBONG
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan desa maju dan mandiri		50	persen	0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
7.01.03.2.01.				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi			lembaga	0		
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu			desa/kelurahan	69219000		KEC. KEJOBONG
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi			kegiatan	25773000		KEC. KEJOBONG
7.01.04.				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.04.2.01.				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah kasus kriminalitas		2	kasus	0		
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan		12	kali	42039100		KEC. KEJOBONG
7.01.04.2.01.02				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat		12	kali	7840000		KEC. KEJOBONG
7.01.05.				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.05.2.01.				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah kasus konflik horizontal			kasus	0		
7.01.05.2.01.03				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa			kegiatan	29009000		KEC. KEJOBONG
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	0		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti		- 100 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja			dokumen	12589000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun			dokumen	2186000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	1109938000		KEC. KALIMANAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	10350000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM		12	bulan	1610000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	1690000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	11052000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					8250000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	18550000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	17400000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	2400000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	7850000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	9047000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	7100000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	2070000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	3875000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			unit/buah	0		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	840000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	45690000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	4480000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	8540000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.03.26					Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan			unit	1000000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	2000000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					17200000		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)			unit	2100000		KEC. KALIMANAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.38					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan,dll)			unit	0		KEC. KALIMANAH
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 100	- persen persen	0		
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik			pcs	0		KEC. KALIMANAH
7.01.02.					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani			persen	0		
7.01.02.2.01.					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani			kasus	0		
7.01.02.2.01.02					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			kegiatan	26967000		KEC. KALIMANAH
7.01.02.2.04.					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		100	persen	0		
7.01.02.2.04.01					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat perizinan		2	jenis	0		KEC. KALIMANAH
7.01.02.2.04.02					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat non perizinan		5	jenis	3838000		KEC. KALIMANAH
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan desa maju dan mandiri		50	persen	0		
7.01.03.2.01.					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi			lembaga	0		
7.01.03.2.01.01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu		...	desa/kelurahan	65732000		KEC. KALIMANAH
7.01.03.2.01.03					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi		...	kegiatan	55130500		KEC. KALIMANAH
7.01.04.					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.04.2.01.					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah kasus kriminalitas		2	kasus	0		
7.01.04.2.01.01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan		12	kali	51747000		KEC. KALIMANAH
7.01.04.2.01.02					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat		12	kali	40685000		KEC. KALIMANAH
7.01.05.					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan		...	per 10.000 penduduk	0		
7.01.05.2.01.					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah kasus konflik horizontal		...	kasus	0		
7.01.05.2.01.03					Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa		...	kegiatan	60628000		KEC. KALIMANAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	0		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti		- 100 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja			dokumen	6427000		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun			dokumen	2355500		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	1152890500		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	1000000		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.02.04				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM		12	bulan	1106000		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.03				Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	525000		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	39900000		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	bulan	0		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.06				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	17400000		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	43200000		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.08				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	28800000		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.09				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	2500000		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	8472000		KEC. PURBALINGGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	1450000		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	930000		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	4800000		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			unit/buah	204000		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	840000		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	32902000		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	2671500		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	2928000		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.22					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					100000000		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			unit/buah	0		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	7600000		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	9850000		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.04.03					Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan			stel	0		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik			pcs	0		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.04.10					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya peserta sosialisasi			orang kali	0		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01.2.04.11					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya peserta bimbingan teknis			orang kali	0		KEC. PURBALINGGA
7.01.02.					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani			persen	0		
7.01.02.2.01.					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani			kasus	0		
7.01.02.2.01.02					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			kegiatan	46472000		KEC. PURBALINGGA
7.01.02.2.04.					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		100	persen	0		
7.01.02.2.04.01					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat perizinan		2	jenis	0		KEC. PURBALINGGA
7.01.02.2.04.02					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat non perizinan		5	jenis	3918000		KEC. PURBALINGGA
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan desa maju dan mandiri		50	persen	0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
7.01.03.2.01.				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi			lembaga	0		
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu			desa/kelurahan	50572000		KEC. PURBALINGGA
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi			kegiatan	33121500		KEC. PURBALINGGA
7.01.04.				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.04.2.01.				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah kasus kriminalitas		2	kasus	0		
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan		12	kali	30280000		KEC. PURBALINGGA
7.01.04.2.01.02				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat		12	kali	17173000		KEC. PURBALINGGA
7.01.05.				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.05.2.01.				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah kasus konflik horizontal			kasus	0		
7.01.05.2.01.03				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa			kegiatan	52602500		KEC. PURBALINGGA
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	0		KEC. MREBET
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti		- 100 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja			dokumen	12252500		KEC. MREBET
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun			dokumen	5007500		KEC. MREBET
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	1644259200		KEC. MREBET

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	8640000		KEC. MREBET
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM		12	bulan	3400500		KEC. MREBET
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	250000		KEC. MREBET
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	21916000		KEC. MREBET
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	bulan	1260000		KEC. MREBET
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	4314000		KEC. MREBET
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	70600000		KEC. MREBET
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	7619000		KEC. MREBET
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	7812000		KEC. MREBET
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	5676000		KEC. MREBET
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	791000		KEC. MREBET
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	15165000		KEC. MREBET
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			unit/buah	0		KEC. MREBET
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1320000		KEC. MREBET
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	28974500		KEC. MREBET
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	1662000		KEC. MREBET
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	7560000		KEC. MREBET
x.xx.01.2.03.21					Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya kelengkapan rumah jabatan			unit/buah	0		KEC. MREBET
x.xx.01.2.03.27					Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas			unit	14012000		KEC. MREBET
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	7012000		KEC. MREBET
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	19484000		KEC. MREBET
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)			unit	0		KEC. MREBET

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.04.02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas (PDH, PDU, PDL, olahraga, dll)			stel	0		KEC. MREBET
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik			pcs	0		KEC. MREBET
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta sosialisasi			orang kali	0		KEC. MREBET
7.01.02.					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani			persen	0		
7.01.02.2.01.					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani			kasus	0		
7.01.02.2.01.02					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			kegiatan	20462500		KEC. MREBET
7.01.02.2.04.					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		100	persen	0		
7.01.02.2.04.01					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat perizinan		2	jenis	1551000		KEC. MREBET
7.01.02.2.04.02					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat non perizinan		5	jenis	1606500		KEC. MREBET
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan desa maju dan mandiri		50	persen	0		
7.01.03.2.01.					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi			lembaga	0		
7.01.03.2.01.01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu			desa/kelurahan	67110000		KEC. MREBET
7.01.03.2.01.03					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi			kegiatan	97810000		KEC. MREBET
7.01.04.					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.04.2.01.					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah kasus kriminalitas		2	kasus	0		
7.01.04.2.01.01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Perangkat Daerah di tingkat kecamatan		12	kali	41944000		KEC. MREBET
7.01.04.2.01.02					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat		12	kali	8052000		KEC. MREBET
7.01.05.					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.05.2.01.					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah kasus konflik horizontal			kasus	0		
7.01.05.2.01.03					Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa			kegiatan	34264000		KEC. MREBET

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	0		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti		- 100 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja			dokumen	10832000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.01.05				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun			dokumen	1446000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	1877643500		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	18200000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.02.04				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM		12	bulan	1000000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03				Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	0		
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	1200000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	16500000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	bulan	2520000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.06				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	16860000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	43200000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.08				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	12000000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.09				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	3450000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	8032000		KEC. PENGADEGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	5137000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	2652000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan rumah tangga			unit/buah	3200000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					2235000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2100000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	33945000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	8544000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	5780000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.20					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional baru			unit	22000000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.27					Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas					480000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	11667000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	15400000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)			unit	0		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.03.38					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor					85000000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	0		
x.xx.01.2.04.03					Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan			stel	0		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik			pcs	0		KEC. PENGADEGAN
7.01.02.					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani			persen	0		
7.01.02.2.01.					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani			kasus	0		
7.01.02.2.01.02					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			kegiatan	22074000		KEC. PENGADEGAN
7.01.02.2.04.					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		100	persen	0		
7.01.02.2.04.01					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat perizinan		2	jenis	0		KEC. PENGADEGAN
7.01.02.2.04.02					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah jenis layanan paten bersifat non perizinan		5	jenis	5244000		KEC. PENGADEGAN
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan desa maju dan mandiri		50	persen	0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
7.01.03.2.01.				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi			lembaga	0		
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu			desa/kelurahan	48394000		KEC. PENGADEGAN
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi			kegiatan	40349000		KEC. PENGADEGAN
7.01.04.				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.04.2.01.				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah kasus kriminalitas		2	kasus	0		
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan		12	kali	31335000		KEC. PENGADEGAN
7.01.04.2.01.02				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat		12	kali	15840000		KEC. PENGADEGAN
7.01.05.				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan			per 10.000 penduduk	0		
7.01.05.2.01.				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah kasus konflik horizontal			kasus	0		
7.01.05.2.01.03				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa			kegiatan	38384000		KEC. PENGADEGAN
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin			KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan			
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	752.676.000		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (> 8 jam)			Orang Kali (ok)	10.400.000		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.03				Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	216.000		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	13.770.000		KEL. PBG KIDUL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			kendaraan/bulan	600.000		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	24.900.000		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			orang/bulan	1.850.000		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	2.242.000		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	1.655.000		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	545.000		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	4.000.000		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			jenis unit/buah	3.000.000		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	840.000		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		12	bulan	8.577.000		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	5.375.000		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	6.500.000		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.03.20					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional baru			unit	-		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	3.000.000		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	25.759.000		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	5.714.000		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	- -		
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik			pcs	1.500.000		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta sosialisasi			orang kali	8.500.000		KEL. PBG KIDUL
x.xx.01.2.04.10					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya peserta bimbingan teknis			orang kali	-		KEL. PBG KIDUL
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kawasan tidak kumuh		100	persen	-		
7.01.03.2.02.					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Luas kawasan kumuh			Ha	-		
7.01.03.2.02.02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jenis sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			jenis	350.000.000		KEL. PBG KIDUL
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jenis kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat			jenis	500.000.000		KEL. PBG KIDUL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	-		KEL. PBG LOR
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	823.969.500		KEL. PBG LOR
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			Orang Kali (ok)	16.690.000		KEL. PBG LOR
x.xx.01.2.03				Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	810.000		KEL. PBG LOR
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	9.000.000		KEL. PBG LOR
x.xx.01.2.03.06				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			kendaraan/bulan	1.000.000		KEL. PBG LOR
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	25.800.000		KEL. PBG LOR
x.xx.01.2.03.09				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			orang/bulan	4.400.000		KEL. PBG LOR
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	9.102.500		KEL. PBG LOR
x.xx.01.2.03.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	1.632.500		KEL. PBG LOR
x.xx.01.2.03.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	660.000		KEL. PBG LOR
x.xx.01.2.03.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	1.500.000		KEL. PBG LOR
x.xx.01.2.03.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	2.280.000		KEL. PBG LOR
x.xx.01.2.03.16				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		12	bulan	10.471.000		KEL. PBG LOR
x.xx.01.2.03.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	5.280.000		KEL. PBG LOR
x.xx.01.2.03.18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	2.310.000		KEL. PBG LOR
x.xx.01.2.03.22				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					40.600.000		
x.xx.01.2.03.25				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	18.000.000		KEL. PBG LOR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan,dll)			unit	6.880.000		KEL. PBG LOR
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	3.840.000		KEL. PBG LOR
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 100	- persen - persen	-		
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta sosialisasi			orang kali	-		KEL. PBG LOR
x.xx.01.2.04.10					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya peserta bimbingan teknis			orang kali	-		KEL. PBG LOR
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kawasan tidak kumuh		100	persen	-		
7.01.03.2.02.					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Luas kawasan kumuh			Ha	-		
7.01.03.2.02.02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jenis sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			jenis	521.000.000		KEL. PBG LOR
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jenis kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat			jenis	329.000.000		KEL. PBG LOR
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Data rasio Cakupan SKPD		- 100 -	- persen - poin - poin	-	Urusan Kewilayahan	KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	-	Gaji dan Tunjangan	
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	842.834.000		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			Orang Kali (ok)	14.160.000		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	360.000		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	17.400.000		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	bulan	-		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			kendaraan/bulan	800.000		KEL. KANDANGGAMPANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	11.700.000		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			orang/bulan	10.800.000		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	1.450.000		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	8.139.000		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	6.080.000		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	525.000		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3.900.000		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	674.000		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1.020.000		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		12	bulan	7.044.000		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	4.800.000		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	3.025.000		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaurn baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	-		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					5.240.000		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya gedung kantor (pencetakan, dll)			unit	2.802.000		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	-		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	- -		
x.xx.01.2.04.03					Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan			stel	-		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta sosialisasi			orang kali	-		KEL. KANDANGGAMPANG
x.xx.01.2.04.10					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya peserta bimbingan teknis			orang kali	-		KEL. KANDANGGAMPANG
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kawasan tidak kumuh		100	persen	-		
7.01.03.2.02.					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Luas kawasan kumuh			Ha	-		
7.01.03.2.02.02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jenis sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			jenis	500.000.000		KEL. KANDANGGAMPANG
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jenis kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat			jenis	350.000.000		KEL. KANDANGGAMPANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	-		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.02				Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	837.843.500		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					10.000.000		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.03				Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	950.000		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.03.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	12.000.000		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.03.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	bulan	650.000		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.03.06				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			kendaraan/bulan	1.000.000		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.03.07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	11.700.000		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.03.08				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					24.000.000		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.03.09				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			orang/bulan	3.200.000		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.03.10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	3.949.000		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.03.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	2.110.000		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.03.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	1.440.000		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.03.13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	16.950.000		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.03.14				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					275.000		
x.xx.01.2.03.15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	960.000		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.03.16				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		12	bulan	10.680.000		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.03.17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	12.080.000		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.03.18				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	1.700.000		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.03.25				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	-		KEL. KEDUNGMEJANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	11.000.000		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	2.700.000		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	- -		
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik			pcs	-		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat			orang kali	-		KEL. KEDUNGMEJANGAN
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kawasan tidak kumuh		100	persen	-		
7.01.03.2.02.					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Luas kawasan kumuh			Ha	-		
7.01.03.2.02.02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jenis sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			jenis	500.000.000		KEL. KEDUNGMEJANGAN
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jenis kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat			jenis	350.000.000		KEL. KEDUNGMEJANGAN
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Rata-rata Gaji ASN		- 100 - -	- persen - poin - poin	- - -		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	821.603.900		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (> 8 jam)			Orang Kali (ok)	17.970.000		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	360.000		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	16.560.000		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	bulan	-		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			kendaraan/bulan	700.000		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	27.000.000		KEL. KALIKABONG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			orang/bulan	3.690.000		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	7.910.000		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	456.000		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	340.000		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	-		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	-		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1.140.000		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		12	bulan	12.100.000		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	8.375.000		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	4.480.000		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.03.22					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					10.000.000		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	-		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	6.378.000		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	10.370.000		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)			unit	1.500.000		KEL. KALIKABONG
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	- -		
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat			orang kali	-		KEL. KALIKABONG
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kawasan tidak kumuh		100	persen	-		
7.01.03.2.02.					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Luas kawasan kumuh			Ha	-		
7.01.03.2.02.02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jenis sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			jenis	350.000.000		KEL. KALIKABONG
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jenis kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat			jenis	500.000.000		KEL. KALIKABONG
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Rata-rata Censori SKP		- 100 - -	- persen - poin - poin	- - -		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	836.198.500		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			Orang Kali (ok)	17.600.000		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	450.000		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	7.500.000		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					750.000		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			kendaraan/bulan	850.000		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	27.900.000		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					9.000.000		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			orang/bulan	3.105.000		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	6.033.000		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	1.625.000		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	440.000		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	-		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					20.000.000		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					960.000		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		12	bulan	12.550.000		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	5.775.000		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	2.500.000		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.03.22					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (garasi, kamar mandi, partisi, tempat parkir, dll)			jenis unit/buah	-		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.03.23					Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Inventaris rumah jabatan/dinas			jenis unit/buah	-		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	50.000.000		KEL. MEWEK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)			unit	4.995.000		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur					2.000.000		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	-		
x.xx.01.2.04.05					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik			pcs	-		KEL. MEWEK
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat			orang kali	5.000.000		KEL. MEWEK
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kawasan tidak kumuh		100	persen	-		
7.01.03.2.02.					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Luas kawasan kumuh			Ha	-		
7.01.03.2.02.02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jenis sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			jenis	609.937.000		KEL. MEWEK
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jenis kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat			jenis	240.063.000		KEL. MEWEK
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	-		
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangan nya terbayar tepat waktu			ASN	881.439.500		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			Orang Kali (ok)	12.400.000		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	200.000		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	9.180.000		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	bulan	750.000		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			kendaraan/bulan	800.000		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	12.300.000		KEL. PBG WETAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			orang/bulan	24.000.000		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	2.000.000		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	6.000.000		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	2.766.000		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	450.000		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	-		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			jenis unit/buah	11.000.000		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	960.000		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		12	bulan	7.444.000		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	6.720.000		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	6.250.000		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.03.20					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional baru			unit	-		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	8.600.000		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	3.000.000		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur					2.000.000		KEL. PBG WETAN
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					-		
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal					5.000.000		KEL. PBG WETAN
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kawasan tidak kumuh		100	persen	-		
7.01.03.2.02.					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Luas kawasan kumuh			Ha	-		
7.01.03.2.02.02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jenis sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			jenis	533.627.000		KEL. PBG WETAN
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jenis kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat			jenis	316.373.000		KEL. PBG WETAN
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Rata-rata Gaji ASN		- 100 -	- persen - poin - poin	-		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	881.437.000		KEL. KEMBARAN KULON

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			Orang Kali (ok)	13.600.000		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	240.000		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	10.200.000		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	bulan	2.500.000		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			kendaraan/bulan	600.000		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	13.500.000		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			orang/bulan	24.000.000		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	2.000.000		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	3.000.000		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	2.701.000		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	900.000		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	1.000.000		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			jenis unit/buah	5.800.000		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	960.000		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		12	bulan	7.980.000		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	7.600.000		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	3.000.000		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.03.20					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional baru			unit	-		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	44.000.000		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	1.200.000		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	- -		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat			orang kali	5.000.000		KEL. KEMBARAN KULON
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kawasan tidak kumuh		100	persen	-		
7.01.03.2.02.					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Luas kawasan kumuh			Ha	-		
7.01.03.2.02.02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jenis sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			jenis	654.000.000		KEL. KEMBARAN KULON
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jenis kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat			jenis	196.000.000		KEL. KEMBARAN KULON
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100	- persen	-		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	863.781.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			Orang Kali (ok)	7.420.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	240.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	10.500.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	bulan	700.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			kendaraan/bulan	600.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	15.300.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					12.000.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			orang/bulan	1.500.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	1.301.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	1.736.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	500.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	18.000.000		KEL. BOJONG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	960.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		12	bulan	12.298.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	2.535.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	2.850.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.03.20					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional baru			unit	23.500.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.03.22					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					140.870.000		
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			jenis unit/buah	11.000.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	5.000.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	2.240.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)			unit	-		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.03.38					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor					70.000.000		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	- -		
x.xx.01.2.04.02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas (PDH, PDU, PDL, olahraga, dll)			stel	-		KEL. BOJONG
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat			orang kali	-		KEL. BOJONG
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kawasan tidak kumuh		100	persen	-		
7.01.03.2.02.					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Luas kawasan kumuh			Ha	-		
7.01.03.2.02.02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jenis sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			jenis	534.570.000		KEL. BOJONG
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jenis kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat			jenis	315.430.000		KEL. BOJONG
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	- -		KEL. BANCAR
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangan nya terbayar tepat waktu			ASN	799.481.000		KEL. BANCAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			Orang Kali (ok)	12.220.000		KEL. BANCAR
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	1.050.000		KEL. BANCAR
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	17.400.000		KEL. BANCAR
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	bulan	-		KEL. BANCAR
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			kendaraan/bulan	1.000.000		KEL. BANCAR
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	28.350.000		KEL. BANCAR
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			orang/bulan	5.100.000		KEL. BANCAR
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			jenis	8.405.500		KEL. BANCAR
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			lembar	1.902.500		KEL. BANCAR
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	1.075.000		KEL. BANCAR
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			jenis unit/buah	22.700.000		KEL. BANCAR
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			jenis unit/buah	-		KEL. BANCAR
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1.080.000		KEL. BANCAR
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		12	bulan	13.003.000		KEL. BANCAR
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	10.920.000		KEL. BANCAR
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	1.750.000		KEL. BANCAR
x.xx.01.2.03.22					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					200.000.000		
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					4.060.000		KEL. BANCAR
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	5.150.000		KEL. BANCAR
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)			unit	-		KEL. BANCAR
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	- -		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.04.01					Pengadaan Mesin/Kartu Absensi					5.000.000		
x.xx.01.2.04.10					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya peserta sosialisasi			orang kali	-		KEL. BANCAR
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kawasan tidak kumuh		100	persen	-		
7.01.03.2.02.					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Luas kawasan kumuh			Ha	-		
7.01.03.2.02.02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jenis sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			jenis	432.000.000		KEL. BANCAR
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jenis kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat			jenis	418.000.000		KEL. BANCAR
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100	- persen	-		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	750.869.000		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	7.260.000		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	330.000		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	10.200.000		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.750.000		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	750.000		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	11.700.000		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	30.000.000		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	2.700.000		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	5.457.000		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	1.425.000		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	778.000		KEL. PENAMBONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			unit/buah	-		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			unit/buah	-		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1.080.000		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	9.780.000		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	4.480.000		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	670.000		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.03.20					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional baru			unit	-		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			unit/buah	10.000.000		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	10.000.000		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	6.200.000		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)			unit	2.000.000		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	- -		
x.xx.01.2.04.02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas (PDH, PDU, PDL, olahraga, dll)			stel	-		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.04.03					Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian batik			pcs	-		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat			orang kali (OK)	-		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01.2.04.10					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya peserta sosialisasi			orang kali (OK)	-		KEL. PENAMBONGAN
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kawasan tidak kumuh		100	persen	-		
7.01.03.2.02.					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Luas kawasan kumuh			Ha	-		
7.01.03.2.02.02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jenis sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			jenis	350.000.000		KEL. PENAMBONGAN
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jenis kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat			jenis	500.000.000		KEL. PENAMBONGAN
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Rata-rata Cakupan SKPD		- 100 - -	- persen - poin - poin	- - -		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	759.107.500		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	10.500.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	210.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	5.400.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	2.500.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	600.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	45.900.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	11.200.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	5.658.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	720.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	870.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			unit/buah	9.300.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			unit/buah	900.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	5.400.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	6.686.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	1.600.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	7.000.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			unit/buah	23.800.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	6.170.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	4.386.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)			unit	2.000.000		KEL. WIRASANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	-		
x.xx.01.2.04.02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas (PDH, PDU, PDL, olahraga, dll)			stel	-		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.04.10					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya peserta sosialisasi			orang kali (OK)	4.130.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01.2.04.11					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya peserta bimbingan teknis			orang kali (OK)	-		KEL. WIRASANA
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kawasan tidak kumuh		100	persen	-		
7.01.03.2.02.					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Luas kawasan kumuh			Ha	-		
7.01.03.2.02.02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jenis sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			jenis	350.000.000		KEL. WIRASANA
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jenis kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat			jenis	500.000.000		KEL. WIRASANA
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	-		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	928.469.500		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	11.250.000		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	200.000		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	15.120.000		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.400.000		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	1.000.000		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	41.400.000		KEL. KARANGSENTUL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	-		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	3.365.000		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	3.588.000		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	2.200.000		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	825.000		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			unit/buah	1.320.000		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			unit/buah	-		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1.200.000		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	9.719.000		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	1.860.000		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	3.280.000		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			unit/buah	2.000.000		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	18.120.000		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	4.215.000		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur					1.500.000		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	- -		
x.xx.01.2.04.02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas (PDH, PDU, PDL, olahraga, dll)			stel	-		KEL. KARANGSENTUL
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kawasan tidak kumuh		100	persen	-		
7.01.03.2.02.					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Luas kawasan kumuh			Ha	-		
7.01.03.2.02.02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jenis sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			jenis	500.000.000		KEL. KARANGSENTUL
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jenis kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat			jenis	350.000.000		KEL. KARANGSENTUL
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Rata-rata Gajian SKPD		- 100 - -	- persen - poin - poin	- - -		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	1.020.767.000		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)			orang kali (OK)	11.250.000		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	420.000		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	15.600.000		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	1.400.000		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	650.000		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	27.000.000		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	2.935.000		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	3.798.000		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	1.950.000		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	725.000		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			unit/buah	7.520.000		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			unit/buah	-		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	1.080.000		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	9.499.000		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	1.890.000		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	3.800.000		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)			unit/buah	8.000.000		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	25.600.000		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	4.240.000		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)			unit	1.500.000		KEL. PBG KULON

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	- -		
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat			orang kali	-		KEL. PBG KULON
x.xx.01.2.04.10					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya peserta sosialisasi			orang kali	-		KEL. PBG KULON
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kawasan tidak kumuh		100	persen	-		
7.01.03.2.02.					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Luas kawasan kumuh			Ha	-		
7.01.03.2.02.02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jenis sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			jenis	594.200.000		KEL. PBG KULON
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jenis kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat			jenis	255.800.000		KEL. PBG KULON
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		- 100 -	- persen - poin	- -		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			ASN	848.801.000		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (> 8 jam)			orang kali (OK)	8.000.000		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	450.000		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	13.800.000		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.000.000		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			orang/bulan	600.000		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang/bulan	13.500.000		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.03.08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam			jenis	14.400.000		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			jenis	3.400.000		KEL. KARANGMANYAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			lembar	9.111.000		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan			jenis unit/buah	1.745.000		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik			jenis unit/buah	825.000		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			unit/buah	8.625.000		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah			eksemplar/bulan	960.000		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			bulan	7.733.000		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat			orang kali (OK)	4.900.000		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah			orang kali (OK)	5.430.000		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.03.20					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional baru			unit	-		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.03.28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)			unit	43.145.000		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)			unit	5.240.000		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	- -		
x.xx.01.2.04.02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas (PDH, PDU, PDL, olahraga, dll)			stel	4.000.000		KEL. KARANGMANYAR
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat			orang kali	5.000.000		KEL. KARANGMANYAR
7.01.03.					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kawasan tidak kumuh		100	persen	-		
7.01.03.2.02.					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Luas kawasan kumuh			Ha	-		
7.01.03.2.02.02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jenis sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			jenis	373.450.000		KEL. KARANGMANYAR
7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jenis kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat			jenis	476.550.000		KEL. KARANGMANYAR
8.					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.01					8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					-		
x.xx.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Rata-rata Capaian SKP		- 100% - 90 - 100	- persen - Poin - Poin	- - -		
x.xx.01.2.01					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan - Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti		- 100 - 100	- persen - persen	- -		
x.xx.01.2.01.01					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja		2	dokumen	5.620.000		KESBANGPOL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.01.05					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun		6	dokumen	2.330.000		KESBANGPOL
x.xx.01.2.02					Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		23	ASN	1.309.329.000		KESBANGPOL
x.xx.01.2.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)		134	Orang Kali (ok)	5.760.000		KESBANGPOL
x.xx.01.2.02.04					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya LRA/LK/SPM		12	bulan	1.300.000		KESBANGPOL
x.xx.01.2.03					Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		12	bulan	-		
x.xx.01.2.03.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	bulan	1.000.000		KESBANGPOL
x.xx.01.2.03.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi		12	bulan	52.800.000		KESBANGPOL
x.xx.01.2.03.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	bulan	16.000.000		KESBANGPOL
x.xx.01.2.03.06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas		-3 -13	-mobil/bulan -motor/bulan	23.100.000		KESBANGPOL
x.xx.01.2.03.07					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer		12	orang/bulan	88.000.000		KESBANGPOL
x.xx.01.2.03.09					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja		3	jenis	3.100.000		KESBANGPOL
x.xx.01.2.03.10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		17	jenis	10.025.000		KESBANGPOL
x.xx.01.2.03.11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan		130000	lembar	3.000.000		KESBANGPOL
x.xx.01.2.03.12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik		32	jenis unit/buah	1.035.000		KESBANGPOL
x.xx.01.2.03.13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		3/63	jenis unit/buah	3.600.000		KESBANGPOL
x.xx.01.2.03.14					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		2	jenis unit/buah	4.000.000		KESBANGPOL
x.xx.01.2.03.15					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah		30	eksemplar/bulan	2.040.000		KESBANGPOL
x.xx.01.2.03.16					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		12	bulan	51.145.000		KESBANGPOL
x.xx.01.2.03.17					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan tamu dan rapat		800	orang kali (OK)	11.200.000		KESBANGPOL
x.xx.01.2.03.18					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah		182	orang kali (OK)	104.450.000		KESBANGPOL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
x.xx.01.2.03.20					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional baru		4	unit	72.000.000		KESBANGPOL
x.xx.01.2.03.25					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)		1	jenis unit/buah	-		KESBANGPOL
x.xx.01.2.03.30					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)		3	unit	50.418.000		KESBANGPOL
x.xx.01.2.03.35					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (meja, kursi tamu, lemari, korden, dll)		2	unit	-		KESBANGPOL
x.xx.01.2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Prosentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya		- 0 - 100	- persen - persen	-		
x.xx.01.2.04.03					Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan		23	stel	-		KESBANGPOL
x.xx.01.2.04.09					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya peserta diklat		5	orang kali	10.000.000		KESBANGPOL
8.01.02.					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penurunan kegiatan aksi massa bernuansa SARA		92	persen	-		
8.01.02.2.01.					Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kegiatan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		3	kali	-		
8.01.02.2.01.02					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					61.834.000		KESBANGPOL
8.01.02.2.01.03					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-Jumlah kegiatan Safari Kebangsaan di 3 eks Kawedanan -Jumlah sarasehan		-3 -1	- kali - kali	-		KESBANGPOL
8.01.03.					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu		87	persen	-		
8.01.03.2.01.					#####	Cakupan partai yang menerima bantuan keuangan		100	persen	-		
8.01.03.2.01.03					Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah partai yang menerima bantuan keuangan		9	parpol	1.240.610.000		KESBANGPOL
8.01.03.2.01.03					Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah partai yang menerima bantuan keuangan		9	parpol	20.874.000		KESBANGPOL
8.01.04.					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-Persentase ormas dan LSM yang terfasilitasi -Tingkat fasilitasi kegiatan keagamaan		-100 -215	-persen -kegiatan	-	Tingkat fasilitasi kegiatan keagamaan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Satuan	Jumlah Belanja	Sumber Dana	OPD Pengampu
8.01.04.2.01.					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Jumlah ormas dan LSM yang sudah terfasilitasi		6	organisasi	-		
8.01.04.2.01.02					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen profil ormas, LSM/yayasan yang disusun		1	dokumen	19.568.000		KESBANGPOL
8.01.04.2.01.03					Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ormas dan LSM yang difasilitasi		6	organisasi	70.264.000		KESBANGPOL
8.01.04.2.01.03					Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ormas dan LSM yang menerima hibah		12	organisasi	342.000.000		KESBANGPOL
8.01.05.					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kebijakan teknis bidang ketahanan eksosbud yang ditindaklanjuti		100	persen	-		
8.01.05.2.01.					Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial	Jumlah kegiatan kebijakan teknis yang dilaksanakan		18	kali	-		
8.01.05.2.01.03					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-Jumlah kegiatan sosialisasi P4GN -Jumlah peserta sosialisasi P4GN -Jumlah dokumen pengawasan aliran kepercayaan		-18 -3600 -8	kali	35.639.000		KESBANGPOL
8.01.06.					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang terselesaikan		100	persen	-		
8.01.06.2.01.					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-Jumlah laporan bulanan potensi kerawanan sosial -Jumlah laporan deteksi dini konflik yang terjadi di wilayah		-12 -12	-dokumen -dokumen	-		
8.01.06.2.01.01					Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-Jumlah informasi potensi kerawanan sosial -Jumlah data informasi tentang kewilayahan -Jumlah TKA yang terdata -Jumlah monitoring kegiatan keamanan		12 -12 - -4	-dokumen -dokumen	587.530.000		KESBANGPOL
8.01.06.2.01.04					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					130.865.000		KESBANGPOL
8.01.06.2.01.05					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					66.231.000		KESBANGPOL

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai ukuran keberhasilan yang disepakati dalam mengukur tingkat pencapaian Visi Misi Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil kumulatif dan akumulasi pencapaian kinerja *outcome* dari setiap program pembangunan daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dengan demikian, capaian kinerja pada akhir periode RPJMD dapat tergambarkan dan terukur tingkat keberhasilannya.

Di samping itu, penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga bertujuan untuk memberikan panduan dalam melakukan evaluasi tingkat pencapaian kinerja tahunan. Indikator kinerja ini menjadi indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kunci, yang dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap akhir tahun perencanaan, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi hasil evaluasi, guna perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun selanjutnya.

Secara teknis, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, dapat fokus dikelompokkan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila mendasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat sasaran (dampak/impact) pemerintah daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu : 1). Aspek Kesejahteraan Masyarakat; 2). Aspek Pelayanan Umum; dan 3). Aspek Daya Saing Daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, adalah sebagaimana tertuang pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Aspek / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian		Target 2021
			2018	2019	
A.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1	Pertumbuhan PDRB (ADHK) - Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,42	5,65	5-6
2	PDRB Per kapita	Rp. (juta)	23,19	24,19	23,3
3	Laju Inflasi	Persen	3,01	2,59	< 5
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,41	68.99	> 70
	a. Angka Harapan Hidup	Tahun	72,98	73,02	73,4
	b. Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,95	11,98	12,9
	c. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,00	7,14	7,92
	d. Pengeluaran Per Kapita	Rp. (ribu)	9.786	10.131	14.000
5	Angka Kemiskinan	Persen	15,62	15,03	13-15
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,06	4,78	< 4
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,32	92,68	> 66
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,05	0,95	< 1
B.	Aspek Daya Saing Daerah				
1	Lama Waktu Perijinan Investasi	Hari	5,0	4,4	4,2
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan	Angka	79,37	81,39	80,5
3	Angka Kriminalitas	Angka	1,73	1,62	2
C.	Aspek Layanan Umum				
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1.	Urusan Pendidikan				
	APK SD/ sederajat	Angka	110,88	120.,37	110
	APK SMP sederajat	Angka	92,87	139,47	100
	APM SD/ sederajat	Angka	95,15	105,70	94
	APM SMP/ sederajat	Angka	78,23	102,51	70
	APK PAUD	Angka	57,86	83,67	100
2	Urusan Kesehatan				
	Angka Kematian Ibu	Per 100 rb KH	75,05	81,19	47

No.	Aspek / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian		Target 2021
			2018	2019	
	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	7,5	7,58	4
	Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	9,3	9,14	11,65
	Prevalensi Balita gizi buruk	Persen	0,08	0,08	0,1
3	Urusan PUPR				
	Persentase Infrastruktur Jalan dalam kondisi Baik	Persen	85,66	87,68	82,15
	Persentase Infrastruktur Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	89,25	96,16	94,75
	Lajur Jalan Minimal 5,5 M	Persen	21,75	23,21	25,5
	Prosentase Bangunan Pengairan Kondisi Baik	Persen	43,9	45	48,2
	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Persen	21,63	21,63	19,11
	Cakupan Air Irigasi	Persen	89,60	69,56	91
	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan	Persen	82	83,05	100
	Cakupan Pelayanan Limbah Perkotaan	Persen	87,48	89,45	100
	Cakupan Timbulan Sampah Terlayani	Persen	66,75	66,75	66
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	93,29	95,77	93,9
	Cakupan Kepemilikan Rumah / Persentase rumah per KK	Persen	81,98	85,79	89,10
	Luasan Kawasan Kumuh	Persen	9,67	3,37	0
	Cakupan Pelayanan Air Bersih	Persen	90.43	91.01	100
	Tanah Pemda yang Bersertifikat	Persen	63,81	64,98	63,97
5	Urusan Trantibum dan Linmas				
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	Persen	68,80	-	-
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif	Persen	-	78,21	-
	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilpres	Persen	-	78,21	-
	Persentase Pelanggaran Perda yang Ditangani	Persen	89,84	96,24	100
	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Korban Bencana Alam	Persen	100	102	100

No.	Aspek / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian		Target 2021
			2018	2019	
	Indeks Resiko Bencana dan Kebakaran	Angka	NA	NA	NA
	Persentase Desa dan Kelurahan Tanggap Bencana	Persen	100	100	100
	Tingkat Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	90	100	60
6	Urusan Sosial				
	Persentase PMKS yang terlayani	Persen	85,58	75,97	80
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
1	Urusan Tenaga Kerja				
	Rasio Tenaga Kerja dengan upah sesuai UMK	Persen	94,88	98,12	95
	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persen	47,15	50,29	46
	Tenaga Kerja yang Mengikuti Jaminan Sosial	Persen	81,07	85,98	90
2	Urusan PP dan PA				
	Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Angka	49	68	40
	Cakupan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Tertangani	Persen	100	100	100
	Cakupan Desa dan Kelurahan Layak Anak	Persen	9	15	18
	Predikat Penilaian Kabupaten Layak Anak	Prestasi	480	374,8	500
3	Urusan Pangan				
	Pola Pangan Harapan	Skor	85,6	86,62	89
	Ketersediaan Pangan Utama (beras)	Kg/kap./th	168	93,5	175
	Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok (beras)	Persen	>5	>5	< 5
	Persentase Pangan Segar Bersertifikat Aman	Persen	>85	90	99
4	Urusan Lingkungan Hidup				
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	54,15	66,78	67
	Pencemaran Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO ² ekuivalen	19,809	NA	43,415
5	Urusan Adminduk Capil				
	Kepemilikan KTP	Persen	99,65	99,99	96
	Kepemilikan KK	Persen	98,54	98,67	98
	Kepemilikan Akte Kelahiran	Persen	37,68	45,32	50

No.	Aspek / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian		Target 2021
			2018	2019	
6	Urusan PMD				
	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,65422	0,667642	0,68
	Jumlah Desa Swasembada	Desa	5	8	8
	Jumlah Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat	Swadaya (Rp)	2.600.000.000,-	3.121.114.000	3.000.000.000
	Cakupan Desa dengan BUMDes Sehat	Persen	22,32 (50 Desa)	46 (105 desa)15	100
7	Urusan Dalduk dan KB				
	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	77,69	77	95
	Cakupan PUS Tak Terlayani (Unmetneed KB)	Persen	10,12	10,57	9
	Cakupan Keluarga Sejahtera	Persen	78,02	80,30	81
	Rata – Rata Angka Kelahiran Total (TFR)	Per 1000 wanita	1,99	2.25	2,05
8	Urusan Perhubungan				
	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	498	579	301
	Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Memadai	Persen	90	85	95*
9	Urusan Komunikasi & Informatika				
	SKPD yang Memiliki Website	SKPD	34	179	43
	Cakupan SKPD yang menerapkan SIM dan memiliki website aktif	SKPD	34	34	43
10	Urusan KUKM				
	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Unit	22	23	23
	Persentase Koperasi Sehat	Persen	65	68	76
	Usaha mikro bersertifikat / berijin	Unit	496	536	1193
11	Urusan Penanaman Modal				
	Realisasi Nilai Investasi	Rp. (juta)	617.870	679.695	770.000
12	Urusan Kepemudaan dan Olahraga				
	Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Regional dan Nasional	medali / piagam	2	15	12
	Jumlah Prestasi Olahraga Tingkat Regional / Provinsi	medali / piagam	54	60	450
	Jumlah Prestasi Olahraga Tingkat Nasional	medali / piagam	112	8	135

No.	Aspek / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian		Target 2021
			2018	2019	
13	Urusan Kebudayaan				
	Cakupan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen	63,64	63,64	72,27
	Cakupan Pelestarian Cagar Budaya	Persen	14,29	13,89	25,54
	Jumlah pementasan seni budaya daerah	Kali	77	69	76
	Jumlah Gedung Pementasan Kesenian	Unit	17	10	12
14	Urusan Perpustakaan				
	Rasio Perpustakaan per Jumlah Penduduk	Persen	0.00158113	0.01	0.00109625
	Rasio Anggota Perpustakaan per Jumlah Penduduk	Persen	0.053556726	0.12	0.044858125
	Rasio Buku Perpustakaan per Jumlah Penduduk	Rasio	0,087	4,28*	4.50
	Cakupan Perpustakaan Desa	Persen	76	78	90
15	Urusan Kearsipan				
	Persentase OPD/ormas/BUMD /lembaga desa/ kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baik	Persen	20,03	22,02	23,24
	URUSAN PILIHAN				
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan				
	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	Rp. (miliar)	331,35	341,389*	360
	Produksi ikan konsumsi	Ton	6.083	6.886	5.293
	NTP Sektor Perikanan	Nilai	102,06	NA	<100
	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap./th	14,66	21,9	12
2	Urusan Pariwisata				
	Jumlah Destinasi Wisata yang yang dikembangkan/difasilitasi	DTW	5	7	36
	Angka kunjungan wisata	Orang	3.793.272	3.279.292	3.579.000
3	Urusan Pertanian				
	NTP Subsektor Padi dan Palawija	Nilai	102,25	NA	<100
	NTP Subsektor Tanaman Hortikultura	Nilai	99,57	NA	108,44
	NTP Subsektor Perkebunan	Nilai	109,63	NA	102,97
	NTP Subsektor Peternakan	Nilai	101,89	NA	102,86
	NTP Subsektor Pertanian	Nilai	103,90	NA	103,4

No.	Aspek / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian		Target 2021
			2018	2019	
	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Rp. (triliun)	5,68	NA	6,9
	Produksi Padi	Ton	281.368	205.172	269.053
	Produksi Jagung	Ton	36.835	48,153	41.759
	Produksi Kedele	Ton	11.461	3.152	235
	Produksi Daging	Ton	15.865	339.72	15.229
4	Urusan Perdagangan				
	Jumlah Pasar ber-SNI	Unit	0	0	3
5	Urusan Perindustrian				
	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp. (triliun)	6,27	7,34*	5,9
	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	27,05	27,11*	27,82
	Persentase Sarpras Perdagangan yang Direvitalisasi	Persen	28,57	43,42*	60
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	Opini Audit BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
	Kategori Akuntabilitas Kinerja	Kategori	58,79/CC	61,5/B	67/B
	Hasil Penilaian LPPD	Nilai	2,6286	NA	3,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,49	81,39	82
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,67	64,09	68,05

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 merupakan tahap ke-V atau tahap terakhir dalam pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, sekaligus juga merupakan kelanjutan dari pelaksanaan RKPD Kabupaten Purbalingga pada tahun – tahun sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan tahun 2021 fokus pada Pengembangan Sumberdaya Lokal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah, Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Pemenuhan Kebutuhan Dasar secara Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 disusun dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan dengan mendorong peningkatan kinerja, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien dan optimal. Upaya tersebut tentu saja dengan tetap mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki, memperhatikan capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, lingkungan strategis dan tantangan pokok yang masih mungkin dihadapi, serta mempertimbangkan kemampuan anggaran yang dimiliki.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RKPD juga sebagai pedoman penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021. RKPD juga dijadikan dasar bagi masyarakat untuk mewujudkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan sekaligus mengawasi dan memonitor dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 diharapkan mendukung tercapainya target kinerja tahunan dan terwujudnya visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI